

**STRATEGI PENINGKATAN INVESTASI PROVINSI ACEH
PERIODE 2010-2016**

DISERTASI

Oleh:

**MALAHAYATIE
NIM: 94315050598**

**PROGRAM STUDI
S-3 EKONOMI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Malahayatie
Nim : 94315050598
Tempat/Tanggal Lahir : Blora Jawa Tengah, 18 Mei 1979
Pekerjaan : Dosen IAIN Lhokseumawe
Alamat : Jl. Pandan Gg. Hikmah No. 14C Desa Uteun Bayi
Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul **“STRATEGI PENINGKATAN INVESTASI PROVINSI ACEH PERIODE 2010-2016”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 09 Januari 2020
Yang membuat pernyataan



Malahayatie
Malahayatie

PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul :

STRATEGI PENINGKATAN INVESTASI PROVINSI ACEH

PERIODE 2010 – 2016

Oleh :

MALAHAYATIE

NIM. 94315050598

Dapat disetujui untuk diujikan pada ujian promosi terbuka dalam rangka memperoleh gelar Doktor (S3) pada Program Studi Ekonomi Syariah sebagaimana telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai hasil ujian tertutup pada tanggal 18 Desember 2019

Medan, 10 Januari 2020

Pembimbing



Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA
NIP. 19580414 198703 1 002



Dr. Saparuddin Siregar, SE, Ak, MA, CA
NIP. 19630718 200112 1 001

PERSETUJUAN

Disertasi berjudul “Strategi Peningkatan Investasi Provinsi Aceh Periode 2010-2016)” atas nama Malahayatie, NIM 94315050598/EKSYA Program Studi Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Ujian Tertutup Program Doktor (S-3) Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019.

Disertasi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Ekonomi Syariah.


Medan, 18 Desember 2019
Panitia Sidang Ujian Tertutup
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua,



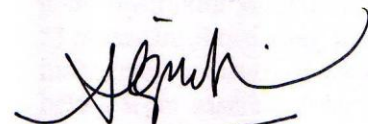
Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
NIP. 19640209 198903 1003

Sekretaris,

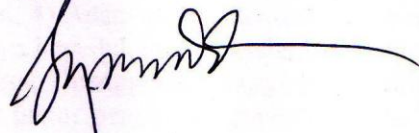


Dr. Achyar Ain, M.Ag
NIP. 19670216 199703 1001

Anggota-Anggota



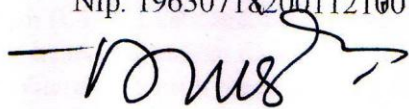
Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA
Nip. 195804141987031002



Dr. Sapparuddin Siregar, SE, Ak, SAS, MA, CA
Nip. 196307182001121001



Dr. Dede Ruslan, M.Si
Nip. 196507041990031002



Dr. Muslim Marpaung, M.Si
Nip. 196407261991031008



Dr. Sri Sudarti, MA
Nip. 195911121990032002

Mengetahui
Direktur Pascasarjana UIN-SU



Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
NIP. 19640209 198903 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt. atas berkat taufiq dan hidayah-Nya serta rahmat dan nikmat penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Salawat beriring salam penulis sampaikan kepada baginda Nabi tercinta Muhammad Saw. yang telah membawa risalah agung dan menyampaikan *uswatun hasanah* bagi umat manusia sekalian. Semoga syafaat Beliau dapat menyertai semua hamba Allah sekalian. Begitu juga kepada sahabat dan keluarga Nabi Muhammad Saw.

Disertasi ini merupakan hasil penelitian penulis tentang strategi peningkatan investasi di Provinsi Aceh periode 2010-2016. Investasi merupakan faktor pendukung dan salah satu hal penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara begitu juga bagi daerah terutama Provinsi Aceh. Masuknya investasi di Provinsi Aceh memiliki peranan yang sangat penting dan signifikan dalam memacu pembangunan ekonomi daerah. Tentunya Provinsi Aceh sebagai salah satu daerah yang mempunyai sejarah konflik berkepanjangan serta bencana tsunami yang begitu hebat tahun 2004 dituntut lebih jeli dalam menarik para investor. Namun Pemerintah Aceh dihadapkan pada isu bahwa syariat Islam dan isu keamanan yang beredar di media masih menjadi penghambat investasi. Disamping itu terjadinya penurunan nilai realisasi investasi dalam beberapa tahun. Padahal pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya strategi dan kebijakan dalam pengembangan dan kemudahan untuk berinvestasi di Provinsi Aceh.

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini merupakan tugas akhir dari rangkaian studi pada Program Doktor Ekonomi Syariah di Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dapat diselesaikan berkat dukungan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan berbagai kontribusi dalam penyelesaian Disertasi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurahman Harahap, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;

2. Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil Dalimunthe, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, beserta seluruh staf pengajar dan pegawai, khususnya pada Program Studi Ekonomi Syariah;
3. Bapak Dr. Achyar Zein, M.Ag, selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA, selaku Ketua Program Studi Doktor S-3 Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang dengan arif dan bijaksana dapat mengarahkan penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan pada Program Doktor Ekonomi Syariah;
5. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Qorib, MA, sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dalam proses pembimbingan Disertasi dengan penuh kesabaran dan ketelitian;
6. Bapak Dr. Saparuddin Siregar, SE, Ak, SAS, M.Ag, MA. CA, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan secara moril selama proses bimbingan serta memberikan bimbingan teknis khususnya pada metodologi sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan;
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Disertasi yaitu Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si., Bapak Dr. Muslim Marpaung, M.Si. dan Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA atas masukan dan saran yang diberikan demi perbaikan Disertasi ini;
8. Para Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama masa perkuliahan;
9. Bapak Dr. H. Hafifuddin, MA sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe yang telah kesempatan dan izin kepada penulis untuk melanjutkan kuliah program Doktor di UIN Sumatera Utara Medan;
10. Bapak Dr. Iskandar selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk mengikuti kuliah program Doktor Ekonomi Syariah di UIN Sumatera Utara Medan begitu juga dengan para Wakil Dekan yang terus memacu semangat penulis untuk perampungan Disertasi ini;
11. Ayahanda tercinta Hamdan Abdurranie Rahimahullah yang terlebih dahulu meninggal namun masih senantiasa penulis doakan segala kebaikan dan amal

ibadahnya diterima di sisi Allah Swt., serta Ibunda Salmah Yusuf yang begitu penulis cintai karena merupakan bagian dari jiwa raga penulis sejak penulis dilahirkan belum pernah berpisah sehingga curahan kasih sayang ibunda tercinta ini selalu mendampingi penulis sampai Disertasi ini selesai.

12. Suami tercinta Zulkarnein Baziad yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi dengan penuh keikhlasan kepada penulis berupa dukungan moril dan materil dalam berbagai kesempatan sejak pertama menikah sampai ke syurga Allah (Insya Allah) serta kepada keenam ananda Umi dan Abi yang sangat dicintai karena Allah yaitu Athifah Alfitrah, Nafisah Alfathiyah, Aqila Annazhifah, Zayyan Almumtaz, Shafiyah Hilyatuna dan Anas Alkasyaf Baziad yang telah rela ditinggal oleh penulis dalam beberapa waktu demi penyelesaian disertasi ini.
13. Teman-teman Pascasarjana UIN-SU seperjuangan Angkatan 2015 yaitu Bambang Sugiharto, Tety Juliaty, Fatimah Zuhra, Yuni Salma, Nurmayana, Wilchan, Dedi Nofendi, Zuardi, Rahmayani dan lainnya.
14. Dr. Harjoni Desky dan Bapak Ali Muhayatsyah yang telah banyak memberikan pemahaman tentang metodologi penelitian lebih terinci sehingga penulis mampu memahami dengan baik.

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar nantinya dapat menjadi lebih baik lagi. Akhirnya semoga segala usaha dan niat baik yang telah kita lakukan mendapat ridha dari Allah Swt. dan semoga Disertasi ini bermanfaat bagi semua yang membutuhkan. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Medan, 08 Januari 2020
Penulis,

MALAHAYATIE
NIM: 94315050598

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan Disertasi ini berdasarkan tata cara penulisan dalam Bahasa Indonesia yang disempurnakan, namun demi menghindari dari bentuk penulisan terhadap kata dan kalimat dalam bahasa Indonesia yang merupakan bentuk kata dan kalimat berbahasa Arab, maka penulis menggunakan pedoman transliterasi Arab-Latin yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dalam hal ini dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

I. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | be |
| ت | Ta | T | te |
| ث | Sa | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Zal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syim | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fa | F | ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | el |
| م | Mim | m | em |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ن | Nun | N | en |
| و | Waw | W | we |
| ه | Ha | H | ha |
| ء | Hamzah | ' | apostrop |
| ي | Ya | Y | ye |

II. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| — | fathāh | A | a |
| — | Kasrah | I | i |
| — | ḍammah | U | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | N a m a | Gabungan Huruf | |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| ي — | fathāh dan ya | Ai | a dan i |
| و — | fathāh dan waw | Au | a dan u |

Contoh:

Kataba : كتب
 Żukira : ذكر
 Yazhabu : يذهب

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| — | Fathāh dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| ي — | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| و — | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

qāla : قال
 ramā : رما
 qīla : قيل
 Yaqūlu : يقول

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *Ta marbutah* hidup

Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhmamah, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbutah* mati

Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan ha (ha).

Contoh:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - Raudah al-atfâl | : روضة الأطفال |
| - Al-Madînah al-Munawwarah | : المدينة المنورة |
| - Al-Madînah Munawwarah | : المدينة لمنورة |
| - Talhah | : طلحة |

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydîd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- | | |
|-----------|------------|
| - Rabbanâ | : رَبَّنَا |
| - Al-birr | : الْبِرَّ |
| - Al-hajj | : الْحَجَّ |
| - Nu'ima | : نَعَمَ |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu : السيدة
- Asy-syamsu : الشمس
- Al-qalam : القلم
- Al-badî'u : البديع

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- Ta'khuẓūna : تأخذون
- An-nau' : النوع
- Sya'un : شيء
- Inna : إن
- Umirtu : أمرت

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisnya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| - Wa innallaha lahua khairar-rāziqin | : وإن الله لهو خير الرازقين |
| - Wa innallaha lahua khairurziqin | : وإن الله لهو خير الرازقين |
| - Fa aufū al-kaila wa al-mîzāna | : فأوفوا الكيل والميزان |
| - Fa auful-kaila wal-mizana | : فأوفوا الكيل والميزان |
| - Ibrāhim al-Khalîl | : إبراهيم الخليل |
| - Ibrahimul-Khalil | : إبراهيم الخليل |
| - Walillāhi 'alan-nāsihiiju al-baiti | : والله على الناس حخ البيت |
| - Walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti | : والله على الناس حخ البيت |
| - Man istata'a ilaihi sabîla | : من استطاع إليه سبيلا |
| - Manistata'a ilaihi sabila | : من استطاع إليه سبيلا |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa maMuhammadun illa rasūl
- Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallāzî bi bakkata mubarakan
- Syahru Ramadan al-lazî unzila fihi al-Qur'ānu
- Syahru Ramadanal-lazî unzila fihil Qur'ānu
- Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubîn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrun minallāhi wa fathun qarib
- Lillāhi al-amru jamî'an
- Lillāhi-amru jamî'an
- Wallāhu bikulli syai'in 'alîm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam ilmu tajwid. Oleh karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN | |
| LEMBAR ORISINILITAS | |
| KATA PENGANTAR | i |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | iv |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| ABSTRAK | xvii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 18 |
| C. Batasan Istilah | 19 |
| D. Tujuan Penelitian | 22 |
| E. Kegunaan Penelitian | 23 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|-----|
| A. Strategi Peningkatan Investasi..... | 24 |
| 1. Pengertian Strategi | 24 |
| 2. Manajemen Strategi | 27 |
| 3. Implementasi Strategi | 30 |
| 4. Jenis-jenis Strategi | 30 |
| 5. Strategi Perspektif Ekonomi Syariah | 31 |
| B. Investasi dan Keamanan | 34 |
| 1. Pengertian Investasi | 34 |
| 2. Hubungan Investasi dan Keamanan | 37 |
| 3. Indeks Keamanan Investasi Indonesia | 42 |
| 4. Konflik Keamanan | 51 |
| 5. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Investasi Dalam Perekonomian Suatu Negara | 55 |
| C. Syari'at Islam dan Investasi..... | 68 |
| 1. Pengertian Syari'at Islam | 68 |
| 2. Konsep Ekonomi Syariah | 71 |
| 3. Tujuan dan Eksistensi Syari'at Islam | 86 |
| 4. Maqashid Syari'ah | 88 |
| 5. Maqashid Ekonomi Syari'ah | 90 |
| D. Faktor Internal dan Eksternal Dalam Berinvestasi | 91 |
| 1. Faktor Pokok | 91 |
| 2. Faktor Penunjang/Faktor Eksternal | 98 |
| E. Kajian Terdahulu | 103 |
| F. Kerangka Pemikiran | 112 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|-----|
| A. Ruang Lingkup Penelitian | 123 |
| B. Jenis Penelitian dan Sumber Data | 124 |
| 1. Jenis Penelitian | 124 |
| 2. Sumber Data | 124 |
| C. Populasi dan Sampel | 126 |
| 1. Populasi | 126 |
| 2. Sampel | 127 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 128 |
| 1. Teknik Observasi | 128 |
| 2. Wawancara Mendalam | 129 |
| 3. Studi Dokumentasi | 130 |
| 4. Kuesioner | 130 |
| E. Metode Analisis Data | 130 |
| 1. Analisis Data | 130 |
| 2. Analisis SWOT | 132 |
| 3. Matriks Evaluasi Faktor Internal | 137 |
| 4. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal | 138 |
| 5. Matriks Internal Eksternal | 140 |
| 6. Positioning Kuadran SWOT | 142 |
| 7. QSPM-Quantitative Strategic Planning Matrix | 144 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|-----|
| A. Hasil Penelitian | 149 |
| 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 149 |
| a. Profil Provinsi Aceh | 149 |
| b. Letak Geografis Aceh | 150 |
| c. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Aceh | 152 |
| d. Regulasi dan Perundang-Undangan di Aceh | 159 |
| e. Syariat Islam dalam Masyarakat Aceh | 165 |
| f. Realisasi Pelaksanaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri | 166 |
| g. Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja | 170 |
| h. Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri Berdasarkan Bidang Usaha dan Lokasi | 171 |
| i. Realisasi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Negara Asal | 174 |
| 2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Peningkatan Investasi Aceh | 176 |
| a. Faktor Penghambat | 176 |
| b. Faktor Pendukung | 188 |
| 3. Eksistensi Faktor Syari'at Islam dan Faktor Keamanan..... | 195 |
| 4. Strategi Peningkatan Investasi Provinsi Aceh | 206 |
| a. Analisis Faktor-Faktor Strategis Menggunakan SWOT | 206 |
| b. Analisis Matriks SWOT | 219 |
| c. Menyusun Formula Strategi | 225 |

| | |
|---|-----|
| d. Analisis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) | 225 |
| B. Pembahasan | 228 |
| 1. Hal-hal yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung investasi Aceh | 228 |
| 2. Eksistensi Faktor Syariat Islam dan Faktor Keamanan | 250 |
| 3. Strategi Peningkatan Investasi di Propinsi Aceh | 266 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 284 |
| 1. Faktor Penghambat dan pendukung Pengembangan Investasi di Aceh | 284 |
| 2. Eksistensi faktor Syariat Islam dan Keamanan Bagi Investasi di Aceh | 284 |
| 3. Strategi Peningkatan Investasi di Aceh menggunakan analisis SWOT | 286 |
| B. Keterbatasan Penelitian | 286 |
| C. Saran | 287 |
| 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh | 287 |
| 2. Badan Investasi dan Promosi Provinsi Aceh | 288 |
| 3. Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Provinsi Aceh | 289 |
| 4. Pemerintah Legislatif dan Eksekutif Provinsi Aceh | 290 |
| 5. Asosiasi Pengusaha dan Himpunan Pengusaha | 290 |
| 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh | 291 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|-----|
| Tabel 1.1 | Target dan Realisasi Investasi di Propinsi Aceh 2010-2016 | 14 |
| Tabel 2.1 | Definisi Operasional | 114 |
| Tabel 3.1 | Matriks Hasil SWOT | 132 |
| Tabel 3.2 | Matrik SWOT | 135 |
| Tabel 3.3 | Contoh Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (QSPM) | 145 |
| Tabel 4.1 | LKPM Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2010-2016 | 167 |
| Tabel 4.2 | LKPM Perusahaan Penanaman Modal Asing Tahun 2010-2016.. | 168 |
| Tabel 4.3 | Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2010-2016 (dalam Rp Miliar) | 169 |
| Tabel 4.4 | Rating Kuisisioner SWOT | 207 |
| Tabel 4.5 | Skor Total IFAS-EFAS | 207 |
| Tabel 4.6 | Matrik IFAS | 208 |
| Tabel 4.7 | Skor Total IFAS | 211 |
| Tabel 4.8 | Matrik EFAS | 212 |
| Tabel 4.9 | Skor Total EFAS | 215 |
| Tabel 4.10 | Matrik SWOT | 220 |
| Tabel 4.11 | Analisis QSPM | 226 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|---|-----|
| Gambar 1.1 | Target dan Realisasi Investasi di Propinsi Aceh 2010-2016 ... | 14 |
| Gambar 2.1 | Proses dan Tahapan Manajemen strategi | 28 |
| Gambar 2.2 | Kerangka Pemikiran | 113 |
| Gambar 3.1 | Matriks Internal Eksternal | 141 |
| Gambar 3.2 | Kuadran SWOT | 143 |
| Gambar 4.1 | Peta Provinsi Aceh | 151 |
| Gambar 4.2 | Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan | 153 |
| Gambar 4.3 | PDRB Per Kapita ADHB | 154 |
| Gambar 4.4 | Pagu Anggaran Pembangunan Provinsi Aceh Menurut Sumber Dana Tahun 2010-2016 | 154 |
| Gambar 4.5 | Realisasi Anggaran Pembangunan Menurut Sumber Dana di Provinsi Aceh Tahun 2010-2016 | 155 |
| Gambar 4.6 | Jumlah Kredit Usaha Kecil Menurut Sektor Ekonomi (Juta Rupiah) Tahun 2010-2016 | 155 |
| Gambar 4.7 | Perkembangan Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (Juta Rupiah) Tahun 2010-2016 | 156 |
| Gambar 4.8 | Rata-rata Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), dan Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2010-2016 | 156 |
| Gambar 4.9 | Rata-rata Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), dan Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Holtikultura Tahun 2010-2016 | 157 |
| Gambar 4.10 | Rata-rata Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), dan Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Perkebunan Rakyat Tahun 2010-2016 | 157 |
| Gambar 4.11 | Rata-rata Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), dan Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Perikanan Tahun 2010-2016 | 158 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| Gambar 4.12 | Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Tahun 2010-2016 | 169 |
| Gambar 4.13 | Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2010-2016 | 170 |
| Gambar 4.14 | Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Berdasarkan 5 Besar Bidang Usaha Tahun 2010-2016 | 171 |
| Gambar 4.15 | Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Berdasarkan 5 Besar Lokasi Tahun 2010-2016 | 172 |
| Gambar 4.16 | Realisasi Penanaman Modal Asing Berdasarkan 5 Besar Bidang Usaha Tahun 2010-2016 | 173 |
| Gambar 4.17 | Realisasi Penanaman Modal Asing Berdasarkan 5 Besar Lokasi Tahun 2010-2016 | 174 |
| Gambar 4.18 | Realisasi Penanaman Modal Asing Berdasarkan 5 Besar Negara Asal Tahun 2010-2016 (Dalam USD Juta) | 175 |
| Gambar 4.19 | Matriks Internal dan Eksternal | 217 |
| Gambar 4.20 | Kuadran SWOT | 219 |
| Gambar 4.21 | Jumlah Total Panjang Jalan Kabupaten/Kota Menurut Jenis Permukaan Jalan (Km) Kabupaten/Kota Tahun 2010-2016 ... | 240 |
| Gambar 4.22 | Jumlah Penumpang yang Datang Per Bulan Melalui Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Tahun 2010-2016 | 242 |
| Gambar 4.23 | Jumlah Barang yang Dimuat Per Bulan Melalui Terminal Domestik Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Tahun 2010-2016 | 243 |
| Gambar 4.24 | Jumlah Barang yang Dimuat POS Per Bulan Melalui Terminal Domestik Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Tahun 2010-2016 | 244 |
| Gambar 4.25 | Produksi Budidaya Perikanan Menurut Kabupaten/Kota (Ton) Tahun 2010-2016 | 245 |
| Gambar 4.26 | Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan Menurut Kabupaten/Kota (Ton) Tahun 2010-2016 | 245 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| Gambar 4.27 | Jumlah Petani/Nelayan dan Produksi Perikanan Laut Menurut Kabupaten/Kota (Orang) Tahun 2010-2016 | 246 |
| Gambar 4.28 | Jumlah Kapal Motor Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2016 | 246 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Wawancara
2. Dokumentasi Penelitian
3. Kuesioner SWOT
4. Hasil Angket Kekuatan dan Kelemahan, Peluang dan Ancaman
5. Surat Keputusan Pembimbing Disertasi
6. Surat Pengantar Riset
7. Surat Pernyataan dari Dinas Terkait
8. Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

STRATEGI PENINGKATAN INVESTASI PROVINSI ACEH PERIODE 2010-2016

Nama : Malahayatie
Nim : 94315050598
Tempat/Tanggal Lahir : Blora Jawa Tengah, 18 Mei 1979
Nama Orang Tua : (Alm) Hamdan A. Ranie
Promotor : Prof. Dr. Ahmad Qorib, M.Ag
Copromotor : Dr. Saparuddin Siregar, SE, Ak, SAS, MA, CA

Investasi merupakan hal penting bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi hal-hal yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung investasi di Provinsi Aceh; 2) menjelaskan eksistensi syariat Islam dan keamanan bagi peningkatan investasi pada periode 2010-2016; 3) merumuskan strategi baru dalam peningkatan investasi di Provinsi Aceh periode 2010-2016. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dalam rangka menyusun kebijakan strategik yang dikembangkan dengan model pendekatan partisipatif (*participatory approach*). Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling* terhadap beberapa informan terpilih.. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT dan analisis QSPM untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah operasional dalam meningkatkan investasi di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal yang menjadi faktor penghambat investasi yaitu; 1) minimnya kegiatan ekonomi produktif; 2) kualitas sumber daya manusia tidak mendukung kepada arah potensi kewilayahan daerah; 3) Infrastruktur dan noninfrastruktur yang masih belum maksimal; 4) Adanya pungutan liar (Pungli) berlapis; 5) proses birokrasi yang rumit; 6) kurangnya kepedulian pengusaha lokal/ daerah untuk menggarap investasi di sektor unggulan daerah; 7) penggunaan anggaran pemerintah yang belum tepat sasaran. Adapun yang menjadi faktor pendukung investasi yaitu; 1) sektor pertanian; 2) potensi perkebunan; 3) Pengembangan tren pariwisata syariah (*halal tourism*); 4) potensi sektor perikanan dan kelautan; 5) Aktifnya kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri Aceh (KIA). Eksistensi faktor Syariat Islam dan keamanan dalam berinvestasi dimaknai akan keberlangsungan dari tujuan syari'ah Islam itu sendiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terbagi atas lima faktor. Pemerintah (penguasa) merupakan pihak yang dibebani Allah untuk mengontrol dan melindungi kepentingan publik dengan otoritas dan beragam sarana yang dimilikinya. Dengan terwujudnya kemaslahatan kondisi keamanan di Aceh akan tercipta dengan sendirinya sebab keamanan dan kedamaian merupakan tujuan daripada eksistensi syari'at Islam. Berdasarkan analisis matrik SWOT maka menghasilkan strategi SO (*Strength-Opportunity*) yaitu: 1) Memperbesar kapasitas produksi; 2) Perbaikan infrastruktur yang menunjang produksi; 3) Penetapan regulasi yang mendorong dunia usaha; 4) Meningkatkan produktifitas sumber daya manusia; 5) Mendorong pengembangan industri pengolahan di daerah. Berdasarkan analisis QSPM dengan urutan strategi alternatif berdasarkan nilai tertinggi adalah: 1) Peningkatan kualitas tenaga kerja dan produktifitas SDM; 2) Pelaksanaan berbagai jenis kegiatan promosi; 3) Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur; 4) Penetapan kepastian hukum; dan 5) Peningkatan partisipasi masyarakat serta keamanan.

Kata Kunci: Investasi, syariat Islam, strategi, keamanan.



ABSTRACT

STRATEGY OF INCREASING OF INVESTMENT IN ACEH PROVINCE FOR PERIODE 2010-2016

Name : Malahayatie
Student Reg Number : 94315050598
Place/Date of Birth : BloraJawa Tengah, 18 May 1979
Parent Name : (Late) Mr. Hamdan A. Ranie
Promotor : Prof. Dr. Ahmad Qorib, M.Ag
Copromotor : Dr. Saparuddin Siregar, SE, Ak, SAS, MA, CA

Investment is one of the important role in economic growth. The research has the purpose to : 1) identify the cases that become to the obstacle and supported factors for investment in Aceh province. 2) explaining the syariah in Islam and security for increasing the investment for period 2010 – 2016 3) formulating the new strategy in increasing the investment in Aceh Province for period 2010-2016. The kind of this research is qualitative research in term of arrange the the strategic policy that will be developed with the participatory approach from the stakeholder element with the bussiness man and private sector the . The Sampling method is purposive sampling method to some informan of stakeholders and selected businessman. Furthermore the data was analysed using the SWOT and QSM analysis and formulate the strategy and operational steps in increasing the invesment in Aceh Province. The result of this analysis showed the cases which is become to the obstacles factor for investment and they are : 1) Lack of the productive economic and it was shown by low of amount and of Processing industry in Aceh ; 2) the quality of human resources quality not supported to the direction of regional potential in that area; 3) the obstacles of Infrastructure and non infrastructure that still not maximum in taking the benefit and advantage; 4) The illegal cost or “*pungli*” still taken out of formal cost that become to the conditional; 5) Complicated and not transparant process of birocration and not straight to the target; 6) Lack of careness of local bussinessman in Aceh to work on investment in priority sector in Aceh; 7) goverment local budgeting using still not straight to the target. The supported factor in this investment are ; 1) farming sector because Aceh was agro industry so the farming sector become to the priority; 2) Gardening Potential still dominated by coconut palm gardening; 3) other priority comodity such as coffee, cocoa, cloves and areca nut has potential value for growing the gardening comodities; 4) The development of infrastructure has shown the development; 5) Uderwater Tourism development through the syariah tourism (*halal tourism*); 6) potential sector of fishing and maritim; 7) the area of specific economic and area of Industry of Aceh. Existence of Syariat factors in Islam and security in investment and it signed by continuity from the objectives of syariah of Islam itself in the effort to increase the welfare of human being and it has five factors. The government (master) is the part that was given the burden by Allah to control and to protect the public importance by using the authority. And many various of structure owned. By having a good security and welfare in Aceh, will be create the security and peace that become the purpose of Existence of Syariat in Islam. Some strategies were formulated so that will occur the increasing of invesment in Aceh that was ; 1) enlarge the production capacity; 2) revitalization of infrastructure that will support the production; 3) regulation statement that will support the bussiness world; 4) increase the productivity of human resources; 5) support the development of agroindustry and processing in the region. After SWOT analysis has been done then also be strengthened by using the QSPM analysis by the result of analysis strategy and based on the highest result was ; 1) increasing the productivity of human resource or labour quality 2) conducting all kind of promotion activity 3) increasing the availability and quality of infrastucture 4) statement of law certainty 5) increasing the community participation and also security guaratee.

Key word: Invesment, Islam Sharia, strategy, security guaratee



ملخص

زيادة إستثمارية في محافظة أتشية أسترتجيامند 2010-2016

إسم : ملاهيتي
رقم الطالبة : 9431505098
مكان و التاريخ ميلاد : بلار جاو وسطى, 18 مايو 1979
إسم الوالد : حمدا أ رني.
متعهد : أستاذ دكتور أحمد قريب
متعهد نائب : دكتور سقرالدين سرغر.

الإستثمار هو أحد الأشياء المهمة للنمو الاقتصادي. تهدف هذه الدراسة إلى : (الأولى) تحديد العوامل المثبطة والعوامل الداعمة للإستثمار في محافظة أتشية. (الثاني) شرح و جود الشريعة الإسلامية و الأمن لزيادة الإستثمار في الفترة 2010-2016. (الثالث) صياغة استراجية للتحسين الإستثمار في محافظة أتشية في الفترة 2010-2016. الطريقة المستخدمة هي البحث النوعي مع نموذج النهج التشاركي . تم أخذ العينات باستخدام طريقة أخذ العينات الهادفة من عدة مخبرين مختارين ، ثم تم تحليلها باستخدام تحليل SWOT وتحليل QSPM لصياغة الاستراتيجيات والخطوات التشغيلية في زيادة الإستثمار في مقاطعة أتشية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن العوامل تثبيط الإستثمار وهي:(الأولى) عدم وجود أنشطة اقتصادية منتجة انخفاض عدد الصناعات المتنوعة في أتشيه وتنوعها؛ (الثاني) جودة المصدر الموارد البشرية لا تدعم اتجاه الإمكانات الإقليمية الإقليمية؛ (الثالث) قيود البنية التحتية وغير البنية التحتية التي لم تصل بعد إلى الحد الأقصى استخدام. (الرابع) وجود رسوم غير رسمية في شكل رسوم غير قانونية (الابتزاز لا تزال تحدث خارج التكاليف الرسمية المطلوبة؛ (الخامس) العملية البيروقراطية معقدة وليس على الهدف؛ (السادس) عدم الاهتمام لرجال الأعمال المحليين المناطق للعمل على الإستثمار في القطاعات الإقليمية العليا؛ (السابع) الاستخدام ميزانية الحكومة التي ليست على الهدف بعد. أما بالنسبة للعوامل أنصار الإستثمار وهم؛ (الأولى) القطاع الزراعي لأن أتشيه منطقة الصناعة الزراعية بحيث يكون القطاع الزراعي متفوقا. (الثاني) إمكانات المزارع لا تزال تهيمن عليها مزارع النخيل. (الثالث) السلع الرئيسية البعض الآخر من القهوة والمطاط والكافو والقرنفل وجوز الأريفة والبلطي هي إمكانات كبيرة لتطوير السلع الزراعية؛ (الرابع) التنمية البنية التحتية التي أظهرت تقدما؛ (الخامس) تنمية السياحة البحرية من خلال اتجاهات السياحة الشرعية (السياحة الحلال)؛ (السادس) إمكانات قطاع المصايد و البحرية. (السابع) و جود مناطق اقتصادية خاصة و المناطق الصناعية أتشيه.

براء على تحليل (قوية، الضعيفة، الفرصة، تحديا)، فأن إستراتيجية (قوية، الضعيفة، الفرصة، تحديا) و هي : (الأولى) توسيع الطاقة الإنتاجية، (الثاني) إصلاح البنية التحتية التي تدعم الإنتاج، (الثالث) تحديد الإتفاق المشجعة عالم الأعمال، (الرابع) زيادة إنتاجية الموارد البشرية. (الخامس) تشجيع تطوير الصناعة التحويلية في المناطق. بناء على التحليل (مصفوفة التخطيط الإستراتيجي الكمي) مع تسلسل إستراتيجية بديل يعتمد على أعلى قيمة هو : (الأولى) تحسين جودة العمل و إنتاجية الموارد البشرية، (الثاني) تنفذ أنواع مختلفة من أنشطة الرويح، (الثالث) تحسين الدعم و الجودة البنية التحتية، (الرابع) إثبات القين القانوني، (الخامس) زيادة المشاركة المجتمع و الأمن.

كلمة المفاتيح : إستثمارية , إستراتيجية , شريعة الإسلامية , و الأمن

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanaman modal atau investasi sudah diketahui memiliki peran penting bagi kemajuan sebuah negara maupun daerah. Hal ini dikarenakan investasi merupakan salah satu sektor yang dapat dijadikan sebagai andalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya investasi turut membentuk jalannya kegiatan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan prasyarat bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi. Perkembangan ekonomi suatu negara yang diukur dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam konsep nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB).¹

Investasi merupakan salah satu hal penting bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat digunakan sebagai alat untuk memulihkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Tanpa investasi akan sulit melakukan ekspansi usaha. Maka penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan akan investasi. Penanaman Modal Asing (PMA) masih diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai kegiatan yang belum mampu sepenuhnya dilaksanakan dengan PMDN, terutama yang menghasilkan barang modal, bahan baku dan komponen sebagai substitusi impor, barang jadi dan barang setengah jadi guna menciptakan kesempatan usaha dan lapangan kerja.²

¹ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 121.

² *Ibid.*, h. 122.

Investasi atau penanaman modal dalam pembangunan telah banyak membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang. Manfaat investasi sangat dirasakan untuk negara sedang berkembang karena kemampuan dalam menyediakan modal yang relatif rendah. Padahal, di sisi lain, usaha untuk mempercepat pembangunan ekonomi memerlukan modal yang sangat besar. Oleh karena itu, salah satu aspek dalam kebijakan pembangunan perlu melakukan berbagai upaya untuk menarik investasi agar memperoleh lebih banyak dana untuk pembangunan. Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang.³ Investasi dapat pula didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.⁴

Tujuan investor melakukan kegiatan investasi ialah untuk mencari (memperoleh) pendapatan atau tingkat pengembalian investasi (*return*) yang akan diterima di masa depan. Di sisi lain risiko (*risk*) juga melekat pada setiap aktifitas investasi, sehingga mengambil keputusan dalam berinvestasi perlu dipertimbangkan dengan cermat. Keputusan investasi juga disebut dengan keputusan penganggaran modal, karena sebagian besar perusahaan mempersiapkan anggaran tahunan yang terdiri dari investasi modal yang disahkan.⁵

Arus modal untuk pembangunan dapat dibedakan pada arus modal dalam negeri yang bersumber dari tabungan sukarela masyarakat maupun tabungan pemerintah. Sedangkan yang berasal dari luar negeri meliputi bantuan luar negeri, pinjaman luar negeri, dan penanaman modal asing (*foreign investment*). Bantuan dan pinjaman luar negeri dapat bersumber dari pemerintah negara asing dan badan

³ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2001), h. 284.

⁴ Abdul Halim, *Analisis Investasi*. Edisi Pertama, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2003), h. 2.

⁵ R.A Brealey, Myers, S.C, Marcus, A.J., *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*, Jilid 1, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008), h. 4.

badan internasional. Sedangkan penanaman modal asing (*foreign investment*) umumnya berasal dari pihak swasta.⁶

Investasi merupakan salah satu penggerak proses penguatan perekonomian negara, karena itu dalam rangka kebijakan ekonominya beberapa negara berusaha keras untuk meningkatkan investasinya. Salah satu cara peningkatan investasi yang diharapkan adalah melalui investasi asing. Para investor diundang masuk ke suatu negara diharapkan dapat membawa langsung dana segar atau *fresh money* dengan harapan agar modal yang masuk tersebut dapat menggerakkan roda perusahaan/industri yang pada gilirannya dapat menggerakkan perekonomian suatu negara.

Menurut Ida Bagus Rahmadi Supancana: investasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*judicial person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian.⁷ Kegiatan usaha yang dijalankan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang melibatkan pihak swasta, baik yang berasal dari penanaman modal asing maupun modal dalam negeri mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian, karena bagaimanapun juga pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan tingkat penanaman modal, maka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan pula tingkat penanaman modal yang tinggi.⁸ Sjafil mengatakan investasi merupakan salah satu penggerak proses penguatan perekonomian negara, sebab itu dalam rangka kebijakan ekonominya beberapa negara berusaha keras untuk meningkatkan investasinya.⁹

⁶ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 304.

⁷ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 2.

⁸ Aloysius Uwiyo, *Implikasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 5 Tahun 2003, h. 9.

⁹ Achmad Sjafil, Pengaruh Investasi Fisik dan Investasi Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 1990-2004. *Journal of Indonesian applied economics*, 2009, h. No. 1. h.1.13

Sebelum memutuskan menanamkan modalnya, investor biasanya terlebih dahulu melakukan studi kelayakan (*feasibility study*) tentang prospek bisnis yang akan dia jalankan, termasuk hal yang diteliti adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan investasi yang akan ia jalankan. Hal yang menjadi masalah bagi investor adalah jika kerugian yang dialami bukan karena salah mengelola perusahaan, akan tetapi tidak adanya perlindungan hukum yang jelas, baik terhadap modal yang ia tanamkan maupun terhadap barang yang akan diproduksi.¹⁰

Dalam era globalisasi, masuknya investasi dalam suatu negara berkembang khususnya Indonesia merupakan salah satu peranan yang sangat signifikan dalam memacu pembangunan ekonomi. Karena di negara-negara berkembang kebutuhan akan modal pembangunan yang besar selalu menjadi masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Sehingga diantara negara-negara berkembang yang menjadi perhatian bagi investor adalah tidak hanya sumber daya alam yang kaya, namun yang paling penting adalah bagaimana hukum investasi di negara tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha.

Provinsi Aceh merupakan wilayah yang mempunyai sejarah dan karakter tersendiri yang bersifat khusus. Secara teritorial, Aceh merupakan Provinsi paling barat dari pulau Sumatera di Indonesia yang pernah mengalami konflik berkepanjangan dan bencana alam tsunami yang hebat pada tahun 2004 yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian disebagian besar wilayahnya.¹¹ Akibat dari pada konflik dan tsunami ini adalah menurunnya pertumbuhan dibidang perekonomian dan infrastruktur karena putusnya akses dan kerusakan fasilitas umum yang secara otomatis menghambat pertumbuhan investasi di Aceh.¹²

Karenanya, peningkatan investasi perlu diupayakan semaksimal mungkin, dengan meningkatkan minat calon investor untuk berinvestasi di Aceh. Iklim investasi yang kondusif seperti adanya kepastian hukum, stabilitas politik dan

¹⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010), h. 170.

¹¹ Bank Dunia, *Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010 : Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: UNDP Indonesia, 2011), h. 83

¹² <http://www.kppod.org>

jaminan keamanan, kebijakan pemerintah yang pro investasi, serta tersedianya sarana dan prasarana umum yang memadai, adalah faktor utama yang dapat meningkatkan minat calon investor.

Untuk meningkatkan perekonomian melalui penanam modal asing tentunya pemerintah Aceh dituntut lebih jeli dalam menarik para investor. Kebijakan-kebijakan dalam pembuatan peraturan (*qanun Aceh*) yang bisa diterima oleh umum, khususnya para investor tanpa mengurangi kepentingan pemerintah itu tersendiri.¹³

Masalah utama yang berkaitan dengan masalah ekonomi Aceh adalah terkait pendapatan yang diperoleh dari industri minyak dan gas di Aceh. Eksploitasi sumber daya alam Aceh dan pembagian yang tidak adil dari sumber daya alam tersebut adalah akar penyebab pemberontakan Aceh.¹⁴ Dari tahun 1970-an sampai pertengahan 1980-an Aceh telah mengalami *booming* LNG setelah penemuan gas alam di pantai timur laut Provinsi Aceh. Meski demikian hampir semua pendapatan minyak dan gas dari kegiatan produksi dan ekspor di Aceh dialokasikan ke pemerintah pusat baik secara langsung maupun melalui perjanjian bagi hasil dengan perusahaan minyak negara Pertamina.¹⁵ Selain itu pemerintah pusat tidak kembali menginvestasikan cukup banyak pendapatan tersebut kembali ke Provinsi Aceh. Hal ini menyebabkan beberapa teknokratis Aceh yang mulai menonjol saat itu untuk mengeluh bahwa Provinsi Aceh telah diberlakukan tidak adil secara ekonomi dan bahwa Aceh telah terpinggirkan dan diabaikan sebagai daerah pinggiran.¹⁶

Walaupun beberapa pengusaha bisnis yang kecil di Aceh mendapat manfaat dari masuknya modal asing selama *booming* LNG, ada banyak yang merasa dirugikan saat kalah dari orang lain dengan koneksi politik yang lebih kuat ke pemerintah pusat, terutama pemimpin GAM sendiri yaitu Hasan Ditiro. Beliau

¹³ Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, h. 27

¹⁴ Geoffrey Robinson, *Rawan is as Rawan Does: The Origins of Disorder in New Order Aceh*, Indonesia, 1998, h. 160.

¹⁵ Dayan Dawood, Syafrizal, *Aceh: The LNG Boom and Enclave Development*, (Singapore: Oxford University Press, 1989), h. 115.

¹⁶ Tim Kell, *The Roots of Achnese Rebellion*, (Ithaca N.Y.: Cornell Modern Indonesia Project, 1995), h. 30.

adalah salah satu pihak yang dirugikan ketika mengajukan tawaran kontrak pipa minyak untuk *Mobil Oil* Indonesia pada tahun 1974, namun dikalahkan oleh perusahaan Amerika Serikat. Robinson mencatat bahwa waktu deklarasi kemerdekaan GAM pada bulan Desember 1976 dan aksi militer pertama GAM pada tahun 1977 terhadap Mobil Oil terjadi pada waktu yang sama ketika fasilitas ekstraksi dan pengolahan gas alam telah diresmikan.¹⁷ Ini merupakan latar belakang lahirnya konflik keamanan sampai dengan tahun 2005 terjadinya perjanjian damai.

Pasca konflik bersenjata di Aceh yang ditandai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) di Helsinki pada tanggal 16 Agustus 2005.¹⁸ Tidak dapat dipungkiri dampak konflik bersenjata membawa implikasi baik implikasinya terhadap sistem pemerintahan, administrasi, sosial politik ataupun dalam sistem ekonomi bahkan termasuk dalam usaha untuk meningkatkan investasi. Menurut Nizar, Hamzah dan Syhnur fenomena peningkatan investasi pasca konflik bersenjata di Provinsi Aceh telah dimulai sejak periode kepemimpinan Gubernur Irwandi Yusuf pada tahun 2007 sampai 2012.¹⁹ Namun sampai hari ini fenomena peningkatan investasi di Provinsi Aceh masih terus diupayakan oleh legislatif dan eksekutif. Usaha-usaha untuk meningkatkan investasi di Provinsi Aceh yang digulirkan oleh pemerintah dapat diketahui dari beberapa program yang menyentuh langsung kepada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Diantaranya disektor laut, perkebunan, dan sektor industri baik industri dalam skala besar atau pun dalam industri yang berskala kecil. Bahkan pemerintah Aceh telah menghadirkan Sistem Aplikasi Perizinan Aceh (SAPA).²⁰ Disamping itu, program lain juga digulirkan pemerintah dalam rangka meningkatkan

¹⁷ Geoffrey Robinson, *Rawan is as....*, h. 138.

¹⁸ S. Hadi, *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal, dan Dinamika Internasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 4

¹⁹ C. Nizar, Hamzah, A., & Syahnur, S. Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN*, h. 2302, 0172.

²⁰ *Kabar Gembira Buat Investor, Izin Investasi di Aceh Selesai Satu Hari*, <http://aceh.tribunnews.com/2017/11/04/kabar-gembira-buat-investor-izin-investasi-di-aceh-selesai-satu-hari>, diakses tanggal 19 April 2018.

investasi di Aceh seperti investasi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).²¹ Dalam sektor industri pemerintah juga mengundang para investor yang berskala internasional seperti membuka Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri Aceh (KIA) dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS).²² Menurut Zainal Abidin Lubis akselerasi investasi selain dari perusahaan perkebunan dan batu bara, investasi juga didorong oleh pihak swasta seperti PT Medco dan PT Semen Indonesia.²³

Fenomena peningkatan investasi di Provinsi Aceh ditengarai bukan sekedar akibat konflik bersenjata, tetapi juga ditengarai akibat hancur luluhnya infrastruktur pasca diterjang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004.²⁴ Kedua permasalahan ini yakni konflik bersenjata dan terjangkit tsunami diketahui telah menghancurkan infrastruktur di Provinsi Aceh. Justru konflik bersenjata dan sapuan ombak tsunami ini telah menyebabkan penurunan secara drastis sendi-sendi perekonomian yang disebabkan karena putusnya akses yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh bahkan peristiwa tsunami juga telah merusak fasilitas-fasilitas umum yang secara otomatis diyakini telah menghambat pertumbuhan investasi di Aceh.²⁵

Menurut Lili pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau daerah dapat dipengaruhi oleh faktor investasi (*penanaman modal*) dan perdagangan internasional (*ekspor-impor*).²⁶ Taufik menyebutkan bahwa iklim investasi sebagai kebijakan institusi, dan kondisi atau perilaku lingkungan, baik saat

²¹ 5 Tahun Realisasi Target 7 Investasi Menjadi Andalan Aceh Besar, <http://aceh.tribunnews.com/2017/08/14/5-tahun-realisasi-target-7-investasi-menjadi-andalan-aceh-besar>, diakses tanggal 19 April 2018.

²² Ini Sektor Yang Masih Jadi Pertumbuhan Ekonomi Aceh, <http://aceh.tribunnews.com/2018/01/16/ini-sektor-yang-masih-jadi-pertumbuhan-ekonomi-aceh>, h. 8, diakses tanggal 19 April 2018.

²³ *Ibid.*

²⁴ Bank Dunia, *Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010: Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: UNDP Indonesia, 2011), h. 83

²⁵ <http://www.kppod.org>

²⁶ L. Masli, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol. 17, No. 1, 2002, h. 1 -14

inibmaupun yang akan datang sehingga dapat mempengaruhi hasil-hasil dan resiko dalam kegiatan investasi²⁷

Pentingnya peningkatan investasi diupayakan secara maksimal karena minat calon investor untuk berinvestasi di Provinsi Aceh terkesan menurun dalam beberapa dekade. Padahal pemerintah Provinsi Aceh telah melakukan upaya-upaya strategis seperti yang dinyatakan oleh kepala Badan Investasi dan promosi Aceh bahwa melalui pengembangan sistem yang diketahui cenderung lebih memudahkan bagi para investor untuk berinvestasi di Provinsi Aceh.

Merujuk pada strategi peningkatan investasi baik strategi peningkatan investasi di daerah-daerah dan provinsi lain di Indonesia maupun strategi peningkatan investasi yang berskala nasional maka dapat diketahui bahwa peningkatan investasi berkorelasi dengan infrastruktur. Diantara infrastruktur yang diperlukan untuk meluncurkan proses dan menarik minat investor.²⁸ Terkait tentang peningkatan investasi ini juga diberitakan di media baik itu yang diberitakan oleh media lokal di Aceh atau yang di ekspos oleh media-media yang berskala nasional bahwa infrastruktur perlu ditingkatkan untuk meluncurkan proses dan minat investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Aceh.²⁹

Perihal senada juga dimuat dalam media-media nasional lainnya bahwa infrastruktur sebagai salah satu faktor yang diyakini dapat mempengaruhi peningkatan investasi pasca konflik bersenjata dan terjangan tsunami di Provinsi Aceh.³⁰ Hal ini dilakukan bukan hanya di kota-kota besar, namun pembangunan secara masif juga dilakukan di Provinsi Aceh. Diantara beberapa proyek infrastruktur yang menjadi prioritas secara nasional di Provinsi Aceh adalah pembangunan jalur Kereta Api (KA), pembangunan KA Trans Sumatera, pembangunan dan revitalisasi Pelabuhan Nasional Balohan dan penyediaan

²⁷ Taufik Abidin, Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Sektor Potensial di Kabupaten Asahan. QJurnal vol.02, No.01-33 h. 80

²⁸ Klaim PUPR Atas Sejumlah Proyek Infrastruktur Aceh, <http://nasional.kontan.co.id/news/klaim-pupr-atas-sejumlah-proyek-infrastruktur-aceh>, diakses tanggal 19 April 2018.

²⁹ BAPPENAS Kebut Pembangunan Infrastruktur Aceh, <https://ekbis.sindonews.com/read/1198576/34/bappenas-kebut-pembangunan-infrastruktur-aceh-1492604111>, diakses tanggal 19 April 2018.

³⁰ Infrastruktur Konektivitas di Aceh Jadi Prioritas, <http://industri.bisnis.com/read/20170417/45/645843/2018-infrastruktur-konektivitas-di-aceh-jadi-prioritas->, diakses tanggal 19 April 2018.

layanan informasi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri PPN/Kepala Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional (Bappenas). Usaha-usaha yang mencerminkan keseriusan pemerintah Provinsi Aceh juga dapat diketahui berdasarkan fokus untuk meningkatkan infrastruktur dan investasi oleh pemerintah Aceh dalam Perencanaan Pembangunan Provinsi Aceh (Musrenbangprov Aceh). Fakta ini merupakan bentuk-bentuk keseriusan pemerintah untuk meningkatkan investasi di Aceh. Justeru dengan digulirkan program-program strategis oleh pemerintah semestinya pertumbuhan ekonomi di Aceh dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional 5.6 persen pada tahun 2018.³¹

Walaupun usaha-usaha strategis telah dilakukan oleh pemerintahan Aceh sejak periode tahun 2007 sampai dengan periode tahun 2012, bahkan dalam periode 2012 sampai saat ini. Namun faktanya peningkatan investasi di Aceh belum terlihat tanda-tanda yang menggairahkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Jika ditinjau kembali terhadap pasar modal, maka dipercaya bahwa salah satu alternatif pembiayaan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya dengan modal yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri, tetapi pembiayaan pembangunan perlu didukung oleh modal dari sektor swasta sekaligus menjadi motor dalam kegiatan ekonomi (*private sector leads growth economy*), yakni melalui campur tangan pemerintah dalam kegiatan pasar. Justru pemerintah telah membuat beberapa peraturan sekaligus menegakkan aturan-aturan tersebut untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien.³² Hal ini diasumsi bahwa kepastian hukum, stabilitas politik dan jaminan keamanan, kebijakan pemerintah yang pro investasi dapat mempengaruhi iklim investasi yang kondusif, bahkan dengan tersedianya sarana dan prasarana umum yang memadai, diyakini dapat meningkatkan minat bagi calon investor yang ingin menanamkan modalnya di Provinsi Aceh.

³¹ *Ini Deretan Proyek Prioritas Pemerintah di Aceh Pada 2018*, <https://www.merdeka.com/uang/ini-deretan-proyek-prioritas-pemerintah-di-aceh-pada-2018.html>, diakses tanggal 19 April 2018.

³² Jusuf Anwar, 2001, *Kajian Tentang Kepastian Hukum Kinerja Lembaga Pasar Modal Di Indonesia Dalam Upaya Menunjang Pembangunan Nasional*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, h. 122

Oleh karena itu, kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam upaya menarik minat penanam modal. Ini ditandai oleh keselarasan regulasi bidang penanaman modal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebaliknya, produk-produk hukum yang tumpang-tindih atau saling bertentangan akan membingungkan dan menyulitkan penanam modal dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Justeru pembenahan legislasi dan kebijakan di bidang penanaman modal perlu terus dilakukan.³³ Apalagi pasca berakhirnya konflik bersenjata antara GAM-dan TNI-POLRI melalui perdamaian di Helsinki lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Menurut undang-undang ini, Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan yang lebih otonom baik dalam bidang politik, sosial bahkan dalam bidang ekonomi termasuk kewenangan untuk menjalin hubungan dan kerjasama internasional dengan Negara asing untuk pembangunan perekonomian Aceh. Salah satu aspek yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perekonomian melalui penanam modal asing dalam wilayah pemerintah Aceh. Hal ini menuntut pemerintah Aceh untuk melakukan pembaharuan infrastruktur dan regulasi dalam rangka mengundnag atau menarik para invesator untuk berinvestasi di Aceh. Kebijakan-kebijakan dalam pembuatan peraturan (*qanun Aceh*) yang bisa diterima oleh umum, khususnya para investor tanpa mengurangi kepentingan pemerintah itu tersendiri.³⁴

Untuk peningkatan investasi khusunya dalam bidang insdutsri dan peningkatan ekonomi yang diharapkan adalah melalui investasi asing. Para investor diundang masuk ke suatu negara diharapkan dapat membawa langsung dana segar atau *fresh money* dengan harapan agar modal yang masuk tersebut dapat menggerakkan roda perusahaan/industri yang pada gilirannya dapat menggerakkan perekonomian suatu negara.

Pasca perdamaian Helsinki di Firlandia Pemerintah Aceh terus berusaha meningkatkan perekonomian melalui investasi untuk memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh telah mendapatkan

³³ Badan Investasi dan Promoasi Aceh, 2013, *RENTRA 2013-2017*. h. 188

³⁴ Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, h. 27

kewenangan yang khusus untuk menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga atau badan luar negeri baik dalam kegiatan seni, budaya dan olah raga internasional.³⁵ Kewenangan tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah Aceh dengan mandiri tanpa harus ada persetujuan dari pemerintah pusat kecuali masalah yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Dengan adanya kewenangan tersebut maka pemerintah Aceh dapat melakukan kerjasama dengan pihak asing untuk menginvestasikan modal mereka di wilayah Aceh. Selanjutnya dalam Pasal 154 Ayat 1 dijelaskan bahwa Aceh melakukan peningkatan perekonomian yang terbuka tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional. Oleh karena Aceh merupakan daerah otonomi khusus maka pemerintah Aceh juga diberikan kewenangan untuk membuat atau menyederhanakan peraturan-peraturan tersendiri untuk menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan amanah konstitusi Negara Republik Indonesia. Pasal UU No 11 Tahun 2006 Pasal 155 Ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bisa melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lain sesuai dengan kewenangannya.

Dengan dasar amanah UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf perekonomian di Aceh. Dalam kesiapan terhadap peraturan-peraturan daerah (*qanun*) yang mengatur masalah investasi secara khusus pada tahun 2009 pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Gubernur Irwandi Yusuf bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) selesai membuat dan mensahkan qanun khusus yang mengatur tentang penanaman modal yaitu Qanun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal.

Dalam Pasal 1 Butir 12 dijelaskan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Aceh. Yang dimaksud penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Aceh yang dilakukan oleh penanam modal

³⁵ Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, h. 29

dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Aceh yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya untuk bidang usaha dan lokasi tertentu maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Selain menyiapkan perangkat peraturan, pemerintah Aceh juga telah melakukan promosi-promosi ditingkat internasional dan regional untuk mendatangkan investor-investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Aceh. Salah satu investor yang menjadi target pemerintah Aceh adalah investor asing, dan tidak terkecuali investor dalam negeri sendiri.

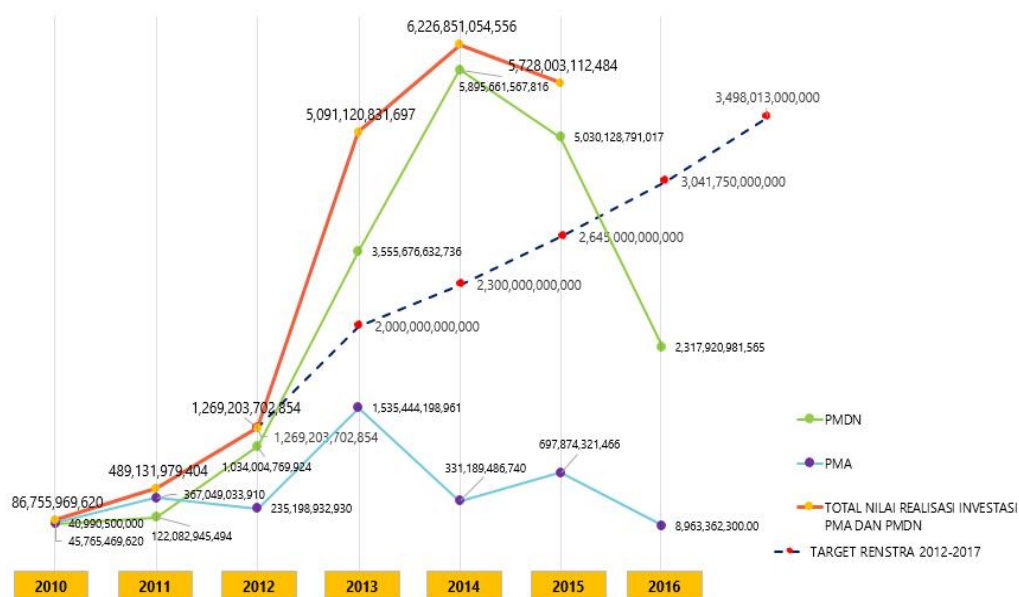
Untuk menarik investor agar menanamkan modal usahanya di daerah tentunya membutuhkan strategi dan melakukan berbagai upaya agar investor untuk membuat komitmen agar bersedia menanamkan modal usahanya di Aceh. Strategi dan upaya tersebut juga harus sesuai dengan standar prosedur pemerintahan yang baik seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 165 ayat 2 bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional. Selanjutnya dalam Ayat 3 dinyatakan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang berlaku nasional berhak memberikan izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum, konversi kawasan hutan, penangkapan ikan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan untuk provinsi dan satu per tiga dari wilayah kewenangan daerah provinsi untuk daerah kabupaten/kota, penggunaan operasional kapal ikan dalam segala jenis ukuran, izin penggunaan air permukaan dan air laut, dan izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan hutan, serta izin operator lokal dalam bidang telekomunikasi.

Merujuk pada undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 juga memberikan kemudahan bagi para investor. Pasal 166 menegaskan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dapat menyediakan fasilitas perpajakan berupa keringan pajak, pembebasan bea masuk, pembebasan pajak-pajak dalam rangka impor barang modal, dan bahan baku ke Aceh dan ekspor barang jadi dari Aceh, fasilitas investasi, dan lain-lain fasilitas fiskal yang diusulkan oleh pemerintah Aceh. Begitu juga dalam hal pertanahan pemerintah Aceh berwenang memberikan hak guna bangunan dan hak guna usaha bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.

Melalui Badan Investasi dan Promosi Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk mendatangkan para investor ke Aceh. Badan Investasi dan Promosi Aceh telah menargetkan pada akhir 2017 bahwa aceh akan menjadi salah satu provinsi destinasi investasi Indonesia melalui jargon "*invest in amazing Aceh*". Kriteria destinasi tentunya diukur dengan jumlah nominal realisasi investasi baik yang berasal dari perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri.³⁶ Menurut catatan Bank Indonesia, pada tahun 2012 hingga 2015 realisasi investasi baik PMDN dan PMA di Aceh masih sangat kecil berkontribusi terhadap total realisasi investasi nasional yaitu hanya mencapai 0,2 persen.

Adapun realisasi dan target penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing selama tahun 2010-2016 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

³⁶ Muhammad, Marthunis, 2016, *Kebijakan in Invest amazing Aceh*" Staf Bappeda Aceh, Diakses dari <http://www.cakrawalakaifa.blogspot.com/> diakses tanggal 15 Oktober 2016 jam 17.00



Sumber : Badan Investasi dan Promosi Aceh, 2016

Gambar 1.1 Target dan Realisasi Investasi di Provinsi Aceh 2010-2016

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Investasi di Provinsi Aceh 2010-2016

| No | Tahun | PMDN | PMA | Total PMDN dan PMA | Target |
|----|-------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2010 | 45.765.469.620 | 40.990.500.000 | 86.755.969.620 | - |
| 2 | 2011 | 122.082.945.494 | 367.049.033.910 | 489.131.979.404 | - |
| 3 | 2012 | 1.034.004.769.924 | 235.198.932.930 | 1.269.203.702.854 | 1.269.203.702.854 |
| 4 | 2013 | 3.555.676.632.736 | 1.535.444.198.961 | 5.091.120.831.697 | 2.000.000.000.000 |
| 5 | 2014 | 5.895.661.567.816 | 331.189.486.740 | 6.226.851.054.556 | 2.300.000.000.000 |
| 6 | 2015 | 5.030.128.791.017 | 697.874.321.466 | 5.728.003.112.484 | 2.645.000.000.000 |
| 7 | 2016 | 2.317.920.981.565 | 8.963.362.300 | 2.326.884.343.865 | 3.041.750.000.000 |
| 8 | 2017 | | | | 3.498.013.000.000 |

Sumber: data yang sudah diolah peneliti, 2019

Pada tahun 2010-2016 realisasi investasi di Aceh terus mengalami perkembangan yang signifikan tiap tahunnya. Pada tahun 2010 realisasi PMA dan PMDN hanya sebesar Rp 86,75 miliar, meningkat 463,80 persen, pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 489,13 miliar, meningkat 159,48 persen, pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 1.269,20 triliun, meningkat hingga 301,13 persen pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 5.091,12 triliun meningkat hingga 301,13 persen, pada tahun 2014 meningkat sebesar 22,31 persen menjadi 6.226,85 triliun, pada tahun 2015

yaitu sebesar 5.728,00 triliun, menurun 8,01 persen dan Pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 13,17 persen menjadi 2.963.46 triliun.³⁷

Total realisasi investasi di Provinsi Aceh cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2010 hingga 2014, namun di tahun 2015 cenderung mengalami penurunan. Hingga semester pertama 2016, realisasi investasi dalam negeri (PMDN) semakin menurun. Penanaman modal asing atau PMA justru cenderung fluktuatif bahkan cenderung menurun. Pencapaian realisasi PMA tertinggi pada tahun 2013 kemudian di tahun 2014 dan 2015 realisasi PMA cenderung menurun. Kondisi ini tentunya tidak diharapkan, oleh sebab karena itu pemerintah Aceh harus terus melakukan kebijakan dan berbagai upaya yang mengarah pada perbaikan iklim investasi karena tujuan dari pada penyelenggaraan Penanaman Modal di Aceh.³⁸ Upaya untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan diyakini dapat menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha secara global, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, dan mendorong pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi kerakyatan.

Demi terciptanya iklim investasi yang baik maka pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing Aceh dalam perekonomian nasional dan internasional, mempercepat peningkatan penanaman modal, dan memanfaatkan secara optimal peluang penanaman modal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Disamping itu pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan kebijakan tersebut juga perlu memperhatikan perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan Aceh dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan bahkan pemerintah Aceh perlu menjamin keamanan dan kepastian

³⁷ <http://dpmpstsp.acehprov.go.id>.

³⁸ Qanun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal, h. 193

hukum dalam berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Justru melalui beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh diharapkan dapat mendorong dan membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, bahkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, kesetaraan, partisipasi rakyat dan efesiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan. Saat ini Aceh dihadapkan pada 'isu' bahwa Aceh sebagai daerah konflik masih begitu terasa begitu juga dengan adanya penerapan Syariat Islam menjadi "isu" yang berkembang sebagai penghambat investasi.

Menurut anggota Komisi III DPR Aceh membidangi investasi dan keuangan Aceh Bardan Saidi, "Syariat Islam, terutama pelaksanaan hukuman cambuk di hadapan orang banyak tidak menjadi penghambat investasi dan investor ke Provinsi Aceh,". Ia menilai laju pertumbuhan investasi di Aceh masih bergerak lambat. Lambatnya pertumbuhan tersebut bukan karena dalih pelaksanaan syariat Islam. "Dari beberapa kali mengikuti bisnis forum baik lokal, regional nasional, dan internasional, masih menempatkan Provinsi Aceh sebagai daerah yang tidak ramah investasi. Tidak ramah investasi bukan karena syariat Islam, namun ada hal-hal lain selain daripada syari'at Islam".

Oleh karena itu, isu pelaksanaan syariat Islam, terutama prosesi hukuman cambuk di depan umum atau pun tidak di depan umum yang mencuat terkait dengan investasi di Provinsi Aceh, tidak ada korelasinya sama sekali. Sebagai contoh di negara-negara Timur Tengah, investasi berkembang pesat. Padahal, mereka juga menerapkan hukum cambuk maupun hukum gantung di depan umum".³⁹

Aceh pasca konflik dan tsunami merupakan salah satu provinsi yang menjadi daya tarik diperbincangkan banyak orang, tidak hanya dalam skala

³⁹Bardan Saidi, Anggota Komisi III DPR Aceh membidangi Investasi dan Keuangan Aceh, *Legislator Syariat Islam Bukan Penghambat Investasi*, (<https://aceh.antaranews.com/berita/44659/legislator-syariat-islam-bukan-penghambat-investasi>), diakses tanggal 15 April 2018.

nasional, tapi juga masyarakat internasional. Daya tarik itu, mungkin karena Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang menyandang status khusus daerah diberlakukannya hukum atau undang-undang tentang Syariat Islam. Karenanya, terkadang apapun yang dilakukan maupun terjadi dikait-kaitkan dengan penerapan Syariat Islam yang dideklarasikan di Blang Padang oleh Gubernur Aceh saat itu Abdullah Puteh pada 2002. Bahkan, ironinya juga ada yang mengaitkan bahwa investor enggan masuk ke Aceh dikarenakan pengusaha, khususnya investasi asing sebab provinsi itu menerapkan Syariat Islam. Namun, Gubernur Aceh Zaini Abdullah menolak keras anggapan Syariat Islam yang berjalan baik di daerahnya itu menjadi hambatan bagi investor yang akan menanamkan investasinya di provinsi tersebut. “Sebenarnya, penerapan Syariat Islam berjalan dengan baik di seluruh Aceh, sangat sesuai dengan budaya dan adat istiadat dan Syariat Islam bukan hambatan,”⁴⁰

Faktor lain yang tidak kalah penting dalam berinvestasi adalah stabilitas politik dan keamanan. Dari pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal pada tahun-tahun sebelumnya dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab tidak kondusifnya iklim investasi di Aceh adalah karena masih adanya pemahaman yang tidak sama dari masyarakat akan arti pentingnya investasi bagi pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ini ditandai oleh adanya gangguan-gangguan dari sebagian masyarakat, harga tanah yang tidak rasional, serta penolakan lainnya yang menyebabkan penanaman modal tidak dapat melakukan kegiatan investasi atau perluasan usaha di Provinsi Aceh. Secara politik dengan berlangsungnya Pemilihan Umum Kepada Daerah tahun 2012 secara damai merupakan momentum penting sebagai daya tarik calon-calon investor akan semakin besar di masa yang akan datang.

Faktor utama lainnya yaitu adanya kebijakan pemerintah akan kemudahan perizinan dan pelayanan lain di bidang penanaman modal. Karena itu upaya perbaikan regulasi untuk meningkatkan minat calon investor baru

⁴⁰ Azhari, Investasi Aceh diantara Isu syariat <https://aceh.antaranews.com/berita/12703/investasi-aceh-diantara-isu-syariat> diakses tanggal 3 mei 2018.

perlu terus dilakukan berdasarkan masukan dari dunia usaha dan belajar dari pengalaman negara lain.⁴¹

Berbagai kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Aceh tersebut melalui Badan Invesasi dan Promosi, belum memberikan hasil yang optimal, sehingga perlu dilakukan strategi yang tepat dalam meningkatkan realisasi investasi. Peneliti berupaya merumuskan strategi sebagai suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuannya sesuai dengan peluang peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan internal organisasi.⁴² Manajemen strategi merupakan proses yang digunakan oleh manajer dan karyawan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan *customer value* terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Langkah pertama proses manajemen strategik dalam menciptakan masa depan perusahaan adalah perumusan strategi.⁴³ Novelty dalam penelitian ini adalah identifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat dan juga faktor pendukung bagi investasi di Aceh, kemudian peneliti ingin menjelaskan eksistensi/keberadaan syariat Islam serta isu keamanan yang masih menghambat investasi dikarenakan Aceh sebagai wilayah dengan sejarah konflik yang berkepanjangan. Namun peneliti dalam hal ini membatasi kurun waktu yang akan di amati yaitu pasca MoU Helsinki 2005 dan setelah berakhirnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi di tahun 2009. Tepatnya periode 2010 sampai dengan 2016. Sehingga akhirnya diharapkan dapat merumuskan strategi yang tepat agar investasi di Provinsi Aceh meningkat dan mengalami perkembangan sesuai harapan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat mengidentifikasi dan merumuskan beberapa masalah yang muncul terkait dengan persoalan “**Strategi Peningkatan Investasi di Provinsi Aceh Periode 2010-2016**”. Adapun parameter yang digunakan dalam membahas penelitian ini yaitu penjelasan

⁴¹ RENSTRA 2012-2017 Badan Investasi dan Promosi Aceh.

⁴² Jatmiko. Rammad Dwi, 2003, *Manajemen Strategik*, (Malang; Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2003), h. 4

⁴³ Edi Purwanto, 2012, *Pentingnya Perumusan Strategi Dalam Sistem Manajemen Strategik*, Volume 16, Jurnal Forum Akademika, Surakarta, h. 31

mengenai faktor faktor yang menjadi penghambat dan pendukung bagi investasi di Aceh, selanjutnya parameter kedua tentang kajian eksistensi faktor syariat Islam dan faktor keamanan bagi peningkatan investasi Aceh dari tahun 2010 sampai 2016. Parameter yang ketiga adalah merumuskan strategi yang sesuai dan relevan dalam upaya peningkatan investasi di Aceh di tahun-tahun mendatang. Maka dapat diajukan rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung bagi investasi di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana Eksistensi faktor syariat Islam dan faktor keamanan dalam mempengaruhi peningkatan investasi pada masa periode 2010-2016 di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana strategi yang tepat dalam rangka peningkatan investasi pada masa periode 2010-2016 di Provinsi Aceh?

C. Batasan Istilah

Batasan istilah merupakan penjelasan tentang pengertian istilah-istilah kunci yang terdapat dalam judul penelitian **Strategi Peningkatan Investasi di Provinsi Aceh Periode 2010-2016** agar terjadi konsistensi dalam penggunaan istilah dan terhindar dari pemahaman yang berbeda oleh pembaca.⁴⁴

Istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

1. Strategi adalah sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir. Hasil akhir dalam hal ini menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Ada strategi luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi kompetitif untuk masing-masing aktifitas.⁴⁵ Jatmiko mendefinisikan strategi sebagai suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta

⁴⁴ Program Pascasarjana UINSU Medan, *Pedoman Penulisan Disertasi*, (Medan, 2014), h. 2.

⁴⁵ Sandra Oliver, *Strategi Publik Relation*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 2.

sumber daya dan internal organisasi.⁴⁶ David mengartikan strategi adalah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang, merupakan tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan/organisasi dalam jumlah yang besar. Selain itu ditegaskan juga bahwa strategi dapat mempengaruhi kemakmuran perusahaan/organisasi dalam jangka panjang dan berorientasi masa depan. Strategi memiliki konsekuensi yang multifungsi dan multidimensi serta perlu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal yang dihadapi perusahaan/organisasi.⁴⁷

2. Investasi adalah pengeluaran perusahaan secara keseluruhan yang mencakup pengeluaran untuk membeli bahan baku, mesin-mesin dan peralatan pabrik serta semua peralatan modal lain yang diperlukan dalam proses produksi. Pengeluaran untuk keperluan bangunan kantor, pabrik tempat tinggal karyawan dan bangunan konstruksi lainnya. Perubahan nilai stok atau barang cadangan sebagai akibat dari perubahan jumlah dan harga.⁴⁸ Investasi merupakan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Menurut Sukirno⁴⁹ kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Investasi yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah penanaman modal baik dalam negeri maupun pihak swasta karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Investasi yang peneliti maksud pada penelitian ini merupakan investasi riil yang langsung memiliki efek pada pertumbuhan ekonomi daerah meliputi kegiatan para pengusaha dalam Asosiasi maupun pribadi.

⁴⁶ Rammad Dwi Jatmiko, *Manajemen Strategik*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2003), Volume 6, Nomor 1, 2018: 501-514, h. 4.

⁴⁷ Fred R. David, *Manajemen Strategis*, Terj. Ichsan Setiyo Budi, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 16-17.

⁴⁸ Muana Nanga, *Makro Ekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 18.

⁴⁹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. (Jakarta: Rajawali, 2000), h. 443.

3. Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.⁵⁰ Keberadaan/Eksistensi disini juga dimaknai dengan apa yang memiliki aktualitas dan segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu “menjadi atau mengada”. Jadi eksistensi ini tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya.⁵¹
4. Faktor adalah hal (keadaan), peristiwa yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.⁵²
5. Penghambat adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal.⁵³ Dalam penelitian ini faktor penghambat proses peningkatan investasi meliputi segala kondisi yang menghalangi menahan dan merintangi proses pertumbuhan investasi di Aceh.
6. Pendukung adalah sesuatu yang dapat mendukung atau mendorong pencapaian sesuatu yang di harapkan atau yang di inginkan⁵⁴. Pendukung dalam penelitian ini merupakan faktor yang mendorong dan menunjang terjadinya peningkatan investasidi Aceh.
7. Sedangkan syari’at Islam merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Aceh sebagai peraturan daerah yang dinamakan dengan Qanun. Syari’at Islam di Aceh diimplementasikan dalam bentuk regulasi atau peraturan-peraturan yang mengatur beberapa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan berbagai hal aspek kehidupan masyarakat baik aqidah, ibadah, akhlak maupun yang berkenaan dengan hukum/perundang-undangan dan hukum sipil, hukum pidana, hukum perdata, tatanan

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵¹ Zainal Abidin, *Filsafat Manusia: Memahami Manusia melalui Filsafat*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 33

⁵² <http://kbbi.web.id/faktor>, diakses 05 Mei 2017.

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

nasional, pemerintahan, prinsip ekonomi dan nilai-nilai sosial yang luhur.⁵⁵

8. Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan dan segala bentuk kecelakaan.⁵⁶ Menurut Tarwoto keamanan adalah keadaan aman dan tenteram sehingga dapat membuat individu aman dalam beraktivitas serta mengurangi stress dan tidak dalam keadaan yang berbahaya.⁵⁷

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi penurunan nilai total realisasi investasi pada tahun 2015 dan 2016 sedangkan Pemerintah Aceh melalui Badan Investasi dan Promosi Aceh telah menyusun rencana strategis dalam peningkatan realisasi investasi dan mewujudkan visi dari Badan Investasi dan Promosi Aceh yaitu “Aceh menjadi salah satu daerah investasi utama tahun 2017”.

Dengan alasan ini Pemerintah Aceh harus mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dari masuknya investasi di Aceh. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor penghambat dan pendukung investasi di Provinsi Aceh.
2. Menjelaskan akan eksistensi faktor syariat Islam dan faktor keamanan dalam mempengaruhi peningkatan investasi dalam periode 2010-2016 di Provinsi Aceh.
3. Menciptakan strategi dalam upaya peningkatan investasi di masa yang akan datang.

⁵⁵ Abdullah Nashih Ulwan, *Islam Syari'at Abadi*, Terj. Jamaluddin Saiz, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 15-23.

⁵⁶ <http://id.m.wikipedia.org>, diakses 05 Mei 2017.

⁵⁷ Tarwoto Wartonah, *Kebutuhan Dasar Manusia dan Proses Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2010), h. 20.

E. Kegunaan Penelitian

Terdapat beberapa kegunaan penelitian tentang strategi dalam meningkatkan investasi pada periode 2010-2016 di Provinsi Aceh. Adapun kegunaan utama penelitian ini untuk mengidentifikasi permasalahan investasi pasca MoU dan tsunami secara teoritis dan praktis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan secara teoritik, dan praktis untuk penelitian yang akan datang dan para akademisi yang ingin melakukan kajian tentang investasi dan faktor keamanan. Temuan penelitian juga diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang investasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membantu pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait investasi di Provinsi Aceh dan secara umum diharapkan dapat membantu semua pihak yang ingin mengkaji tentang investasi. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan membantu pihak yang bertanggung jawab dan pihak pengambil kebijakan ekonomi di Provinsi Aceh. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten seperti pemerintah dan akademisi yang bergelut dibidang Ekonomi terutama ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dapat membantu semua pihak dalam menangani investasi di lingkungannya masing-masing. Penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh agar dapat menyusun langkah-langkah strategis dalam peningkatan investasi.
2. Badan Investasi dan Promosi Provinsi Aceh, agar dapat memaksimalkan potensi investasi di Provinsi Aceh.
3. Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia agar dapat mengoptimalkan semua program yang sudah direncanakan.
4. Asosiasi Pengusaha dan Himpunan Pengusaha Muda yang ada di Provinsi Aceh.
5. Pemerintah legislatif dan eksekutif Provinsi Aceh.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh
7. Peneliti berikutnya sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang sama pada bidang ekonomi khususnya investasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi Peningkatan Investasi

1. Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos* yang berasal dari kata *stratos* yang berarti militer *Ag* yang artinya pemimpin. Strategi dalam konteks awal diartikan sebagai *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan peperangan.¹ Pada awalnya konsep strategi didefinisikan sebagai berbagai cara untuk mencapai tujuan. Konsep generik ini terutama sesuai dengan perkembangan awal penggunaan konsep strategi yang digunakan dalam dunia militer.²

Strategi adalah pola fundamental dari tujuan-tujuan sekarang dan yang akan terencana, penyebaran sumber daya, dan interaksi dari sebuah organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Strategi harus menentukan, 1. Apa yang akan dicapai, 2. Dimana fokus perusahaan, 3. Bagaimana sumberdaya dan aktivitas apa yang akan dialokasikan untuk setiap pasar guna memenuhi peluang lingkungan dan ancaman untuk meraih suatu keunggulan kompetitif.³

Menurut Hamel dan Prahalad pengertian strategi adalah tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir dimulai dari apa yang terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.⁴

¹ Setiawan Hari Purnomo dan Zulkiefli Mansyah, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), h. 8.

² Ismail Solihin, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 24.

³ Hendri Simamora, *Manajemen Pemasaran Internasional*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 214-215.

⁴ Husein Umar, *Strategic Management in Action*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Sedangkan secara terminologi banyak ahli telah mengemukakan definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya kesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, diantara para ahli yang merumuskan tentang definisi strategi tersebut salah satu proses dimana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran.

Menurut Thomson (dalam Oliver) strategi adalah sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir. Hasil akhir dalam hal ini menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Ada strategi luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi kompetitif untuk masing-masing aktifitas.⁵

Jatmiko mendefenisikan strategi sebagai suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan internal organisasi.⁶

David mengartikan strategi adalah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang, merupakan tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan/organisasi dalam jumlah yang besar. Selain itu ditegaskan juga bahwa strategi dapat mempengaruhi kemakmuran perusahaan/organisasi dalam jangka panjang dan berorientasi masa depan. Strategi memiliki konsekuensi yang multifungsi dan multidimensi serta perlu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal yang dihadapi perusahaan/organisasi.⁷

Sedangkan Pearce dan Robin mengartikan strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi.⁸ Strategi adalah hal menetapkan arah kepada manajemen dalam arti orang tentang sumber daya di dalam bisnis dan

⁵ Sandra Oliver, *Strategi Publik Relation*. (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 2.

⁶ Rammad Dwi Jatmiko, *Manajemen Strategik*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2003), Volume 6, Nomor 1, 2018: 501-514, h. 4.

⁷ Fred R. David, *Manajemen Strategis*, Terj. Ichsan Setiyo Budi, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 16-17.

⁸ John A. Pearce II dan Richard B. Robinson Jr., *Manajemen Strategis-Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 6.

tentang bagaimana mengidentifikasi kondisi yang memberikan keuntungan terbaik untuk membantu memenangkan persaingan di dalam pasar. Dengan kata lain, definisi strategi mengandung dua komponen, yakni; future intentions (tujuan jangka panjang) dan competitive advantage (keunggulan bersaing).⁹ Keduanya ini merupakan sebuah kombinasi akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan akhir tersebut.

Strategi adalah program yang luas untuk mencapai tujuan organisasi, berarti bagaimana cara melaksanakan misinya. Kata “program” dalam definisi ini mencerminkan peranan yang aktif, sadar, dan rasional yang dilakukan oleh para manajer dalam merumuskan strategi organisasi. Suatu strategi menetapkan arah yang terpadu dari berbagai tujuannya, dan membimbing penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk menggerakkan organisasi ke arah tujuan itu.¹⁰ Strategi juga dapat diartikan sebagai pola tanggapan organisasi pada lingkungannya dalam suatu kurun waktu. Strategi menghubungkan manusia dan sumber daya lainnya dalam suatu organisasi disatu pihak dengan tantangan dan resiko yang datang dari dunia luarnya di pihak lain.¹¹

Dari beberapa pengertian di atas strategi yang dimaksud dalam konteks ini adalah cara atau sarana yang digunakan untuk memperoleh keberhasilan dan kesuksesan dalam mencapai tujuan akhir (sasaran). Strategi di sini digunakan sebagai pedoman untuk mencapai sasaran yang dicita-citakan oleh suatu lembaga, sehingga lembaga pendidikan tersebut dapat terus berkembang dan mampu mempertahankan eksistensinya.

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan

⁹ Crown Dirgantoro, *Manajemen Strategik: Konsep, Kasus, dan Implementasi*, (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 5-6.

¹⁰ Rustam Effendy, *Dasar-dasar Manajemen Modern*, (Malang: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, tt), h. 59.

¹¹ *Ibid.*

lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang). Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.¹²

Menurut Fred R. David strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Merupakan aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan dan berorientasi pada masa yang akan datang.¹³

2. Manajemen Strategi

Manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan.¹⁴ Manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Thomas Wheelen dkk, manajemen strategi adalah serangkaian dari pada keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan tersebut terdiri dari perumusan/perencanaan strategi, pelaksanaan/implementasi dan evaluasi.¹⁵ Menurut Bambang Haryadi¹⁶ strategi manajemen adalah suatu proses yang dirancang secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, menjalankan strategi dan mengevaluasi strategi dalam rangka menyediakan nilai-nilai yang terbaik bagi seluruh pelanggan untuk mewujudkan visi organisasi. Menurut Mulyadi, Manajemen strategi adalah suatu proses yang

¹² David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: Andi, 2003).

¹³ Fred R. David, *Strategic Management Manajemen Strategi Konsep, Edisi 12*. (Jakarta: Salemba Empat, 2011) h. 18

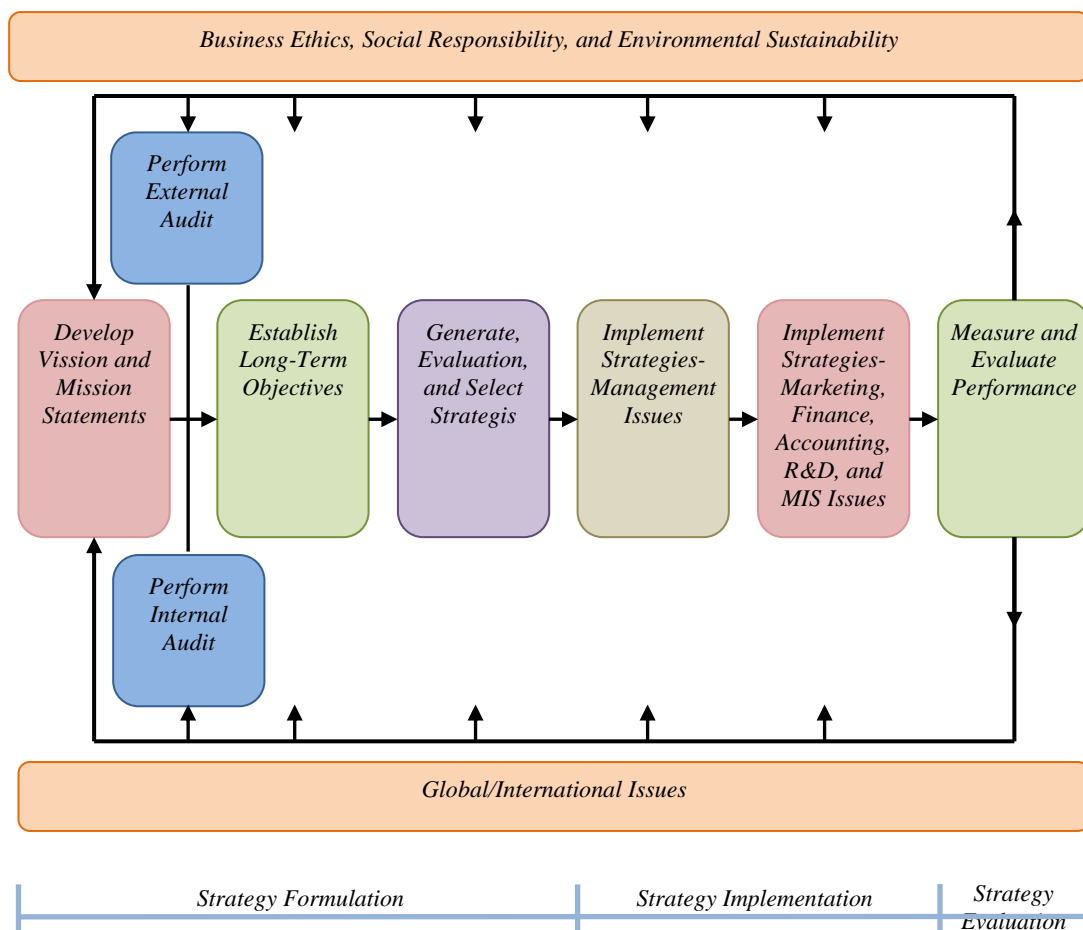
¹⁴ Fred David, *Ibid.*, h. 6

¹⁵ Wheelen, Thomas L., Hunger, J. David. 2010. *Strategic Management and Business Policy Achieving Sustainability*. Twelfth Edition. Pearson. h. 105.

¹⁶ Bambang Hariadi, *Strategi Manajemen*. (Malang: Banyumedia Publishing, 2005). h. 3.

digunakan oleh manajer dan karyawan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi.¹⁷

Manajemen strategi berawal dari mengidentifikasi visi organisasi yang sudah ada, misi, tujuan, dan strategi adalah titik awal yang logis untuk manajemen strategis karena situasi sekarang perusahaan dan kondisi dapat menghalangi strategi tertentu dan bahkan mungkin mendikte tindakan tertentu. Setiap organisasi memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi, bahkan jika unsur-unsur ini tidak sadar dirancang, ditulis, atau dikomunikasikan. Manajemen strategi memiliki tahapan atau proses yang disusun dan terstruktur dalam bentuk model seperti gambar di bawah ini.¹⁸



Gambar 2.1 Proses dan Tahapan Manajemen Strategi

¹⁷ Mulyadi, *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 40

¹⁸ Freed David, *Ibid.*, h. 15

David menjelaskan bahwa proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

a. Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*)

Perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi, yang mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

b. Implementasi Strategi (*Strategy Implemented*)

Implementasi strategi adalah tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi yang ditetapkan. Penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi.

c. Evaluasi Strategi (*Strategy Evaluation*)

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik; Evaluasi strategi adalah alat utama untuk memperoleh informasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. Dalam penilaian strategi terdapat tiga aktivitas penilaian yang mendasar, yaitu: Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, Pengukuran kinerja, dan 3). Pengambilan langkah korektif. Penilaian strategi sangat diperlukan oleh suatu perusahaan karena strategi yang berhasil untuk saat ini tidak selalu berhasil untuk di masa yang akan datang.¹⁹

¹⁹ Freed David, *Ibid*.,.....h. 15

3. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan keseluruhan kegiatan pilihan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah rencana strategi. Ini merupakan proses untuk menjalankan strategi dan kebijakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Wheelen dan Hunger menjelaskan sebelum mengimplementasikan strategi para manajer meski terlebih dahulu menjawab pertanyaan-pertanyaan penting berikut ini: Siapa yang akan menjalankan rencana strategis, apa yang mesti dilakukan, bagaimana cara menjalankan rencana strategis itu, apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan rencana strategis itu.²⁰

Ada 10 masalah yang paling sering dijumpai organisasi saat mengimplementasikan strategi yang telah dirumuskan. Yaitu sebagai berikut:

- a. Implementasi berjalan lebih lambat daripada yang direncanakan
- b. Ada masalah besar yang tidak terantisipasi
- c. Koordinasi kegiatan yang tidak efektif
- d. Kegiatan yang saling bersaing dan krisis yang mengalihkan perhatian dari implementasi
- e. Kemampuan tenaga kerja yang terlibat tidak memadai
- f. Pelatihan dan pembelajaran yang tidak memadai
- g. Faktor-faktor lingkungan eksternal yang tidak dapat dikontrol
- h. Kepemimpinan dan arahan menejer yang tidak memadai
- i. Lemahnya pendefinisian kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas implementasi yang pokok
- j. Lemahnya monitoring kegiatan melalui sistem informasi.²¹

4. Jenis-jenis Strategi

Menurut Rangkuti pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan 3 tipe strategi yaitu, strategi manajemen, strategi investasi dan strategi bisnis.

²⁰ Thomas L. Wheelen dan David J. Hunger, *Concept Instrategic Management and Business Policy*, (India: Pearson Education, 2011).

²¹ Yosai Triantara, *Manajemen Strategis Publik Relation*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 35-36.

- a. Strategi Manajemen, meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro, misalnya: strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan, dan sebagainya.
- b. Strategi Investasi, merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi, misalnya: apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi, dan sebagainya.
- c. Strategi Bisnis, sering juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya : strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.²²

5. Strategi Perspektif Ekonomi Syariah

Perkembangan ilmu manajemen modern yang ada saat ini termasuk manajemen strategi tidak luput atau bahkan sangat sarat dipengaruhi paham sekulerisme. Menjadi tugas setiap muslim, khususnya para cendekiawan, untuk membangun wacana dan praktik manajemen dengan paradigma baru yang terbatas dari paham sekuler. Kehendak seperti itulah yang diwujudkan dalam disertasi ini. Basis pemahaman terhadap ilmu manajemen strategis konvensional sebagaimana diuraikan di atas, uraian dalam disertasi ini memuat internalisasi nilai-nilai Islam dan sejumlah korelasi terhadap materi manajemen strategis.

Dalam Islam, setiap kegiatan atau aktivitas seorang muslim selalu didasarkan pada tauhid dan syari'at Islam. Dengan demikian, keberadaan manajemen organisasi harus dipandang pula sebagai suatu sarana untuk memudahkan implementasi Islam dalam kegiatan organisasi.

²² Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 21

Menurut Yusanto dan Widjajakusuma:

Manajemen strategis perspektif Islami bagi suatu organisasi memiliki sembilan karakter khas yang membedakan dengan manajemen strategis konvensional. Perbedaannya kesembilan karakter tersebut ditinjau dari aspek-aspek: 1) Asas; 2) motivasi; 3) Orientasi; 4) Strategi induk; 5) Strategi fungsional operasi; 6) Strategi fungsional keuangan; 7) Strategi fungsional pemasaran; 8) Strategi fungsional SDI; dan 9) Sumberdaya.²³

Strategi menurut Islam mengandung makna pengelolaan agar menjadi lebih baik dalam koridor kebenaran sesuai syariah, tidak menghalalkan segala cara, organisasi rapi, dan itqan (tepat, tuntas, professional), mengundang kemaslahatan dunia hingga akhirat. Penggunaan strategi yang berbasis Islam mutlak diperlukan dalam penerapan Manajemen Strategi Syariah (MMS) baik lembaga. Perlunya strategi yang Islami dalam setiap aktivitas umat atau organisasi dan lembaga dan perusahaan berdasarkan firman Allah dalam Alquran:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنِينَ مَرصُوصٌ

Artinya: *Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.* (QS. Ash-Shaff, 61: 4)²⁴

Dalam bukunya Abdul Halim Usman, menemukan teori baru tentang manajemen strategi syariah yang dinamakan *Five Power of The Sharia Strategic Management* (lima kekuatan manajemen strategi syariah), untuk mendapatkan hasil yang optimal, kelima teori ini harus diimplementasikan secara keseluruhan, sehingga mempinyai kekuatan yang sempurna, kelima teori tersebut sebagai berikut:²⁵

a. Teori 1: Azas Tauhid Pada Organisasi Atau Lembaga

Penetapan azas tauhid sebagai landasan segala aktivitas organisasi, dengan keyakinan mutlak bahwa Allah SWT sebagai Penguasa dan

²³ Abdul Halim Usman. *Manajemen Strategis Syariah, Teori, Konsep & Aplikasi*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), h. 57-58.

²⁴ Departemen Agama RI, *Quran dan Terjemahnya*, Cet. Ke 13, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2013), h. 552.

²⁵ Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah, Teori, Konsep & Aplikasi*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), h. 74-75.

pengatur segala kehidupan makhluk di dunia ini, dan dengan berserah diri secara totalitas hanya kepada-Nya, akan menambah keyakinan bagi manajemen untuk berhasil mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan yang lebih baik dan bermaslahat dunia akhirat.

b. Teori 2: Orientasi Duniawi-Ukhrawi

Menetapkan tujuan perusahaan berorientasi duniawi-ukhrawi, yaitu memperoleh profit duniawi sekaligus benefit ukhrawi, akan memberi ketenangan, ketentraman dan kepuasan dalam bekerja dan beraktivitas sehingga diperoleh kebahagiaan dalam menjalankan organisasi.

c. Teori 3: Motivasi Mardhatillah

Dengan motivasi mardhatillah yaitu semua aktivitas organisasi perusahaan diniatkan semata-mata karena Allah serta mengharapkan pahala dan ridha Allah SWT, akan memberi dorongan yang lebih kuat bagi manajemen untuk mencapai keberhasilan usahanya di dunia hingga akhirat.

d. Teori 4 : Keyakinan Ubudiyah dalam bekerja

Dengan keyakinan ubudiyah yaitu meyakini bahwa bekerja adalah ibadah di mana segala aktivitas dalam organisasi semata-mata diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT, akan memberi kekuatan bagi manajemen untuk menghadapi dan mengatasi berbagai kendala dan rintangan serta memberi ketenangan, kepuasan, dan kebahagiaan dalam bekerja dan beraktivitas demi mengharapkan keberkahan dan keridhaan Allah SWT.

e. Teori 5: Kesadaran Ihsaniyah dalam bekerja

Dengan kesadaran ihsaniyah yaitu meyakini bahwa segala aktivitas perusahaan merupakan amal saleh yang senantiasa diketahui dan dalam pengawasan Allah SWT, akan mendorong manajemen untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, jujur, amanah, dan itqan tanpa harus diawasi oleh atasan, sehingga mendorong tercapainya hasil dan kinerja yang terbaik.

B. Investasi dan Keamanan

1. Pengertian Investasi

Teori investasi dipelopori oleh John Dunning, Teori ini menjelaskan bahwa untuk terjadinya investasi diperlukan 3 (tiga) pilar utama, yaitu: *Ownership* (kepemilikan modal), *Location Determinant* (lokasi tempat tujuan investasi) dan *Internalization* (internalisasi). Ketiga pilar ini dirangkai dalam sebuah singkatan, yaitu *O-L-I theory*. *Ownership* adalah faktor kepemilikan modal, dimana modal ini dimiliki oleh pihak pemilik modal (investor), baik investor dalam negeri maupun investor asing. Sebuah perusahaan tidak akan berinvestasi di negara lain jika biaya produksi terlalu tinggi. Motivasi utama yang mendorong sebuah perusahaan berinvestasi di luar negeri adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dengan kata lain, perusahaan akan berinvestasi di luar negeri jika keuntungan yang diharapkan lebih tinggi dari biaya produksi.²⁶ Lokasi tempat investasi. Faktor ini berhubungan dengan suatu potensi alami pasar yang bersangkutan. Tujuan investasi yang ditawarkan investasi bagi para investor negara tuan rumah bagi perusahaan asing yang melakukan investasi di negara tersebut. Faktor lingkungan termasuk dukungan sumber daya alam, sumber daya lingkungan, pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial, pertumbuhan ekonomi, biaya tenaga kerja, penegakan hukum, kestabilan politik, institusi pemerintahan, kebijakan pemerintah, peraturan pemerintah, dan sistem perpajakan yang merupakan pilar penentu yang ikut memberi pengaruh besar bagi investor dalam membuat keputusan investasi²⁷ dan yang terakhir internalisasi. Pilar internalisasi ini berkaitan dengan rasionalisasi mengapa investor tersebut menanamkan modalnya di tempat lain dimana perusahaan asal berhak mengontrol perusahaannya di tempat investasi berlangsung.²⁸

Teori-teori tentang investasi yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi diantaranya adalah teori Keynes (teori *multiplier*). Keynes mengatakan bahwa

²⁶ Azhari Yahya, *The Location Determinant and Provincial Distribution of Foreign Direct Investment in Indonesia*, Research Project paper, (Australian National University: Crawford School of Economics and Government, 2007), h. 11.

²⁷ *Ibid.*, h. 12.

²⁸ *Ibid.*, h. 13.

untuk mempengaruhi jalannya perekonomian pemerintah dapat memperbesar anggaran pengeluaran saat perekonomian mengalami kelesuan (*recession*) sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akhirnya pendapatan riil masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Terjadinya *mutiplier effect* akan menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi ke arah yang lebih dinamis, yaitu terciptanya lapangan pekerjaan yang disebabkan oleh tingginya pendapatan masyarakat secara otomatis berpengaruh kepada peningkatan kebutuhan masyarakat dan dibutuhkannya sumber-sumber produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Investasi mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Alasannya yaitu investasi mampu menciptakan pendapatan dan investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stock modal.²⁹

Nanga mengemukakan bahwa investasi merupakan pengeluaran perusahaan secara keseluruhan yang mencakup pengeluaran untuk membeli bahan baku, mesin-mesin dan peralatan pabrik serta semua peralatan modal lain yang diperlukan dalam proses produksi. Pengeluaran untuk keperluan bangunan kantor, pabrik tempat tinggal karyawan dan bangunan konstruksi lainnya. Perubahan nilai stok atau barang cadangan sebagai akibat dari perubahan jumlah dan harga.³⁰

Investasi merupakan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Menurut Sukirno³¹ kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Hal ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja, pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dan investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

²⁹ Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara dan Longman, 2000), h. 43

³⁰ Muana Nanga, *Makro Ekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h 20

³¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Rajawali, 2000), h. 443.

Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri maupun investasi asing.³²

Investasi telah menjadi variabel penting dalam mendorong terciptanya pembangunan ekonomi. Upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penciptaan lapangan kerja baru, serta penanggulangan kemiskinan pada akhirnya menempatkan investasi sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi. Menurut Mankiw³³ bahwa investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Pertambahan investasi kemudian akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan perkataan lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi sesuatu perekonomian.³⁴

Menurut Reilly dan Brown Investasi adalah komitmen untuk mengikatkan aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor berupa: (1) keterikatan aset pada waktu tertentu, (2) tingkat inflasi, dan (3) ketidakpastian penghasilan di masa mendatang.³⁵

³² Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, Edisi Ketiga. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 108.

³³ N. Gregory Mankiw, *Macro Economics*, (New York: Worth Publisher Inc, 2007), h. 186.

³⁴ Hadi Sasana, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi swasta di Jawa Tengah. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 1(1), 2008, h. 1-10.

³⁵ Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2008), h. 11.

2. Hubungan Investasi dan Keamanan

a. Investasi

Di Indonesia ada dua jenis investasi, yang pertama adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan yang kedua adalah Penanaman Modal Asing (PMA). Menurut Panjaitan, Penanaman Modal Asing adalah satu kegiatan penanaman modal yang didalamnya terdapat unsur asing (*foreign element*) yang ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal, dan sebagainya. Dalam penanaman modal asing, modal yang ditanam merupakan modal milik asing maupun modal patungan antara modal milik asing dengan modal dalam negeri. Sedangkan pengertian penanaman modal dalam negeri (PMDN) menurut UU No.6 tahun 1968 adalah penggunaan modal dalam negeri (yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-haknya dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan usaha) bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.³⁶

b. Iklim Investasi

Iklim investasi dalam pengertian konseptual dan kontekstual adalah sebuah kondisi yang tercipta dari berbagai dimensi yang saling tarik-menarik. Iklim Investasi merupakan salah satu yang paling esensial namun paling sulit diukur secara kuantitatif. Namun pada kenyataannya dalam laporan Survey Iklim Investasi, dalam dunia nyata seorang investor yang akan menanamkan modalnya pada suatu bidang usaha tertentu akan selalu memperhatikan faktor-faktor keamanan lingkungan, ketertiban umum, kepastian hukum, status lahan investasi dan dukungan pemerintah menjamin keberlangsungan investasi.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Stern, menurutnya iklim investasi adalah semua hal terkait kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan yang berlangsung atau sedang direncanakan yang bisa mempengaruhi tingkat resiko

³⁶ Ardani Januar, *Keterkaitan Antara Iklim Investasi Berdasarkan Persepsi Pelaku Usaha dan Realisasi Investasi: Kasus Provinsi Barat*, (Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi dan Manajemen IPB, 2009), h. 8-9.

pengembalian suatu investasi. Lalu Stern lebih dalam menjelaskan bahwa ada 3 faktor utama yang menentukan Iklim Investasi seperti;³⁷

- 1) Kondisi ekonomi makro, termasuk stabilitas ekonomi, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial politik.
- 2) Kepemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil.
- 3) Kepemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan, keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil.

c. Penegakan Hukum

Prinsip penegakan hukum harus dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan dirasakan langsung oleh masyarakat bahwa produk hukum tersebut memang berguna untuk mereka. Walaupun, hingga saat ini, masih ditemukan di beberapa kasus apa yang dianggap berguna dimata masyarakat belum tentu adil dihadapan hukum atau sebaliknya.

Hal tersebut juga diutarakan oleh Radbruch, menurutnya hukum harus memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum yakni keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, Radbruch mengakui bahwa diantara 3 nilai dasar hukum tersebut terdapat suatu ketegangan dan saling menegasikan, hal tersebut dikarenakan 3 nilai dasar hukum memang mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya.³⁸

Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan gagasan ideal terkait pelaksanaan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Maka dari itu, Penegakan hukum pada hakekatnya adalah sebuah upaya memastikan norma-

³⁷ Economics and Research Department Development Indicators and Policy Research Division, *Jalan Menuju Pemulihan Memperbaiki Iklim Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Asian Development Bank, 2005), h. 3.

³⁸ Radbruch dalam Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 21.

norma hukum dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁹

Penegakan hukum adalah faktor yang dominan mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kuatnya penegakan hukum akan memperkuat kepercayaan investor yang berujung pada kepastian atas keamanan investasinya. Begitupun sebaliknya. Akibat dari lemahnya penegakan hukum dapat menimbulkan korupsi, kolusi, nepotisme dan persaingan yang tidak sehat yang membuat para investor melarikan modalnya ke negara lain.

Memperkuat penegakan hukum pada sektor penanaman modal berarti memberikan jaminan serta perlindungan hukum kepada para investor. Jaminan terhadap perlindungan dan penegakan hukum akan menghindari penanam modal dari berbagai risiko politik dan sosial yang dapat membawa kerugian besar bagi penanam modal. Risiko politik dan sosial terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan ketidakjelasan perundang-undangan di Indonesia.

d. Stabilitas Politik

Dalam dunia investasi, salah satu syarat fundamental untuk menopang elemen-elemen pembangun ekonomi adalah stabilitas politik. Stabilitas politik sangat berkaitan erat dengan partisipasi warga negara dan aktivitas kelembagaan negara. Kedua elemen tersebut yang dapat menentukan stabil atau tidaknya situasi politik negara ini. Selain itu, menurut Plano, stabilitas politik merupakan suatu kondisi dari sebuah sistem politik yang komponen dan elemennya tidak mengalami perubahan dari batasan-batasan yang telah disepakati bersama.⁴⁰

Stabilitas politik mempengaruhi iklim investasi, semakin situasi politik di sebuah negara tidak menentu, sudah dapat dipastikan tingkat kepercayaan investor untuk menanamkan modal semakin rendah. Para penanam modal memang membutuhkan dinamika politik yang lebih stabil untuk mengeksekusi rencana investasi mereka di Indonesia. Bila banyak kebijakan pemerintah dibuat

³⁹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberti, 2007), h. 32.

⁴⁰ Jack C. Plano, *Kamus Analisa Politik*, (Jakarta: Rajawali, 1989), h. 249.

untuk mempermudah investasi tapi tidak dibarengi kondisi politik yang kondusif akan menghasilkan sesuatu yang sia-sia.

e. Stabilitas Sosial

Stabilitas sosial adalah suatu kondisi dimana masyarakat mampu menghadapi perubahan, ancaman, tantangan, hambatan dan secara langsung maupun tidak langsung yang mengganggu ketertiban umum. Stabilitas sosial merupakan wujud kehidupan yang teratur sesuai perundang-undangan yang berlaku guna membangun masyarakat yang dinamis, aman dan bebas dari gangguan ancaman yang menyebabkan ketakutan secara psikis maupun fisik.

Stabilitas sosial sangat diperlukan disektor investasi. Karena tidak ada investor yang mau menanamkan modalnya dilingkungan masyarakat yang tidak stabil. Investasi tidak bisa berjalan secara optimal bilamana masih terjadi konflik horizontal dimasyarakat, demonstrasi yang mengganggu ketertiban umum, tindakan premanisme, kasus pencurian, pemalakan dan penyimpangan sosial lainnya.

f. Akuntabilitas Kelembagaan

Akuntabilitas kelembagaan adalah pertanggungjawaban dari lembaga atau institusi yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal. akuntabilitas kelembagaan ada 5 dimensi⁴¹:

- 1) *Akuntabilitas hukum*, terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

⁴¹ Syahrudin Rasul, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*, (Jakarta: PNRI, 2003), h. 11.

- 2) *Akuntabilitas manajerial*, yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
- 3) *Akuntabilitas program*, juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan progra
- 4) *Akuntabilitas kebijakan*, lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.
- 5) *Akuntabilitas financial*, ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

g. Mitigasi Bencana

Mitigasi Bencana merupakan suatu bentuk skema penanggulan kebencanaan yang dilihat dari berbagai faktor-faktor internal dan eksternal. Mitigasi kebencanaan memetakan wilayah-wilayah yang memiliki potensi terhadap bencana. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap apa yang akan terjadi. Mitigasi bencana diperlukan bukan hanya sebagai antisipasi tetapi juga sebagai pembuatan standar aktifitas apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan selama masa normal. Hal ini tentunya sebagai meminimalisir terjadi ancaman-ancaman kebencanaan.

Dalam sebuah rencana investasi kajian mitigasi bencana menjadi hal yang sangat penting. Hal ini karena dengan adanya mitigasi bencana para investor dapat mengetahui apakah wilayah industri atau proyek investasi yang dikerjakan memiliki tingkat kerawanan tertentu, dan sudah memiliki skema antisipasi serta penanganan kebencanaan. Pemetaan wilayah yang memiliki potensi kebencanaan akan menjadi pertimbangan dari investor untuk menilai tingkat keamanan atas wilayah tersebut.

3. Indeks Keamanan Investasi Indonesia

Indeks keamanan investasi merupakan suatu skala penilaian atas tingkat keamanan untuk berinvestasi. Pada dasarnya keamanan investasi merupakan sebuah bentuk jaminan negara kepada *private sector* untuk mau berinvestasi dan mengembangkan usahanya dalam skala yang lebih luas. Pada pembahasan sebelumnya mengenai aspek indeks keamanan investasi yang berupa penegakan hukum, stabilitas politik, stabilitas sosial, dan akuntabilitas kelembagaan diperlukan *pertama*, konseptualisasi atas pengertian mengenai indeks keamanan investasi indonesia sebagai mempermudah memahami konsep seperti apa yang akan dijelaskan dan di jadikan acuan dalam melihat indeks keamanan Indonesia. *Kedua*, kontekstualisasi indeks keamanan indonesia yang sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai gambaran akan ciri khas pendekatan yang akan dilakukan dalam melihat kondisi keamanan investasi indonesia. *Ketiga*, operasionalisasi pendekatan dan penanganan keamanan investasi indonesia.

a. Konseptualisasi Keamanan Investasi

Investasi merupakan kegiatan penempatan atau pengalokasian modal untuk pembelian alat produksi ataupun bentuk-bentuk kekayaan lain yang mampu diakumulasikan menjadi keuntungan di masa depan.⁴² Kegiatan investasi sesuai pengertiannya ialah bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari besarnya modal yang dimiliki saat ini. Dalam hal ini ada sebagian modal yang disisihkan dari individu atau perusahaan yang nantinya diharapkan akan terakumulasi jika modal

⁴² Carolyn Kousky, *Private Investment and Government Protection*, (New York: Springer Science, 2006), h. 78.

tersebut di investasikan. Konsekuensi dari kegiatan investasi adalah adanya resiko ketidakpastian apakah modal yang diinvestasikan akan mendapatkan keuntungan atau justru menyebabkan kerugian dengan hilangnya modal dan alat produksi.

Investasi pada dasarnya di bagi menjadi dua yaitu *pertama*, Investasi pada finansial aset. Investasi pada finansial aset dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu investasi pada finansial aset yang dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang dan lainnya. Investasi pada finansial aset yang dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi dan lainnya.

Kedua, investasi pada real aset. Investasi pada real aset diwujudkan dalam bentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya. Investasi pada real aset termasuk dalam *capital budgeting*, yaitu merupakan keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pengeluaran dana, di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut lebih dari setahun.

Dengan demikian *capital budgeting* mempunyai arti yang sangat penting bagi perusahaan, karena:⁴³

- 1) Dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Ini berarti bahwa perusahaan harus menunggu selama waktu yang panjang atau lama sampai keseluruhan dana yang tertanam dapat diperoleh kembali oleh perusahaan.
- 2) Investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Kesalahan dalam mengadakan *forecasting* akan dapat mengakibatkan adanya *over investment* atau *under investment* dalam aktiva tetap. Apabila *over investment* akan memberikan beban tetap yang besar bagi perusahaan. Sebaliknya jika *under investment* akan mengakibatkan kekurangan peralatan, yang ini dapat mengakibatkan perusahaan bekerja dengan harga pokok yang tinggi sehingga mengurangi daya bersaingnya atau kemungkinan lain ialah kehilangan sebagian dari pasar bagi produknya.

⁴³ Rafael La Porta, dkk, *Investor Protection and Corporate Governance*, Journal Of Financial Economics, vol 58. (Cambridge: Elsevier, 2000), h. 6.

- 3) Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Jumlah dana yang besar itu mungkin tidak dapat diperoleh dalam jangka waktu yang pendek atau mungkin tidak dapat diperoleh sekaligus.
- 4) Kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal tersebut akan mempunyai akibat yang panjang dan berat. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian.

Pada konteks indeks keamanan investasi yang dibuat adalah investasi dalam bentuk sektor riil. Untuk melakukan pembangunan investasi disektor riil, pemerintah harus melakukan banyak pembenahan di berbagai bidang seperti stabilitas politik dan keamanan, infrastruktur. Di Indonesia, selain buruknya infrastruktur, faktor keamanan juga menjadi kendala utama yang membuat investor dalam negeri maupun asing enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Tidak tegasnya pemerintah dalam menangani kasus-kasus kerusuhan, menyebabkan banyak kejadian serupa terjadi di berbagai daerah. Penegakan supremasi hukum yang masih tergolong rendah menyebabkan banyak hal yang tidak mendukung terciptanya kondisi investasi yang kondusif. Pada dasarnya keamanan investasi merupakan suatu kondisi terjaminnya aset investor dalam menjalani usaha atas gangguan-gangguan yang dapat menyebabkan kerugian.

Konsep keamanan tidak hanya sebatas pada kemanan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Namun juga aman terhadap gangguan bencana alam. Resiko akan kerusakan yang diakibatkan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan angin puting beliung mampu membuat kerusakan aset-aset produksi. Pendekatan terhadap keamanan dari bencana alam yang belum mendapat perhatian khusus di beberapa daerah. Perlindungan investasi dari bencana alam membutuhkan sebuah asesmen penelitian untuk melihat potensi bencana di suatu daerah kawasan industri.

Namun, jangan dilupakan bahwa pemerintah juga harus bekerja keras melakukan pembenahan di banyak bidang yang menjadi masalah dan keluhan para investor yang ingin atau telah menanamkan modal di Indonesia. Seperti perbaikan infrastruktur, pengefisiensian birokrasi, pemberantasan pungli, korupsi,

kolusi, nepotisme serta pemberian kepastian hukum dan peraturan. Kondisi Indonesia yang seperti ini menimbulkan *high cost economy*. Lalu yang terjadi adalah inefisiensi ekonomi terutama dalam proses pemasaran distribusi, pemasaran dan produksi. Hal ini yang menjadi kendala utama pemerintah untuk menarik investor guna menanamkan modalnya di Indonesia.

Bila pembenahan telah dilakukan, maka proses pemasaran, distribusi dan produksi akan lebih lancar dan menjadi efisien secara ekonomi. Dengan demikian pemerintah dapat meningkatkan investasi di sektor riil. Kondisi ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkualitas. Pertumbuhan ekonomi ini berkualitas tinggi karena selain berorientasi jangka panjang, hal ini juga membuka kesempatan kerja baru serta mempercepat alih teknologi yang membantu meningkatkan kapasitas produksi di Indonesia.

Dengan perbaikan infrastruktur maka keamanan untuk berinvestasi dalam hal efisiensi budgeting sehingga membuat ongkos produksi kecil sehingga membuat aman pengusaha dari segi kemudahan berusaha. Hal ini berpengaruh jika infrastruktur seperti energi tidak terpenuhi maka proses produksi tidak akan mencapai target dan investor akan mengalami kerugian. Maka pemenuhan keamanan bagi investor mencakup banyak aspek yang tujuan utama adalah memperlancar proses produksi dari perusahaan.

b. Kontekstualisasi Keamanan Investasi

Keamanan investasi pada setiap negara dan juga daerah diperlukan pendekatan yang berbeda-beda, sebab konteks permasalahannya pun yang akan dihadapi berbeda pula. Pada pembahasan aspek keamanan investasi, konteks penegakan hukum menjadi hal yang universal terjadi di setiap negara. Sebab dengan penegakan hukum keterjaminan investasi atas perlindungan aset menjadi kenyamanan dan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya.

Pada Keppres No. 63 tahun 2004 tentang pengamanan objek vital nasional dan Permen Perindustrian tentang pengamanan objek vital industri dijelaskan bahwa kawasan industri masuk dalam objek vital nasional yang harus dilindungi jika terdapat gangguan. Namun koordinasi dalam penanganan objek kawasan

industri antara kepolisian dengan pihak swasta dan pemerintah belum tertuang dalam bentuk kerja sama yang terstruktur di daerah-daerah. Hal ini untuk menjamin hak kepemilikan properti bagi pengusaha. Kawasan industri yang di jadikan objek vital nasional tentunya memiliki tingkat dan perlakuan keamanan yang ketat. Hal ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun kepercayaan investor. Sampai saat ini baru 14 kawasan industri dan 49 perusahaan yang termasuk dalam Objek Vital Nasional sektor Industri (OVNI). Ke 49 perusahaan ini mendapatkan sertifikat yang dinyatakan sebagai OVNI. Sertifikat ini merupakan pengakuan dari negara bahwa kawasan industri dan perusahaan tersebut harus mendapatkan pengamanan yang lebih. Hal ini sudah tertuang dalam pembuatan pedoman kerja antara POLRI dan Kementerian Perindustrian.

Penjaminan terhadap Hak Kekayaan Intelektual atau HKI juga menjadi prioritas dalam dunia usaha. Dalam dunia yang sudah demikian terbuka akan kompetisi dan akses informasi bisa didapatkan begitu mudah, konsekuensi yang terjadi adalah dapat terjadi peniruan atas karya atau hasil orang lain. Hal ini tentu akan merugikan karena hilangnya klaim atas hasil karya yang diciptakan seseorang atau perusahaan. Pemerintah Indonesia telah memiliki UU yang mengatur HKI yaitu UU No 28 Tahun 2014. Bagi investor jaminan atas hak paten atas karya dari produk mereka akan menciptakan kepastian berusaha, terutama bagi industri musik, film, dan industri software komputer. Ketiga jenis industri tersebut sangat rawan terhadap pembajakan, dan di Indonesia industri tersebut belum masuk sebagai industri yang strategis karena para seniman atau investor tidak mendapat jaminan atas hasil karya mereka meskipun UU telah mengatur.

Dalam dunia usaha monopoli adalah sesuatu yang harus di hindari. Karena hal ini akan membuat pemusatan kekuatan ekonomi pada segelintir orang. Persaingan usaha yang sehat merupakan iklim yang membuat investor memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam berkompetisi. Praktek monopoli membuat aset produksi, distribusi dan pasar konsumen hanya dikuasai oleh beberapa orang. Praktek kartel juga merupakan hal yang harus dihilangkan dalam sistem persaingan usaha. Iklim investasi tersebut tidak akan membuat ketertarikan dari investor baru untuk menanamkan modalnya. Indonesia telah memiliki UU Nomor

5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli. Landasan filosofis dari UU tersebut adalah karena Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi yang bertentangan dengan praktek monopoli.

Aspek penegakan hukum menjadi hal yang penting bagi sebuah negara berkembang dengan sistem demokrasi yang masih baru, saling tumpang tindih aturan dan kepentingan menjadi hal yang paling sering terjadi. Oleh karena itu perlu sinergi dalam menerapkan aturan antara pusat dan daerah. Kemudian pada konteks daerah yang rawan konflik, penanganan keamanan investasi pembangunan perlu dilakukan secara persuasif dan koersif. Dalam konteks persuasif, dialog antar stakeholder perlu didahulukan untuk menemukan titik temu setiap pemangku kepentingan. Konflik yang terjadi antara lain konflik agraria, konflik kecemburuan sosial, konflik adat atas nilai-nilai lokal.

Stabilitas politik menjadi aspek penting kedua dalam memahami bagaimana membuat iklim investasi yang bagus bagi para investor. Dalam hal ini Indonesia yang menerapkan desentralisasi kebijakan yang membuat daerah bisa mengeluarkan ijin usaha. Hal ini bisa berdampak negatif dimana struktur kekuasaan lokal akan sangat bertolak belakang dengan kekuasaan pusat dalam menerapkan kebijakan akibatnya raja-raja kecil di daerah akan menjadi penghambat dalam sinergitas kebijakan dalam membuat iklim investasi di daerah-daerah.

Stabilitas politik di daerah juga terkait dengan bagaimana penguasa lokal saling bersaing dalam kontestasi menguasai sektor-sektor bisnis. Kontestasi penguasa lokal berdampak pada semakin tingginya tingkat korupsi kolusi dan nepotisme di daerah, hal ini karena pemerintah daerah akan cenderung memberikan kemudahan proyek bagi pengusaha-pengusaha yang menguntungkan penguasa lokal. Tingkat resiko investasi di daerah juga di tentukan bagaimana integritas kepala daerahnya. Hal ini berkaitan dengan bagaimana sehatnya persaingan usaha di daerah-daerah. Semakin tidak kompetitifnya daerah tersebut dengan adanya monopoli maka setiap investor akan enggan untuk berinvestasi.

Stabilitas politik mencerminkan diperlukannya kesepahaman akan rencana strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek Menengah dan Panjang

yang tidak berubah-ubah dan konsisten untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan dan terarah merupakan cermin dari stabilnya politik nasional dalam merancang konsep pembangunan nasional. Walaupun kekuasaan pemerintahan berganti-ganti tetapi tetap memiliki komitmen untuk membuat iklim investasi yang kondusif. Hal ini menandakan telah matangnya sistem politik suatu negara dan cara berpikir dari pemimpin-pemimpin negara.

Penegakan Hukum dan kestabilan politik juga akan membuat kestabilan sosial, yang akan meredam konflik horizontal dan vertikal. Stabilitas sosial mencerminkan adanya keadilan sosial dan kecilnya ketimpangan ekonomi. Pemantapan nilai-nilai kemajemukan dalam Pancasila dan nilai keadilan sosial menjadi modal dalam menciptakan tertib sosial. Isu-isu yang berkaitan SARA menjadi perhatian khusus di beberapa daerah seperti Jakarta, Papua Barat, Sulawesi, Kalimantan menjadi wilayah yang rentan terhadap isu SARA.

Pengamanan aset-aset produksi dari perusahaan dari tindakan pencurian dan pengrusakan adalah masalah yang penting. Aksi pencurian barang-barang oleh masyarakat dapat menciptakan kerugian bagi investor. Oleh karena itu pengamanan oleh aparat keamanan penting terhadap kawasan-kawasan industri. Selain itu tindakan kekerasan yang terjadi di daerah-daerah yang dilakukan aparat negara, dan masyarakat dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif dan memberikan ancaman kepada pekerja. Protap terhadap pengamanan kekerasan harus melalui pendekatan yang berbeda dengan melakukan pendeteksian lebih dini terhadap benih-benih kekerasan apapun isunya.

Dalam hal mengurangi resiko untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif ada langkah-langkah yang perlu dilakukan selain pendekatan militeristik adalah akuntabilitas kelembagaan. Dalam hal ini lembaga negara mampu memberikan keterbukaan atas kinerja dan informasi mengenai aturan-aturan. Akuntabilitas lembaga juga memberikan jaminan kepada investor atas regulasi yang konsisten dan menghilangkan praktek suap. Investor membutuhkan sebuah lembaga negara yang kredibel dan mau terbuka dalam setiap lelang tender proyek-proyek strategis, agar setiap investor mengetahui segala macam permasalahan dan kendala jika mereka jadi menginvestasikannya.

Praktik pungli saat ini menjadi perhatian dari Pemerintahan Joko Widodo. Hal ini dikarenakan praktek pungli membuat cost produksi dan perusahaan semakin tinggi dan membuat investor enggan menanamkan modalnya karena ingin berusaha saja sudah ditarik biaya. Sistem upeti ini terjadi di hampir semua sektor lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, pembentukan satgas saber pungli adalah tindakan yang tepat dilakukan pemerintah sebagai reson atas melawan praktik pungli. Sistem informasi yang diberikan kepada masyarakat membuat para pengusaha bisa melaporkan dengan cepat dan direspon untuk ditindak lanjuti.

Tantangan ini juga berlaku bagi pemerintah daerah. Perlu ada *political will* dari pemimpin daerah agar mau terbuka terhadap proyek-proyek di daerah serta permasalahan di daerahnya jika ada investor yang ingin menanamkan modalnya. Keterbukaan akses informasi dan kebenaran atas informasi tersebut menjadi modal kepercayaan dari setiap investor.

c. Operasionalisasi Indeks Keamanan Investasi Indonesia

Dalam beberapa pandangan mengenai beberapa konteks keamanan investasi di Indonesia, perlu ada oprasionalisasi mengenai hal apa yang harus dan akan dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pertama, adanya sebuah draft kerjasama antara BKPM, Seluruh Kapolda dan Kapolres se-Indonesia, Gubernur, dan Bupati untuk bersinergi menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini dapat mencakup koordinasi dan wadah untuk berkomunikasi mengenai *update* dan *follow up* setiap masalah keamanan investasi di setiap daerah.

Kedua, dibentuk kajian riset mengenai keamanan investasi dan isu-isu terkait di semua daerah agar dapat dilakukan pendekatan yang komprehensif guna menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Hal ini penting sebab permasalahan di setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri, sehingga pengidentifikasian harus sangat akurat.

Ketiga, Pembuatan UU tata ruang serta peraturan turunannya hingga ke Peraturan Daerah. Pengelolaan tata ruang yang komprehensif dibutuhkan untuk memberikan kepastian kepada Investor tentang peta investasi di Indonesia. Hal ini

akan memudahkan perijinan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan diambil pemerintah dalam mengeluarkan izin investasi, sebab akan bisa diidentifikasi status tata ruang di suatu tempat sebagai apa. Hal ini tentunya juga akan memberikan akses kepada investor untuk menjamin wilayah-wilayah yang potensi sebagai lahan investasi. UU tata ruang juga mampu meminimalisir konflik horizontal dan vertikal sebab pengaturan ini akan melibatkan seluruh stakeholder untuk mendapatkan konsensus tentang wilayah-wilayah mana saja yang dapat dijadikan investasi dan yang bukan.

Keempat, perlu adanya mitigasi kebencanaan untuk memprediksi dan menanggulangi jika terjadi bencana di suatu wilayah industri. Mitigasi bencana ini juga menjadi perhitungan bagi investor dalam melihat bagaimana penanganan dan pencegahan bencana dalam mengamankan investasi mereka.⁴⁴

Investasi merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi yang sangat penting, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional atau daerah. Investasi dikenal dengan dua jenis: investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung adalah dimana investor langsung memperoleh hak atas surat berharga atau kekayaan yang terdiri atas aset riil.⁴⁵ Sedangkan investasi tidak langsung pada umumnya merupakan investasi jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Investasi ini disebut sebagai investasi jangka pendek karena pada umumnya mereka melakukan jual saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan atau mata uang yang hendak mereka perjual belikan.⁴⁶

Investasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun gabungan antara swasta dan pemerintah guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan

⁴⁴ Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas, *Indeks Keamanan Investasi Indonesia*, Kedeputan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2016.

⁴⁵ Murtir Jeddawi, *Memacu Investasi Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UII Press 2005), h. 124.

⁴⁶ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 2.

mencari keuntungan. Adapun empat komponen investasi menurut Mankiw⁴⁷, yaitu:

- a. Investasi perusahaan-perusahaan swasta (*Business Fixed Investment*)
- b. Pengeluaran untuk mendirikan tempat tinggal (*Real Estate Investment*)
- c. Perubahan dalam inventaris perusahaan (*Inventory Investment*)
- d. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah (*Government Investment*)

4. Konflik Keamanan

a. Pengertian Konflik Keamanan

Secara teoritik, konflik diartikan sebagai hubungan dua pihak atau lebih yang memiliki sasaran tidak sejalan.⁴⁸ Dalam sudut pandang sosiologi, konflik dibagi menjadi dua yakni konflik terbuka dan konflik tertutup (*latent*).⁴⁹ Konflik tertutup digambarkan dengan rasa gelisah ataupun resah yang masih tersimpan di dalam hati dan pikiran orang banyak yang tidak diikuti dengan tindakan terhadap pihak lain. Sedangkan, konflik terbuka diartikan sebagai rasa resah yang sudah diiringi langkah fisik kepada pihak lain dan kalau tidak cepat ditanganai akan membawa dampak yang parah dalam masyarakat.⁵⁰

Khusus untuk penyebab konflik, keresahan terjadi ketika adanya beberapa pemicu (*triggers*) dalam situasi yang tengah rentan terjadinya pertikaian.⁵¹ Pemicunya antara lain disparitas politik dan ekonomi antar 2 kelompok dengan sumber utama pembangunan ekonomi yang tidak mampu memerangi kemiskinan.⁵²

Sementara istilah post konflik memiliki arti yang berlawanan. Situasi post konflik lebih sering digambarkan sebagai sebuah kondisi dimana perang atau

⁴⁷ N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), h. 45.

⁴⁸ Chris Mitchell (1981) seperti dikutip Simon Fisher dkk., *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi untuk Bertindak*, (edisi terjemahan), (Indonesia: The British Council, 2001), h. 4.

⁴⁹ Selo Soemardjan, *Konflik-konflik Sosial di Indonesia: Refleksi Keresahan Masyarakat*, Jurnal Analisis CSIS (No 3 Tahun XXXI/2002), (Jakarta: CSIS, 2002), h. 308.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Robert J. Muscat, *Investing in Peace, How Development Aid Can Prevent or Promote Conflict*, (New York: ME Sharpe Inc., 2002), h. 139.

⁵² *Ibid.*, h. 122-139.

pertikaian sudah berakhir. Kurtenbach dan Herbert (2012: 6) menjelaskan asumsi umum dari post konflik adalah sebuah perubahan yang memungkinkan adanya pembangunan dalam sebuah daerah yang tertimpa konflik. Meskipun demikian, sering kali pembangunan pasca konflik sering kali menghadapi banyak kendala. Salah satu tantangan utama dari pembangunan di daerah tersebut adalah tingginya skala ketidakamanan yang jika gagal ditangani akan membalikkan keadaan menjadi ke arah konflik.⁵³

Sekalipun istilah konflik dan post-konflik masih mengundang diskursus, artikel ini berposisi bahwa situasi post-konflik adalah situasi dimana eskalasi kekerasan terjadi tidak lagi lebih tinggi dari saat terjadinya perang atau pertikaian.

b. Pengembangan Keamanan

Harus diakui, keberhasilan dari sebuah perjanjian damai sangat bergantung pada isi dari perjanjian tersebut. Meski demikian, dalam konteks rekonstruksi post-konflik, pembangunan perdamaian akan pula bergantung pada kemampuan pemerintah mengelola otoritas politik, ekonomi dan militer. Pada fase inilah, ketegasan dan kemampuan pemerintah diuji, apakah akan serius mengimplementasikan isi dari perjanjian damai atau tidak. Dua topik yang umum disinggung dan juga saling terkait di area post konflik adalah keamanan dan pembangunan. Banyak pihak mempercayai keamanan dan pembangunan saling terhubung mutual dan mempengaruhi satu sama lain.⁵⁴ Pendapat ini seakan menjadi konsensus bersama, sekalipun hingga kini tetap menjadi diskursus yang berkembang.

Mengelaborasi pengembangan keamanan penting kiranya untuk menguraikan istilah ‘keamanan (*security*)’ dan ‘pengembangan (*development*)’ terlebih dahulu. Dalam perjalanan waktu, konsepsi teoritik tentang keamanan

⁵³ Sabine Kurtenbach dan Herbert Wulf, 2012, *Violence and Security Concerns in Post-Conflict Situations*, Duisburg: Institute for Development and Peace (Research and Advisory Project “Instruments and Procedures of German Development Cooperation in Post-Conflict Situations” - Project Working Paper No. 3).

⁵⁴ M. Stern and Ojendal, J., 2010, Mapping the Security Development Nexus: Conflict, Complexity, Cacophony, Convergence', *Security Dialogue*, vol. 41, no. 1, pp. 6

telah berevolusi sedemikian rupa yang membuka lebar peluang keterlibatan banyak pihak untuk mewarnai diskursus ini.

Konsep keamanan dapat didekati dengan dua cara: tradisional dan non tradisional. Pendekatan tradisional mengartikan keamanan sebagai keamanan negara yang terancam oleh kekuatan militer pihak lain. Dalam pendekatan ini, negara (state) menjadi subyek dan obyek dalam konteks penyediaan keamanan.⁵⁵

Sementara pada pendekatan non-tradisional, konsepsi keamanan lebih dititikberatkan pada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara (non-state actors).⁵⁶ Konsepsi ini berkembang setelah menurunnya ancaman militer yang menggerogoti kedaulatan negara sementara ancaman terhadap keamanan manusia semisal kemiskinan, penyakit menular, bencana alam, dan kerusakan lingkungan hidup meningkat.⁵⁷ Diskursus ini muncul setelah pemikir dari ‘the Copenhagen School’ memperluas referent object.⁵⁸ Pada awalnya, keamanan hanya terfokus pada negara, kini bergeser dengan memasukkan keamanan manusia menjadi bagian fokus keamanan.⁵⁹

Dalam beragam literatur, pembangunan dapat dilihat dari berbagai lensa. Dari sisi historis misalnya, pembangunan diartikan sebagai sebuah kebutuhan dari negara bekas jajahan atas pertumbuhan ekonomi dan konsolidasi politik.⁶⁰ Sementara dari aliran post-development, istilah pembangunan dilihat sebagai upaya pelanggaran perbedaan, hirarki dan ketidakseimbangan hubungan kuasa

⁵⁵ Edy Prasetyono, *Konsep-Konsep Keamanan dalam Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*, Indra J Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro (eds). *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: CSIS, 2006), h. 267-269

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Lihat Bob Sugeng Hadiwinata, *Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: Dari Realisme hingga Konstruktivisme*, dalam Yulius P Hermawan (ed). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 13

⁵⁸ Istilah referent object of security dipopulerkan oleh Barry Buzan. Lihat Barry Buzan, *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War*. (Boulder: Lynne Rienner Publisher, 1991).

⁵⁹ Tokoh-tokoh the Copenhagen School antara lain Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap Wilde. Lebih lanjut baca Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap Wilde. 1998. *Security: a New Framework for Analysis*. Boulder, Colorado: Lynne Rienner.

⁶⁰ Stern dan Ojendal (2010) membagi penjelasan mengenai teori pembangunan dalam 6 pendekatan yakni (1) development as modern (teleological) narrative; (2) broadening, deepening and humanizing development; (3) development as impasse; (4) post-development; (5) development as a techniques of governmentality; (6) development as globalized. Lihat Stern, M. and Ojendal, J., 2010, *Mapping the Security...*

yang merupakan reproduksi dari perilaku kolonial.⁶¹ Meski demikian, artikel ini mengidentifikasi pembangunan sebagai sebuah upaya perubahan kondisi makro masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengedepankan penggunaan indikator ekonomi yakni angka kemiskinan sebagai alat ukur utama. Performa ekonomi ini tentu juga tidak lepas dari kapasitas pemerintah dalam menyiapkan strategi pembangunan. Sekalipun tidak dielaborasi detail, kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pembangunan akan disoroti pada konteks pelanggaran atau penyimpangan keuangan (korupsi).

c. Tujuan Keamanan

Adapun tujuan dari keamanan adalah terciptanya perdamaian. Berbicara mengenai pembangunan perdamaian (*peace-building*) juga tidak mudah. Konsepsi ini adalah bagian dari 3 pendekatan yang dikenalkan oleh Johan Galtung dalam meneropong perdamaian: *peace making*, *peace keeping* dan *peace-building*.⁶²

John Paul Lederach menggarisbawahi *peace-building* sebagai “*a comprehensive concept that encompasses, generates, and sustains the full array of processes, approaches, and stages needed to transform conflict toward more sustainable, peaceful relationships.*”⁶³

Oleh karena itu, tidak heran jika banyak pihak menyepakati bahwa *peace-building* adalah sebuah proses dinamis yang berkelanjutan. Perdamaian yang dimaksudkan dalam terminologi ini merupakan hasil dari sebuah interaksi banyak aktor dan elemen. Tidak hanya dari para kombatan yang terlibat dalam perang, tetapi juga mencakup kultur dan sistem yang kelak terbangun pasca kesepakatan damai dihasilkan.

Khusus untuk penyebab konflik, keresahan terjadi ketika adanya beberapa pemicu (*triggers*) dalam situasi yang tengah rentan terjadinya pertikaian.⁶⁴

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Diskusi mengenai 3 pendekatan yang ditawarkan Galtung, baca Johan Galtung (1976). *Three approaches to peace: peace making, peace keeping and peace building*. dalam *Peace, War and Defense: Essay in Peace Research*, Volume II, h. 282-304.

⁶³ John Paul Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*, (Washington, DC: United States Institute of Peace Press: 1997).

⁶⁴ Robert J. Muscat, *Investing in Peace, How Development Aid Can Prevent or Promote Conflict*, (New York: ME Sharpe Inc., 2002), h. 139.

Pemicunya antara lain disparitas politik dan ekonomi antar 2 kelompok dengan sumber utama pembangunan ekonomi yang tidak mampu memerangi kemiskinan.⁶⁵

5. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Investasi Dalam Perekonomian Suatu Negara

Sukses tidaknya suatu negara dalam menarik arus dana investasi dipengaruhi baik faktor ekonomi maupun non-ekonomi, di antaranya: *Pertama*, pemberian fasilitas yang mendorong adanya investasi seperti pembebasan pajak (*tax holiday*) dan kemudahan mengakses bahan baku. *Kedua*, stabilitas ekonomi dan politik, hal ini akan berpengaruh terhadap nilai tukar serta kepastian dan keamanan usaha. Nilai tukar yang relatif stabil terutama dibutuhkan oleh investor yang berorientasi pada pasar luar negeri. Iklim politik dan faktor keamanan negara penting untuk menjamin ketentraman hidup dan keamanan usaha serta kekayaan investor. *Ketiga*, peraturan perundang-undangan seperti aturan perizinan, dan lalu lintas devisa yang berlaku juga menjadi perhatian bagi investor. Peraturan devisa di negara yang tidak menghalangi penanam modal untuk memindahkan kekayaan dan keuntungannya ke luar negeri lebih menarik bagi investor. *Keempat*, faktor lain juga menentukan dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif adalah infrastruktur yang menunjang dan memadai. Fasilitas transportasi memungkinkan orang, barang, dan jasa diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain. Perannya sangat penting baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi. Telekomunikasi, listrik, dan air merupakan elemen penting dalam proses produksi dari sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor produksi. *Kelima*, ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas. Potensi sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar saja tak cukup untuk menarik investor. Potensi itu harus dibarengi ketersediaan tenaga kerja berkualitas, terampil, kreatif, dan murah yang dikelola dengan baik.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 122-139.

Anna Rokhmatussa'dyah sebagaimana dikutip oleh Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa setiap penanam modal terutama penanam modal asing akan dipengaruhi oleh:

- a. Sistem politik atau ekonomi negara yang bersangkutan;
- b. Sikap rakyat dan pemerintahannya terhadap orang asing dan modal asing;
- c. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi dan stabilitas keuangan;
- d. Jumlah dan daya beli penduduk sebagai calon konsumennya;
- e. Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi;
- f. Adanya tenaga buruh yang terjangkau untuk produksi;
- g. Tanah untuk tempat usaha;
- h. Struktur perpajakan, pabean, dan cukai; dan
- i. Peraturan perundang-undangan dan aspek kepastian hukum yang mendukung jaminan akan usaha yang dijalankannya.⁶⁶

Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi yang telah dihimpun dalam berbagai sumber, yaitu:

1. Suku Bunga

Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman turun maka akan mendorong investor untuk meminjam modal dan dengan pinjaman modal tersebut maka ia akan melakukan investasi.

2. Pendapatan nasional per kapita untuk tingkat negara (nasional) dan PDRB per kapita untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota

Pendapatan nasional per kapita dan PDRB per kapita merupakan cermin dari daya beli masyarakat atau pasar. Makin tinggi daya beli masyarakat suatu negara atau daerah (yang dicerminkan oleh pendapatan nasional per kapita atau PDRB per kapita) maka akan makin menarik negara atau daerah tersebut untuk berinvestasi.

⁶⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), h. 266.

3. Kondisi sarana dan prasarana

Prasarana dan sarana pendukung tersebut meliputi sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah dan lain-lain. Sarana dan prasarana transportasi contohnya antara lain: jalan, terminal, pelabuhan, bandar udara dan lainlain. Sarana dan prasarana telekomunikasi contohnya: jaringan telepon kabel maupun nirkabel, jaringan internet, prasarana dan sarana pos. Sedangkan contoh dari utilitas adalah tersedianya air bersih, listrik dan lain-lain.

4. Birokrasi perijinan

Birokrasi perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang memperbesar biaya bagi investor. Birokrasi yang panjang akan memperbesar biaya bagi pengusaha karena akan memperpanjang waktu berurusan dengan aparat. Padahal bagi pengusaha, waktu adalah uang. Kemungkinan yang lain, birokrasi yang panjang membuka peluang oknum aparat pemerintah untuk menarik suap dari para pengusaha dalam rangka memperpendek birokrasi tersebut.

5. Kualitas sumberdaya manusia

Manusia yang berkualitas akhir-akhir ini merupakan daya tarik investasi yang cukup penting. Sebabnya adalah teknologi yang dipakai oleh para pengusaha makin lama makin modern. Teknologi modern tersebut menuntut ketrampilan lebih dari tenaga kerja.

6. Peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan

Peraturan undang-undang ketenagakerjaan ini antara lain menyangkut peraturan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), Upah Minimum, kontrak kerja dan lain-lain.

7. Stabilitas politik dan keamanan

Stabilitas politik dan keamanan penting bagi investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang.

8. Faktor-faktor sosial budaya

Contoh faktor sosial budaya ini misalnya selera masyarakat terhadap makanan. Orang Jawa pedalaman misalnya lebih senang masakan yang manis rasanya, sementara masyarakat Jawa pesisiran lebih senang masakan yang asin rasanya.

9. Pengaruh Nilai tukar

Secara teoritis dampak perubahan tingkat / nilai tukar dengan investasi bersifat *uncertainty* (tidak pasti). Dalam jangka pendek, penurunan tingkat nilai tukar akan mengurangi investasi melalui pengaruh negatifnya pada absorpsi domestik atau yang dikenal dengan *expenditure reducing effect*. Karena penurunan tingkat kurs ini akan menyebabkan nilai riil aset masyarakat yang disebabkan kenaikan tingkat harga-harga secara umum dan selanjutnya akan menurunkan permintaan domestik masyarakat. Gejala diatas pada tingkat perusahaan akan direspon dengan penurunan pada pengeluaran / alokasi modal pada investasi.

10. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif. Disamping itu tingkat inflasi yang tinggi sering dinyatakan sebagai ukuran ketidakstabilan roda ekonomi makro dan suatu ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi makro.⁶⁷

⁶⁷ *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Dalam Perekonomian Suatu Negara*, <https://punyaprasetyo.wordpress.com/category/perekonomian-indonesia/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-investasi-dalam-perekonomian-suatu-negara/> diakses pada tanggal 4 maret 2018.

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu:

1. Faktor ekonomi

a. Sumber alam

Menurut Lewis, bahwa nilai suatu sumber alam tergantung pada kegunannya, dan kegunannya senantiasa berubah sepanjang waktu karena perubahan dalam teknik atau penemuan baru.⁶⁸

b. Akumulasi modal

Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat memproduksi apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, maka hal ini tersebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Akumulasi modal akan terjadi jika ada proporsi tertentu dari pendapatan sekarang yang ditabung yang kemudian diinvestasikan untuk memperbesar *output* pada masa yang akan datang termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (*human resources*). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurkse bahwa makna pembentukan modal ialah, masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatan saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak, tetapi mengerjakan sebagai dari padanya untuk pembuatan barang modal, alat-alat dan perlengkapan, mesin dan fasilitas pengangkutan, pabrik dan peralatannya. Dalam arti ini pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, *output* nasional dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama menuju pembangunan ekonomi.

c. Pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan

⁶⁸ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Terj. D. Guritno Rajawali, Jakarta, 1992), h. 86.

ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerjaberarti semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik.

d. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi organisasi bersifat melengkapi (komplomen) modal, buruh dan membentuk meningkatkan produktifitasnya. Dalam pertumbuhan ekonomi moderen, para wiraswatawan tampil sebagai organisator dan pengambilan resiko diantara ketidakpastian wirastawan bukanlah manusia dengan kemampuan biasa ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan dengan orang lain.

e. Kemajuan teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktifitas buruh, modal dan faktor produksi lain.

f. Pembagian kerja dan skala produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi. Hal ini menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Adam Smith menengkan arti penting pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi pembagian kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh.⁶⁹

2. Faktor Non Ekonomi

a. Faktor sosial

Faktor sosial dan budaya juga sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pendidikan dan kebudayaan barat membawa ke arah

⁶⁹ *Ibid.*, h. 92.

penalaran (*reasoning*) skeptisisme. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan, pandangan, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial.

b. Faktor manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekankan pada efisiensi mereka.

c. Faktor politik dan administratif

Faktor politik dan administratif juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambatan pembangunan ekonomi negara tlatang. Administrasi yang efisien, yang kuat, efisien, dan tidak dikorup dengan demikian amat penting bagi pembangunan ekonomi.⁷⁰

Ada beberapa faktor yang menyebabkan lambatnya pemulihan investasi di Indonesia. Faktor tersebut mulai dari masalah keamanan, tidak adanya kepastian hukum, kondisi infrastruktur yang buruk, hingga kondisi perburuhan yang semakin buruk. Padahal sebelum krisis yang bersifat multidimensi melanda, Indonesia termasuk salah satu negara yang banyak diminati oleh banyak investor, baik investor luar negeri maupun investor dari dalam negeri. Sejalan dengan itu, Bank dunia memberikan penilaian tersendiri terhadap Indonesia dari sisi investasi, yakni sebagai salah satu negara yang memiliki iklim investasi yang buruk, sehingga banyak investor yang kurang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Iklim investasi yang dimaksud meliputi stabilitas ekonomi, kepastian hukum, stabilitas sosial politik, stabilitas keamanan, sistem perpajakan, regulasi, korupsi, ketersediaan SDM terampil, dan ketersediaan infrastruktur (jalan, listrik, pelabuhan, telekomunikasi, dan sebagainya).⁷¹

⁷⁰ *Sumber Daya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi*, http://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/366/Sumber-Daya-Alam-dan-Pertumbuhan-Ekonomi.pdf diakses tanggal 4 Maret 2018

⁷¹ HM. Pudjihardjo, *Menciptakan Daya Tarik Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*, (Jurnal Komplek Vol. 2, No. 1, Juni 2010 ISSN 2088-6268), h. 1-8.

a. Permasalahan Investasi dan Upaya Mengatasinya

Menurut Direktur Fasilitas Promosi Daerah BKPM, ada lima hambatan berinvestasi di Indonesia yang kerap dikeluhkan para investor. Hambatan tersebut terkait dengan inkonsistensi peraturan/kepastian hukum, perpajakan, kualitas tenaga kerja, ketersediaan lahan dan hambatan izin pembangunan, serta kualitas infrastruktur.⁷²

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang kerap dikeluhkan investor baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam rangka menciptakan keamanan dan kepastian hukum berusaha, BKPM telah bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menciptakan keamanan investasi melalui Pedoman Kerja BKPM-Polri tentang Jaminan Keamanan Berinvestasi di Indonesia. Adapun isi dari kesepakatan tersebut adalah kedua instansi diharapkan saling membantu guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.⁷³

Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, pemerintah melalui Kemnaker terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan vokasi melalui strategi *triple skilling*, yakni *skilling*, *upskilling*, dan *reskilling*. Bagi tenaga kerja yang belum punya keterampilan dapat mengikuti program *skilling* agar punya keahlian di bidang tertentu. Bagi tenaga kerja yang telah memiliki *skill* dan membutuhkan peningkatan akan masuk program *upskilling*, sedangkan yang ingin beralih *skill* dapat masuk ke program *reskilling*. Adanya kepastian pengupahan, jaminan sosial, hubungan industrial yang baik serta perubahan paradigma *Mayday* yang makin kondusif diharapkan akan mampu menarik investasi ke Indonesia.⁷⁴

Pada awal tahun 2019 BKPM melakukan perbaikan terhadap sistem perizinan yang terkoneksi, termasuk melalui platform Koordinasi Pengawasan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (Kopi Mantap). Platform tersebut akan

⁷² BKPM Catat 5 Keluhan Investor Soal Hambatan Investasi, 12 Januari 2018, <https://tirto.id/bkpm-catat-5-keluhan-investor-soal-hambatan-investasi-cDo1>, diakses 21 Maret 2019.

⁷³ BKPM Ingatkan Pentingnya Kepastian Hukum Bagi Investor, <https://finansial.bisnis.com/read/20180905/9/835515/bkpm-ingatkan-pentingnya-kepastian-hukum-bagi-investor>, diakses 20 Maret 2019.

⁷⁴ Bangun Daya Saing RI, *Kompas*, diakses 14 Maret 2019, h. 17.

membantu pemerintah pusat dalam mengawal pelaksanaan investasi hingga di tingkat pemerintah daerah (pemda). Hal ini sesuai dengan yang diingatkan Presiden Joko Widodo, yakni menjaga investasi dari hulu ke hilir.⁷⁵ Selain itu BKPM menerapkan sistem *Online Single Submission* (OSS), Pengawasan Investasi, Pemantauan Realisasi Investasi, Perencanaan Penanaman Modal, serta Kerja Sama Penanaman Modal.⁷⁶

Pemerintah berkomitmen menciptakan iklim bisnis yang kondusif dengan memberikan fasilitas fiskal dan kemudahan perizinan. Pemerintah semakin serius dan gencar mendorong kebijakan hilirisasi industri karena dinilai mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Saat ini, Indonesia termasuk dalam empat negara Asia (selain China, Jepang dan India) yang memiliki nilai tambah sektor manufaktur tertinggi di dunia. Nilai tambah industri nasional meningkat hingga USD 34 miliar, dari tahun 2014 sebesar USD 202,82 miliar, menjadi USD 236,69 miliar pada tahun 2018.

Terkait sektor perpajakan, pada tahun 2015 Kementerian Keuangan telah mengeluarkan aturan mengenai *tax allowance* dan *tax holiday*, yang merupakan insentif keringanan pajak. Akan tetapi fasilitas pajak tersebut tidak terlalu banyak dimanfaatkan oleh investor karena ketatnya persyaratan dan kriteria yang diterapkan. Pemberian fasilitas pajak sesungguhnya merupakan dilema, pemerintah saat ini tengah menghadapi persaingan tarif pajak global. Bila mengikuti tren penurunan tarif pajak yang tengah dilakukan oleh banyak negara di dunia, maka akan berimbas pada neraca fiskal. Bila pemerintah mengorbankan penerimaan pajak, dikhawatirkan negara akan kekurangan anggaran untuk menstimulus perekonomian.⁷⁷

Sejak tahun 2015, Indonesia melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Salah satu megaprojek infrastruktur utama adalah pembangunan

⁷⁵ *Bidik Investasi Double Digit, BKPM Siapkan Kopi Mantap*, <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/03/12/po8pom383-bidik-investasi-double-digit-bkpm-siapkan-kopi-mantap>, diakses 21 Maret 2019.

⁷⁶ *Koordinasi Pengawasan Investasi*, 13 March-14 March 2019-ICE BSD, <https://www.investindonesia.go.id/id/kalender-kegiatan>, diakses 19 Maret 2019.

⁷⁷ *Dilema Pajak sebagai Sumber Pendanaan dan Stimulus Investasi*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/06/101712226/dilema-pajak-sebagai-sumber-pendanaan-dan-stimulus-investasi>.

jalan dan jalan tol. Hingga tahun 2018, pemerintahan telah menyelesaikan 3.387 kilometer jalan nasional dan masih akan bertambah hingga 4.119 kilometer di 2019. Selain itu, sejumlah infrastruktur lain seperti bendungan dan jaringan irigasi juga dibangun dengan masif.⁷⁸

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah nampaknya belum mampu meningkatkan nilai investasi. Bila melihat penurunan nilai investasi di tahun 2018 yang cukup memprihatinkan, bisa jadi permasalahan eksternal seperti perang dagang di pasar global dan tekanan dolar AS merupakan penyebab utamanya.⁷⁹

b. Tujuan Investasi

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional atau wilayah, sumber-sumber pembiayaan bisa didapatkan dari ekspor, bantuan luar negeri, investasi asing dan tabungan domestik.⁸⁰ Khusus mengenai investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi tidak hanya menaikkan permintaan agregat, tetapi juga menaikkan penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang, investasi meningkatkan stok modal dan setiap penambahan stok modal akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan *output* yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Todaro⁸¹ menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berkembang dengan adanya pertambahan faktor-faktor produksi, terutama penambahan peralatan produksi dan perbaikan faktor-faktor produksi, sehingga pengerahan atau mobilisasi dana tabungan guna menciptakan investasi dalam jumlah yang memadai dibutuhkan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

⁷⁸ Meski Infrastruktur Dibangun Investasi Asing Malah Lesu” [https:// www.cnbcindonesia.com/market/20190217185136-17-55975/ meski-infrastruktur-dibangun-investasi-asing-malah-lesu](https://www.cnbcindonesia.com/market/20190217185136-17-55975/meski-infrastruktur-dibangun-investasi-asing-malah-lesu), diakses 20 Maret 2019.

⁷⁹ Venti Eka Satya, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik, Vol. XI, No.06/II/Puslit/Maret/2019.

⁸⁰ Mudradjad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: YKPN, 2007), h. 215.

⁸¹ Todaro & Smith, *Pembangunan Ekonomi (Sebuah Terjemahan)*. (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 113.

Peningkatan investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan, kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran.⁸²

Investasi dalam perekonomian berfungsi sebagai injection untuk menggairahkan perekonomian. Dalam persamaan makroekonomi $Y = C + I + G + (X - M)$, mengandung maksud pendapatan nasional (Y) akan meningkat jika variabel sebelah kanan (yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan selisih ekspor dengan impor) ikut meningkat. Dari berbagai analisis yang dikemukakan oleh para ekonom, variabel yang paling efektif untuk meningkatkan pendapatan adalah variabel investasi (I).⁸³

Investasi atau penanaman modal adalah komponen pembentuk nilai tambah nasional, yang merupakan pembelian barang modal dan pelengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Meningkatnya kegiatan perekonomian sangat tergantung kepada aliran modal bagi usaha produktif. Ada sementara ahli yang mengatakan bahwa ekspor dan investasi merupakan “*engine of growth*”. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pada umumnya didukung oleh peningkatan ekspor dan investasi.⁸⁴

Investasi dalam perekonomian merupakan motor penggerak yang dapat memperluas kapasitas produksi dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa peranan investasi di samping dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi juga sekaligus dapat menciptakan pemerataan pendapatan dan lapangan kerja. Peranan investasi dalam perekonomian yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk, dan penciptaan lapangan kerja. Melalui investasi maka kegiatan ekonomi

⁸² Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Rajawali, 2000), h. 367.

⁸³ HM. Pudjihardjo, *Menciptakan Daya Tarik Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*, (Jurnal Kompilek Vol. 2, No. 1, Juni 2010 ISSN 2088-6268), h. 1-8.

⁸⁴ Hadi Sasana, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi swasta di Jawa Tengah. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 1(1), 2008, h. 1-10.

dapat berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat. Jadi investasi merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi bagi suatu perekonomian yang sedang membangun disamping faktor pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.⁸⁵

Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Pada posisi semacam ini investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika investasi mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak atau lesunya perekonomian. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian setiap negara senantiasa menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.⁸⁶

Selain itu investasi juga bertujuan: *Pertama*, investasi mendorong pertambahan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi) secara berlipat ganda lewat proses *multiplier* (Teori Keynes). *Kedua*, investasi juga akan mendorong penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja ini akan mengurangi pengangguran. Berkurangnya pengangguran akan mengurangi kemiskinan. Dan berkurangnya kemiskinan akan berdampak pada teratasinya masalah-masalah ikutan lain seperti gizi buruk, buta huruf, kejahatan dan lain-lain.

Ketiga, investasi juga bisa dipakai sebagai alat untuk pemerataan baik pemerataan antar daerah, antar sektor dan antar perorangan. Investasi sebagai alat pemerataan ini tentu saja tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri atau dibiarkan berjalan menurut mekanisme pasar tetapi harus ada intervensi pemerintah. Caranya ada macam-macam, misalnya memberi insentif pembebasan pajak bagi

⁸⁵ Imamudin Yuliadi, *Analisis Kesenjangan investasi Asing (PMA) di Provinsi Sulawesi Utara: Sebuah Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah*, (Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 10 (1): 1-12, 2009), h. 2-3.

⁸⁶ Muhammad Nasir Badu, *Internasionalisasi Potensi Sulawesi Barat (Studi Kasus: Investasi Asing di Sulawesi Barat)*, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.

investor yang bersedia berinvestasi di daerah yang tertinggal, mempermudah ijin investasi di daerah tertinggal agar investor tertarik menanamkan modalnya di sana, dan banyak kebijakan lain.⁸⁷

c. Daya Tarik Investasi

Persaingan yang semakin tajam menuntut Pemerintah Daerah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga mampu menarik investasi, orang dan industri ke daerah. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi. Hal yang dipertegas oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), bahwa faktor-faktor yang menentukan daya tarik suatu daerah terhadap investasi adalah :

- a. Perekonomian Kota, yakni berkaitan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif suatu kota/daerah seperti potensi dan struktur ekonomi;
- b. Ketenagakerjaan, yakni berkaitan dengan produktifitas tenaga kerja yang sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan;
- c. Sarana dan Prasarana, yakni berkaitan dengan sarana transportasi dan sarana publik lainnya;
- d. Sosial Budaya, yakni berkaitan dengan masalah keamanan, kondisi sosial kemasyarakatan dan faktor budaya;
- e. Institusi, yakni berkaitan dengan pelayanan, kebijakan, keuangan dan peraturan daerah yang mendukung.⁸⁸

Dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif tidak cukup hanya berhasil menarik investor, namun yang lebih penting adalah mampu mempertahankan investasi yang ada sehingga mereka merasa betah dan feel like home tanpa mengorbankan pekerja. Hal ini berarti bahwa ada kenyamanan bagi investor sehingga investasi yang masuk bisa bertahan. Hal ini tergantung pada itikad baik pemerintah untuk memberikan atmosfir dan iklim berusaha yang baik

⁸⁷ *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Dalam Perekonomian Suatu Negara*, <https://punyaprasetyo.wordpress.com/category/perekonomian-indonesia/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-investasi-dalam-perekonomian-suatu-negara/>

⁸⁸ <http://www.kppod.org>

dan nyaman bagi penanam modal. Selain itu penting juga untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat atau pekerja yang ikut terlibat di dalamnya. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah melalui suatu tata kelola yang baik terhadap segenap aspek yang berpengaruh terhadap perekonomian daerahnya.

Peningkatan nilai tambah perekonomian di daerah tersebut akan memberikan dampak positif pada besaran balas jasa terhadap faktor-faktor produksi, misalnya dalam bentuk sewa tanah, upah, bunga dan keuntungan akan meningkat karena adanya aktivitas penanaman modal. Selain itu, meningkatnya intensitas perekonomian akan membuka peluang kerja bagi perekonomian dan penduduk di daerah sekitar penanaman modal. Dengan demikian, secara langsung dan tidak langsung akan terwujud efek multiplier terhadap kegiatan ekonomi dan pendapatan penduduk di kawasan-kawasan sekitar dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. Lingkaran ekonomi ini akan semakin besar dengan munculnya investasi pada potensi-potensi baru dalam membangun sektor industri lainnya.⁸⁹

C. Syari'at Islam dan Investasi

1. Pengertian Syari'at Islam

Syari'at Islam adalah segala peraturan yang telah diisyaratkan Allah, atau ia telah mensyariatkan dasar-dasarnya, agar manusia melaksanakannya, untuk dirinya sendiri dalam berkomunikasi dengan tuhan, dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, dengan alam semesta dan berkomunikasi dengan kehidupan.⁹⁰

Pengertian syariat islam menurut Mahmud Syaltut adalah;

الشَّرِيعَةُ لُغَةً الْمَوْزُودُ تَوْمُهُ النَّاسُ أَوِ الدَّوَابُّ لِلشُّرْبِ وَالصُّطْلَاحَا الْأَحْكَامُ وَالنَّظْمُ الَّتِي شَرَعَهَا
اللَّهُ لِعِبَادِهِ لِاتِّبَاعِهَا وَعَلَى قَطْعِهِم بِالنَّاسِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَإِنَّا نَعْنِي هُنَا بِمَعْنَى الْإِصْطِلَاحِي
وَالْتَّعْبِيرِ بِالشَّرِيعَةِ يَنْصَرِفُ إِلَى الْأَحْكَامِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَالسُّنَّةُ الْمَحْمَدِيَّةُ ثُمَّ مَا

⁸⁹ Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional 2: Kekuasaan Politik Ekonomi Internasional dari Tatanan Dunia*. (Terj.) (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama; 1993), h. 470.

⁹⁰ Mahmud Syaltut dalam Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 200.

اجْمَع عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ مِمَّا اجْتَهَدُوا فِيهِ وَيَدْخُلُ فِي الاجْتِهَادِ الْحُكْمُ بِالْقِيَاسِ وَالْقُرَّائِنِ
وَالْإِمَارَاتِ وَالِدَّلَائِلِ

“Syariat menurut bahasa ialah : tempat yang didatangi atau dituju oleh manusia dan hewan guna meminum air. Menurut istilah ialah : hukum-hukum dan aturan yang Allah syariatkan buat hambanya untuk diikuti dan hubungan mereka sesama manusia. Disini kami maksudkan makna secara yang istilah yaitu syari’at tertuju kepada hukum yang didatangkan al-qur’an dan rasulnya, kemudian yang disepakati para sahabat dari hukum hukum yang tidak datang mengenai urusannya sesuatu nash dari al-qur’an atau as-sunnah. Kemudian hukum yang diistimbatkan dengan jalan ijtihad, dan masuk ke ruang ijtihad menetapkan hukum dengan perantaraan *qiyas*, *karinah*, tanda-tanda dan dalil-dalil”.⁹¹

Sedangkan Syariat menurut Salam Madkur adalah:

التَّشْرِيعُ لَفْظٌ مَا أُخِذَ مِنَ الشَّرِيعَةِ الَّتِي مِنْ مَعَا نِيهَا عِنْدَ الْعَرَبِ الطَّرِيقَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ وَالَّتِي
اطْلَقَهَا الْفُقَهَاءُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْأَحْكَامِ الَّتِي سَنَّهَا اللَّهُ لِعِبَادِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ لِيَعْمَلُوا
بِهَا عِنَايَمَانِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِأَفْعَالٍ أَمْ بِإِعْقَائِدٍ أَمْ بِالْأَخْلَاقِ وَهُوَ مِنَ الشَّرِيعَةِ
بِهَذَا الْمَعْنَى اِشْتَقَّ التَّشْرِيعُ بِمَعْنَى اِنْشَاءِ الشَّرِيعَةِ وَسُنُّ قَوَاعِدِهَا فَالتَّشْرِيعُ بِنَاءٌ عَلَى هَذَا هُوَ
سُنُّ الْقَوَانِينِ سَوَاءٌ كَانَتْ آتِيَةً عَنْ طَرِيقِ الْأَدْيَانِ وَيُسَمَّى تَشْرِيعًا سَمَآوِيًّا أَمْ كَانَتْ مِنْ
وَضْعِ الْبَشَرِ وَتَفْكِيرِهِمْ وَسَمَّى تَشْرِيعًا وَضَعِيًّا

“Tasyri ialah lafadl yang diambil dari kata syari’at yang diantara maknanya dalam pandangan orang Arab ialah; jalan yang lurus dan yang dipergunakan oleh ahli fikih islam untuk nama bagi hukum-hukum yang Allah tetapkan bagi hambanya dan dituangkan dengan perantaraan rasul-Nya agar mereka mengerjakan dengan penuh keimanan baik hukum-hukum itu berkaitan dengan perbuatan ataupun dengan aqidah maupun dengan akhlak budi pekerti. dan dinamakan dengan makna ini dipetik kalimat tasyri yang berarti menciptakan undang-undang dan membuat qaidah-qaidah Nya, maka tasyri menurut pengertian ini ialah membuat undang-undang baik undang-undang itu datang dari agama dan dinamakan tasyri samawi atau pun dari perbuatan manusia dan pikiran mereka dinamakan tasyri wadl’i.”⁹²

⁹¹ Ibid.

⁹² Muhammad Sallam Madkur, *Al-Madkhal Lil Fiqh al-Islami*, 2nd Ed., (Cairo, 1963), h.

Dalam definisi yang lain syari'at Islam⁹³ adalah hukum Allah yang membuat seseorang menjadi muslim, sebab sistem hukum tersebut mencakup segala aspek kehidupan sehari-hari. Meliputi hukum perdata Islam, hukum dagang Islam dalam aspek transaksi bisnis dan perdagangan (fikih muamalah), hukum pidana (fikih jinayah), dalam hal memilih pemimpin atau kepala daerah, menerapkan hukum fikih syiasah, hukum yang mencakup tata krama dalam keluarga, peradilan dan sebagainya yang jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan memperoleh jaminan hidup harmonis dalam kehidupan dunia dan mencapai tingkat kesejahteraan hidup di akhirat.⁹⁴

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa yang dimaksud Syari'at Islam adalah apa yang disyari'atkan Allah berupa hukum-hukum yang ditetapkan dengan dalil ijma' dan qiyas serta dalil-dalil lainnya.⁹⁵ Adapun Mahmud Syaltut mengemukakan tentang pengertian syari'at adalah sebutan bagi berbagai penuturan dan hukum yang telah disyari'atkan Allah atau disyari'atkan prinsip-prinsipnya lalu diwajibkan kepada kaum muslimin agar berpegang teguh pada syari'at tersebut dalam melakukan hubungan dengan Allah dan antar manusia.⁹⁶

Dari beberapa definisi tentang syari'at, sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya syari'at adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih, atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang. Dan bila syari'at dikaitkan dengan investasi, maka artinya, perbuatan subjek hukum dalam hal melakukan suatu investasi harus sesuai dengan ketentuan syari'at.⁹⁷

⁹³ Daud Rasyid, *Formalisasi Syari'at Islam di Serambi Mekkah*, Sudah tentu yang dimaksud Syari'at Islam di sini adalah Syari'at Islam yang berlaku sekarang di kalangan masyarakat Aceh sebagai yang akan menjadi bingkai pembahasan. Lihat Ahmad Syafi'i Ma'arif (et., all.) dalam Kurniawan Zein dan Saifuddin HA, *Syari'at Islam Yes Syari'at Islam No Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Paradima, 2001), h. 217-219.

⁹⁴ Nasr, *Ideals and Realita of Islam Dalam Cita dan Fakta*, Terj. Abdurrahman Wahid dan Hasyim Wahid, (Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional (LAPPENAS), 1981), h. 64.

⁹⁵ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Syari'at Islam*, Pentj. Nabhani Idris, (Jakarta: Islamuna Press, 1996M/1416H), h. 22.

⁹⁶ Mahmud Syaltut, *Islam Akidah dan Syari'ah*, edisi revisi, pentj. Abdurrahman Zein, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998M/1418H), h. 109.

⁹⁷ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 42-43.

2. Konsep Investasi Syariah

a. Investasi dalam Islam

Investasi dalam Islam disebut الاستثمار. Berasal dari kata ثَمَرَ. Tsamar dalam *Mujam Maqayis al-Lughah* menurut bahasa adalah sesuatu yang dilahirkan dari sesuatu secara kolektif. تَمَرَ الرَّجُلُ مَالَهُ artinya ia bagus dalam mengelola hartanya. تَمَرَ اللَّهُ مَالَهُ artinya mudah-mudahan Allah menumbuhkan dan mengembangkan hartanya.⁹⁸ Dalam kamus al-Munawwir أَثْمَرَ الشَّجَرِ (berbuah), الرَّجُلُ ثَمَرَ وَاسْتَثْمَرَ (mengembangkan, mengusahakan harta agar bertambah, menanamkan modal).⁹⁹

Istitsmar menurut bahasa adalah طَلَبُ الْحَصُولِ عَلَى الثَّمَرَةِ (menuntut hasil atas sesuatu yang dikembangkan)¹⁰⁰. Dalam al-Mujam al-Wasith *istitsmar*/investasi didefinisikan dengan:

لَا سِثْمَارَ اسْتِخْدَامِ الْأَمْوَالِ فِي الْإِنْتَاكِ إِلَّا مَبَاشَرَةً بِشَرَاءِ الْأَلَاتِ وَالْمَوَادِّ الْأَوَّلِيَّةِ
وَأَمَّا بِطَرِيقٍ غَيْرِ مَبَاشَرٍ كَشَرَاءِ الْأَسْهُمِ وَالسَّنَدَاتِ

“Investasi adalah menggunakan harta dalam produksi/industri baik secara langsung dengan membeli alat-alat dan bahan baku atau tidak langsung seperti membeli saham dan obligasi.”¹⁰¹

Menurut al-Qalyubi investasi itu pada dasarnya adalah dianjurkan¹⁰² sedangkan menurut Asyraf Muhammad Dawwabah Islam mewajibkan pentingnya menginvestasikan harta dan melarang untuk menyia-nyiakannya, demi untuk memelihara dan mengembangkannya, sehingga harta tidak akan habis ketika harus dikeluarkan untuk sedekah. Islam memposisikan harta sebagai salah satu

⁹⁸ Ahmad bin Faris al-razi, *Mujam Maqayis al-lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979, jil. 1), h. 388

⁹⁹ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002), h. 156

¹⁰⁰ Nazih Hammad, *Mu'jam al-Mustalahat al-Mâliyyah...*, h. 50

¹⁰¹ Majma' al-Lughat al-'Arabiyyah bi al-Qâhirah, *al-Mujam al-Wasîl*, (Turki: al-Maktabah al-Islamiyyah, TT, Juz I), h. 100

¹⁰² Wizarah al-Auqaf al-Kuwait, *al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar al-Salasil, 1404H, Jil III), h. 183

maqasid syari'ah.¹⁰³ Salah satu diantara *maqasid syari'ah* adalah *hifdzul mal* (menjaga harta).

Memiliki kekayaan tetapi membiarkan tidak dimanfaatkan akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan produktivitas perekonomian. Orang seperti ini dianggap bakhil dan akan mendapatkan dosa, karena Allah swt menganugrahkan kekayaan sebagai kenikmatan yang layak untuk dinikmati dan pada gilirannya akan memberi manfaat pada orang lain. Dalam kasus pemilikan tanah (pertanian), misalnya Rasulullah saw. melarang seseorang memiliki tanah, tetapi dibiarkan terlantar tanpa dimanfaatkan sedikitpun. Secara ekonomi, tindakan ini akan menyebabkan penurunan produktivitas pertanian dan menutup kesempatan bagi siapa saja yang mampu memanfaatkan tanah tersebut¹⁰⁴.

Islam juga melarang menimbun uang (*kanz al-mal*), yaitu mengumpulkan uang sekedar untuk mengumpulkan, bukan untuk motif mencukupi transaksi pada masa datang (*idzkhar* atau *saving*). Seseorang yang menyimpan uang hakikatnya telah menarik uang itu dari pasar. Jika itu terjadi terus menerus dan makin lama makin banyak, tak ubahnya seperti mengurangi darah dari sirkulasi di dalam tubuh.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-Taubah, 9: 34)*¹⁰⁵

¹⁰³ Asyraf Muhammad Dawwabab, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Nun, 2008), h. 136

¹⁰⁴ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 149-150

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Quran dan ...*, h. 193.

Kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan dengan sebaik-baiknya akan mendorong optimalisasi sumber daya. Lahan pertanian yang ditelantarkan, uang yang disimpan tanpa keperluan dan harta kekayaan lainnya yang sengaja ditimbun tanpa ada maksud untuk dimanfaatkan akan menimbulkan sistem penguasaan tanah yang buruk dan penimbunan modal. Tindakan ini, disamping akan membuat kekayaan yang ada tidak optimal dimanfaatkan. Juga akan merugikan masyarakat secara keseluruhan.¹⁰⁶

Sedangkan secara istilah investasi merupakan suatu kegiatan penempatan dana pada aset produktif dengan harapan mendapatkan pertumbuhan modal dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya investasi secara konvensional dapat diartikan sebagai suatu kegiatan bisnis yang pasif karena tanpa melibatkan langsung penanam modal. Berinvestasi adalah salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan setiap orang untuk menghasilkan keuntungan lebih.

Namun menurut Jack Clark Francis investasi adalah penanaman modal yang diharapkan dapat menghasilkan tambahan dana pada masa yang akan datang. Berdasarkan definisi Investasi, dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu bentuk pengorbanan kekayaan di masa sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan dengan tingkat resiko tertentu.¹⁰⁷

Investasi adalah suatu ikhtiar dan pengorbanan untuk menghasilkan kemanfaatan yang lebih besar sebagai imbalan dari ikhtiar dan pengorbanan tersebut. Menurut ekonomi makro, sumber dana investasi berasal dari kelebihan pendapatan nasional/daerah atau sering disebut sebagai tabungan nasional/daerah sedangkan menurut ekonomi mikro investasi merupakan langkah pembelanjaan sumber daya/dana untuk membangun fasilitas produksi baru maupun tambahan dari yang telah ada dalam rangka memperoleh ataupun memperbesar perolehan laba.

¹⁰⁶ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 150-151

¹⁰⁷ Francis, Jack C., *Investment: Analysis and Management*, 5th edition, McGraw-Hill Inc., Singapore, 1991.

Investasi dalam teori ekonomi berarti penambahan terhadap stok modal fisik, apakah itu melalui pembangunan rumah-rumah, pembuatan mesin, pembangunan pabrik/kantor ataupun tambahan terhadap persediaan barang. Selain investasi dalam artian fisik ini ia juga dapat diartikan dengan investasi dalam modal manusia (*human capital*). Inilah ciri khas investasi konvensional.

Ia hanya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada tenaga kerja dan jumlah (**stock**) kapital. Investasi akan menambah jumlah (**stock**) daripada kapital. Tanpa investasi maka tidak akan ada pabrik/mesin baru dan dengan demikian tidak ada ekspansi. Teori tentang investasi pada umumnya hendak menjelaskan faktor-faktor (variabel) yang mempengaruhi investasi. Beberapa faktor yang diduga kuat pengaruhnya terhadap investasi ini antara lain tingkat bunga, penyusutan, kebijaksanaan perpajakan, serta perkiraan (*expectation*) tentang penjualan serta kebijaksanaan ekonomi.¹⁰⁸

b. Prinsip Dasar Berinvestasi

Islam menganjurkan untuk menjaga harta benda serta mencegahnya dari kehilangan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٠﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.* (QS. An-Nisa, 4: 5)¹⁰⁹

Kalau kita lihat ayat diatas Allah menegaskan dengan kata *وارزقوهم فيها* bukan *وارزقوهم منها*. Menurut Imam Ar-Razi ayat diat menggunakan kalimat *فسفها* supaya kita tidak menjadikan harta mereka sebagai rezeki, akan tetapi menjadikannya sarana untuk mendapatkan rezeki dengan cara mengembangkannya untuk mendapatkan keuntungan.

¹⁰⁸ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 54.

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Quran dan ...*, h. 78.

Umar bin Khatab Ra berkata: dagangkan harta anak yatim dan jangan makan zakat dari penghasilannya.

Namun sesuai prinsipil, bahwa aktivitas perdagangan dan usaha yang sesuai dengan syariah adalah kegiatan usaha yang tidak berkaitan dengan produk atau jasa yang haram seperti makanan haram. Selain itu juga menghindari cara perdagangan dan usaha yang dilarang, termasuk yang tergolong praktik *riba*, *gharar*, *maysir*.

Secara lebih spesifik, Metwally mengembangkan suatu fungsi investasi dalam perekonomian Islamakan sangat berbeda dari perekonomian yang non-Islami (konvensional). Model yang dikembangkan mengasumsikan tingkat suku bunga nol, adapun asumsi lain yang digunakan adalah:

- 1) Terdapat denda untuk penimbunan aset-aset yang tidak termanfaatkan.
- 2) Dilarangnya segala bentuk spekulasi dan tindakan perjudian.
- 3) Tingkat suku bunga pada semua jenis dana pinjaman adalah nol.

Jadi, para investor dapat memilih diantara tiga alternatif untuk memanfaatkan dananya (a) memegang dananya dalam bentuk tunai (b) memegang dananya dalam bentuk aset-aset yang tidak menghasilkan pendapatan (contoh: deposito bank, pinjaman, property) atau (c) menginvestasikan dananya (menjadi investor dalam proyek yang dapat menambah persediaan modal negara). Menurut beberapa pandangan kontemporer, seorang Muslim yang menginvestasikan dana atau tabungannya tidak akan dikenakan pajak pada jumlah yang telah diinvestasikannya, tetapi dikenakan pajak pada keuntungan yang dihasilkan dari investasinya, karena dalam perekonomian Islami semua aset-aset yang tidak termanfaatkan dikenakan pajak, jadi investor Muslim akan lebih baik memanfaatkan dananya untuk investasi daripada mempertahankan dananya dalam bentuk yang tidak termanfaatkan.¹¹⁰

Dalil-dalil tentang investasi:

¹¹⁰ Mohammad Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*, Cet. II, (Yogyakarta: PPSK Press, 2008).

1) Al-Qur'an

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah, 9: 105)¹¹¹

قُلْ يَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ لَافْلَحُ الْظَالِمُونَ ﴿١٣٥﴾

Artinya: Katakanlah: Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. (QS. Al An'am, 6: 135)¹¹²

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيًّا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah, 2: 148)¹¹³

2) Hadits

حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْرَ
بَشَطَرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطَىٰ أَزْوَاجُهُ مِائَةً وَسِيقًا: ثَمَانُونَ
وَسِيقًا قَوْمًا، وَعِشْرُونَ وَسِيقًا شَعِيرًا؛ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْرَ فَخَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Quran dan ...*, h. 204.

¹¹² *Ibid.*, h. 146.

¹¹³ *Ibid.*, h. 24.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يُمَصَّى لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الْأَرْضَ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Ibn Umar r.a berkata: Nabi Saw. menyerahkan sawah ladang dan tegal di Khaibar kepada penduduk Khaibar dengan menyerahkan separuh dari penghasilannya berupa kurma atau buah dan tanaman, maka Nabi Saw. memberi isteri-isterinya seratus wasaq (1 wasaq = 60 sha'. 1 sha' = 4 mud atau 2½ kg), delapan puluh wasaq kurma tamar, dan dua puluh wasaq sya'ier (jawawut). Kemudian dimasa Umar r.a. membebaskan kepada isteri-isteri Nabi Saw. untuk memilih apakah minta tanahnya atau tetap minta bagian wasaq itu, maka diantara mereka ada yang memilih tanah dan ada yang minta bagian hasilnya berupa wasaq. Aisyah r.a. telah memilih tanah. (HR. Bukhari Muslim)¹¹⁴

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى جَمِيعًا عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ ابْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوْ الرُّبْعِ بِالْمَادِيَّاتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Abu Thahir dan Ahmad bin Isa semuanya dari Ibnu Wahb. Ibnu Isa mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah menceritakan kepadaku Hisyam bin Sa'ad bahwa Abu Zubair Al Makki telah menceritakan kepadanya, dia berkata; Saya mendengar Jabir bin Abdullah berkata; "Di zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kami terbiasa menyewakan tanah dengan bayaran sepertiga atau seperempat (dari hasil panen) yang disepanjang saluran air (parit), maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam kasus ini: "Barangsiapa yang memiliki tanah, hendaklah ditanaminya sendiri, jika dia tidak sanggup menanamnya sendiri hendaklah dipinjamkan kepada saudaranya (supaya

¹¹⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, Jilid II, Terj. H. Salim Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h. 562-563.

ditanaminya), jika tidak hendaknya dibiarkan.” (HR. Muslim No. 2870)¹¹⁵

حَدَّثَنِي هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ بَيَانَ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ، فَيَخْطُبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Hannad bin As Sari telah menceritakan kepada kami Abul Ahwash dari Bayan Abu Bisyr dari Qais bin Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata; Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Jika salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari lalu mencari kayu bakar yang di panggul di punggungnya (lalu menjualnya), kemudian bersedekah dengan hasilnya dan merasa cukup dari apa yang ada di tangan orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah dengan menafkahi orang yang engkau tanggung. (Muslim No. 1042)¹¹⁶

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِرْعَةٌ لَحْمٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Abu Thahir] telah mengabarkan kepada kami [Abdullah bin Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Laits] dari [Ubaidullah bin Abu Ja’far] dari [Hamzah bin Abdullah bin Umar] bahwa ia mendengar [bapaknya] berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seseorang terus meminta-minta hingga

¹¹⁵ Kumpulan Hadits, <https://tafsirq.com/hadits/muslim?page=178>, diakses tanggal 30 September 2019.

¹¹⁶ Kumpulan Hadits, <https://tafsirq.com/hadits/muslim?page=68>, diakses tanggal 30 September 2019.

kelak pada hari kiamat ia menjumpai Allah sementara di wajahnya tidak ada sekerat daging pun.” (HR. Muslim, no. 1725)¹¹⁷

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ قَالَ وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ كِلَاهُمَا عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ يَزِيدَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ قَوْلُهُ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَعَوَّذَ مِنْ أَشْيَاءَ ذَكَرَهَا وَالْبُخْلُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Ayyub] telah menceritakan kepada kami [Ibnu ‘Ulayyah] dia berkata; dan telah mengabarkan kepada kami [Sulaiman At Taimi] telah menceritakan kepada kami [Anas bin Malik] dia berkata; “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah berdoa: ‘Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, rasa takut, kepikunan, dan kekikiran. Dan aku juga berlindung kepada-Mu dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian.’” Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Kamil] telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Zurai] Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin ‘Abdul A’la] telah menceritakan kepada kami [Mu’tamir], keduanya dari [At Taimi] dari [Anas bin Malik] dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dengan Hadits yang serupa. Namun Yazid di dalam Haditsnya tidak menyebutkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam; serta fitnah kehidupan dan kematian.’ Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib Muhammad bin Al ‘Ala] telah mengabarkan kepada kami [Ibnul Mubarak] dari [Sulaiman At Taimi] dari [Anas bin Malik] dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau berlindung dari beberapa hal yang beliau sebutkan, dan dari kekikiran. (HR. Muslim, No. 4878)¹¹⁸

¹¹⁷ Kumpulan Hadits, <https://tafsirq.com/hadits/muslim?page=170>, diakses tanggal 30 September 2019.

¹¹⁸ Kumpulan Hadits, <https://tafsirq.com/hadits/muslim?page=303>, diakses tanggal 30 September 2019.

حَدَّثَنَا ابْنُ مُنَيَّرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزُؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Numair] telah menceritakan kepada kami [ayahku] telah menceritakan kepada kami [Abdul Malik] dari [‘Atha’] dari [Jabir] dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam, kecuali setiap tanamannya yang dimakannya bernilai sedekah baginya, apa yang dicuri orang darinya menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan binatang liar menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan burung menjadi sedekah baginya, dan tidaklah seseorang mengambil darinya, melainkan ia menjadi sedekah baginya.” (HR. Muslim, No. 2900).¹¹⁹

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ رَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada saya [Muhammad] telah menceritakan kepada kami [‘Abdullah bin Yazid] telah menceritakan kepada kami [Sa’id] berkata, telah menceritakan kepada saya [Abu Al Aswad] dari [‘Urwah] berkata,, [‘Aisyah radliallahu ‘anha] berkata: “Para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah para pekerja yang pada suatu hari mereka hadir ke masjid dalam keadaan lusuh dan kotor sehingga dikatakan kepada mereka seandainya kalian mandi lebih dahulu”. [Hammam] meriwayatkan dari [Hisyam] dari [bapaknya] dari [‘Aisyah radliallahu ‘anha]. (HR. Bukhari, No. 1929)¹²⁰

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

¹¹⁹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Edisi Indonesia, (Beirut: Al-Maktab Al Islami, tt), h. 683-685.

¹²⁰ *Kumpulan Hadits*, <https://tafsirq.com/hadits/bukhari?page=129>, diakses tanggal 30 September 2019.

الْقُرْآنُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَيُتَسَرَّجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسَرَّجَ دَوَابُّهُ وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا
 مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Telah bercerita kepada kami [‘Abdullah bin Muhammad] telah bercerita kepada kami [‘Abdur Razzaq] telah mengabarkan kepada kami [Ma’mar] dari [Hammam] dari [Abu Hurairah radliallahu ‘anhu] dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Telah dimudahkan bagi Nabi Daud ‘alaihi salam membaca al-Qur’an (Kitab Zabur). Dia pernah memerintahkan agar pelana hewan-tunggangannya disiapkan, maka dia selesai membaca Kitab sebelum pelana hewan tunggangannya selesai disiapkan, dan dia tidak memakan sesuatu kecuali dari hasil usaha tangannya sendiri”. [Musa bin ‘Uqbah] meriwayatkan dari [Shafwan] dari [‘Atha’ bin Yasar] dari [Abu Hurairah radliallahu ‘anhu] dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. (HR. Bukhari, No. 3164)¹²¹

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا
 أَخَذَ مِنْهُ أَمِنْ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Adam] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Dza’bi] telah menceritakan kepada kami [Sa’id Al Maqbariy] dari [Abu Hurairah radliallahu ‘anhu] dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapaknya apakah dari barang halal atautkah haram”. (HR. Bukhari, no. 1918)¹²²

c. Peran Modal Dalam Investasi Syariah

1) Pengertian Modal

Modal dalam Islam disebut juga dengan أس المال (*ras al-mal*). Allah swt. berfirman:

¹²¹ Kumpulan Hadits, <https://tafsirq.com/hadits/bukhari?page=208>, diakses tanggal 30 September 2019.

¹²² Kumpulan Hadits, <https://tafsirq.com/hadits/bukhari?page=128>, diakses tanggal 30 September 2019.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-Baqarah,2: 279)¹²³

Ras al-mal menurut bahasa adalah pokok harta tanpa laba maupun tambahan. Dalam hadits diistilahkan juga dengan sulb al-mal. Sebagaimana dalam hadits riwayat Imam Nasai.¹²⁴

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعَذَّبُ غَيْرَ بئرِ
رُومَةَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي بئرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا
فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبٍ مَالِي

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang ke Madinah dan tidak ada padanya air segar selain sumur Rumah, kemudian beliau bersabda: "Barangsiapa membeli sumur Rumah kemudian meletakkan padanya embernnya bersama dengan ember orang-orang muslim dengan kebaikan darinya, maka ia akan berada dalam Surga." Lalu aku membelinya dari hartaku secara murni.

Sedangkan Muhammad Qal'azi dan Hamid Shadiq mengatakan

رأس المال :مجموعة التكاليف التي تقوم عليها السلعة =مجموع الثمن والتكاليف
الآخري كالنقل والتخزين ونحو ذلك

Modal adalah kumpulan biaya untuk adanya komoditas = kumpulan harga dan biaya lain seperti transportasi dan gedung¹²⁵

¹²³ Departemen Agama RI, *Quran dan ...*, h. 48.

¹²⁴ Nazih Hammad, *Mu'jam al-Mustalahât al-Mâliyyah wa al-Iqtishâdiyyah fî lughat al-Fuqahâ'*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2008), h. 218.

¹²⁵ Muhammad Qal'azi dan Hamid Shadiq, *Mujam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut: Dar Nafais, 1988), h. 217

Sedangkan menurut Afzalurrahman, modal adalah kekayaan yang membantu menghasilkan kekayaan selanjutnya.¹²⁶

2) Urgensi Modal

Afzalurrahman mengatakan, Rasulullah saw. menekankan pentingnya modal dalam ucapan ini: “Tidak akan ada kecemburuan kecuali dalam dua hal: orang yang diberi oleh Allah kekayaan (atau modal) dan kekuasaan untuk membelanjakannya dalam menegakkan kebenaran, dan orang yang dijamin oleh Allah dengan ilmu pengetahuan yang banyak untuk menilai dan mengajarkannya pada orang lain. (Bukhari).¹²⁷

Petumbuhan modal dianggap penting dan setiap Muslim diharapkan untuk menginvestasikan uangnya ke dalam bisnis. Sehubungan dengan ini, hadist berikut berarti: “Tuhan tidak memberkahi harga tanah dan rumah yang tidak diinvestasikan lagi pada sebuah tanah”, (Ibn Majah dan Kitab al-Karaj li Yahya). Hadits lain yang menekankan pentingnya modal, mengungkapkan: “Barangsiapa yang menjual sebuah rumah atau tanah yang mendatangkan keuntungan, lalu tidak menginvestasikan kembali uang itu kedalam sesuatu yang sejenis itu, ia tidak akan diberkati.¹²⁸

3) Macam-Macam Modal

Secara fisik terdapat dua jenis modal yaitu fixed capital (modal tetap), dan circulating capital (modal yang bersirkulasi). Fixed capital contohnya gedung-gedung, mesin-mesin, mobil dan lainnya yaitu, benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati, eksistensi substansinya tidak berkurang. Adapun circulating capital itu seperti bahan baku, uang dan lainnya yaitu benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati, substansinya juga hilang.¹²⁹

¹²⁶ Afzalurrahman, Muhammad as A Trader. Terj. Dewi Nurjulianti, dkk. Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2010), h. 263

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*, h. 265-266

¹²⁹ Mustafa Edwin Nasution, et.al, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 253. Dalam Fikih ekonomi Umar bin Khatab bahwa saham modal barang dalam produksi dapat dilakukan sesuai salah satu dari dua cara sebagai berikut: 1. Musyarakah 2. Ijarah. Adapun modal uang bisa menjadi saham dalam produksi sesuai salah satu dari dua system ini: 1. Musyarakah 2. Qardhul Hasan. Dr. Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, al-Fiqh al-Iqtishadi li

Perbedaan keduanya dalam syari'ah dapat kita lihat sebagai berikut. Modal tetap pada umumnya dapat disewakan tetapi tidak dapat dipinjamkan (*qarhd*). Sedangkan modal sirkulasi yang bersifat konsumtif bisa dipinjamkan (*qardh*), tetapi tidak dapat disewakan. Hal itu disebabkan karena ijarah (sewa menyewa, pen) dilakukan kepada benda-benda yang memiliki karakteristik substansinya dapat dinikmati secara terpisah atau secara sekaligus. Ketika sebuah barang disewakan, ia dinikmati oleh penyewa namun status kepemilikannya tetap pada siempunya. Uang tidak memiliki sipat seperti itu.

Modal yang masuk pada kategori tetap seperti kendaraan akan mendapatkan return on capital dalam bentuk upah dari penyewaan jika transaksi yang digunakan ijarah. Juga mendapatkan return on capital dalam bentuk bagian dari laba jika yang digunakan adalah musyarakah.

Circulating capital (dalam hal ini uang) tidak akan return on capital dalam bentuk ijarah. Uang dalam Islam bukan sebagai komoditas yang bisa disewakan atau diperjual belikan. Ia dibutuhkan sebagai alat tukar saja. Ia memiliki return on capital bila dikembangkan dalam bentuk akad mudharabah. Ia juga dapat dipinjamkan tetapi tidak diperbolehkan pengembaliaannya melebihi pokok. Kelebihan dmikian termasuk riba.¹³⁰

Hal senada juga dikatakan oleh Hulwati dia mengatakan, perbedaan uang dengan modal adalah modal akan tetap kalau disewakan, ketika modal dalam bentuk barang disewakan, maka pemilik dapat keuntungan dari sewa. Ketika masa sewa berakhir barang dikembalikan pada pemilik, tetapi tidak dapat dipinjamkan. Sementara modal dalam uang dapat dipinjamkan tetapi ia tidak dapat disewakan. Ketika seseorang meminjam uang, maka peminjam mesti mengembalikan dalam jumlah yang sama. Kelebihan dalam nilai pokok adalah riba. Karena uang dalam Islam bukan komoditi yang dapat disewa beli dengan kelebihan, maka uang hanya sebagai alat tukar saja, akan tetapi ia dapat memberikan keuntungan kalau dikembangkan dalam bentuk mudharabah.¹³¹ Uang bukanlah komoditi yang

Amiril Mukminin Umar Ibn al-Khatab. Terj. Asmuni Solihin Zamakhsyari, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab, (Jakarta: Khalifa, 2003), h. 102

¹³⁰ *Ibid.*, 253-254

¹³¹ Dra Hulwati, M.Hum., Ph.D, Ekonomi Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2009), h. 60

mempunyai harga sehingga dapat diperjual belikan. Fungsi uang hanya sebagai medium of change dan unit of account.¹³²

Dalam kaidah dikatakan:

كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارته وما لا فلا

Setiap yang dimanfaatkan dan barangnya tetap ada bisa disewakan dan apa yang tidak maka tidak bisa disewakan

Oleh karena itu dalam Islam uang, air, susu, buah-buahan, bahan bangunan, barang yang ditimbang dan ditakar dan lain sebagainya tidak bisa disewakan karena ketika digunakan dan dimanfaatkan ain/dzatnya akan hilang.

4) Ketentuan Islam Mengenai Modal

Beberapa ketentuan hukum Islam mengenai modal dikemukakan A. Muhsin Sulaiman, sebagaimana yang dikutip oleh Rustam Effendi¹³³, adalah sebagai berikut:

- a) Islam mengharamkan penimbunan modal
- b) Modal tidak boleh dipinjam dan meminjamkan dengan cara riba
- c) Modal harus dengan cara yang sama dengan mendapatkan hak milik (dengan cara yang halal misalnya)
- d) Modal yang mencapai nisab, zakatnya wajib dikeluarkan (85 gram emas)
- e) Modal tidak boleh digunakan untuk memproduksi dengan cara boros
- f) Pembayaran gaji buruh/pekerja harus sesuai dengan ketentuan gaji dalam Islam.

3. Tujuan dan Eksistensi Syari'at Islam

a. Tujuan Syari'at Islam

Menurut al-Ghazali tujuan syari'ah bagi manusia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terbagi atas lima faktor, yaitu: 1) menjaga agama mereka (*hifdzu al-diin*); 2) menjaga nyawa (kehidupan) mereka (*hifdzu al-nafs*); 3) menjaga akal (pikiran) mereka (*hifdzu al-'aql*); 4) menjaga

¹³² Mohamad Hidayat, Pengantar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h.255

¹³³ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003) him. 63

keturunan (generasi) mereka (*hifdzu al-nasl*); dan 5) menjaga harta benda mereka (*hifdzu al-mal*). Perlindungan terhadap kelima faktor tersebut, bukan hanya kepentingan individu, tetapi juga merupakan penjaminan terhadap kepentingan publik. Pemerintah (penguasa) merupakan pihak yang dibebani Allah SWT untuk mengontrol dan melindungi kepentingan publik dengan otoritas dan beragam sarana yang dimilikinya.

Jadi, tujuan utama syari'ah adalah mendidik setiap manusia, memantapkan keadilan dan merealisasikan keuntungan bagi setiap manusia di dunia maupun di akhirat. Syari'at mengatur setiap aspek kehidupan umat Muslim, baik politik, ekonomi dan sosial dengan menjaga keyakinan, kehidupan akal, dan kekayaan mereka. Tujuan Allah SWT merumuskan syari'at Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan dimaksud hendak dicapai melalui *taklif*. *Taklif* itu baru dapat dilaksanakan bila memahami sumber hukum Islam, kemudian tujuan itu tidak akan tercapai kecuali dengan keluarnya seseorang dari diperbudak oleh hawa nafsunya, menjadi hamba Allah dalam arti tunduk keada-Nya. Salah satu ayat al-quran yang menunjukkan pernyataan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia yaitu surat al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi: “dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Masing-masing lima pokok tersebut dalam mewujudkan dan memeliharanya dikategorikan kepada beberapa klasifikasi menurut tingkat prioritas kebutuhan, yaitu kebutuhan *daruriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniat*. Ketiganya harus terwujud dan terpelihara. Memelihara kebutuhan *daruriyat* dimaksudkan perwujudan dan perlindungan terhadap lima pokok yang telah diuraikan dalam batas jangan sampai terancam eksistensinya. Memelihara kebutuhan *hajiyyat* dimaksudkan perwujudan dan perlindungan terhadap hal-hal yang diperlukan dalam kelestarian lima pokok tersebut, tetapi di bawah kadar batas kepentingan *daruriyat*. Tidak terpeliharanya kebutuhan ini, tidak akan membawa terancamnya eksistensi lima pokok tersebut, tetapi membawa kepada kesempitan dan kepincikan, baik dalam usaha mewujudkan maupun dalam pelaksanaannya; sedangkan kepincikan dan kesempitan itu di dalam ajaran Islam

perlu disingkirkan. Berdasarkan uraian di atas, untuk mewujudkan dan melestarikan tiga kategori kebutuhan tersebut, Allah SWT menurunkan hukum-Nya. Melaksanakan taklif hukum-Nya itu, maka kebutuhan yang diperlukan oleh setiap manusia mukallaf akan terwujud dan terpelihara, yang merupakan kebahagiaan bagi umat manusia atau yang biasa disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹³⁴

b. Eksistensi Syari'at Islam

Syariah Islam *compatible* bagi segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia. Teks-teks Syariah (*nusûs al-syari'ah*) dapat mewujudkan-bagi manusia-*masalah* pada setiap ketentuan hukumnya. Tidak ada satu pun masalah hukum yang muncul kecuali sudah ada-di dalam Kitab Allah-petunjuk jalan solusi atasnya.¹³⁵ Syariah Islam merupakan syariah yang selaras dengan *fitrah* kemanusiaan (*syari'at al-fitrah*), yang memperhatikan segenap sisi kehidupan manusia, dan yang menawarkan tuntunan hidup yang berkeadilan. Syariah Islam juga merupakan syariah yang selaras dengan moralitas kemanusiaan yang luhur, yang membebaskan manusia dari cengkeraman kuasa hawa nafsu yang destruktif. Syariah Islam merupakan syariah yang bervisi dan bermisi mulia.¹³⁶ Syariah Islam senantiasa memperhatikan realisasi *masalah* bagi segenap hamba-Nya. Karena itulah, konsep *masalah* memberi saham besar bagi terwujudnya panduan yang layak diperhatikan sang *mujtahid* guna mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh *nass* Syara'.¹³⁷ Jelaslah bahwa *masalah* menjadi elan vital bagi Syariah Islam sehingga ia senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya; dan ini pada gilirannya menjadikan Syariah Islam tetap *up to date* menyapa segenap persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan.

¹³⁴ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 22-23.

¹³⁵ Husain Hâmid Hisân, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), h. 607.

¹³⁶ Lihat Mannâ' al-Qattân, *Raf' al-Haraj fi al-Syari'at al-Islâmiyyah*, (Riyad: al-Dâr al-Su'ûdiyyah, 1402 H/1982 M), h. 61-62.

¹³⁷ Sa'id Ramadân al-Bûti, *Dawâbit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah wa al-Dâr al-Muttahidah, 1421 H/2000 M), h. 69

Fondasi bangunan Syariah Islam itu direpresentasikan oleh *masalahah* yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan *ukhrawi*-nya. Syariah Islam itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan (*'adâlah*), kasih sayang (*rahmah*), dan *masalahah*,. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari Syariah Islam, meskipun dicari rasionalisasi (*ta'wîl*) untuk menjadikannya sebagai bagian dari Syariah Islam.¹³⁸ Keagungan dan keluhuran Syariah Islam termanifestasikan pada kompatibilitas hukum-hukum Syariah dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh *masalahah* yang menggerakkannya.¹³⁹

Mewujudkan *masalahah* merupakan peran vital Syariah Islam. Dalam setiap aturan hukumnya, *al-Syâri'* mentransmisikan *masalahah* sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindar keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, *masalahah* itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan Syara' berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh Syara', bukan oleh hawa nafsu manusia.¹⁴⁰

4. *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah secara harfiah berarti tujuan hukum. *Maqashid*, dari kata *qashada* yang berarti tujuan. Tujuan atau hasilnya yang diharapkan dari perundang-undangan undang-undang.¹⁴¹ *Maqasid al-Syari'ah* telah secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau disimpulkan dari ini oleh sejumlah ilmuwan. Semua hal ini mengatakan urgensi pemenuhan *masalahah (jalb al-masalih)* dari semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya (*daf'u al-mafasid / dar'u al-mafasid*).

¹³⁸ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Âlamîn*, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1425 H/2004 M), Juz ke-3, h. 5.

¹³⁹ Husain Hâmid Hisân, *Fiqh al-Maslahah wa Tatbîqâtuhu al-Mu'âsirah*, h.4, dalam Seminar Internasional Tatanan Fundamental Ekonomi Islam Kontemporer, (Jeddah: IRTIIslamic Development Bank, Ramâdan, 1413 H), h. 4. (tidak diterbitkan).

¹⁴⁰ Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân, *al-Masâlih al-Mursalah wa Makânatuha fi al-Tasyrî'*, (t.tp: Matba'at al-Sa'âdah, 1403 H/1983 M), h. 12 dan 13

¹⁴¹ Kamil Iskandar, *Al-Munjid Al Wasith*, (Beirut: Daar al-Masyriq), h. 855

Secara terminologi, *maqashid* berarti makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam tiap syariat baik umum maupun khusus, guna memastikan *maslahat* hamba-Nya. Maksud dari ‘makna’ di sini adalah sebab, maksud dan sifat. ‘Hikmah’ berarti sifat, sifat syariat Islam yaitu mendapatkan *mashlahah*. Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan. Yaitu:

- a. Kemaslahatan *dharuriyyat* (inti/pokok): Kemaslahatan *maqashid* syariah yang berada di dalam urutan paling atas.
- b. Kemaslahatan *ghairu dharuriyyat* (bukan pokok): Kemaslahatan pelengkap tergolong penting dan tidak dapat dipisahkan.

Menurut as-Syatibi *maqashid* dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu *maqshud asy-syari’* dan *maqshud al-mukallaf*. Lebih lanjut as-Syatibi menjelaskan bahwa *maqshud asy-syari’* terdiri dari empat bagian: 1) *qashdu al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah*; 2) *qashdu al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah li al-ifham*; 3) *qashdu al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah li al-taklif bi muqtadhaha*; 4) *qashdu al-syari’ fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari’ah*. Sedangkan bagian *qashdu al-mukallaf*, Syatibi tidak menyebutkan macam-macamnya.¹⁴²

Syatibi kemudian membagi *maqashid* dalam tiga gradasi tingkatan, yaitu: *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *Dharuriyyat* yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat essensial bagi kebutuhan manusia. Jika seseorang tidak terpenuhi *masalahah dharuriyyah*-nya, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan sesuai dengan *masalahah dharuriyyah* yang hilang.¹⁴³ *Maslahah dharuriyyat* ini dikenal dengan istilah *al-kulliyyat al-khams* atau *adh-dharurat al-khams* (lima hal inti), yang dianggap sebagai dasar-dasar tujuan umum syariat yang harus dijaga. Adapun lima hal pokok itu adalah:

1. *Hifzu al-din* (pemeliharaan agama/keimanan)
2. *Hifzu al-Nafs* (pemeliharaan jiwa)

¹⁴² Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), h. 219.

¹⁴³ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: IIIT, 1995), h. 145-146

3. *Hifzu al-'Aql* (pemeliharaan akal)
4. *Hifzu al-Nasl* (pemeliharaan keturunan)
5. *Hifzu al-Maal* (pemeliharaan harta)

Hajjiyyat yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpeliharanya kebutuhan ini tidak mengancam lima kebutuhan pokok atau kebutuhan manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. *Maslahah hajjiyyah* merupakan *mashlahah* yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, ketiadaan *maslahah hajjiyyah* tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat.¹⁴⁴ *Tahsiniyyat* yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.¹⁴⁵ *Maslahah tahsiniyyah* ialah pelengkap atau penyempurna dari dua *maqashid* sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia.¹⁴⁶

5. *Maqashid* Ekonomi Syari'ah

Menurut Muhammad Thahir Ibn Asyur, sebagaimana dikutip al-Raisuni, *maqashid muamalat* dapat dibagi menjadi lima tujuan, yaitu: *rawaj* (perputaran ekonomi via jual-beli), *wudhuh* (kejelasan-*well defined*), *hifz* (dapat disimpan), *tsabat* (stabil), *adl* (keadilan). *Rawaj* berarti bahwa harta benda ditujukan untuk diperjualbelikan agar kekayaan tersebut menjadi berkembang. *Wudhuh* berarti harta ditujukan agar dikelola secara transparan dan akuntabel serta jelas kepemilikannya. *Hifz* berarti harta sebagai barang titipan Allah ditujukan agar dipelihara dan dibelanjakan secara *syar'i*. *Tsabat* berarti harta benda ditujukan untuk validitas kepemilikan sehingga membangkitkan etos kerja yang tinggi dalam mengelolanya dan mengembangkannya dengan cara-cara yang sah dan

¹⁴⁴ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, h. 146

¹⁴⁵ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 337.

¹⁴⁶ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, h. 146

halal. *Adl* berarti harta harus dikelola secara berkeadilan tanpa menzalimi orang lain.¹⁴⁷

Riyadh Mansur al-Khulaifi membagi dua sisi dalam melihat *maqashid muamalat*: sisi *al-adam* (pelarangan) dan sisi *al-wujud* (perintah). Pada aspek ini, al-Khulaifi menjelaskan enam hal, yaitu: larangan menyerang orang lain untuk mendapatkan harta; larangan membuang-buang harta dan *ishraf* dalam membelanjakannya; perintah disyariatkan pelaksanaan *hudud* dan *ta'zir* bagi pelaku kriminal; kewajiban memberikan jaminan harta yang diambil secara diam-diam (*dhaman al-maghsub*); mempertahankan diri untuk menjaga hartanya; adanya dokumentasi hutang, saksi, dan mengambil jaminan.¹⁴⁸

D. Faktor Intenal dan Eksternal Dalam Berinvestasi

Menurut Mubyarto menyatakan bahwa ada faktor-faktor pokok yang menyebabkan perusahaan melakukan investasi dapat berkembang dengan baik apabila dimiliki, antara lain adalah :

1. Faktor Pokok

a. Kebijakan Pemerintah

Thomas R. Dye mengatakan Kebijaksanaan pemerintah merupakan apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi Thomas R. Dye itu didasarkan pada kenyataan, bahwa banyak sekali masalah-masalah yang harus diatasinya, banyak sekali keinginan dan kehendak rakyat yang harus dipenuhinya.

Carl J. Friedrich mengatakan kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau Pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu.

¹⁴⁷ Ahmad al-Raisuni, *I'tibar al-Maqashid fi al-Fatawa al-Maliyah*, h. 3, Lihat juga, Husain Hamid Hasan, *Maqashid al-Syariah fi al-Hayah al-Itishadiyah*, h. 179.

¹⁴⁸ Riyadh Mansur al-Khulaifi, *al-Maqashid al-Syariah wa Atsaruha Fi Fiqh al-Muamalah al-Maliyah*, h. 25-27.

Kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau Pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu.

Dimock dalam bukunya yang berjudul *Public Administration* mengarahkan kebijaksanaan pemerintah adalah perpaduan dan kristalisasi dan pada pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan banyak orang dan golongan-golongan dalam masyarakat.¹⁴⁹

Kebijakan pemerintah berisi peraturan perundang-undangan sebagai produk dari kebijakan publik merupakan komoditas politik yang menyangkut kepentingan publik. Namun demikian, berbagai dinamika yang terjadi dapat membawa konsekuensi bahwa kebijakan publik pun dapat mengalami perbaikan. Oleh karenanya, kebijakan publik pada satu pandangan tertentu, dipersyaratkan bersifat fleksibel, harus bisa diperbaiki, dan disesuaikan dengan perkembangan dinamika pembangunan. Kesesuaian suatu kebijakan publik sangat tergantung kepada penilaian masyarakat.¹⁵⁰

b. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga.¹⁵¹

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika

¹⁴⁹ Soenarko, *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Airlangga University Press, 2003), h. 41-43.

¹⁵⁰ Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, *Jurnal Publik* Vol. 11; No. 01; 2017; h. 1-12.

¹⁵¹ MT. Rionga & Yoga Firdaus, *Tenaga Kerja*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 2.

mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.¹⁵² Simanjuntak (dalam Subri)¹⁵³ mengelompokkan tenaga kerja menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*labor force*) terdiri dari golongan yang bekerja dan menganggur atau yang mencari pekerjaan. Golongan yang bukan angkatan kerja terdiri dari yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain yang menerima pendapatan. Jumlah tenaga kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia.

c. Sumber Daya Alam

Kuncoro yang menyatakan bahwa sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah akan menentukan tingkat penerimaan daerah. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak dan dapat dikelola secara baik tentunya akan berkontribusi positif terhadap jumlah penerimaan daerah.¹⁵⁴

Pengelolaan sumber daya alam dan energi mempunyai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dengan tujuan antara sebagai sumber devisa, pemenuhan kebutuhan manusia, pelestarian lingkungan, pembangunan daerah/ masyarakat dan pemerataan.¹⁵⁵

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya.¹⁵⁶

Selain memiliki fungsi ekonomi, sumber daya alam juga memiliki fungsi sosial dan lingkungan yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung pada kesejahteraan manusia.¹⁵⁷ Jasa lingkungan seperti air, tanah yang subur, udara yang bersih, maupun siklus nutrisi di laut, berperan dalam meningkatkan produksi pertanian dan perikanan.

¹⁵² Mulyadi Subri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Edisi pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003).

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 76.

¹⁵⁵ *Ibid.*, h. 187.

¹⁵⁶ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 2.

¹⁵⁷ A. Fauzi, *Valuasi Ekonomi dan Penilaian Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, (Bogor: IPB Press, 2014).

Menurut Fauzi, sektor perikanan seperti halnya dengan sektor ekonomi lainnya, ia merupakan salah satu aktivitas yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan suatu bangsa. Sebagai salah satu sumber daya alam yang bersifat dapat diperbarui (*renewable*), pengelolaan sumber daya ini memerlukan pendekatan yang bersifat menyeluruh dan hati-hati.¹⁵⁸

Konsep sumber daya alam mencerminkan penafsiran atau penilaian manusia dalam hubungannya dengan kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karena itu sumber daya alam tidak hanya mencakup tanah, air, udara, hutan dan mineral, tetapi juga lingkungan hidup. Hal ini diungkapkan oleh Anthony C Fisher.¹⁵⁹

Dengan demikian, maka sumber daya alam memiliki hubungan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat yang memiliki potensi alam perikanan.¹⁶⁰

d. Sarana dan Prasarana

Prasarana: Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya).¹⁶¹ Sedangkan *sarana* adalah segala sesuatu (bisa berupa syarat atau upaya) yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan.¹⁶²

Dalam kamus besar bahasa Indonesia infrastruktur diartikan sebagai sebuah sarana dan prasarana umum. Dimana sarana umum dapat berupa fasilitas publik seperti kereta api, rumah sakit, jembatan, jalan, sanitasi, telepon, air bersih, listrik, sekolah dan sebagainya. Sedangkan Dalam ilmu ekonomi infrastruktur publik merupakan wujud dari modal

¹⁵⁸ A. Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Teori dan Aplikasi)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004).

¹⁵⁹ Suparmoko Irawan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), h. 102.

¹⁶⁰ Hasil Penelitian Badriyyah Djula, Dosen Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Neg. Gorontalo, *Sumber Daya Alam Dan Pertumbuhan Ekonomi*, 2009.

¹⁶¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 893.

¹⁶² *Ibid.*, h. 999.

publik (*public capital*) dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Infrastruktur dalam hal ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan.¹⁶³

e. Sumber Energi

Energi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi kehidupan manusia. Berbagai hal mulai dari transportasi, penerangan dan lainnya senantiasa membutuhkan energi. Sebagian besar kebutuhan energi dipenuhi dari minyak bumi sebagai bahan bakunya. Kondisi minyak bumi pada saat ini, persediaan semakin menipis dan harga semakin meningkat, mendorong kita untuk mengembangkan sumber energi alternatif.¹⁶⁴

Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha (kerja) atau melakukan suatu perubahan. Energi merupakan bagian dari suatu benda tetapi tidak terikat pada benda tersebut. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat dirubah bentuknya. Energi juga disebut tenaga. Satuan energi menurut Satuan Internasional (SI) adalah joule (J). Sedangkan satuan energi lain yaitu erg, kalori, dan kWh. Energi bersifat fleksible, artinya dapat berpindah dan berubah.¹⁶⁵

Terdapat dua kategori energi yaitu energi potensial dan energi kinetik. Terdapat banyak macam energi diantaranya energi mekanik, listrik, elektromagnetik, kimia, panas, nuklir, angin, dan lain-lain. Sebagian besar energi tersebut harus dirubah supaya dapat digunakan.¹⁶⁶

Tenaga panas bumi (*geothermal*) merupakan pemanfaatan energi panas bumi dari bawah permukaan bumi untuk menghasilkan listrik maupun panas. Pemanfaatan energi panas bumi adalah cara yang bersih

¹⁶³ N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), h. 38.

¹⁶⁴ Tatang H. Soerawidjaja, *Peningkatan Kelangsungan Ekonomi Usaha Pengembangan Jarak Pagar Melalui Pengelolaan Secara Terpadu*, (Bandung: Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, ITB, 2007).

¹⁶⁵ *Pengertian Energi dan Beberapa Macam*, <http://furqanwera.blogspot.com/2012/01/pengertian-energi-dan-beberapa-macam.html>, diakses tanggal 27 Mei 2017.

¹⁶⁶ *Ibid.*

dan terjangkau untuk menghasilkan listrik dan panas, dan menghindari penggunaan bahan bakar fosil.¹⁶⁷

Peranan energi dalam proses pembangunan nasional Indonesia terbukti sangat besar. Bagi Indonesia, energi berperan ganda sebagai penghasil utama devisa melalui ekspor energi dan pendorong kegiatan industrialisasi. Peran penting yang dimainkan energi membuat proses pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor energi. Keberhasilan pembangunan nasional erat kaitannya dengan keberhasilan pembangunan di sektor energi. Untuk menjamin berlangsungnya proses pembangunan energi perlu disusun serangkaian kebijakan di bidang energi. Dengan adanya kebijakan energi tersebut diharapkan dapat tercipta iklim yang sesuai bagi pelaksanaan tujuan pembangunan energi. Formulasi kebijakan energi pertama kali muncul pada 1976. Tujuannya waktu itu adalah memaksimalkan pemanfaatan sumber daya energi.¹⁶⁸

Energi panas bumi merupakan sumber energi terbarukan sehingga pemanfaatannya bisa berkelanjutan, dan berpotensi sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar berbasis fosil untuk pembangkit tenaga listrik di Indonesia sehingga menunjang kemandirian energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Pemerintah perlu memberikan perhatian yang besar pada penelitian dan implementasi energi terbarukan, serta memberikan insentif yang dapat menarik investasi untuk mencapai target pengembangan energi panas bumi dan energy mix pada tahun 2025, antara lain dengan mengembangkan

¹⁶⁷ Richard W. Asplund, *Profiting from Clean Energy: a Complete Guide to Trading Green in Solar, Wind, Ethanol, Fuel Cell, Power Efficiency, Carbon Credit Industries, and More Profiting from Clean Energy*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2008, h. 163.

¹⁶⁸ Purnomo Yusgiantoro, *Ekonomi Energi: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2000), h. 338-339.

kebijakan yang komprehensif yang memberikan kejelasan bagi investor untuk melakukan investasi di bidang panas bumi.¹⁶⁹

Pemanfaatan energi panas bumi adalah cara yang bersih dan terjangkau untuk menghasilkan listrik dan panas, dan menghindari penggunaan bahan bakar fosil.¹⁷⁰

f. Pemasaran Hasil Produksi

Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi tidak hanya terbatas pada pembuatannya saja tapi juga penyimpanan, distribusi, pengangkutan, pengeceran dan pengemasan kembali.¹⁷¹

Produksi adalah suatu proses dimana barang dan jasa yang disebut input diubah menjadi barang-barang dan jasa-jasa lain yang disebut output. Banyak jenis-jenis aktivitas yang terjadi di dalam proses produksi, yang meliputi perubahan-perubahan bentuk, tempat dan waktu penggunaan hasil-hasil produksi. Produksi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menciptakan atau menambah nilai atau manfaat baru. Jadi produksi meliputi semua aktivitas menciptakan barang dan jasa.¹⁷²

Pemasaran hasil produksi merupakan kegiatan kreasi dan realisasi sebuah standar hidup. Kegiatan pemasaran meliputi menyelidiki dan mengetahui apa yang diinginkan konsumen, kemudian merencanakan dan mengembangkan sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut, hingga akhirnya memutuskan cara terbaik untuk menentukan harga, promosi produk, dan mendistribusikan produk tersebut.¹⁷³ Menurut Stanton (dalam Umar), pemasaran hasil produksi meliputi keseluruhan

¹⁶⁹ Hilma Meilani dan Dewi Wuryandani, *Potensi Panas Bumi Sebagai Energi Alternatif Pengganti Bahan Bakar Fosil Untuk Pembangkit Tenaga Listrik di Indonesia*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 1 No. 1, Juni 2010 h. 47 – 74.

¹⁷⁰ Richard W. Asplund, *Ibid*, h. 163.

¹⁷¹ R.L Millers dan E.R Meiners, *Teori Mikro Ekonomi Intermediate*, Terj. Haris Munandar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

¹⁷² Ari Sudarman, *Teori Ekonomi Mikro*, Jilid I, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1999).

¹⁷³ Thamrin Abdullah, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

sistem yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, hingga mempromosikan, dan distribusi hasil produksi dari barang atau jasa yang akan dipasarkan.¹⁷⁴

Menurut Arsyad hasil produksi yang optimal di suatu daerah berarti membawa pengaruh terhadap peningkatan kesempatan kerja, dimana dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan produksi suatu daerah maka daerah tersebut akan keluar dari lingkaran kemiskinan serta kesejahteraan masyarakat daerah tersebut akan meningkat pula. Pemasaran produk hasil keluaran produksi haruslah dikelola oleh orang-orang yang tepat agar hasil produksi dapat terjual untuk mendapatkan keuntungan/profit yang diharapkan sebagai pemasukan untuk pembiayaan kegiatan produksi berikutnya.¹⁷⁵

2. Faktor Penunjang/Faktor Eksternal

1. Budaya Masyarakat

Kebudayaan sebagai wujud yang mencakup antara gagasan atau ide, kelakuan dan hasil kelakuan sedangkan masyarakat adalah sekelompok individu yang secara langsung atau tidak langsung saling berhubungan sehingga merupakan sebuah satuan kehidupan yang berkaitan antara sesamanya dalam sebuah satuan kehidupan yang mempunyai kebudayaan tersendiri.¹⁷⁶ Budaya masyarakat juga berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia dan pemenuhannya melalui fungsi dan pola-pola kebudayaan sehingga kebudayaan sebagai *blueprint* bagi kehidupan manusia.¹⁷⁷

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.¹⁷⁸ Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma,

¹⁷⁴ Umar Husen, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005).

¹⁷⁵ Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2006), h. 289.

¹⁷⁶ Parsudi Suparlan, *Hubungan Antar Suku Bangsa*, (YPKIK, 2004.)

¹⁷⁷ C. Kluckhohn, *Cermin Bagi Manusia*, Parsudi Suparlan Editor *Manusia Kebudayaan dan Lingkungannya*, Cet. II, (Jakarta: Grafindo Persada, 1994).

¹⁷⁸ Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1974).

ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.¹⁷⁹ Menurut Edward B. Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.¹⁸⁰

Sedangkan masyarakat adalah sekelompok individu yang secara langsung atau tidak langsung saling berhubungan sehingga merupakan sebuah satuan kehidupan yang berkaitan antara sesamanya dalam sebuah satuan kehidupan yang dimana mempunyai kebudayaan tersendiri, berbeda dari kebudayaan yang dipunyai oleh masyarakat lain. Budaya masyarakat merupakan sebagai satuan kehidupan sebuah masyarakat yang menempati sebuah wilayah dan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, saling berkaitan dan saling berhubungan dalam menjalankan peranannya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.¹⁸¹

2. Teknologi Informasi

Wijayanto mengatakan bahwa dengan berkembangnya teknologi informasi, perusahaan dihadapkan pada situasi dan kondisi yang menuntut adanya pergeseran paradigma dalam memandang lingkungan sekitarnya. Tidak ada lagi terminologi stabilitas dalam lingkungan bisnis yang global saat ini, yang ada hanyalah stabilitas yang bersifat semu yang harus disikapi secara kritis oleh perusahaan. Lingkungan bisnis sedang dan telah mengalami perubahan signifikan. Perubahan tersebut diperkirakan akan semakin kompleks dan sulit untuk diprediksi. Perusahaan harus

¹⁷⁹ Andreas Eppink, *The Eppink Model and the Psychological Analysis of a Culture*, 2013.

¹⁸⁰ Edward B. Tylor, *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom*, Volume I, (London: Bradburry, Evans and Co., Printers Whitefriars, 1871).

¹⁸¹ P. Suparlan, *Kebudayaan dan Pembangunan*, (Jurnal Media IKA, Vol. 14 No. 11 Jurusan Antropologi UI, 1986), h. 106.

berorientasi pada tuntutan selera konsumen, dengan kata lain disamping efisien perusahaan harus inovatif.¹⁸²

Teknologi informasi akan membawa perusahaan pada kondisi yang menguntungkan yaitu kemudahan memasuki pasar, diferensiasi produk, dan *cost efficiency*.¹⁸³ Dengan kemudahan tersebut maka perusahaan akan mampu meningkatkan kinerjanya. Jadi penggunaan teknologi informasi secara strategik akan mampu membawa perusahaan meningkatkan profitabilitas yang merupakan salah satu indikator *performance*.¹⁸⁴

Dengan investasi dalam TI yang tepat maka perusahaan akan memiliki suatu keunggulan kompetitif sehingga akan mampu bersaing dalam perusahaan dan keberhasilan dalam persaingan akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam bentuk output perusahaan, efisiensi, efektivitas, kekuatan perusahaan, dan nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai saham perusahaan.¹⁸⁵ Mahmood dan Mann juga menyatakan bahwa Investasi yang mantap dalam teknologi informasi harus dipertimbangkan untuk meningkatkan *performance* ekonomi dan strategi organisasi.¹⁸⁶

Karimi et al. dalam penelitiannya juga menemukan adanya hubungan antara ukuran perusahaan dengan keinginan melakukan investasi dalam teknologi informasi sebagai respon strategik perusahaan terhadap globalisasi¹⁸⁷

Untuk meningkatkan tingkat investasi dalam menunjang inovasi, perusahaan mencari terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi.

¹⁸² Yudha Berlina Pratiwi, *Dampak investasi Aset Teknologi Informasi Pemanufakturan Terhadap Efisiensi Operasional Dengan Lingkungan Industri Sebagai Variabel Pemoderasi*. Skripsi. Universitas Jember. Jember, 2012.

¹⁸³ W.J. Kettinger and Chong C. Lee, 1994, *Perceived Service Quality and User Satisfaction With the Information Service Function*, *Decisions Sciences* Vol. 25, h. 737.

¹⁸⁴ Delphie Bandi, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Setting Pendidikan Inklusi*, (Sleman: PT. Intan Sejati Klaten, 2006).

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ Mahmood Mo Adam dan Mann Gary, *Special Issue: Impact of Information Technology Investment on Organizational Performance*. *Journal of Management Information System*, 1993.

¹⁸⁷ Roohangiz Karimi., Alipour, Farhad, *Reduce Job Stress in Organization: Role of Locus of Control*, *International Journal of Business and Social Science*, Vo. 2 No. 18, 1996.

Semula teknologi informasi digunakan hanya sebatas pada pemrosesan data. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi tersebut, hampir semua aktivitas organisasi saat ini telah dimasuki oleh aplikasi dan otomatisasi teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi di lingkungan usaha sudah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas perusahaan. Perusahaan memiliki strategi bisnis masing-masing untuk menjadikan teknologi informasi sebagai pedoman dalam berinvestasi. Investasi teknologi informasi terhadap aset perusahaan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk menentukan strategi bisnis yang tepat dalam mencapai tujuan atau kinerja.¹⁸⁸

3. Kebijakan Pemerintah Pusat

Kebijakan pemerintah merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Kebijakan pemerintah ini dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah pusat, peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah kota/kabupaten dan keputusan walikota/bupati.¹⁸⁹

4. Kondisi Alam/Iklim

Kondisi alam yang baik serta iklim yang sesuai dengan jenis industri akan membantu industri memperlancar kegiatan usahanya. Di Indonesia memiliki iklim tropis tanpa banyak cuaca yang ekstrim sehingga kegiatan produksi rata-rata dapat berjalan dengan baik sepanjang tahun. Kondisi alam yang dimaksud disini adalah iklim yang ada dalam suatu daerah. Iklim adalah sintesis atau kesimpulan dari perubahan nilaiunsur unsur cuaca dalam jangka waktu disuatu tempat atau pada suatu wilayah, Iklim dapat pula diartikan sebagai sifat cuaca disuatu tempat atau wilayah¹⁹⁰ Iklim adalah kondisi rata rata cuaca pada wilayah tertentu dalam waktu

¹⁸⁸ Xue, L., Ray, G., and Sambamurthy, V. 2012. *Efficiency or Innovation: How Do Portfolios? Mis Quartely. Research Article.*

¹⁸⁹ Nugrohu Ryan D, *Kebijakan Publik Evaluasi dan Implementasi*, (Jakarta: Elex Media Computindo, 2003).

¹⁹⁰ Handoko, *Klimatologi Dasar*, (Jakarta PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 3

yang panjang.¹⁹¹ Iklim merupakan salah satu komponen ekosistem alam sehingga kehidupan manusia, hewan dan tumbuh tumbuhan tidak terlepas dari pengaruh atmosfer dengan segala prosesnya.¹⁹²

5. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian merupakan keadaan yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah/Negara dimana adanya proses perubahan secara berkesinambungan yang menuju keadaan yang lebih baik selama periodetertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dicitakan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pendapatan masyarakat yang baik dan tinggi akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli produk industri, sehingga efeknya akan sangat baik untuk perkembangan perindustrian lokal maupun internasional. Pendapatan masyarakat akan sangat terkait dengan angka pertumbuhan ekonomi, tingkat kenaikan harga atau inflasi, serta tingkat suku bunga. Di samping itu saluran distribusi yang baik untuk menyalurkan barang dan jasa dari tangan produsen ke konsumen juga menjadi hal yang sangat penting.¹⁹³

Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi.

¹⁹¹ Husairi Achsan, *Iklim yang Semakin Tidak Menentu*, (Depok: CV Arya Duta, 2008), h. 5

¹⁹² Ance Gunarsih Karta Sapetra, *Klimatologi Pengaruh Iklim Terhadap Tanah dan Tanaman*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2004), h. 1.

¹⁹³ Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 112

Dalam perspektif yang lebih panjang investasi akan menambah stok kapital.¹⁹⁴

E. Kajian Terdahulu

Gita Melina, Azhari Yahya, Mahdi Syahbandir dalam penelitiannya dengan judul “Kendala dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang”. Hasil penelitian ditemukan masih ada beberapa faktor kendala dan hambatan pelaksanaan penanaman modal tidak berjalan maksimal seperti kurangnya kemampuan SDM secara internal BPKS dan sarana infrastruktur penunjang investasi, kondisi kemanan yang belum kondusif, kesulitan dalam menarik minat investor, kurangnya kenyamanan dalam berinvestasi, letak regional Kawasan yang belum strategis serta belum dijadikannya Kawasan Sabang sebagai daerah tujuan investasi.¹⁹⁵

Harikah Maya Sari, dkk dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Iklim Investasi di Kota Samarinda, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh DPMPTSP dalam meningkatkan iklim investasi berpengaruh positif terhadap peningkatan iklim investasi dengan melihat jumlah total keseluruhan PMDN dan PMA setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan grafik garis pertumbuhan PMDN dan PMA yang terus mengalami peningkatan. Adapun strategi yang digunakan adalah pelaksanaan promosi, memperbaiki kualitas pelayanan, serta meningkatkan capaian investasi serta melihat faktor yang mempengaruhi peningkatan iklim investasi di Kota Samarinda.¹⁹⁶

Fery Dona dalam penelitiannya yang berjudul Peran Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pembangunan Ekonomi di Era Otonomi Daerah

¹⁹⁴ Ahmad Ma'aruf dan Latri Wihastuti, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9, Nomor 1, April 2008, h. 44-45.

¹⁹⁵ Gita Melina, dkk, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1(3) Desember 2017.

¹⁹⁶ Harikah Maya Sari, Anwar As, Melati Dama, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2017, 6 (1): 501-514 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id

menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi yang sedang dilaksanakan di Indonesia dapat terlaksana apabila didukung dana yang cukup dan memadai. Sejak awal pemerintahan orde baru pemerintah mengalami kesulitan modal dan sumber pembiayaan pembangunan, sehingga jalan keluarnya adalah mencari pinjaman luar negeri dan Penanaman Modal Asing (PMA). Indonesia memiliki beberapa faktor yang secara potensial mampu memperkuat daya saingnya dalam menarik investor, sehingga apabila semua potensi yang ada dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, sektor swasta dapat berperan melalui investasi, hal tersebut akan memberikan kontribusi besar dalam rangka pembangunan ekonomi. Di era otonomi daerah dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, maka pemerintah daerah menjadi ujung tombak masuknya investasi.¹⁹⁷

Hafid Zakariya dkk dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Hukum dan Politik Terhadap Perkembangan Investasi Asing di Indonesia menyimpulkan bahwa Indonesia yang merupakan negara yang kaya akan potensi alam dan menjadi incaran pasar dunia. Sebagai negara yang sedang berkembang dan mempunyai banyak kekayaan alam yang melimpah yang dapat digunakan sebagai sumber dana dalam memajukan perekonomiannya sangat membutuhkan sekali bantuan dari investor asing baik dalam segi pendanaan maupun segi teknologi pengelolaannya. Dalam menarik investor asing ini Indonesia harus menciptakan iklim yang nyaman bagi para investor asing. Karena investor asing ini merupakan orang-orang yang cukup sensitif dengan isu-isu kestabilan hukum dan politik serta tidak mau mengambil resiko maka pemerintah perlu membuat kebijakan kebijakan yang membuat mereka mau dan nyaman untuk menanamkan modalnya.

Dalam pembuatan kebijakan tersebut tidak terlepas dari peran anggota politik yang duduk dalam legislatif negara. Kebijakan-kebijakan hukum tersebut harus mampu mengakomodasi kebutuhan negara untuk mensejahterakan warga negaranya dan disatu sisi juga harus mampu memberi kelunakan bagi para investor asing tersebut. Hukum dan politik disini sangat berkaitan sekali dalam

¹⁹⁷ Feri Dona, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E).

mempengaruhi datangnya investor asing. Politik yang mempunyai kedudukan yang lebih independen dari hukum sangat menentukan arah kebijakan dan produk yang hukum yang diambil. Hukum berperan sebagai produk dari pada politik yang ada pada saat ini.¹⁹⁸

Mariah S.M. Purba dalam penelitian dengan judul “Kewenangan Pemerintahan Aceh Dalam Pengembangan Investasi Asing Sebagai Penanaman Modal Daerah Untuk Pembangunan (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Dilematika Hukum Antara UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan modal, keterampilan, dan teknologi yang merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi nasional yang dapat diwujudkan melalui kontribusi penanaman modal. Pemerintah daerah (Pemda) dalam hal ini perlu melakukan penanaman modal yang baik dengan memperhatikan potensi yang ada di daerahnya. Pengembangan potensi daerah melalui investasi harus diarahkan pada sektor unggulan/prioritas daerah itu sendiri. Untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor.¹⁹⁹

Rizky P. Lubis, dkk dalam penelitiannya yang berjudul Faktor Faktor yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung pada Sektor Perkebunan di Indonesia, menyatakan bahwa realisasi investasi di Indonesia didominasi oleh investor asing di mana sektor padat modal seperti industri pertambangan adalah fokus utama. Untuk memperkuat peran mereka dalam ekonomi nasional, investor asing harus diarahkan ke sektor perkebunan karena memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja dan neraca perdagangan yang positif. Menurut MP3EI, realisasi investasi di sektor perkebunan telah mencapai 2,29 persen Maret 2013 yang masih di bawah target. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu

¹⁹⁸ Hafid Zakariya, Hernawan Santosa, Furry Dhismayana Masa Ganta, Ratna Fitri Anjani, Jurnal Serambi Hukum Vol. 10 No. 02 Agustus 2016 - Januari 2017, ISSN: 1693-0819 E-ISSN: 2549-5275.

¹⁹⁹ Mariah S.M. Purba, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015.

investasi dilakukan analisis vektor error correction model asing langsung dan strategi dirumuskan dengan menggunakan matriks SWOT untuk meningkatkan sektor perkebunan Indonesia. Variabel yang digunakan dalam model ini adalah investasi langsung asing, nilai ekspor, nilai tukar, suku bunga domestik, suku bunga di Amerika Serikat Negara, indeks harga konsumen, produk domestik bruto dan krisis sebagai variabel dummy. Alternatif strategi dirumuskan model SWOT didasarkan pada kuesioner dan wawancara responden dirancang dalam rangka proses hirarki analisis. Hasil dari model yang menyarankan bahwa nilai tukar jangka pendek, nilai ekspor, suku bunga Amerika Serikat, produk domestik bruto dan indeks harga konsumen memiliki dampak positif terhadap investasi asing langsung. Pada krisis sisi lain memiliki dampak negatif. Sementara itu di jangka panjang, suku bunga domestik, indeks produk domestik bruto dan harga konsumen memiliki dampak positif tetapi krisis memiliki kontribusi negatif. Prioritas strategi untuk meningkatkan investasi asing langsung di sektor perkebunan Indonesia dapat dilakukan melalui harmonisasi antara peraturan pemerintah pusat dan daerah.²⁰⁰

Harun Santoso dan Yudi Siyamto dalam penelitiannya yang berjudul *Investasi dan Dorongan Pertumbuhan Ekonomi Bisnis Mikro Islam di Indonesia*, dengan hasil pembahasan yaitu dorongan pertumbuhan Ekonomi Bisnis Mikro Islam jika dilihat dari peran UMKM pada LKMS dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat memiliki peran yang aktif, dimana kebanyakan masyarakat kecil membutuhkan dana dalam penambahan modal usaha. Hal ini didorong pertumbuhan pada sektor kecil sangat dominan dalam mengentaskan kemiskinan karena masyarakat dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya dan juga dapat mengurangi pengangguran. Jadi jelas bahwa UMKM di Indonesia dapat dikatakan memiliki peran yang sangat penting.

Perkembangan ekonomi berbasis syariah di tanah air sungguh luar biasa, yaitu mencapai 40 persen setiap tahunnya, jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi konvensional yang hanya mencapai 19 persen setiap

²⁰⁰ Rizky P. Lubis, Muhammad Firdaus, Hendro Sasongko, *Jurnal Bisnis & Manajemen*, 2015, Vol. XVI, No. 2, h. 80-89

tahunnya. Sehingga Kontribusi nyata ekonomi syariah dalam proses pembangunan nasional menjadi kekuatan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan mendorong perkembangan ekonomi syariah, inklusivitas pembangunan dapat terus kita tingkatkan sekaligus mempercepat proses pemerataan pembangunan, mereduksi kesenjangan baik antar penduduk maupun antar wilayah, mengentaskan kemiskinan dan membantu sistem jaringan pengaman sosial yang selama ini telah berjalan.²⁰¹

Isa Ismail dalam penelitiannya yang berjudul *Kendala Investasi di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pembangunan Proyek PLTU di Kabupaten Batang)* menyimpulkan bahwa kehadiran para investor asing ke desa-desa wilayah dibangunnya proyek PLTU ini membuat warga setempat ketakutan dan pada akhirnya ada yang menolak rencana pembangunan proyek PLTU ini dengan berbagai alasan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mendadak berkepentingan seperti para preman atau calo tanah, LSM lingkungan serta LBH yang beralih membela rakyat lemah agar tidak di tindas hak-haknya oleh pemerintah. Sampai saat ini pun pembangunan proyek PLTU di Kabupaten Batang yang berkapasitas 2x1000 MW ini masih menemui kendala. Kendala-kendala itu antara lain: Kendala Kebijakan dimana adanya tumpang tindih kebijakan, Sumber Daya Manusia di Kabupaten Batang adalah kurangnya orang-orang yang berkompeten dan dapat bekerja profesional dalam bidangnya, kehilangan mata pencaharian bagi buruh tani, ketakutan terhadap berbagai isu pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan bakar batu bara dalam proyek PLTU nantinya, lokasi sawah dan kebun pengganti yang jauh dari permukiman yang hanya akan menambah beban baru, ketakutan perubahan sosial akibat dibangunnya proyek PLTU nantinya, seperti gaya hidup hedonisme, nilai-nilai kearifan lokal yang luntur, munculnya individualisme dan lain-lain kerusakan moral yang ditakutkan.²⁰²

Muhammad Nasir Badu, Ph.D dalam penelitiannya yang berjudul *internasionalisasi Potensi Sulawesi Barat (Studi Kasus: Investasi Asing di*

²⁰¹ Harun Santoso dan Yudi Siyamto, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 02, No. 02, Juli 2016.

²⁰² Isa Ismail, *Politika*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2014.

Sulawesi Barat) menyimpulkan bahwa upaya-upaya dan Strategi pemerintah Sulawesi Barat dalam meningkatkan investasi asing melalui berbagai cara diantaranya: perbaikan iklim investasi, mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, menciptakan promosi dan kerjasama investasi lokal, regional Sulawesi, nasional dan internasional, memaksimalkan pelayanan, pengendalian dan proses perizinan penanaman modal, memfasilitasi percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan merumuskan dan meningkatkan regulasi penanaman modal.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Sulawesi Barat adalah belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien, masih terbatasnya dan rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah, masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah, dan kurang memadainya infrastruktur jalan, bandara, dan pelabuhan di Sulawesi Barat.²⁰³

Lu Sudirman dalam penelitiannya yang berjudul Iklim Investasi di Indonesia menyimpulkan bahwa alasan yang mendasar para investor mau menanamkan modalnya ke luar negeri karena investor dalam menanamkan modalnya di luar negeri selain ada faktor kemudahan yang diberikan oleh negara tuan rumah penerima modal juga faktor internal atau dalam negeri pemodal tersebut, antara lain bahan baku semakin sempit. Selain itu investor juga ingin memperluas pemasaran produksi lebih luas. Oleh sebab itu, perlu dicari alternatif lain yakni melakukan eksoansi ke luar negeri.

Indonesia mau menerima dan mengundang investor asing masuk ke Indonesia karena penting modal asing bagi pembangunan ekonomi Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional. Upaya pembangunan ekonomi mensyaratkan adanya rangkaian investasi yang dilaksanakan secara bertahap.

Faktor-Faktor yang berpengaruh dalam penanaman modal di Indonesia antara lain: Faktor keamanan sejalan dengan desentralisasi itu sendiri masih belum disentuh secara baik oleh pemerintah daerah. Kondisi infrastruktur yang tidak memadai seperti sarana transportasi, listrik, air bersih yang masih menjadi

²⁰³ Muhammad Nasir Badu, *Internasionalisasi Potensi Sulawesi Barat (Studi Kasus: Investasi Asing di Sulawesi Barat)*, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.

permasalahan yang cukup serius bagi daerah tujuan investasi. Demikian juga masalah ketidakstabilan nilai mata uang atau nilai tukar rupiah yang akan mempengaruhi stabilitas ekonomi baik pusat maupun daerah.²⁰⁴

Ahmad Ma'ruf dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Pengembangan Investasi di Daerah: Pemberian Insentif Ataukah Kemudahan menyimpulkan bahwa kegiatan pengembangan penanaman modal, sangat terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah, seperti menciptakan lapangan kerja, mencapai stabilitas ekonomi daerah, dan mengembangkan basis ekonomi yang beragam. Studi analisis kebijakan pemberian insentif dan kemudahan bidang penanaman modal di daerah ini diharapkan mampu meningkatkan penanaman modal dari implementasi rumusan strategik yang didasarkan pada analisis kebutuhan (*need assessment*) stakeholders. Data yang digunakan bersifat primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan wawancara dipandu kuesioner, dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD) stakeholders. Kajian ini dilakukan pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Alat analisis meliputi studi kepustakaan, deskriptif kualitatif untuk kebijakan publik, dan analisis SWOT. Dihasilkan bahwa dalam rangka menarik investasi baru maupun mendorong peningkatan penanaman modal dari sisi kebijakan strategis lebih dikedepankan pilihan kebijakan memberikan berbagai kemudahan penanaman modal daripada pemberian insentif.²⁰⁵

HM. Pudjihardjo dalam penelitiannya yang berjudul Menciptakan Daya Tarik Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi berkesimpulan bahwa, investasi mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan demikian diperlukan berbagai upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar para investor bersedia menanamkan modalnya. Upaya itu diantaranya adalah memperbaiki kelembagaan, menciptakan stabilitas (mencakup stabilitas politik, stabilitas sosial budaya, dan stabilitas keamanan), kondisi ketenagakerjaan yang baik, serta ketersediaan infrastruktur fisik. Dalam upaya meningkatkan investasi, pemerintah daerah perlu

²⁰⁴ Lu Sudirman, Iklim Investasi di Indonesia, *Jurnal SELAT*, Mei Vol. 3 No. 2 Edisi 6.

²⁰⁵ Ahmad Ma'ruf, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 13, Nomor 1, April 2012, h.43-52.

melakukan langkah-langkah positif dalam menciptakan iklim investasi yang baik di daerah. Diantaranya adalah dengan melakukan reformasi birokrasi layanan investasi, membangun sistem informasi potensi investasi, serta peningkatan provisi infrastruktur fisik.²⁰⁶

Sopandi dan Nazmulmunir (2012) menulis artikel pada sebuah jurnal dengan judul “Pengembangan Iklim Investasi Daerah”. Buruknya daya saing Indonesia dalam menarik PMA lebih nyata lagi jika dibandingkan dengan perkembangan PMA di negara-negara lain. Misalnya dalam kelompok ASEAN, Indonesia satu-satu negara yang mengalami arus PMA negatif sejak krisis ekonomi 1998; walaupun nilai negatifnya cenderung mengecil sejak tahun 2000. Hal ini ada kaitannya dengan iklim politik yang semakin baik dibandingkan pada periode 1998- 1999, yang memperkecil keraguan calon-calon investor untuk menanam modal mereka di Indonesia.

Ada sejumlah faktor yang berpengaruh pada iklim investasi, yakni stabilitas politik dan sosial, kondisi infrastruktur dasar, sektor pembiayaan, pasar tenaga kerja, regulasi, perpajakan, birokrasi, korupsi, konsistensi dan kepastian kebijakan. Bank Dunia Melaporkan tentang iklim investasi, diantara faktor-faktor tersebut, stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi, dan kepastian kebijakan ekonomi merupakan empat faktor terpenting. The World Economic Forum (WEF) yang hasilnya ditunjukkan di dalam laporan tahunannya, The Global Competitiveness Report. berdasarkan persentase dari responden, ternyata tiga faktor penghambat bisnis yang mendapatkan peringkat paling atas adalah berturut-turut birokrasi yang tidak efisien, infrastruktur yang buruk, dan regulasi perpajakan.²⁰⁷

Hasan dan Purwanto melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Investasi, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Adil dan Berkelanjutan” Penelitian ini membahas masalah investasi di Indonesia serta memberikan rekomendasi langkah-langkah reformasi untuk menciptakan iklim investasi yang

²⁰⁶ HM. Pudjihardjo, *Menciptakan Daya Tarik Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*, (Jurnal Komplek Vol. 2, No. 1, Juni 2010 ISSN 2088-6268), h. 1-8

²⁰⁷ Andi Sopandi dan Nandang Nazmulmunir, 2012, *Pengembangan Iklim Investasi Daerah*, Jurnal Kybernan, Vol. 3, No. 1, Maret 2012, h. 102

sehat dan berdaya saing, dan arah kebijakan investasi terutama dari sisi sektoral. Hasil kajian menunjukkan bahwa walau tumbuh moderat, investasi belum dapat menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masih mengandalkan konsumsi swasta yang diragukan kesinambungannya dan juga kemampuannya untuk dapat menyerap tenaga kerja di tengah tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Usaha untuk meningkatkan daya saing dan iklim investasi harus dilakukan secara komprehensif dan mencakup sejumlah aspek.

Aspek pertama, reformasi atau revisi UU investasi yang ada dan pelaksanaannya. Kedua adalah perbaikan iklim investasi menyangkut perpajakan, tenaga kerja, desentralisasidan birokrasi. Ketiga, perbaikan daya dukung investasi yaitu infrastruktur serta kebijakan industri dan perdagangan. Sejalan dengan itu penting adanya insentif fiskal dan non fiskal kepada sektor-sektor industri yang menjadi prioritas pengembangan berdasarkan prinsipprinsip ekonomi yang jelas dan menggunakan beberapa kriteria yaitu penciptaan lapangan kerja, comparative advantages dari industri tersebut, nilai tambah, dan perkembangan sosial ekonomi disertai kerangka yang terukur. Berdasarkan permasalahan ekonomi mendasar yang dihadapi, sektor industri yang perlu mendapat insentif dan prioritas utama dari Pemerintah Indonesia adalah industri yang berbasis pada sumber daya alam yang terbarukan dan mampu menyerap tenaga kerja.²⁰⁸

Sejauh peneliti amati dari berbagai kajian terdahulu menyimpulkan bahwa masalah yang peneliti angkat mengenai strategi peningkatan investasi di Provinsi Aceh dengan menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung investasi serta bagaimana eksistensi syariat Islam dan keamanan dalam meningkatkan investasi belum pernah diteliti oleh orang lain. Namun dari segi strategi investasi kedaerahan dalam kajian politik, hukum dan ekonomi sudah pernah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya. Novelty dari kajian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan faktor penghambat dan faktor

²⁰⁸ M. Fadhil Hasan dan Deniey A. Purwanto, 2006, *Kebijakan Investasi, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Adil dan Berkelanjutan*, Jurnal Kebijakan Ekonomi MPKP FEB UI, Volume 1 No.1. <http://mpkp.feb.ui.ac.id/jurnal-kebijakan-ekonomi/> diakses tanggal 29 September 2016 Jam 18.00

pendukung serta eksistensi syariat Islam dan keamanan dalam peningkatan investasi, sehingga dapat dirumuskan berbagai kebijakan strategi untuk menunjang peningkatan investasi di Provinsi Aceh.

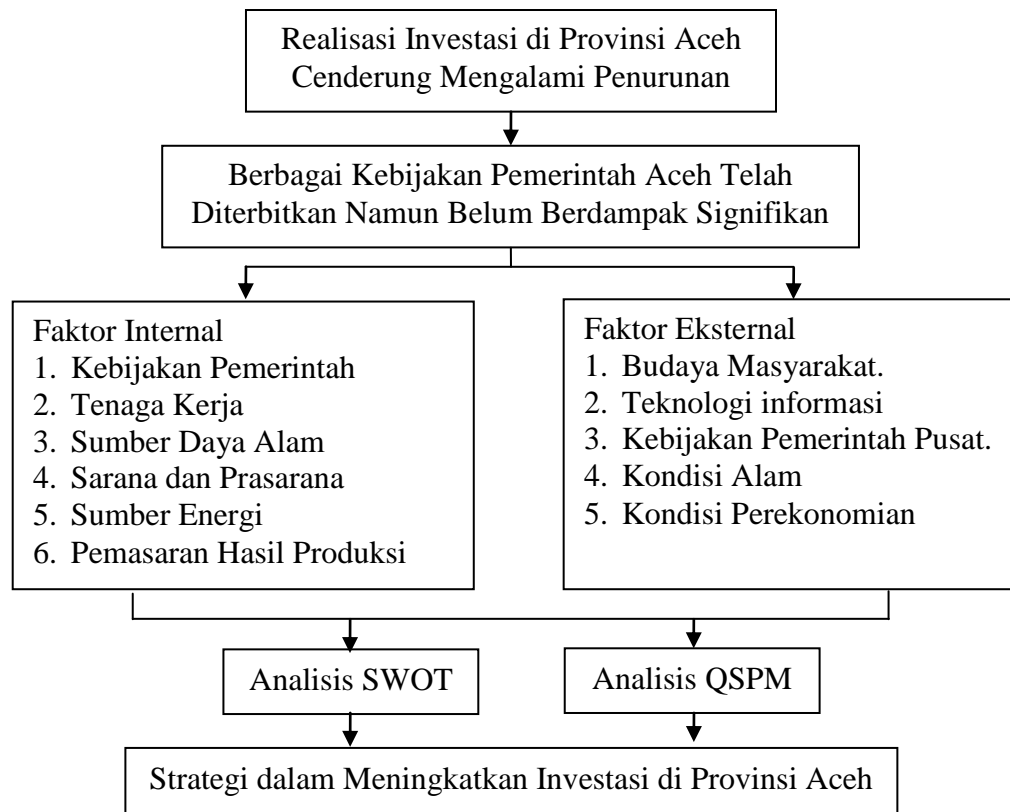
Penelitian Ikrar Nusa Bakti tentang problematika keamanan di Aceh pasca MoU Helsinki dan prospeknya di masa depan dengan hasil bahwa tantangan bagi keamanan di Aceh sangat kompleks karena masih terdapat gangguan-gangguan keamanan walaupun dikatakan bahwa kondisi keamanan Aceh sudah kondusif karena tidak lagi terjadi konflik yang bersifat vertikal khususnya yang terjadi antara *Govermant of Indonesia* (GOI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun konflik yang lebih banyak bersifat horizontal khususnya yang terjadi antara mantan anggota GAM atau kombatan GAM itu sendiri. Hal ini menunjukkan konflik kepentingan antar mantan anggota GAM itu sendiri masih sangat marak terjadi di berbagai daerah. Kondisi ini yang menjadi hambatan keamanan bagi pembangunan ekonomi di Aceh.²⁰⁹

F. Kerangka Pemikiran

Ada berbagai faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan investasi di suatu daerah. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang dapat dikendalikan, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan.²¹⁰ Realisasi Investasi di Provinsi Aceh yang cenderung mengalami penurunan disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi penghambat dan pendukung investasi. Selain itu juga menjelaskan akan eksistensi syariat Islam dan keamanan bagi peningkatan investasi. Kemudian merumuskan strategi dalam meningkatkan investasi di Provinsi Aceh, dari uraian pada latar belakang dan landasan teori maka disusun Kerangka Pemikiran seperti terlihat pada Gambar 2.2.

²⁰⁹ Ikrar Nusa Bakti, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, 2017, www.politik.lipi.go.id/10-problematika-keamanan-di-aceh.

²¹⁰ Mubyarto, *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 88



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

Dengan mengidentifikasi setiap aspek pada faktor internal dan faktor eksternal diharapkan dapat disusun secara sistematis dalam bentuk Matriks SWOT berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Berbagai pilihan alternatif strategi tersebut akan dipilih salah satunya melalui analisis *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM), sehingga dirumuskan satu strategi yang komprehensif dalam meningkatkan investasi di Provinsi Aceh.

Tabel 2.1 Definisi Operasional

| Faktor Internal | | |
|------------------------|---|--|
| Aspek | Definisi Operasional | Indikator |
| Kebijakan Pemerintah | <p>Carl J. Friedrich mengatakan kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau Pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu.</p> <p>Kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau Pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu.</p> <p>Dimock dalam bukunya yang berjudul <i>Public Administration</i> mengarahkan kebijaksanaan pemerintah adalah perpaduan dan kristalisasi dan pada pendapat- pendapat dan keinginan-keinginan banyak orang dan golongan-golongan dalam masyarakat.</p> <p>Kebijakan pemerintah berisi peraturan perundang-undangan sebagai produk dari kebijakan publik merupakan komoditas politik yang menyangkut kepentingan publik. Namun demikian, berbagai dinamika yang terjadi dapat membawa konsekuensi bahwa kebijakan publik pun dapat mengalami perbaikan. Oleh karenanya, kebijakan publik pada satu pandangan tertentu, dipersyaratkan bersifat fleksibel, harus bisa diperbaiki, dan disesuaikan dengan perkembangan dinamika pembangunan. Kesesuaian suatu kebijakan publik sangat tergantung kepada penilaian masyarakat.</p> | <p>Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal</p> <p>Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam</p> |
| Tenaga Kerja | Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat | <p>Usia angkatan kerja</p> <p>Jenis kelamin</p> <p>Pendidikan</p> |

| | | |
|----------------------|--|--|
| | <p>memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Simanjuntak (dalam Subri) mengelompokkan tenaga kerja menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (<i>labor force</i>) terdiri dari golongan yang bekerja dan menganggur atau yang mencari pekerjaan. Golongan yang bukan angkatan kerja terdiri dari yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain yang menerima pendapatan. Jumlah tenaga kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia.</p> | <p>(https://belajarekonomiyukk.weebly.com/kesempatan-kerja-angkatan-kerja-dan-tenaga-kerja.html)</p> |
| Sumber daya alam | <p>Kuncoro yang menyatakan bahwa sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah akan menentukan tingkat penerimaan daerah. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak dan dapat dikelola secara baik tentunya akan berkontribusi positif terhadap jumlah penerimaan daerah.</p> <p>Pengelolaan sumber daya alam dan energi mempunyai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat (<i>social welfare</i>) dengan tujuan antara sebagai sumber devisa, pemenuhan kebutuhan manusia, pelestarian lingkungan, pembangunan daerah/ masyarakat dan pemerataan.</p> <p>Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya.</p> | Pertanian dan kelautan Migas |
| Sarana dan prasarana | <p><i>Prasarana</i>: Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya).</p> <p>Sedangkan <i>sarana</i> adalah segala sesuatu (bisa berupa syarat atau upaya) yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan.</p> <p>Dalam kamus besar bahasa Indonesia infrastruktur diartikan sebagai sebuah sarana dan prasarana umum. Dimana sarana umum dapat berupa fasilitas publik seperti kereta api, rumah sakit, jembatan, jalan, sanitasi,</p> | Jalan, Listrik, Jembatan, Pelabuhan, Bandara Teknologi informasi, Penginapan |

| | | |
|---------------|---|---|
| | telepon, air bersih, listrik, sekolah dan sebagainya. Sedangkan Dalam ilmu ekonomi infrastruktur publik merupakan wujud dari modal publik (<i>public capital</i>) dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Infrastruktur dalam hal ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan. | |
| Sumber energi | <p>Energi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi kehidupan manusia. Berbagai hal mulai dari transportasi, penerangan dan lainnya senantiasa membutuhkan energi. Sebagian besar kebutuhan energi dipenuhi dari minyak bumi sebagai bahan bakunya. Kondisi minyak bumi pada saat ini, persediaan semakin menipis dan harga semakin meningkat, mendorong kita untuk mengembangkan sumber energi alternatif.</p> <p>Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha (kerja) atau melakukan suatu perubahan. Energi merupakan bagian dari suatu benda tetapi tidak terikat pada benda tersebut. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat dirubah bentuknya. Energi juga disebut tenaga. Satuan energi menurut Satuan Internasional (SI) adalah joule (J). Sedangkan satuan energi lain yaitu erg, kalori, dan kWh. Energi bersifat fleksible, artinya dapat berpindah dan berubah.</p> <p>Terdapat dua kategori energi yaitu energi potensial dan energi kinetik. Terdapat banyak macam energi diantaranya energi mekanik, listrik, elektromagnetik, kimia, panas, nuklir, angin, dan lain-lain. Sebagian besar energi tersebut harus dirubah supaya dapat digunakan.</p> <p>Energi panas bumi merupakan sumber energi terbarukan sehingga pemanfaatannya bisa berkelanjutan, dan berpotensi sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar berbasis fosil untuk pembangkit tenaga listrik di Indonesia sehingga menunjang kemandirian energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Pemerintah perlu memberikan perhatian yang besar pada penelitian dan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Minyak bumi dan gas 2. Daya Listrik 3. Energi Matahari 4. Energi Panas bumi |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| | implementasi energi terbarukan, serta memberikan insentif yang dapat menarik investasi untuk mencapai target pengembangan energi panas bumi dan energy mix pada tahun 2025, antara lain dengan mengembangkan kebijakan yang komprehensif yang memberikan kejelasan bagi investor untuk melakukan investasi di bidang panas bumi. | |
| Pemasaran hasil produksi | Menurut Stanton, pemasaran meliputi keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, hingga mempromosikan, dan distribusi barang atau jasa yang akan dipasarkan. Menurut Abdullah, Pemasaran adalah kegiatan kreasi dan realisasi sebuah standar hidup. Kegiatan pemasaran meliputi menyelidiki dan mengetahui apa yang diinginkan konsumen, kemudian merencanakan dan mengembangkan sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut, hingga akhirnya memutuskan cara terbaik untuk menentukan harga, promosi produk, dan mendistribusikan produk tersebut. Menurut Arsyad hasil produksi yang optimal di suatu daerah berarti membawa pengaruh terhadap peningkatan kesempatan kerja, dimana dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan produksi suatu daerah maka daerah tersebut akan keluar dari lingkaran kemiskinan serta kesejahteraan masyarakat daerah tersebut akan meningkat pula. Pemasaran produk hasil keluaran produksi haruslah dikelola oleh orang-orang yang tepat agar hasil produksi dapat terjual untuk mendapatkan keuntungan/profit yang diharapkan sebagai pemasukan untuk pembiayaan kegiatan produksi berikutnya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk (<i>product</i>) 2. Harga (<i>price</i>) 3. Tempat (<i>place</i>) 4. Promosi (<i>promotion</i>) |
| Faktor Eksternal | | |
| Budaya masyarakat | Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu | Clyde kluckhohn menyebutkan 7 unsur kebudayaan, yakni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, |

| | | |
|---------------------|--|---|
| | <p>masyarakat.</p> <p>Menurut Edward B. Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.</p> <p>Masyarakat adalah sekelompok individu yang secara langsung atau tidak langsung saling berhubungan sehingga merupakan sebuah satuan kehidupan yang berkaitan antara sesamanya dalam sebuah satuan kehidupan yang dimana mempunyai kebudayaan tersendiri.</p> | <p>rumah, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat rumah produksi dan transportasi)</p> <p>2. Mata pencarian hidup dan system-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, system produksi, dan system distribusi)</p> <p>3. System kemasyarakatan (system kekerabatan, organisasi, politik, system hokum dan system perkawinan)</p> <p>4. Bahasa (lisan maupun tertulis)</p> <p>5. Kesenian (seni rupa, seni sastra dan seni gerak)</p> <p>6. System pengetahuan</p> <p>7. System kepercayaan (religi)</p> |
| Teknologi informasi | <p>Wijayanto mengatakan bahwa dengan berkembangnya teknologi informasi, perusahaan dihadapkan pada situasi dan kondisi yang menuntut adanya pergeseran paradigma dalam memandang lingkungan sekitarnya. Tidak ada lagi terminologi stabilitas dalam lingkungan bisnis yang global saat ini, yang ada hanyalah stabilitas yang bersifat semu yang harus disikapi secara kritis oleh perusahaan. Lingkungan bisnis sedang dan telah mengalami perubahan signifikan. Perubahan tersebut diperkirakan akan semakin kompleks dan sulit untuk diprediksi. Perusahaan harus berorientasi pada tuntutan selera konsumen, dengan kata lain disamping efisien perusahaan harus inovatif.</p> <p>Teknologi informasi akan membawa perusahaan pada kondisi yang menguntungkan yaitu kemudahan memasuki pasar, diferensiasi produk, dan <i>cost efficiency</i>. Dengan kemudahan tersebut maka perusahaan akan mampu meningkatkan</p> | <p>1. Keunggulan kompetitif dalam bersaing</p> <p>2. Peningkatan kinerja</p> <p>3. Efektif, efisiensi kerja</p> <p>4. Performance dan strategi organisasi</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>kinerjanya. Jadi penggunaan teknologi informasi secara strategik akan mampu membawa perusahaan meningkatkan profitabilitas yang merupakan salah satu indikator <i>performance</i>.</p> <p>Dengan investasi dalam TI yang tepat maka perusahaan akan memiliki suatu keunggulan kompetitif sehingga akan mampu bersaing dalam perusahaan dan keberhasilan dalam persaingan akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam bentuk output perusahaan, efisiensi, efektivitas, kekuatan perusahaan, dan nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai saham perusahaan. Mahmood dan Mann juga menyatakan bahwa Investasi yang mantap dalam teknologi informasi harus dipertimbangkan untuk meningkatkan <i>performance</i> ekonomi dan strategi organisasi.</p> <p>Karimi et al. dalam penelitiannya juga menemukan adanya hubungan antara ukuran perusahaan dengan keinginan melakukan investasi dalam teknologi informasi sebagai respon strategik perusahaan terhadap globalisasi.</p> <p>Untuk meningkatkan tingkat investasi dalam menunjang inovasi, perusahaan mencari terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi. Semula teknologi informasi digunakan hanya sebatas pada pemrosesan data. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi tersebut, hampir semua aktivitas organisasi saat ini telah dimasuki oleh aplikasi dan otomatisasi teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi di lingkungan usaha sudah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas perusahaan. Perusahaan memiliki strategi bisnis masing-masing untuk menjadikan teknologi informasi sebagai pedoman dalam berinvestasi. Investasi teknologi informasi terhadap aset perusahaan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk menentukan strategi bisnis yang tepat dalam mencapai tujuan atau kinerja.</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Kebijakan pemerintah pusat | <p>Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.</p> <p>Kebijakan pemerintah merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicari solusi. Kebijakan pemerintah ini dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah pusat, peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah kota/kabupaten dan keputusan walikota/bupati.</p> | <p>UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 4 Oktober 1999</p> <p>UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam</p> <p>Peraturan tentang BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)</p> |
| Kondisi Alam | <p>Kondisi alam yang baik serta iklim yang sesuai dengan jenis industri akan membantu industri memperlancar kegiatan usahanya. Di Indonesia memiliki iklim tropis tanpa banyak cuaca yang ekstrim sehingga kegiatan produksi rata-rata dapat berjalan dengan baik sepanjang tahun. Kondisi alam yang dimaksud disini adalah iklim yang ada dalam suatu daerah. Iklim adalah sintesis atau kesimpulan dari perubahan nilai unsur unsur cuaca dalam jangka waktu di suatu tempat atau pada suatu wilayah, Iklim dapat pula diartikan sebagai sifat cuaca di suatu tempat atau wilayah. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca pada wilayah tertentu dalam waktu yang panjang. Iklim merupakan salah satu komponen ekosistem alam sehingga kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan tidak terlepas dari pengaruh atmosfer dengan segala prosesnya.</p> | <p>Geografis alam Aceh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daratan 2. Lautan (Pesisir) 3. Cuaca |
| Kondisi perekonomian | <p>Kondisi perekonomian merupakan keadaan yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah/Negara dimana adanya proses perubahan secara berkesinambungan yang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga</p> | <p>Investasi</p> <p>Pendapatan Masyarakat</p> <p>Pengeluaran Pemerintah</p> <p>Kenaikan kapasitas produksi</p> <p>Distribusi</p> |

| | | |
|------------------|--|--|
| | <p>dirtikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian yang di wujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pendapatan masyarakat yang baik dan tinggi akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli produk industri, sehingga efeknya akan sangat baik untuk perkembangan perindustrian lokal maupun internasional. Pendapatan masyarakat akan sangat terkait dengan angka pertumbuhan ekonomi, tingkat kenaikan harga atau inflasi, serta tingkat suku bunga. Di samping itu saluran distribusi yang baik untuk menyalurkan barang dan jasa dari tangan produsen ke konsumen juga menjadi hal yang sangat penting.</p> <p>Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang lebih panjang investasi akan menambah stok kapital.</p> | |
| Syariat Islam | <p>Segala peraturan yang telah diisyaratkan allah, atau ia telah mensyariatkan dasarnya, agar manusia melaksanakannya, untuk dirinya sendiri dalam berkomunikasi dengan tuhan, dengan sesama muslim dengan sesama manusia dengan alam semesta dan berkomunikasi dengan kehidupan.</p> <p>(Mahmud Syaltut dalam Hasby ash Shiddieqy, 1974, <i>Falsafah Hukum Islam</i>, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 200)</p> | <p>Maslahat ummat Maslahat jiwa Maslahat keturunan Maslahat harta (Al Ghazali) Dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat (Imam Al Syatibi)</p> |
| Konflik keamanan | <p>Secara teoritik, konflik diartikan sebagai hubungan dua pihak atau lebih yang memiliki sasaran tidak sejalan (Chris Mitchell (1981) seperti dikutip Simon Fisher dkk. 2001.</p> <p><i>Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi untuk Bertindak</i>. (edisi terjemahan). The</p> | <p>Konflik tertutup (rasa gelisah ataupun resah yang masih tersimpan di dalam hati dan pikiran orang banyak yang tidak diikuti dengan tindakan</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | British Council. Indonesia. Halaman 4) | terhadap pihak lain) Konflik terbuka (rasa resah yang sudah diiringi langkah fisik kepada pihak lain dan kalau tidak cepat ditanganai akan membawa dampak yang parah dalam masyarakat) |
|--|--|--|

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini di Ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dengan fokus pada Bagaimana strategi peningkatan investasi di Aceh (analisis faktor syariat Islam dan faktor konflik keamanan periode 2010-2016). Pemilihan lokasi penelitian karena pusat dari Ibukota Provinsi Aceh ada di Kota Banda Aceh dan sumber data serta beberapa informasi terkait pada penelitian ini terutama masalah investasi berada pada Badan Investasi dan Promosi Aceh. Selain itu juga dinas dinas Provinsi Acehterkait lainnya serta pihak ketiga sebagai narasumber juga berada di Kota Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memadukan data primer dan sekunder dengan studi analisis SWOT dan analisis QSPM. Studi analisis yang penulis lakukan berawal dari observasi tidak terstruktur namun menjalankan proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*indept interview*) kepada para informan yang kompeten dan ahli dalam bidangnya untuk menghasilkan input. Untuk merumuskan strategi menggunakan analisis SWOT. Sebagai cara yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan faktor eksternal secara sistematis untuk memformulasikan strategi suatu kegiatan.¹ Selanjutnya berbagai alternatif strategi yang didapatkan dari analisis SWOT akan dipilih salah satunya melalui analisis QSPM. QSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternative-alternatif strategi yang ada. Perhitungan QSPM didasarkan kepada input dari bobot matriks internal eksternal, serta alaternatif strategi pada tahap pencocokan.²

¹ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 112

² David, Fred R, *Manajemen Strategis*, Edisi Sepuluh, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 6.

B. Jenis Penelitian dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menggunakan analisis mengacu pada data dan memanfaatkan teori yang ada sebagai pendukung. Jenis penelitian ini lebih bersifat memberi gambaran secara jelas suatu permasalahan sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif juga berusaha dalam memahami makna dan mengkonstruksi realitas. Sehingga proses, peristiwa dan otentisitas sangat diperhatikan dalam penelitian kualitatif. Karakteristik lain penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif. Deskripsi tersebut dapat berupa deskripsi atas gejala-gejala yang diamati, yang tidak selalu harus berbentuk angka-angka atau koefisien antar variabel. Oleh karena itu penelitian ini berusaha menggambarkan (sesuatu atau kondisi tertentu terkait suatu kelompok manusia) secara akurat, sistematis, dan faktual berdasarkan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif memiliki karakter fleksibel sejalan dengan proses pelaksanaan penelitian. Model penelitian kualitatif³ bekerja melalui penggalan dan eksplorasi informasi responden kunci (*key informan*).

Penelitian ini diharapkan akan mendapatkan kejelasan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung terjadinya peningkatan investasi serta menjelaskan tentang eksistensi syariat Islam dan keamanan bagi investasi sehingga akhirnya dapat merumuskan beberapa kebijakan strategi. Untuk sampai pada sasaran penelitian, pendekatan ilmiah yang digunakan adalah pendekatan *partisipatif*. Penggunaan pendekatan *partisipatif* dimaksudkan agar mampu menyusun beberapa kebijakan strategi bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*), dalam hal ini Pemerintah Aceh yang berkaitan langsung dengan investasi.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³Karakteristik terpenting dari penelitian kualitatif adalah sifatnya natural. Pendekatan kualitatif berupaya memahami realitas dan berusaha menangkap makna sebagaimana dipahami dan dialami oleh subjek penelitian secara langsung, menemu-kenali fenomena menurut apa adanya bukan menurut apa seharusnya. Lihat: Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 102.

a. Data Primer

Data primer menurut Sangaji dan Sopiah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa observasi terhadap suatu benda fisik, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian⁴ yaitu berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subjek penelitian. Yang dimaksud dengan data utama (primer) disini berupa informasi tentang iklim investasi termasuk strategi dalam penggiatannya, yang menjadi subjek penelitian. Data diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan, serta hasil wawancara mendalam dengan personal terkait. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung, pada penelitian ini melalui pertanyaan terbuka kepada investor dari dalam negeri, yang telah memiliki usaha atau bisnis di Provinsi Aceh. Pertanyaan terbuka juga diajukan kepada pihak-pihak yang berhak yang telah diuraikan pada Populasi. Responden yang telah diuraikan pada sub bab populasi pada tahap awal memberikan jawaban tertulis dari pertanyaan terbuka mengenai kondisi investasi di Provinsi Aceh, kemudian tahap kedua dikumpulkan dalam satu ruangan untuk membuat *focus group discussion* atau Diskusi Kelompok Terarah, yakni suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.⁵ Diskusi kelompok terarah adalah wawancara dari sekelompok kecil orang yang dipimpin oleh seorang nara sumber atau moderator yang secara halus mendorong peserta untuk berani berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan topik diskusi saat itu. Interaksi diantara peserta merupakan dasar untuk memperoleh informasi. Peserta mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan dan memberikan pernyataan, menanggapi, komentar maupun mengajukan pertanyaan. Ada beberapa alasan dipergunakannya FGD yaitu:

⁴ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h. 171

⁵ Irwanto, *Focus Group Discussion: Sebuah Pengantar Praktis*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).

- 1) Adanya keyakinan bahwa masalah yang diteliti tidak dapat dipahami dengan metode survei atau wawancara.
 - 2) Untuk memperoleh data kualitatif yang bermutu dalam waktu yang relatif singkat.
 - 3) Sebagai metode yang dirasa cocok bagi permasalahan yang bersifat sangat lokal dan spesifik oleh karena itu FGD yang melibatkan masyarakat setempat dipandang sebagai pendekatan yang paling ideal.
- b. Data Sekunder

Data sekunder menurut M. Ikbal Hasan adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber sumber yang telah ada dan biasanya di peroleh dari perpustakaan atau laporan laporan penelitian terdahulu.⁶ Adapun data sekunder yang didapatkan berupa laporan penelitian berupa artikel jurnal, data yang sudah diolah oleh Dinas terkait, buku-buku yang telah dipublikasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data Sekunder melalui studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mempelajari data-data yang telah tersedia melalui Badan Investasi dan Promosi Provinsi Aceh, BPS dan Dinas yang terkait dengan investasi di Provinsi Aceh.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono memberikan pengertian bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷

⁶ M. Ikbal Hasan, *Pokok Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, (Bogor, Galia Indonesia, 2002), h. 82.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 1997), h. 57.

Nawawi menyebutkan bahwa populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap.⁸

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang meliputi seluruh elemen yang ada dalam wilayah penelitian.⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pihak-pihak terkait dari unsur pemerintah dan pihak eksternal non pemerintah.

2. Sampel

Menurut Muhammad memberikan pengertian bahwa sampel adalah bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci. Sedangkan sampling metodologi yang digunakan untuk memilih dan mengambil unsur-unsur atau anggota-anggota populasi untuk digunakan sebagai sampel yang representatif.¹⁰

Sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* yang terdiri dari pihak-pihak berkompeten dalam memberikan informasi mengenai investasi di Provinsi Aceh yang terdiri dari pihak internal dan eksternal. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik *non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun sampel yang peneliti pilih sejumlah 18 orang terdiri dari pihak internal yang berasal dari unsur pemerintahan yaitu:

1. Ketua Badan Investasi dan Promosi Aceh
2. Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh
5. Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh

⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), h. 141.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Sebuah Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 42

¹⁰ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 162.

6. Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Aceh
7. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh
8. Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh
9. Pimpinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Provinsi Aceh

Sedangkan sampel yang berasal dari pihak eksternal non pemerintahan merupakan pihak yang berada di luar Pemerintah Provinsi Aceh, yaitu:

1. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Wilayah Aceh.
2. Ketua Himpunan Ikatan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Aceh Utara
3. General Manager PT. Sarana Aceh Utama
4. Perwakilan dari PT. Alhas Jaya Group
5. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Wilayah Aceh
6. Pengusaha Properti Aceh
7. Distributor PT. Semen Andalas Indonesia
8. Pengusaha Travel
9. Pengusaha UMKM.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk mendapatkan data yang diperlukan.¹¹ Metode pengumpulan data untuk mendapatkan seluruh data penelitian, baik itu bersifat data sekunder ataupun data primer, maka digunakan beberapa pendekatan yang lazim dilakukan dalam penelitian kualitatif. Adapun beberapa cara dalam pengumpulan data antara lain:

1. Teknik Observasi

Dimana peneliti menggunakan observasi partisipatif untuk memahami pola, norma dan makna perilaku dari informan yang diteliti.¹² Observasi partisipatif yaitu observasi yang melibatkan peneliti atau observer secara langsung

¹¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cetakan 1 (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 57

¹² M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 115-117.

dalam kegiatan pengamatan di lapangan. Jadi, peneliti bertindak sebagai observer dan menjadi bagian dari kelompok-kelompok informan.

Salah satu yang akan mempermudah peneliti dalam melakukan observasi dan wawancara, di mana selama ini peneliti secara intens mengamati wilayah penelitian, sehingga peneliti ikut terlibat dan dapat melihat secara langsung, merasakan serta memahami berbagai fenomena terkait dengan iklim investasi di Provinsi Aceh. Hal ini akan memudahkan peneliti melakukan rekonstruksi terhadap fenomena yang dikaji disebabkan karena peneliti telah memiliki seperangkat pengetahuan tentang kajian yang diteliti.

2. Wawancara Mendalam

Metode ini sering digunakan bersamaan dengan metode observasi. Pertanyaan yang digunakan dalam wawancara ini merupakan pertanyaan terbuka sehingga informan bisa menjawab dengan lebih komprehensif dan dapat mendapatkan informasi primer serta dapat berinteraksi secara langsung.¹³

Metode yang digunakan melalui *indept interview* yang berupaya mengungkap dan mengoptimalkan peran pihak-pihak yang berkompeten memberikan informasi mengenai investasi di Provinsi Aceh yang terdiri dari pihak internal dan eksternal.

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan kepada informen yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Wawancara model ini dimaksudkan untuk menggali data atau informasi lebih mendalam tentang iklim investasi dan strategi peningkatannya.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan *petunjuk umum wawancara* dengan membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. Kerangka ini perlu agar pokok-pokok yang direncanakan tercakup secara keseluruhan pada saat pelaksanaan wawancara.¹⁴

¹³ Hadi Sabari Yunus, *Metodelogi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 358.

¹⁴ Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 173.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi akan menambah kepercayaan peneliti dalam pembuktian suatu kejadian.¹⁵

4. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan campuran antara seni dan ilmu pengetahuan dan melihat keseluruhan yang terpadu dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan setelah beberapa cacatan pendahuluan dan petunjuk untuk memudahkan masuk ke objek yang dikaji.¹⁶ Pembuatan kuesioner SWOT berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dalam *Focus Group Discussion* secara umum kuesioner ini memiliki kategorisasi penilaian sebagai berikut:

- a. Penilaian faktor internal dan eksternal
- b. Penilaian urgensi.

E. Metode Analisis Data

1. Analisis Data

Dalam rangka untuk menemukan strategi peningkatan investasi di Provinsi Aceh, maka analisis yang dianggap dapat memenuhi kriteria tersebut adalah Analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal Analisis Lingkungan Internal terdiri dari lingkungan internal Provinsi Aceh yang terdiri dari faktor-faktor:

- a. Kebijakan Pemerintah
- b. Tenaga Kerja
- c. Sumber Daya Alam
- d. Sarana dan Prasarana

¹⁵Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 4, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 149.

¹⁶Newman W. Laurance, *Metodelogi Penelitian Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Index, 2015), h. 349.

- e. Sumber Energi
- f. Pemasaran Hasil Produksi

Analisis Lingkungan Eksternal merupakan analisis terhadap lingkungan pemerintahan nasional dan investor, yang terdiri dari faktor-faktor :

- a. Budaya Masyarakat
- b. Teknologi informasi
- c. Kebijakan Pemerintah Pusat
- d. Kondisi Alam
- e. Kondisi Perekonomian
- f. Syariat Islam
- g. Konflik Keamanan.

Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, dikumpulkan dan kemudian di analisis dengan menggunakan analisis lingkungan yaitu analisis terhadap lingkungan internal perusahaan yang menghasilkan kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal perusahaan yang menghasilkan peluang dan ancaman. Dalam penelitian ini, analisis lingkungan diolah dengan 3 (tiga) jenis matriks yakni Matriks Evaluasi Faktor Intern (IFE Matriks), Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE Matriks). Setelah diketahui hasil IFE dan EFE Matriks kemudian dilakukan analisis SWOT.

Analisis lingkungan internal lebih pada analisis intern perusahaan dalam menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap divisi yakni keuangan dan akuntansi, pemasaran, riset dan pengembangan, personalia serta operasional. Inti dari analisis lingkungan internal ini adalah berusaha untuk mencari keunggulan strategis yang dipakai untuk membedakan diri dari pesaing. Menurut Jauch dan Gluech, lingkungan internal adalah proses dimana perencanaan strategi mengkaji faktor internal perusahaan untuk menentukan dimana perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan yang berarti sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dan menghadapi ancaman yang terdapat dalam lingkungan.¹⁷ Sedangkan menurut Pearce dan Robinson, analisis lingkungan

¹⁷ Laurende R. Jauch dan William F. Gluech, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*, Edisi Ketiga, Alih : Murtado, (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 76

internal adalah pengertian mengenai pencocokan kekuatan dan kelemahan internal dengan peluang dan ancaman eksternal.¹⁸

2. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah analisis kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk memformulasikan strategi suatu kegiatan. Analisis SWOT adalah singkatan dari Lingkungan *Internal Strengths* dan *Weaknesses* serta Lingkungan Eksternal *Opportunities* dan *Threats*.¹⁹

Analisis SWOT disebut juga analisis situasi karena menggolongkan kondisi-kondisi yang terjadi kedalam faktor internal (kekuatan dan kelemahan) atau dikatakan dampak secara tidak langsung serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) atau dikatakan dampak secara langsung. Kedua faktor tersebut memberikan dampak positif yang berasal dari peluang dan kekuatan serta dampak negatif yang berasal dari ancaman dan kelemahan.

Analisis ini didasarkan pada kondisi-kondisi yang terjadi disekitar perusahaan yang bertujuan memberikan saran agar dapat menemukan strategi yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) suatu kegiatan umum secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

Tabel 3.1. Matriks Hasil SWOT

| | Peluang | Ancaman |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Kekuatan | SO1 SO2 SO3 SO4 Son | ST1 ST2 ST3 ST4 STn |
| Kelemahan | WO1 | WT1 |

¹⁸ Richard B. Robinson JR & John A. Pearce II, *Manajemen Strategik Formula, Implementasi, dan Pengendalian*, Terj. Agus Maulana, (Jakarta: Binarupa Aksara, 2009), h. 33

¹⁹ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 112

| | | |
|--|-----|-----|
| | WO2 | WT2 |
| | WO3 | WT3 |
| | WO4 | WT4 |
| | Won | WTn |

Sumber : Rangkuti, 2006

Dari Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa alternatif strategi pada matriks hasil analisis SWOT dihasilkan dari penggunaan unsur-unsur kekuatan strategi pengembangan industri batu bata mesin untuk mendapatkan peluang yang ada (SO), penggunaan kekuatan yang ada untuk menghadapi ancaman yang akan datang (ST), pengurangan kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang yang ada (WO) dari pengurangan kelemahan yang ada untuk menghadapi ancaman yang akan datang (WT).

Wedhasmara menyatakan bahwa analisis SWOT akan dipetakan dari hasil analisis lingkungan. Kekuatan diidentifikasi dengan tujuan untuk mengetahui apa saja kekuatan organisasi untuk dapat meneruskan dan mempertahankan bisnis. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*) dalam lingkungan internal, dan peluang (*Opportunities*) serta ancaman (*Threats*) lingkungan eksternal.²⁰ Analisis kekuatan dan kelemahan yang ada di lingkungan internal terutama ditujukan terhadap faktor keberhasilan kunci (*Key Success Factor*). Jadi dengan analisis ini diharapkan akan diperoleh cara untuk mengembangkan dan memanfaatkan kekuatan serta penopang atau mengurangi kelemahan dengan maksud untuk memanfaatkan peluang dan mengurangi ancaman.²¹

Dari analisis ini ada empat kemungkinan identifikasi lingkungan yang dihadapi perusahaan :

²⁰ Ari Wedhasmara, 2009, *Langkah-Langkah Perencanaan Strategis Sistem Informasi Dengan Menggunakan Metode Ward And Peppard*, Jurnal Sistem Informasi, Volume 1 No 1 Tahun 2009, Palembang, h. 72

²¹ Fred R. David, *Manajemen Strategis*, Terj. Ichsan Setiyo Budi, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 102

1. Terdapat peluang dalam suatu industri dan institusi mempunyai kekuatan untuk mendapatkannya sehingga harus disusun strategi yang bersifat agresif.
2. Terdapat peluang dalam suatu industri akan tetapi perusahaan mempunyai kelemahan yang pokok untuk mendapatkannya, sehingga harus disusun strategi yang bersifat perubahan haluan (*Turnaround*).
3. Terdapat ancaman dalam suatu industri dan perusahaan mempunyai kekuatan untuk mendapatkannya, sehingga harus disusun strategi bisnis yang bersifat diversifikasi.
4. Terdapat ancaman dalam suatu industri dan disamping itu perusahaan mempunyai kelemahan yang pokok di bidang yang bersangkutan, sehingga harus disusun strategi yang bersifat defensif.

SWOT adalah akronim untuk kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*) internal perusahaan, dan peluang (*Opportunities*) serta ancaman (*Threats*) dari lingkungan eksternal perusahaan. Analisis SWOT disusun berdasarkan asumsi bahwa suatu strategi yang efektif memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman suatu perusahaan. Apabila diterapkan secara tepat, asumsi sederhana ini mempunyai implikasi yang berpengaruh untuk merancang suatu strategi yang berhasil. Analisis lingkungan industri memberikan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam lingkungan suatu perusahaan, yang merupakan fokus utama dalam analisis SWOT. Teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Diagram Analisis SWOT dan Matriks Eksternal dan Matrik Internal. Berdasarkan matriks SWOT tersebut, dapat disusun empat strategi utama yakni; SO (*Strengths, Opportunities*), WO (*Weakness, Opportunities*), ST (*Strengths, Threats*), dan WT (*Weakness, Threats*).

Tabel 3.2 Matrik SWOT

| <div style="text-align: center;">IFAS</div> <div style="text-align: center;">EFAS</div> | <div style="text-align: center;">STRENGTHS (S)</div> <div>Tentukan faktor-faktor kekuatan internal</div> | <div style="text-align: center;">WEAKNESSES (W)</div> <div>Tentukan faktor-faktor kelemahan internal</div> |
|---|---|---|
| | <div style="text-align: center;">OPORTUNITIES (O)</div> <div>Tentukan faktor-faktor peluang eksternal</div> | <div style="text-align: center;">STRATEGI SO</div> <div>Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</div> |
| <div style="text-align: center;">THREATS (T)</div> <div>Tentukan faktor-faktor ancaman eksternal</div> | <div style="text-align: center;">STRATEGI WO</div> <div>Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang</div> | <div style="text-align: center;">STRATEGI ST</div> <div>Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</div> |
| | <div style="text-align: center;">STRATEGI WT</div> <div>Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman</div> | |

Sumber : David, (2006)

Tabel 3.2 menunjukkan berbagai alternatif strategi dari setiap elemen SWOT yang terdiri dari:

1. Strategi SO (Kekuatan Peluang). Ini merupakan situasi yang menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Strategi yang dihasilkan pada kombinasi ini adalah memanfaatkan kekuatan atas peluang yang telah diidentifikasi. Misalnya bila kekuatan perusahaan adalah pada keunggulan teknologinya, maka keunggulan ini dapat dimanfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat teknologi dan kualitas yang lebih maju, yang keberadaanya dan kebutuhannya telah diidentifikasi pada analisis kesempatan.
2. Strategi WO (Kelemahan Peluang). Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi ini yaitu meminimalkan masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut pasar yang lebih baik

(*turn around*). Kesempatan yang dapat diidentifikasi tidak mungkin dimanfaatkan karena kelemahan perusahaan. Misalnya jaringan distribusi ke pasar tersebut tidak dimiliki oleh perusahaan. Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah bekerjasama dengan perusahaan yang mempunyai kemampuan menggarap pasar tersebut. Pilihan strategi lain adalah mengatasi kelemahan agar dapat memanfaatkan kesempatan.

3. Strategi ST (Kekuatan Ancaman). Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi *diversifikasi* (produk/pasar). Dalam analisis ancaman ditemukan kebutuhan untuk mengatasinya. Strategi ini mencoba mencari kekuatan yang dimiliki perusahaan yang dapat mengurangi atau menangkal ancaman tersebut.

4. Strategi WT (Kelemahan-Ancaman).

Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Fokus strategi yaitu melakukan tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang lebih besar (*defensive*). Dalam situasi menghadapi ancaman dan sekaligus kelemahan intern, strategi yang umumnya dilakukan adalah “keluar” dari situasi yang terjepit tersebut. Keputusan yang diambil adalah “mencairkan” sumber daya yang terikat pada situasi yang mengancam tersebut, dan mengalihkannya pada usaha lain yang lebih cerah. Siasat lainnya adalah mengadakan kerjasama dengan satu perusahaan yang lebih kuat, dengan harapan ancaman di suatu saat akan hilang. Dengan mengetahui situasi yang akan dihadapi, anak perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu dan bertindak dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang terarah dan mantap, dengan kata lain perusahaan dapat menerapkan strategi yang tepat.

3. Matriks Evaluasi Faktor Internal

Tahap ekstrasi dalam menjalankan audit manajemen strategi adalah membuat matriks evaluasi faktor internal (*Internal Factor Evaluation-IFE Matrix*). Alat formulasi strategi meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area fungsional, dan juga memberikan dasar untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi hubungan antara area-area tersebut. Penilaian intuitif dibutuhkan untuk mengembangkan Matriks IFE, jadi kemunculan pendekatan ilmiah tidak seharusnya diartikan bahwa ini adalah teknik yang sangat luar biasa. Pemahaman yang baik atas faktor-faktor yang dimasukkan lebih penting daripada angka yang sebenarnya. Matriks IFE dikembangkan dengan lima tahap:

1. Menuliskan faktor internal utama seperti diidentifikasi dalam proses audit internal dengan menggunakan berbagai faktor internal, mencakup kekuatan dan kelemahan. Faktor internal dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan terlebih dahulu dan kemudian kelemahan sespesifik mungkin, dengan gunakan presentase, rasio dan angka komparatif.
2. Berikan bobot untuk masing-masing faktor dari 0,0 (tidak penting) hingga 1,0 (paling penting) untuk masing-masing faktor. Bobot yang diberikan kepada masing-masing faktor mengindikasikan tingkat penting relatif dari faktor terhadap keberhasilan realisasi investasi pemerintah Provinsi Aceh. Tanpa memandang apakah faktor kunci itu adalah kekuatan atau kelemahan internal, faktor yang dianggap memiliki pengaruh paling besar dalam kinerja organisasi harus diberikan bobot yang paling tinggi. Jumlah seluruh bobot harus sama dengan 1,0. Didalam pembobotan faktor-faktor internal dilakukan berdasarkan diskusi dengan pihak-pihak yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian ditotal. Dari nilai masing-masing faktor tersebut dibagi dengan total, sehingga diperoleh bobot masing-masing faktor.
3. Berikan peringkat/rating 1 sampai 4 untuk masing-masing faktor untuk mengindikasikan apakah faktor tersebut menunjukkan kelemahan utama

(peringkat = 1), atau kelemahan minor (peringkat = 2), kekuatan minor (peringkat = 3), atau kekuatan utama (peringkat = 4). Perhatikan bahwa kekuatan harus mendapatkan peringkat 3 atau 4 dan kelemahan harus mendapatkan peringkat 1 dan 2. Dalam menentukan nilai ranting dari semua faktor internal dimintakan pendapat pihak-pihak yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan skala mulai dari 4 (sangat baik) sampai dengan 1 (dibawah rata-rata) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi organisasi yang bersangkutan.²²

4. Kalikan masing-masing bobot faktor dengan peringkatnya untuk menentukan rata-rata tertimbang untuk masing-masing variabel.
5. Jumlahkan rata-rata tertimbang untuk masing-masing variabel untuk menentukan total rata-rata tertimbang untuk organisasi. Berapapun banyaknya faktor yang dimasukan dalam matriks IFE, total rata-rata tertimbang berkisar antara yang terendah 1,0 dan tertinggi 4,0 dengan rata-rata 2,5. Total rata-rata tertimbang dibawah 2,5 menggambarkan organisasi yang lemah secara internal, sementara total nilai diatas 2,5 mengindikasikan posisi internal yang kuat.

4. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal

Matriks evaluasi faktor eksternal (*Eksternal Factor Evaluastion-EFE Matrix*) memungkinkan untuk merangkum dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan persaingan. Matriks EFE dapat dibuat dengan lima tahapan, yaitu :

1. Buat daftar yang terdiri dari berbagai faktor eksternal yang diklasifikasikan dalam proses audit eksternal. Masukan dari total sepuluh hingga dua puluh faktor, termasuk peluang dan ancaman, yang mempengaruhi invstasi di Provinsi Aceh. Tuliskan peluang terlebih dahulu dan kemudian ancaman. Usahakan untuk sespesifik mungkin.

²² Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 204.

2. Berikan bobot untuk masing-masing faktor dari 0,0 (tidak penting) hingga 1,0 (paling penting). Bobot mengindikasikan tingkat penting relatif dari faktor terhadap keberhasilan investasi. Peluang sering kali diberi bobot lebih tinggi dari ancaman, tetapi ancaman juga dapat diberi bobot yang tinggi jika mereka sangat serius atau sangat mengancam. Bobot yang tepat dapat ditentukan dengan membandingkan keberhasilan atau kegagalan pesaing atau dengan mendiskusikan faktor dan mencapai konsensus kelompok. Penjumlahan dari seluruh bobot yang diberikan kepada semua faktor harus sama dengan 1,0. Didalam pembobotan faktor-faktor eksternal juga dilakukan berdasarkan persentase dari hasil kuisioner dan data-data sekunder, kemudian di total. Dari nilai masing-masing faktor tersebut dibagi dengan total, sehingga diperoleh bobot masing-masing faktor.

Didalam pembobotan faktor-faktor eksternal dilakukan berdasarkan diskusi dengan pihak-pihak yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian ditotal. Dari nilai masing-masing faktor tersebut dibagi dengan total, sehingga diperoleh bobot masing-masing faktor.

3. Berikan peringkat 1 hingga 4 untuk masing-masing faktor eksternal kunci tentang seberapa efektif strategi perusahaan saat ini dalam merespon faktor tersebut, dimana 4 = respons perusahaan superior, 3= respons perusahaan di atas rata-rata, 2= respon perusahaan rata-rata, dan 1= respon perusahaan jelek. Peringkat didasarkan pada efektivitas strategi perusahaan. Dengan demikian, peringkat didasarkan pada perusahaan (*company based*), sedangkan bobot dalam tahap 2 didasarkan pada industri (*industri based*). Penting untuk diperhatikan bahwa ancaman dan peluang dapat diberi peringkat 1, 2, 3 atau 4.

4. Kalikan masing-masing bobot faktor dengan peringkatnya untuk menentukan nilai tertimbang.

Tanpa mempedulikan jumlah peluang dan ancaman kunci yang dimasukkan dalam matriks EFE, total nilai tertimbang tertinggi untuk suatu organisasi adalah 4,0 dan nilai tertimbang terendah adalah 1,0. Total nilai tertimbang rata-rata adalah 2,5. Total nilai tertimbang sebesar 4,0 mengindikasikan

bahwa organisasi merespons dengan sangat baik terhadap peluang dan ancaman yang ada dalam industrinya. Dengan kata lain, strategi perusahaan secara efektif mengambil keuntungan dari peluang yang ada saat ini dan meminimalkan efek yang mungkin muncul dari ancaman eksternal. Total nilai 1,0 mengindikasikan bahwa strategi perusahaan tidak memanfaatkan peluang atau tidak menghindari ancaman eksternal.²³

5. Matriks Internal Eksternal

Matriks IE bermanfaat untuk memposisikan institusi atau perusahaan kedalam matriks yang terdiri dari sembilan sel. Matriks IE terdiri dari dua dimensi, yaitu total skor dari IFE matriks pada sumbu X dan total skor EFE matriks pada sumbu Y. Pada sumbu X dari IE matriks terdiri dari 3 (tiga) skor yakni

- Skor 1,0 – 1,99 menyatakan bahwa posisi internal lemah
- Skor 2,0 – 2,99 posisinya adalah sedang
- Skor 3,0 – 4,0 adalah kuat.

Dengan cara yang sama, pada sumbu Y yang dipakai untuk IFE matriks dengan kriteria :

- Skor 1,0 – 1,99 menyatakan bahwa posisi eksternal rendah,
- Skor 2,0 – 2,99 posisinya adalah sedang,
- Skor 3,0 – 4,0 adalah tinggi.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.1.

²³ Fred R. David, *Manajemen Strategis*, Terj. Ichsan Setiyo Budi, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h.78-79

| | | Skor Total IFE | | | |
|----------------|--------|----------------|-----|--------|-------|
| | | Kuat | | Sedang | Lemah |
| | | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| Skor Total EFE | Tinggi | 4,0 | I | II | III |
| | Sedang | 3,0 | IV | V | VI |
| | Rendah | 2,0 | VII | VIII | IX |
| | | 1,0 | | | |

Gambar 3.1. Matriks Internal Eksternal

Matriks IE memiliki 3 (tiga) implikasi strategi yang berbeda²⁴, yaitu :

1. SBU yang berada pada Sel I, II, atau IV dapat digambarkan sebagai *Grow* dan *Build*. Strategi-strategi yang cocok bagi SBU ini adalah strategi Intensif seperti *Market Penetration*, *Market Development*, dan *Product Development* atau Strategi Terintegrasi seperti *Backward Integration*, *Forward Integration*, dan *Horizontal Integration*.
2. SBU yang berada pada sel III, V, atau VII paling baik dikendalikan dengan strategi *Hold and Maintain*. Strategi-strategi yang umum dipakai yaitu strategi *Market Penetration* dan *Product Development*.
3. SBU yang berada pada sel VI, VIII, atau IX dapat menggunakan strategi *Harvest* dan *Divestiture*.

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*) dalam lingkungan internal perusahaan, dan peluang (*Opportunities*) serta ancaman (*Threats*) lingkungan eksternal perusahaan. Analisis kekuatan dan kelemahan yang ada di lingkungan internal terutama ditujukan terhadap faktor keberhasilan kunci (*Key Success Factor*). Jadi dengan analisis ini diharapkan akan diperoleh cara untuk mengembangkan dan

²⁴ Husein Umar, *Strategis Management in Action*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 34-35

memanfaatkan kekuatan serta penopang atau mengurangi kelemahan dengan maksud untuk memanfaatkan peluang dan mengurangi ancaman.²⁵

Dari analisis ini ada empat kemungkinan identifikasi lingkungan yang dihadapi perusahaan :

- Terdapat peluang dalam suatu industri dan perusahaan mempunyai kekuatan untuk mendapatkannya sehingga harus disusun strategi yang bersifat agresif.
- Terdapat peluang dalam suatu industri akan tetapi perusahaan mempunyai kelemahan yang pokok untuk mendapatkannya, sehingga harus disusun strategi yang bersifat perubahan haluan (*Turnaround*).
- Terdapat ancaman dalam suatu institusi mempunyai kekuatan untuk mendapatkannya, sehingga harus disusun strategi bisnis yang bersifat diversifikasi.
- Terdapat ancaman dalam suatu industri dan disamping itu perusahaan mempunyai kelemahan yang pokok di bidang yang bersangkutan, sehingga harus disusun strategi yang bersifat defensif

6. Positioning Kuadran SWOT

Setelah memasukan data dalam matrik *Internal Factors Analysis Summary* (IFAS) dan *External Factors Analysis Summary* (EFAS), tahapan kerja selanjutnya adalah menghitung jumlah skor yang didapat dari kedua matrik tersebut, di mana hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui *positioning* suatu wilayah atau kawasan dilihat dari potensi yang ada. *Positioning* yang dimaksud disini adalah *positioning* untuk mengetahui posisi potensi pengembangan investasi di Aceh. Berikut tahapan kerja untuk menentukan Positioning Kuadran SWOT.

Setelah sebelumnya membahas matrik IFAS dan EFAS maka dapat diketahui posisi suatu perusahaan yang sesungguhnya. Dari matrik IFAS dapat diketahui posisi sumbu X (*Strengths-Weaknesses*). Sedangkan untuk matrik EFE dapat diketahui posisi sumbu Y (*Opportunities-Threats*).

²⁵ Fred R. David, *Manajemen Strategis*, Terj. Ichsan Setiyo Budi, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 33



Gambar 3.2 Kuadran SWOT

Berdasarkan matrik IFAS dan EFAS tersebut dapat diketahui posisi sumbu X dan posisi sumbu Y di mana menentukan posisi di kuadran SWOT. Rumusan setiap kuadran adaptasi dari penggunaan SWOT sehingga diadaptasi dari rumusan sebagai berikut:

1. Kuadran I (Positif, Positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

2. Kuadran II (Positif, Negatif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Diversifikasi Strategi, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenanya, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

3. Kuadran III (Negatif, Positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Ubah Strategi, artinya organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab, strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi.

4. Kuadran IV (Negatif, Negatif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Strategi Bertahan, artinya kondisi internal organisasi berada pada pilihan dilematis. Oleh karenanya organisasi disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri.²⁶

7. QSPM-Quantitative Strategic Planning Matrix

QSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternative-alternatif strategi yang ada. Perhitungan QSPM didasarkan kepada input dari bobot matriks internal eksternal, serta alaternatif strategi pada tahap pencocokan.

Pada kerangka perumusan strategi komprehensif QSPM menggunakan input dari analisis Tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis Tahap 2 untuk menentukan secara objektif di antara alternatif strategi. Yaitu, Matriks EFE SWOT, Matriks IFE, yang membentuk Tahap 1, digabung dengan Matriks SWOT, Matriks SPACE, Matriks IE, Matriks *Grand Strategy*, yang membentuk dalam Tahap 2, memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membuat QSPM (Tahap 3). QSPM adalah alat yang memungkinkan penyusun strategi untuk mengevaluasi alternatif strategi secara objektif, berdasarkan faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Seperti alat analisis perumusan-strategi lainnya, QSPM membutuhkan penilaian intuitif yang baik.

²⁶ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 41.

Format dasar dari QSPM diilustrasikan dalam Tabel 3.3, perhatikan bahwa kolom kiri dari QSPM terdiri atas faktor internal dan eksternal kunci (dari Tahap 1), dan baris atas terdiri atas alternatif strategi yang layak (dari Tahap 2).

Secara spesifik, kolom kiri QSPM terdiri atas informasi yang didapat langsung dari Matriks EFE dan Matriks IFE. Pada kolom yang berdekatan dengan faktor keberhasilan kunci, masing-masing bobot yang diterima oleh setiap faktor dalam Matriks EFE dan Matriks IFE dicatat.

Baris atas QSPM terdiri atas alternatif strategi yang diturunkan dari Matriks SWOT, Matriks SPACE, Matriks IE, dan Matriks *Grand Strategy*. Alat pencocokan ini biasa menghasilkan alternatif strategi yang mirip. Tetapi, tidak semua strategi yang disarankan oleh teknik pencocokan harus dievaluasi dalam QSPM. Penyusun strategi harus menggunakan penilaian intuitif yang bagus untuk memilih strategi yang akan dimasukkan dalam QSPM.

Secara konsep, QSPM menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi berdasarkan seberapa jauh faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal dimanfaatkan atau diperbaiki. Daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam satu set alternatif dihitung dengan menentukan pengaruh kumulatif dari masing-masing faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal. Jumlah set alternatif strategi yang dimasukkan dalam QSPM bisa berapa saja, jumlah strategi dalam satu set juga bisa berapa saja, tetapi hanya strategi dalam set yang sama dapat dievaluasi satu sama lain. Sebagai contoh, satu set strategi dapat mencakup diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat, sementara set lainnya dapat memasukkan penerbitan saham dan penjualan divisi untuk menghasilkan modal yang dibutuhkan. Dua set strategi ini sangatlah berbeda, dan QSPM mengevaluasi strategi hanya dalam satu set.

Tabel 3.3 Contoh Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (QSPM)

| ALTERNATIF STRATEGI | |
|----------------------------|---------------------|
| <i>Faktor Kunci</i> | <i>Bobot</i> |
| <i>Strategi 1</i> | |
| <i>Strategi 2</i> | |
| <i>Strategi 3</i> | |

| Faktor Eksternal Kunci | Faktor Internal Kunci |
|-------------------------------|------------------------------|
| Budaya Masyarakat | Kebijakan Pemerintah |
| Teknologi Informasi | Tenaga Kerja |
| Kebijakan Pemerintah Pusat | Sumber Daya Alam |
| Kondisi Alam | Sarana dan Prasarana |
| Kondisi Perekonomian | Sumber Energi |
| | Pemasaran Hasil Produksi |

Sumber: David (2006)

Menurut David langkah-langkah pengembangan QSPM ialah sebagai berikut²⁷:

| | |
|-----------|---|
| Langkah 1 | Membuat daftar peluang/ancaman eksternal dan kekuatan/kelemahan internal kunci perusahaan pada kolom kiri dalam QSPM. Informasi ini harus diambil secara langsung dari Matriks EFE dan IFE. Minimum sepuluh faktor keberhasilan kunci eksternal dan sepuluh faktor keberhasilan kunci internal harus dimasukkan dalam QSPM. |
| Langkah 2 | Berikan bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal. Bobot ini identik dengan yang ada pada Matriks EFE dan IFE. Bobot disajikan dalam kolom persis di samping kanan faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal. |
| Langkah 3 | Evaluasi matriks Tahap 2 (pencocokan), dan identifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diimplementasikan. Catat strategi-strategi ini pada baris atas dari QSPM. Kelompokkan strategi ke dalam set yang independen jika memungkinkan. |
| Langkah 4 | Tentukan Nilai Daya Tarik (<i>Attractiveness Scores—AS</i>) didefinisikan sebagai angka yang mengindikasikan daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam set alternatif tertentu. Nilai Daya Tarik (<i>Attractiveness Scores—AS</i>) ditentukan |

²⁷ Fred R. David, *Manajemen Strategis*, Edisi Sepuluh, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. ...

| | |
|------------------|--|
| <p>Langkah 5</p> | <p>dengan mengevaluasi masing-masing faktor internal atau eksternal kunci, satu pada suatu saat tertentu, dan mengajukan pertanyaan, "<i>Apakah faktor ini memengaruhi pilihan strategi yang dibuat?</i>" Jika jawabannya ya, maka strategi tersebut harus dibandingkan secara relatif terhadap faktor kunci tersebut. Secara spesifik, Nilai Daya Tarik harus diberikan untuk masing-masing strategi untuk mengindikasikan daya tarik relatif dari satu strategi atas strategi lainnya, dengan mempertimbangkan faktor tertentu. Jangkauan untuk Nilai Daya Tarik adalah 1 = tidak menarik, 2 = agak menarik, 3 = cukup menarik, 4 = sangat menarik. Jika jawaban atas pertanyaan di atas jawabannya adalah tidak, mengindikasikan bahwa faktor kunci tersebut tidak memiliki dampak terhadap pilihan spesifik yang dibuat, dengan demikian tidak perlu berikan bobot terhadap strategi dalam set tersebut. Gunakan tanda minus untuk mengindikasikan bahwa faktor utama tersebut tidak memengaruhi pilihan strategi yang dibuat. Catatan: Jika Anda memberikan nilai daya tarik (AS) untuk satu strategi, kemudian berikan nilai AS untuk yang lainnya. Dalam kata lain, jika satu strategi mendapat minus, maka yang lainnya pada baris yang sama harus mendapat minus juga.</p> <p>Hitung Total Nilai Daya Tarik. Total Nilai Daya Tarik (<i>Total Attractiveness Scores—TAS</i>) didefinisikan sebagai produk dari pengalian bobot (Langkah 2) dengan Nilai Daya Tarik (Langkah 4) dalam masing-masing baris. Total Nilai Daya Tarik mengindikasikan daya tarik relatif dari masing-masing alternatif strategi, dengan hanya mempertimbangkan pengaruh faktor keberhasilan kunci internal atau eksternal yang terdekat. Semakin tinggi Total Nilai Daya Tarik, semakin menarik alternatif strategi tersebut (dengan hanya mempertimbangkan faktor keberhasilan kunci terdekat).</p> |
|------------------|--|

| | |
|-----------|---|
| Langkah 6 | <p>Hitung Penjumlahan Total Nilai Daya Tarik. Tambahkan Total Nilai Daya Tarik dalam masing-masing kolom strategi dari QSPM. Penjumlahan Total Nilai Daya Tarik (STAS) mengungkapkan strategi mana yang paling menarik dari setiap set alternatif. Nilai yang lebih tinggi mengindikasikan strategi yang lebih menarik, mempertimbangkan semua faktor internal dan eksternal yang relevan yang dapat memengaruhi keputusan strategis. Tingkat perbedaan antara Penjumlahan Total Nilai Daya Tarik dari set alternatif strategi tertentu mengindikasikan tingkat kesukaan relatif dari satu strategi di atas yang lainnya.</p> |
|-----------|---|

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh yang menjadi pusat wilayah Pemerintahan Daerah Tingkat I Provinsi Aceh.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Provinsi Aceh

Aceh merupakan daerah istimewa yang secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam atau disingkat NAD. Provinsi ini memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang. Aceh adalah daerah pertama yang mempunyai hubungan langsung dengan dunia luar. Pada masa kejayaannya, tepatnya pada masa Kerajaan Samudera Pasai, provinsi ini memegang peranan penting bagi jalur perdagangan internasional, karena posisinya yang strategis. Karena letaknya yang strategis pula, Kerajaan Samudra Pasai waktu itu berkembang menjadi kerajaan Islam yang kuat. Bertolak dari sejarah itulah, pantaslah kiranya provinsi ini memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi lain.

Aceh adalah sebuah provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sumatra dengan ibu kotanya Banda Aceh. Ada bermacam suku bangsa yang hidup bersama di Aceh, sehingga menambah kebhinekaan Serambi Mekah ini. Provinsi Aceh mendapat sebutan Serambi Mekah karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Aceh Syariat Islam benar-benar diberlakukan kepada sebagian warganya yang menganut agama Islam. Islam memang agama yang dominan, sementara agama kristen, katolik, hindu, dan buddha dianut oleh sebagian masyarakat lainnya yang berketurunan Jawa, Cina, Batak, dan India.

Seperti provinsi lain di Indonesia, Provinsi Aceh memiliki berbagai keunikan tersendiri, mulai dari kehidupan suku bangsanya, lagu daerah, bahasa dan sebagainya. Agar lebih jelas berikut profil Aceh yang dijelaskan secara singkat, padat dan jelas.

- Nama Resmi: Provinsi Aceh
- Ibukota: Banda Aceh

- Luas Wilayah: 57.956,00 Km²
- Jumlah Penduduk: 5.066.831 Jiwa
- Suku Bangsa: Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Jawa, Simeuleu, Kluet, Aneuk Jamee.
- Suku pendatang : Jawa, Minang, Palembang, Makassar dan lain-lain.
- Agama: Islam: 98,80%, Kristen Protestan : 0,84% Khatolik: 0,16%, Buddha: 0,18%, Hindu : 0,02%.
- Wilayah Administrasi: Kab.: 18, Kota: 5, Kec.: 289, Kel.: -, Desa: 6.474
- Lagu Daerah: Bungong Jeumpa
- Lain-lain: 642 mukim. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi NAD yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah kecamatan. Dipimpin oleh Imum Mukim.¹

b. Letak Geografis Aceh

Secara geografis Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terletak pada posisi 2 derajat - 6 derajat LU - 95 derajat - 98 derajat BT. Provinsi yang terletak di sebelah ujung utara Pulau Sumatra ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Andaman
- Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara, dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

¹ Website: <http://www.acehprov.go.id>



Gambar 4.1 Peta Provinsi Aceh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (pasal 18), menyebutkan bahwa Provinsi Aceh juga memiliki wilayah laut, yaitu laut teritorial dan laut kepulauan. Luas wilayah daratan Aceh yang beribu kota di Banda Aceh adalah 57.365,57 km persegi atau 5.736,557 ha. Adapun rincian penggunaannya meliputi:

- a. Perkampungan/pemukiman seluas 110.715,55 ha
- b. Industri seluas 3.441,03 ha
- c. Pertambangan seluas 516,29 ha
- d. Persawahan seluas 289.122,47 ha
- e. Pertanian tanah kering seluas 136.530,00 ha

- f. Tanaman semusim seluas 329.852,03 ha
- g. Perkebunan besar seluas 308.053,11 ha
- h. Perkebunan kecil seluas 223.725,17 ha
- i. Hutan seluas 3.946.317,56 ha
- j. Perairan darat seluas 13.825,17 ha
- k. Tanah terbuka seluas 18.930,64 ha
- l. dan lain-lain seluas 13.825,17 ha

Provinsi Aceh juga memiliki 2 danau, 35 gunung, 73 sungai, dan 119 pulau. Wilayah administrasi Daerah tingkat II Provinsi Aceh dibagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Sejak tahun 1999, Provinsi Aceh telah mengalami beberapa pemekaran wilayah. Sampai saat ini wilayah administrasi provinsi terbagi menjadi 18 kabupaten dan 5 daerah kota. Wilayah administrasi tersebut terbagi lagi atas 257 kecamatan, 693 mukim, 6335 gampong, dan 112 kelurahan.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan daerah beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai dengan Agustus. Musim penghujan terjadi dari bulan September sampai dengan Pebruari.

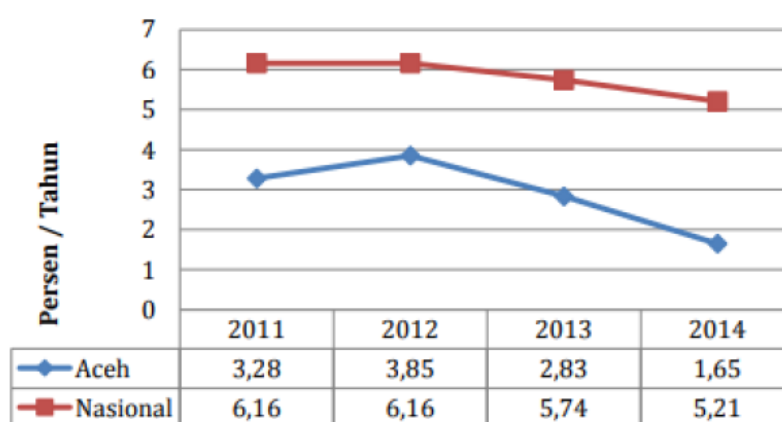
Hal ini berkaitan erat dengan posisinya yang terletak di sekitar garis khatulistiwa. Curah hujan di pesisir timur dan utara berkisar antara 1.000 mm - 2.000 mm per tahun. Sementara itu, di bagian tengah, pesisir barat dan selatan curah hujannya lebih tinggi antara 2.000 - 3.000 mm pertahun. Adapun suhu maksimum rata-rata antara 23 - 35 derajat Celcius dengan kelembapan nisbi udara antara 65 - 75%.²

c. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Potensi kekayaan alam di Provinsi Aceh melimpah, yang berasal dari hasil hutan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Sektor pertambangan telah mampu menyumbang sekitar 10,83 persen perekonomian di Aceh dengan komoditas minyak dan gas.

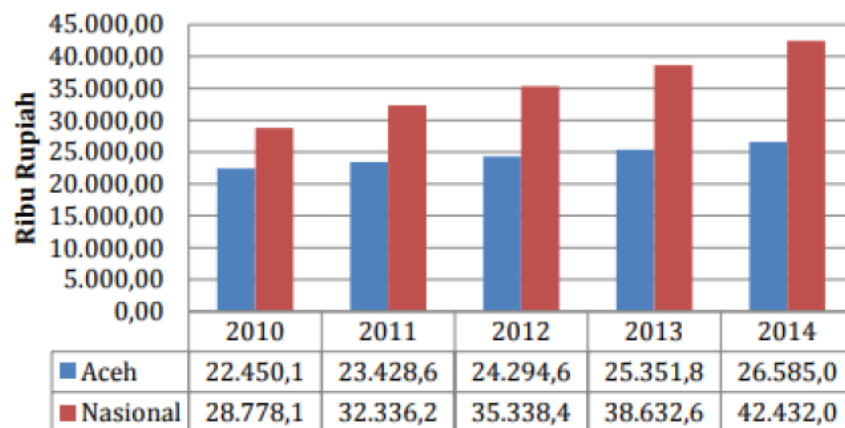
² *Letak Geografis Provinsi Aceh*, <https://www.sejarah-negara.com/2017/11/letak-geografis-provinsi-aceh.html>, diakses tanggal 18 Mei 2019.

Selain sektor pertambangan, kegiatan perekonomian masyarakat dominan pada sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan. Pertumbuhan ekonomi Aceh terus mengalami peningkatan periode 2011-2012, kemudian menurun pada tahun 2012-2014 (Gambar 4.2). Selama kurun waktu 2011-2014 kinerja perekonomian Provinsi Aceh memiliki laju pertumbuhan rata-rata 2,90 persen, pertumbuhan ekonomi Aceh dari tahun 2012-2014 melambat karena pengaruh produksi aktivitas pertambangan dan industri pengolahan yang menurun, ditunjukkan dengan pertumbuhan kedua sektor tersebut negatif.

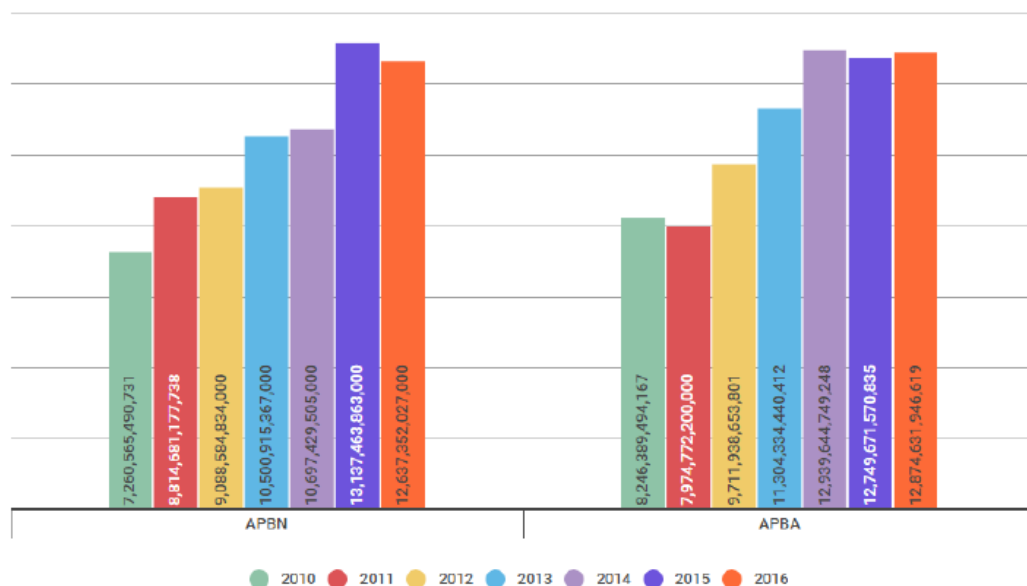


Gambar 4.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan

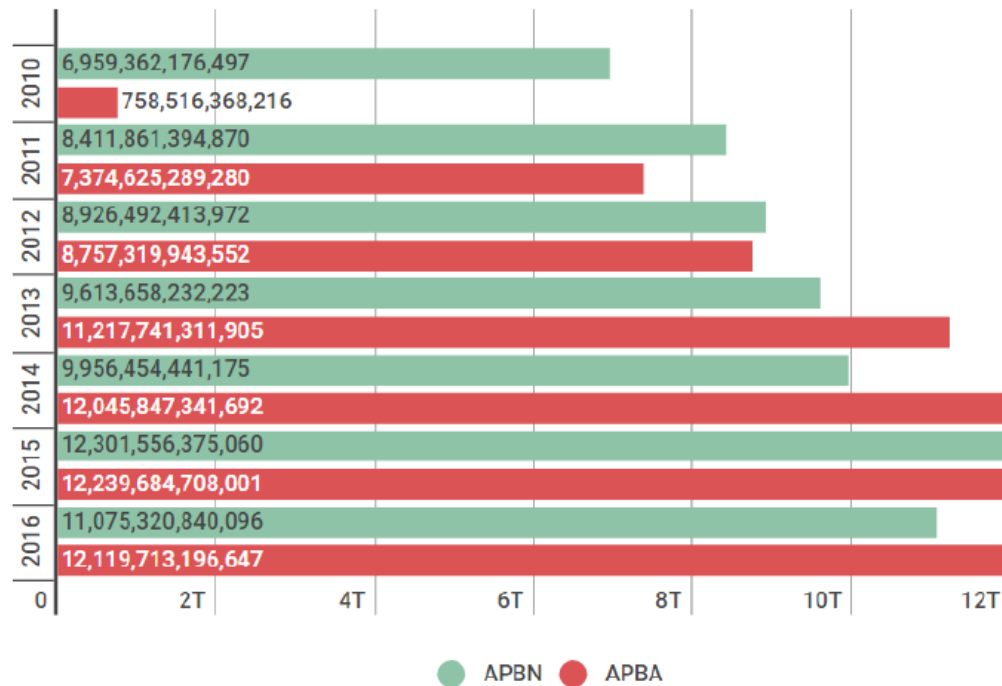
Selama kurun waktu 2010-2014 pendapatan per kapita di Provinsi Aceh cenderung meningkat, namun lebih rendah dari pendapatan per kapita nasional. Tingginya pendapatan perkapita di Provinsi Aceh tidak dapat digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan di lapangan. Dukungan pendapatan dari sektor pertambangan mempengaruhi peningkatan pendapatan perkapita di Provinsi Aceh. Jika pada tahun 2010 rasio PDRB perkapita Provinsi Aceh dan PDB Nasional sebesar 78,01 persen, maka pada tahun 2014 rasionya menurun menjadi 62,65 persen (Gambar 4.3). Hal ini menunjukkan pengaruh sektor pertambangan mulai mengalami penurunan bagi peningkatan pendapatan perkapita di Aceh.



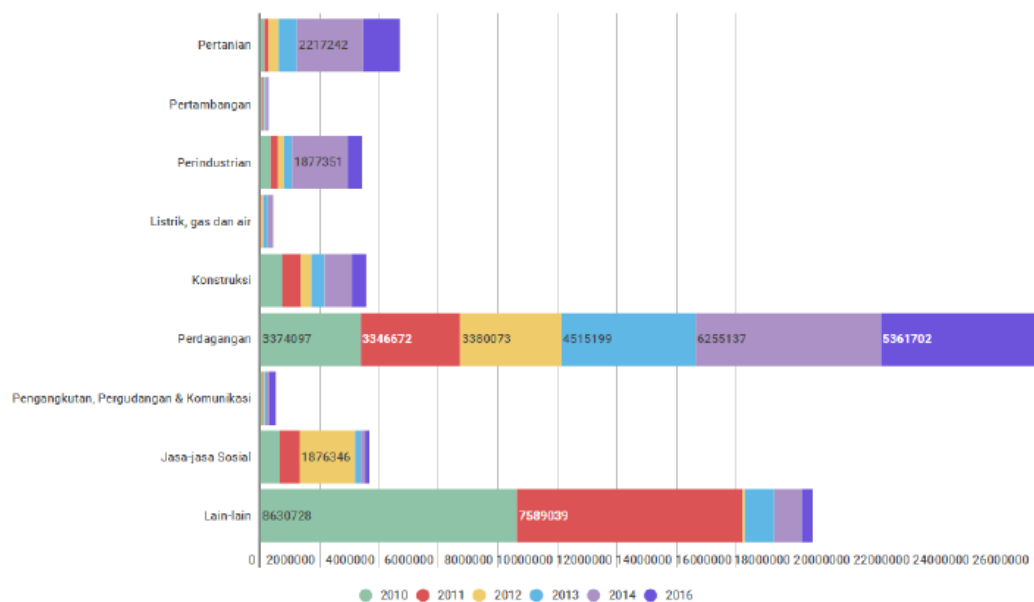
Gambar 4.3 PDRB Per Kapita ADHB



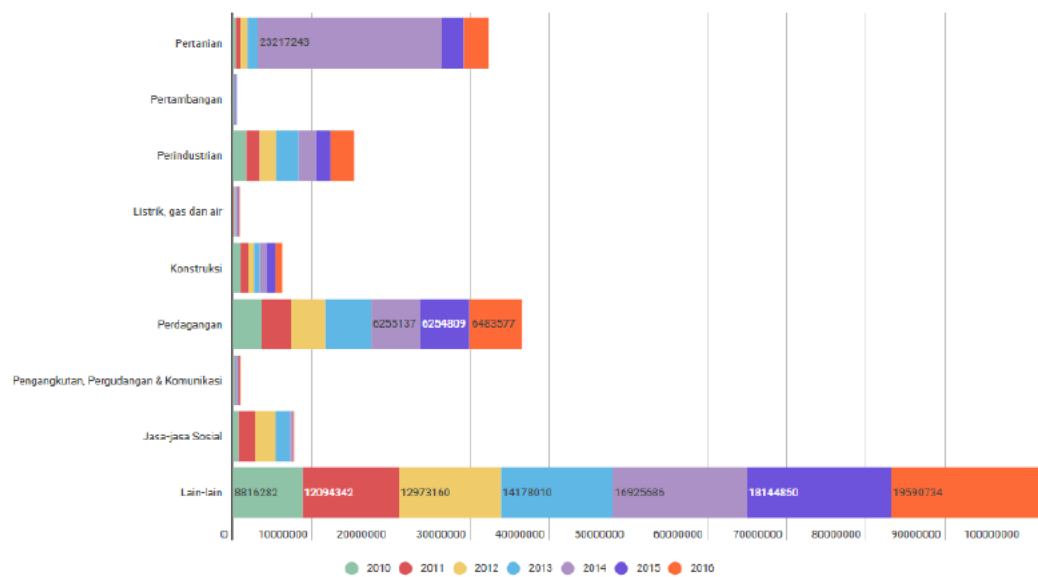
Gambar 4.4 Pagu Anggaran Pembangunan Provinsi Aceh Menurut Sumber Dana Tahun 2010-2016



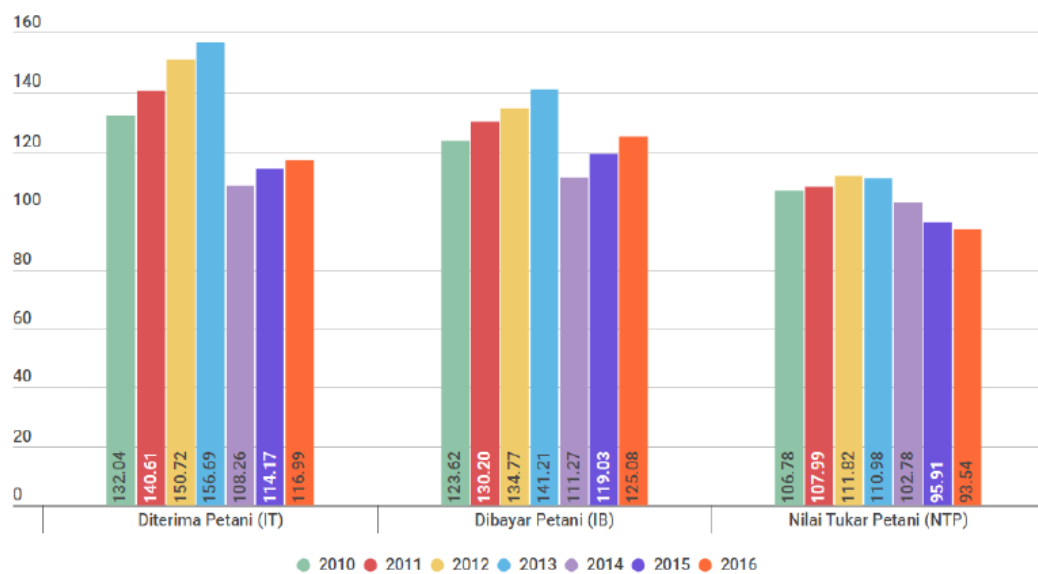
Gambar 4.5 Realisasi Anggaran Pembangunan Menurut Sumber Dana di Provinsi Aceh Tahun 2010-2016



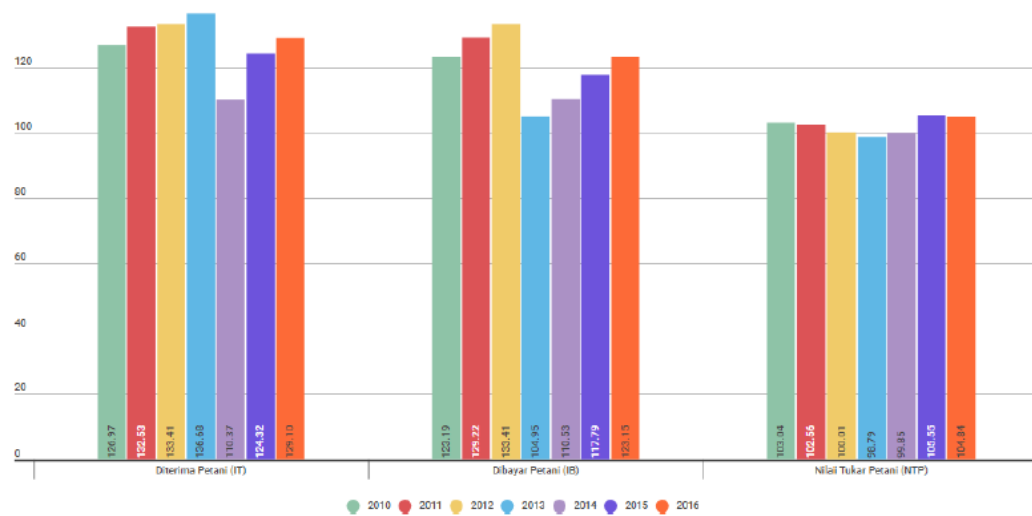
Gambar 4.6 Jumlah Kredit Usaha Kecil Menurut Sektor Ekonomi (Juta Rupiah) Tahun 2010-2016



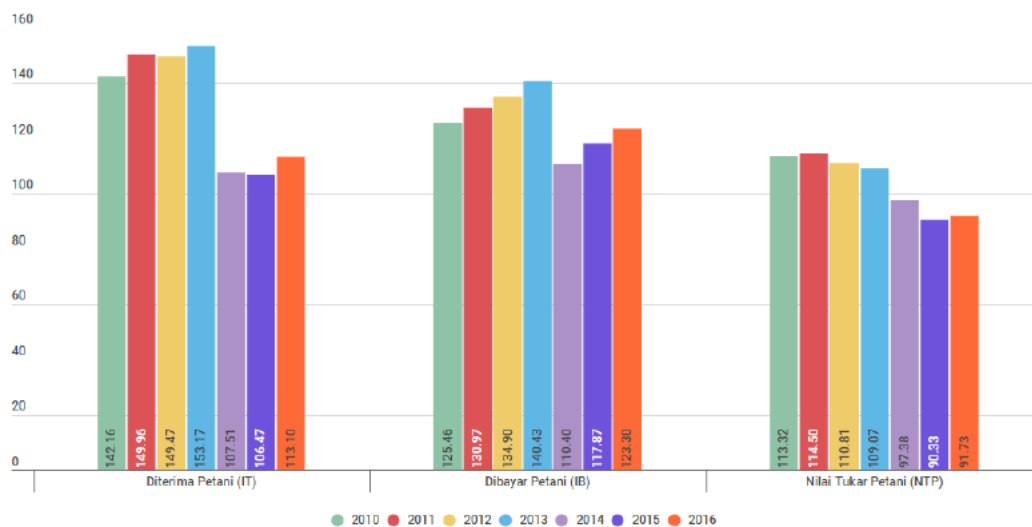
Gambar 4.7 Perkembangan Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (Juta Rupiah) Tahun 2010-2016



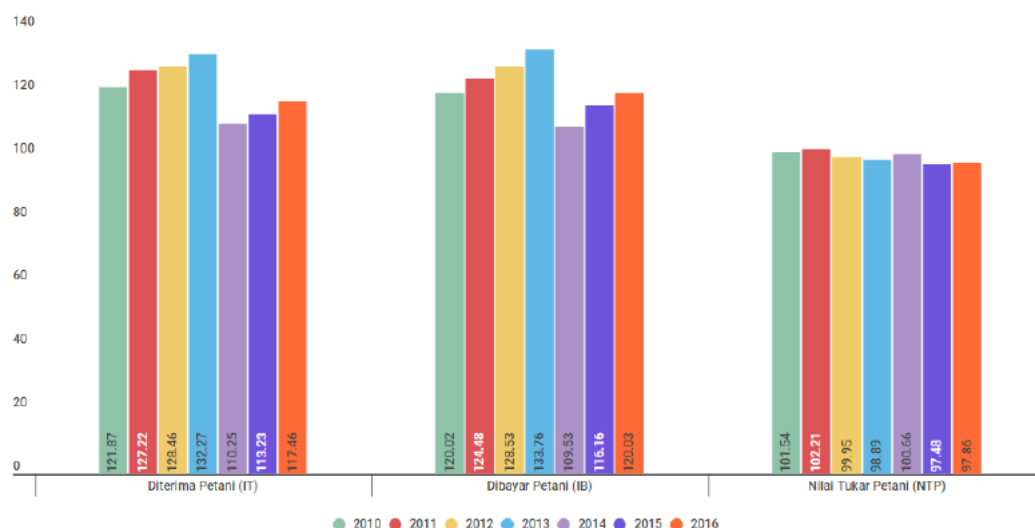
Gambar 4.8 Rata-rata Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), dan Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2010-2016



Gambar 4.9 Rata-rata Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), dan Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Holtikultura Tahun 2010-2016



Gambar 4.10 Rata-rata Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), dan Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Perkebunan Rakyat Tahun 2010-2016



Gambar 4.11 Rata-rata Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), dan Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Perikanan Tahun 2010-2016

Perekonomian di Provinsi Aceh secara umum masih bertumpu pada sektor yang berbasis komoditas sumber daya alam. Sejak tahun 1970 komoditas utama Aceh masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Namun demikian, sejak tahun 2005 dominasi tersebut digantikan oleh sektor pertanian dengan *share* hampir mencapai 30% terhadap total ekonomi. Adanya penurunan sektor pertambangan dan penggalian seiring dengan habisnya hasil minyak dan gas yang ditandai dengan berakhirnya kegiatan ekspor LNG dari PT. Arun pada bulan Oktober 2014.

Pasca habisnya hasil minyak dan gas, perekonomian Aceh bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan administrasi pemerintahan. Keempat sektor tersebut tercatat memberikan *share* sebesar 63,62% dalam struktur ekonomi dengan rincian sektor pertanian (28,57%), perdagangan (15,72%), konstruksi (9,76%), dan administrasi pemerintahan (9,58%).

Sektor pertanian di Aceh masih didominasi oleh subsektor perkebunan dengan *share* sebesar 26,00% dari total sektor pertanian. Adapun subsektor tanaman pangan berada pada urutan kedua dengan pangsa sebesar 19,00%. Sementara itu, subsektor perikanan berada pada posisi ketiga dengan jumlah *share* sebesar 18,00%. Sebagian besar komoditas andalan Aceh adalah kelapa sawit,

kopi, karet, dan kakao. Daerah persebaran penghasil komoditas tersebut tersebar di Aceh Tengah, Gayo Luwes, Bener Meriah (Kopi), Aceh Timur, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tamiang (Kelapa Sawit), Aceh Barat (Karet) serta Pidie, Pidie Jaya (Kakao).

d. Regulasi dan Perundang-Undangan di Aceh

Aceh adalah provinsi di Indonesia yang secara resmi memberlakukan Syariat Islam berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Dalam Undang-undang Nomor 44 Syariat Islam didefinisikan sebagai semua aspek ajaran Islam. Dalam UU Nomor 18 disebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah akan melaksanakan Syariat Islam yang dituangkan ke dalam qanun (peraturan daerah) terlebih dahulu.

Hingga kini, Aceh telah melahirkan lebih dari 15 Qanun Syariat, termasuk Instruksi dan peraturan Gubernur, yang berlaku secara resmi di Aceh. Juga ada Qanun yang telah dicabut. Berlakunya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, misalnya, secara otomatis mencabut Qanun Provinsi NAD Nomor 12, 13, 14 Tahun 2003. Qanun Nomor 6/2014 ini mulai berlaku 23 Oktober 2015. Qanun Syariat terbaru adalah Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencabutan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah, juga telah mensahkan beroperasinya Bank Aceh Syariah secara penuh dan mengakhiri polemik seputar rencana semula berupa spin-off cabang syariah dari Bank Aceh yang tetap menyediakan jasa bank konvensional. Tidak hanya itu saja, Pemerintah Aceh juga sedang menuntaskan Grand Desain Syariat Islam sebagai panduan pelaksanaan Dinul Islam di Serambi Mekkah ini.

Regulasi pemerintah dalam meningkatkan investasi antaranya dengan merumuskan Qanun Penanaman Modal. Hal ini dapat membuka peluang dalam

peningkatan Investasi di Provinsi Aceh. Peluang Aceh dalam kerangka UU No.11/2006 Undang-Undang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa penduduk di Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi secara internal dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 165, ayat 1), dan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dapat menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku secara nasional (Pasal 165, ayat 2). UU Penanaman Modal dengan Qanun Investasi. Secara prinsip UUPM memuat aturan yang bersifat umum, sementara qanun memuat legislasi yang rinci dalam mengimplementasikan regulasi investasi yang berlaku secara nasional. UUPA memberikan peluang bagi Aceh untuk menyusun regulasi yang sedikit berbeda dari UUPM, misalnya dalam hal insentif yang ditawarkan atau peraturan mengenai tenaga kerja atau pengelolaan tanah, atau hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan SDA.

UUPA juga menyatakan bahwa qanun investasi Aceh harus konsisten dengan UUPM. UU Penanaman Modal 2007 merupakan asas yang digunakan dalam penggalangan investasi adalah kepastian hukum, keterbukaan, perlakuan yang sama, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pemberlakuan *negative list*, yaitu bidang-bidang investasi yang tertutup untuk penanam modal asing. Adanya penekanan pada pemrosesan izin investasi secara pelayanan terpadu satu pintu (*one stop shop*) Penanaman modal dengan pengembangan UMKM dan penanaman modal/investasi asing berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Pemberian fasilitas, terutama perpajakan dan keringanan bea masuk dan wewenang yang lebih besar diberikan kepada BPKM disamping itu mengenal *Investor Why invest*. Beberapa motivasi dalam berinvestasi seperti investor mencari sumber daya. SDA, bahan baku, tenaga kerja yang murah atau memiliki keahlian khusus merupakan alasan paling penting yang harus dilakukan untuk menarik minat investor. Hal ini disebabkan oleh para investor yang mencari pasar-

pasar baru baik lokal maupun regional, memenuhi keperluan pengganti barang import, atau membuka pasar yang selama ini tertutup.

Efisiensi ini dalam rangka integrasi regional atau global, atau product rationalization. Justeru hal ini sering menjadi pertanyaannya dan motivasi investor masuk ke Aceh. Kerangka kebijakan (*policy framework*), kemudahan berusaha dan memulai investasi, ketersediaan dan kualitas SDA, karakteristik dari pasar lokal dan insentif fiskal (pajak) serta upah dan kualitas tenaga kerja, biaya transportasi, dan harga faktor produksi lainnya termasuk Infrastruktur dan ketersediaan bahan baku antara faktor penting dalam menentukan lokasi investasi.

Adapun tinjauan Qanun Investasi Aceh secara sederhana, komponen yang harus ada dalam Qanun:

- a. Ketentuan umum
- b. Proses perizinan
- c. Jaminan-jaminan
- d. Insentif
- e. Penyelesaian sengketa
- f. Aturan peralihan

Sementara tinjauan Qanun Investasi Aceh Komponen Qanun dalam Ketentuan umum 13 item, 34 item terkait proses perizinan yang tidak dibedakan investor asing dan investor dalam negeri. Semangat penyederhanaan melalui PTSP diidentifikasi belum ada PTSP Jaminan-jaminan, Kepastian hukum, Perlakuan yang sama tidak ada nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, hak repatriasi modal dan keuntungan. Tinjauan Qanun Investasi Aceh Komponen Qanun vs RUU PM: Butiran RUU PM Rancangan Insentif & fasilitas Insentif pajak; PPh, PBB, PPN, keringan bea masuk barang modal & pendukung, percepatan penghitungan amortisasi, dan hak atas tanah. Tidak begitu tegas/jelas, dan terbatas pada keringan bea masuk barang modal Penyelesaian sengketa Cukup jelas, dari tahap musyawarah mufakat sampai arbitrase tidak ditemukan.

Adapun qanun-qanun dan peraturan daerah yang terbit setelah lahirnya Undang-Undang no 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, yang berkaitan dengan syari'at Islam, yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam
2. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat
3. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 tahun 2001 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Syari'at Islam.
4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2003 tentang Peradilan Syari'at Islam.
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2003 tentang susunan Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksikatif, Legislatif dan instansi Lainnya.

13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Negara Nanggroe Aceh Darussalam
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004 Kebudayaan Aceh.
17. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Dari tahun 1999 sampai tahun 2013 qanun Aceh baru terbit hanya 16 qanun, yang berkenaan langsung syari'at Islam baru 5 qanun, dan selebihnya adalah qanun-qanun yang berkenaan dengan pelaksanaan syari'at Islam. Sementara dari sejumlah qanun tersebut yang sudah berjalan seiring dengan pelaksanaan syari'at Islam adalah qanun nomor 3 tentang MPU, qanun 33 tentang Dinas Syari'at Islam, qanun 10 tentang Mahkamah Syari'ah. Sedangkan qanun tentang kepolisian dan kejaksaan secara kasat mata kita perhatikan belum ada implementasi.

Peraturan lainnya yang lahir adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan ini mengatur sistem pendidikan di Aceh harus didasarkan pada nilai-nilai syari'at Islam. Pendidikan formal yang dikelola oleh dinas pendidikan harus menambah jam pelajaran agama, yang sebelumnya hanya 2 jam dalam seminggu menjadi 6 sampai 8 jam seminggu. Dan berikutnya lahir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan Adat. Peraturan ini menjelaskan tentang adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Aceh yang dibenarkan menurut syariat Islam yang diatur oleh negara. Semua perda-perda tersebut mengatur berbagai hal yang dapat memotivasi dan menggairahkan pelaksanaan syari'at Islam, sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan alat kelengkapan dan fasilitas umum yang mendukung kepada pelaksanaan syari'at Islam yang kaffah. Namun yang tersisa dari itu adalah belum ada pembahasan yang menyangkut dengan pembinaan mental para

pelaksanaa syari'at Islam sendiri. Sangat mungkin hal ini akan menjadi kendala tersendiri pelaksanaan syari'at di Aceh.

Kemudian tahun 2001 terbitlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Undang-undang ini memperkuat kedudukan dan kewenangan daerah Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi daerah. Setelah terbit undang-undang ini, semua Peraturan Daerah diubah nama menjadi Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah Undang-Undang ini terbit lahirlah 7 Qanun Provinsi, yaitu:

1. Qanun Provinsi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam kemudian disebut Mahkamah Syar'iyah. Undang-Undang ini mengubah nama Peradilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan lembaga diakui sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang tunduk dibawah Mahkamah Agung.
2. Qanun Provinsi Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.
3. Qanun Provinsi Nomor 12 Tahun 2003 tentang minumam Khamar dan Sejenisnya.
4. Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir.
5. Qanun Provinsi Nomor 14 Tabun 2003 tentang Khalwat.
6. Qanun Provinsi nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan Zakat.
7. Qanun Provinsi Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Semua qanun-qanun tersebut untuk memperkuat dan memperjelas tata kerja dan pelaksanaan syari'at Islam yang kaffah di Aceh.

Pada tahun 2006 lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan kewenangannya, undang-undang ini lahir setelah tercapainya perdamaian antara RI dan GAM. Karena itu undang-undang ini merupakan amanat dari MOU Helsinky dalam upaya menjaga perdamaian Aceh yang abadi. Undang-Undang ini memberi kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah Aceh dalam mengatur urusan rumah tangga Aceh. Diharapkan undang-undang ini sebagai salah satu bentuk solusi dalam menyelesaikan konflik

Aceh yang sudah mendera masyarakat dalam waktu yang sangat lama. Undang-Undang ini di samping sebagai bentuk penyempurnaan Undang-undang sebelumnya dan juga memperjelas serta memperkuat kedudukan pemerintahan Aceh dalam bingkai NKRI. Di samping dari itu juga Undang-undang ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang memberikan peluang untuk Aceh dalam melaksanakan syari'at Islam yang kaffah. Hal itu juga sebagai upaya pembentukan dan penyusunan hukum positif di Aceh yang berdasarkan syari'at Islam.³ Sedangkan qanun daerah nomor 18 Tahun 2007 tentang penetapan Baitul Mal sebagai pengelola harta agama.⁴

e. Syariat Islam dalam Masyarakat Aceh

Penerapan syari'at Islam di Aceh erat kaitannya dengan identitas diri masyarakat Aceh yang telah hilang, sebagai daerah yang berpenduduk muslim yang fanatik beragama. Aceh sebagai daerah yang memiliki sejarah syari'at Islam sejak Islam masuk ke wilayah itu dan juga merupakan daerah yang pertama Islam hadir di Nusantara. Tidak berlebihan kiranya Aceh sebagai daerah yang diberi kekhususan oleh pemerintah pusat untuk menerapkan syari'at Islam. Bukan hal yang mengada-ada bila Aceh menjadi berbeda dengan daerah lain di Indonesia, karena penerapan syari'at Islam. Itulah identitas masyarakat Aceh dengan syari'at Islam, walaupun terjadi perbedaan sebenarnya hanya untuk memperkuat kebhinnekaan dan keragaman Indonesia.

Sebenarnya secara jujur dapat dikatakan bahwa Syari'at Islam yang diterapkan di Aceh saat ini hanyalah sebagai bahagian mengembalikan formalisasi syari'at Islam yang sudah pernah terjadi dalam masa kerajaan Islam di Aceh. Pada masa kerajaan-kerajaan dahulu, syari'at Islam merupakan bahagian yang tidak bisa dipisahkan dengan hukum yang diterapkan saat itu. Menurut para ahli sejarah sulit untuk memisahkan antara hukum Islam dan hukum adat yang diterapkan oleh kerajaan Islam di Aceh. Karena syari'at Islam tidak tertulis secara khusus dalam

³ Alyasa' Abu Bakar, *Kebijakan Pelaksanaan Di Nanggroe Aceh Darussalam, dalam Kompilasi Pemikiran Guru Besar IAIN Ar-Raniry*, (Banda Aceh: BRR NAD-NIAS dan Ar-Raniry Press), h. 280.

⁴ Hafifuddin, *Peranan Ulama Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 150-156.

qanun-qanun syari'at Islam sebagaimana halnya sekarang yang memiliki qanun-qanun khusus syari'at Islam. Hal ini dipahami bahwa yang berkenaan dengan syari'at Islam tidak berdiri sendiri yang terpisah dengan qanun-qanun lainnya, namun yang berhubungan syari'at Islam dimasukkan dalam qanun-qanun umum lainnya yang digunakan oleh istana. Setiap materi qanun yang disusun saat itu berlandaskan syari'at Islam, setiap hukum adat yang berlaku juga bernuansa Islam dan segala aktifitas lainnya berdasarkan syari'at Islam.

Identitas syari'at Islam masyarakat juga tampak dalam sistem kehidupan sosial kemasyarakatan, sistem kehidupan itu selalu dihidupkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Nilai-nilai syari'at Islam selalu diterapkan dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan. Menumbuhkan sifat gotong royong dan saling membantu, menjadi sifat keutamaan masyarakat. Identitas masyarakat Aceh yang Islami juga nampak dalam kegiatan seni budaya masyarakat. Seni budaya masyarakat Aceh selalu tertata dengan nilai-nilai syari'at Islam. Seperti seni sedati dan saman, syair-syairnya adalah puji-pujian kepada Allah Swt dan selawat kepada Rasulullah Saw.

Apalagi Aceh pernah berjaya dengan syari'at Islam dalam masa-masa kerajaan Islam hingga pernah menjadi kerajaan termasyhur di nusantara. Penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang itu telah melahirkan masyarakat dan budaya Aceh yang Islami, budaya dan adat yang lahir dari renungan para. ulama kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat.⁵

f. Realisasi Pelaksanaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Sejak tanggal 1 Januari 2010, data Penanaman modal yang dilaporkan adalah data realisasi investasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang izinnya dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman

⁵ Penjelasan atas qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Modal (BKPM) RI, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi dan PTSP Kabupaten/ Kota. Sedangkan, data realisasi investasi yang dilaporkan Pada periode 1986 sampai dengan tahun 2009 adalah data kegiatan realisasi investasi berdasarkan Izin Usaha Tetap (IUT).

Data realisasi investasi berdasarkan LKPM adalah data realisasi investasi yang direalisasikan oleh perusahaan baik pada tahap pembangunan (konstruksi) maupun tahap produksi/ operasi komersial selama kurun waktu berjalan yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. LKPM tahap pembangunan disampaikan oleh perusahaan tiap triwulan, dan LKPM tahap produksi/ operasi komersial disampaikan perusahaan tiap semester. Data realisasi Penanaman modal dalam laporan ini belum menggambarkan seluruh kegiatan investasi yang ada di Aceh, karena data penanaman modal tersebut belum termasuk investasi perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi investasi dan investasi portofolio (pasar modal), dan investasi rumah tangga.

**Tabel 4.1 LKPM Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri
Tahun 2010-2016**

| No | Tahun | Realisasi Investasi |
|----|--------------|-------------------------|
| 1 | 2010 | Rp 40,99 miliar |
| 2 | 2011 | Rp 122,08 miliar |
| 3 | 2012 | Rp 1,03 triliun |
| 4 | 2013 | Rp 3,80 triliun |
| 5 | 2014 | Rp 5,89 triliun |
| 6 | 2015 | Rp. 5,03 triliun |
| 7 | 2016 | Rp 3,55 triliun |
| | Total | Rp 19,48 triliun |

Sumber : data diolah peneliti 2019

Pada tahun 2010-2016 Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang menyampaikan LKPM dengan total nilai tambahan realisasi investasi sebesar Rp 19,48 triliun dengan rincian pada tahun 2010 sebesar Rp 40,99 miliar, tahun 2011 sebesar Rp 122,08 miliar, tahun 2012 sebesar Rp 1,03 triliun, tahun 2013 sebesar

Rp 3,55 triliun, tahun 2014 sebesar Rp 5,89 triliun, tahun 2015 sebesar Rp. 5,03 triliun dan pada tahun 2016 sebesar Rp 3,80 triliun.

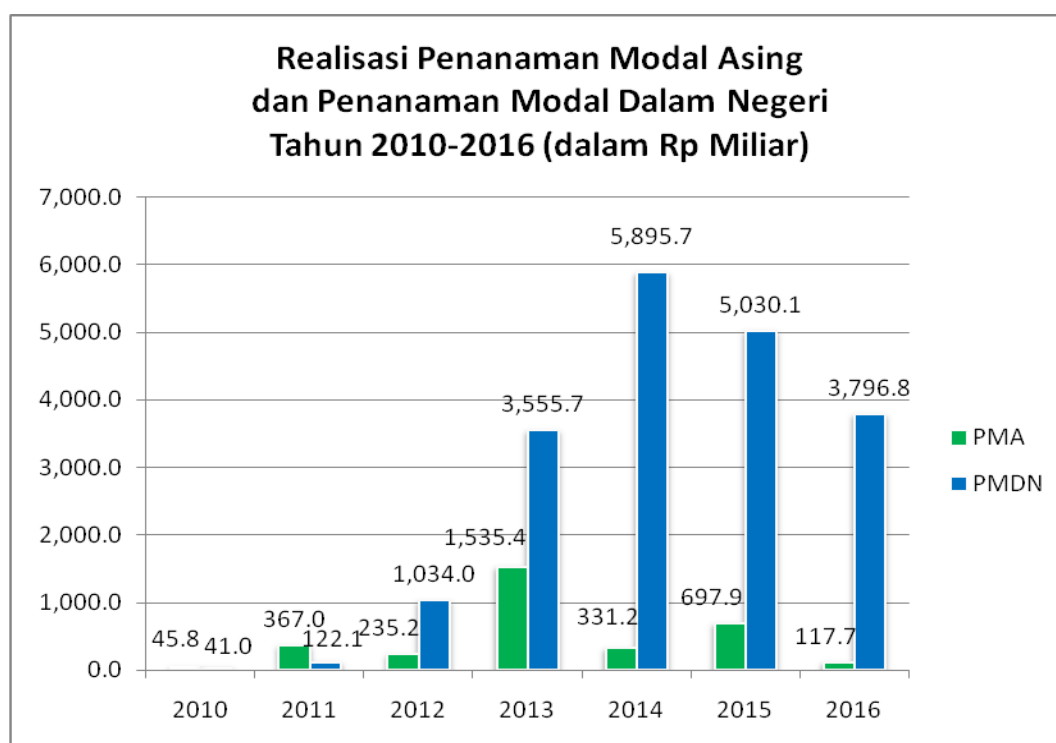
**Tabel 4.2 LKPM Perusahaan Penanaman Modal Asing
Tahun 2010-2016**

| No | Tahun | Realisasi Investasi |
|-----------|--------------|----------------------------|
| 1 | 2010 | USD 5,08 juta |
| 2 | 2011 | USD 40,78 juta |
| 3 | 2012 | USD 26.13 juta |
| 4 | 2013 | USD 165,10 juta |
| 5 | 2014 | USD 31.54 juta |
| 6 | 2015 | USD 55,87 juta |
| 7 | 2016 | USD 87,80 juta |
| | Total | USD 412,28 Juta |

Sumber : data diolah peneliti 2019

Pada tahun 2010-2016 Perusahaan Penanaman Modal Asing yang menyampaikan LKPM dengan nilai tambahan realisasi investasi sebesar USD 412,28 juta dengan rincian pada tahun 2010 sebesar USD 5,08 juta, tahun 2011 sebesar USD 40,78 juta, tahun 2012 sebesar UD 26.13 juta, tahun 2013 sebesar USD 165,10 juta, tahun 2014 sebesar USD 31.54 juta, tahun 2015 sebesar USD 55,87 juta dan pada tahun 2016 sebesar USD 87,80 juta.

Adapun realisasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing selama tahun 2010-2016 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 4.12 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Tahun 2010-2016

**Tabel 4.3 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2010-2016
(dalam Rp Miliar)**

| No | Tahun | PMDN | PMA | Total PMDN dan PMA |
|----|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2010 | 45.765.469.620 | 40.990.500.000 | 86.755.969.620 |
| 2 | 2011 | 122.082.945.494 | 367.049.033.910 | 489.131.979.404 |
| 3 | 2012 | 1.034.004.769.924 | 235.198.932.930 | 1.269.203.702.854 |
| 4 | 2013 | 3.555.676.632.736 | 1.535.444.198.961 | 5.091.120.831.697 |
| 5 | 2014 | 5.895.661.567.816 | 331.189.486.740 | 6.226.851.054.556 |
| 6 | 2015 | 5.030.128.791.017 | 697.874.321.466 | 5.728.003.112.484 |
| 7 | 2016 | 2.317.920.981.565 | 8.963.362.300 | 2.326.884.343.865 |

Sumber : data diolah peneliti 2019

Tahun 2010-2016 realisasi investasi di Aceh terus mengalami perkembangan yang signifikan tiap tahunnya. Pada tahun 2010 realisasi PMA dan PMDN hanya sebesar Rp 86,75 miliar, meningkat 463,80 persen, pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 489,13 miliar, meningkat 159,48 persen, pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 1.269,20 triliun, meningkat hingga 301,13 persen pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 5.091,12 triliun meningkat hingga 301,13 persen, pada tahun

2014 meningkat sebesar 22,31 persen menjadi 6.226,85 triliun, pada tahun 2015 yaitu sebesar 5.728,00 triliun, menurun 8,01 persen dan Pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 13,17 persen menjadi 2.963.46 triliun.⁶

g. Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja

Adapun realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia dari penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tahun 2010-2016 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 4.13 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2010-2016

Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2010 sebanyak 4.529 orang dan Tenaga Kerja Asing (PMA) 2 orang, pada tahun 2011 sebanyak 5.463 orang TKI dan TKA 1 orang, pada tahun 2012 sebanyak 17.354 orang TKI dan TKA 10 orang, pada tahun 2013 sebanyak 16.369 orang TKI dan TKA 7 orang, pada tahun 2014 sebanyak 13.666 orang TKI dan TKA 39 orang, pada tahun 2015 sebanyak 26.438

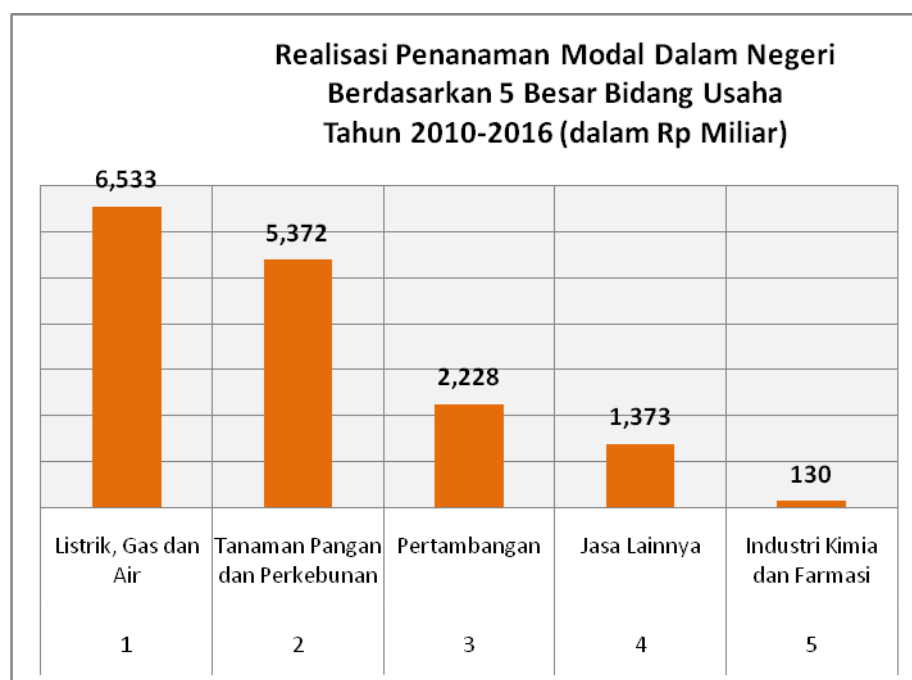
⁶ <http://dpmpstsp.acehprov.go.id>.

orang TKI dan TKA 55 orang, dan pada tahun 2016 sebanyak 23.914 TKI dan TKA 32 orang.

Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2010 sebanyak 6.242 orang dan Tenaga Kerja Asing (TKA) 36 orang, pada tahun 2011 sebanyak 6.140 orang TKI dan TKA 52 orang, pada tahun 2012 sebanyak 6.362 orang TKI dan 56 orang TKA, pada tahun 2013 sebanyak 5.367 orang TKI dan 74 orang TKA, tahun 2014 sebanyak 6.256 orang TKI dan 77 orang TKA, tahun 2015 sebanyak 4.938 orang TKI dan 42 orang TKA dan pada tahun 2016 sebanyak 4.779 orang TKI dan 29 orang TKA.

h. Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri Berdasarkan Bidang Usaha dan Lokasi

Adapun realisasi penanaman modal dalam negeri berdasarkan 5 besar bidang usaha tahun 2010-2016 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 4.14 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Berdasarkan 5 Besar Bidang Usaha Tahun 2010-2016

Dan realisasi penanaman modal dalam negeri berdasarkan lokasi tahun 2010-2016 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 4.15 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Berdasarkan 5 Besar Lokasi Tahun 2010-2016

Pada tahun 2010 terdapat 20 proyek/perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menyampaikan LKPM dengan jumlah nilai tambahan realisasi investasi sebesar Rp 40,99 miliar dengan sektor dominan adalah sektor primer dan lokasi terbesar realisasi di Kabupaten Aceh Besar.

Pada tahun 2011 terdapat 15 proyek/perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menyampaikan LKPM dengan jumlah nilai tambahan realisasi investasi sebesar Rp 122,08 miliar dengan sektor dominan adalah sektor primer dan lokasi terbesar realisasi di Kota Subulussalam.

Pada tahun 2012 terdapat 29 proyek/perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menyampaikan LKPM dengan jumlah nilai tambahan realisasi investasi sebesar Rp 1.03 triliun dengan sektor dominan adalah sektor primer dan lokasi terbesar realisasi di Kabupaten Aceh Timur.

Pada tahun 2013 terdapat 79 proyek/perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menyampaikan LKPM dengan jumlah nilai tambahan

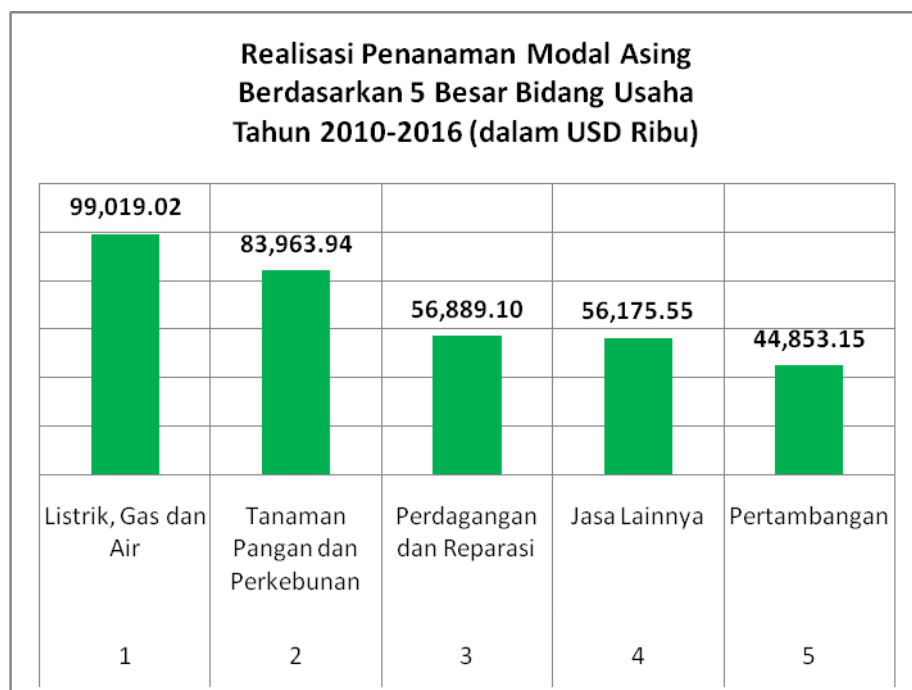
realisasi investasi sebesar Rp 3,55 triliun, dengan sektor dominan adalah sektor tersier dan lokasi terbesar realisasi di Kabupaten Nagan Raya.

Pada tahun 2014 terdapat 146 proyek/perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menyampaikan LKPM dengan jumlah nilai tambahan realisasi investasi sebesar Rp 5,89 triliun dengan sektor dominan adalah sektor primer dan lokasi terbesar realisasi di Kota Lhokseumawe.

Pada tahun 2015 terdapat 171 proyek/perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menyampaikan LKPM dengan jumlah nilai tambahan realisasi investasi sebesar Rp 5,03 triliun dengan sektor dominan adalah sektor primer dan lokasi terbesar realisasi di Kota Lhokseumawe.

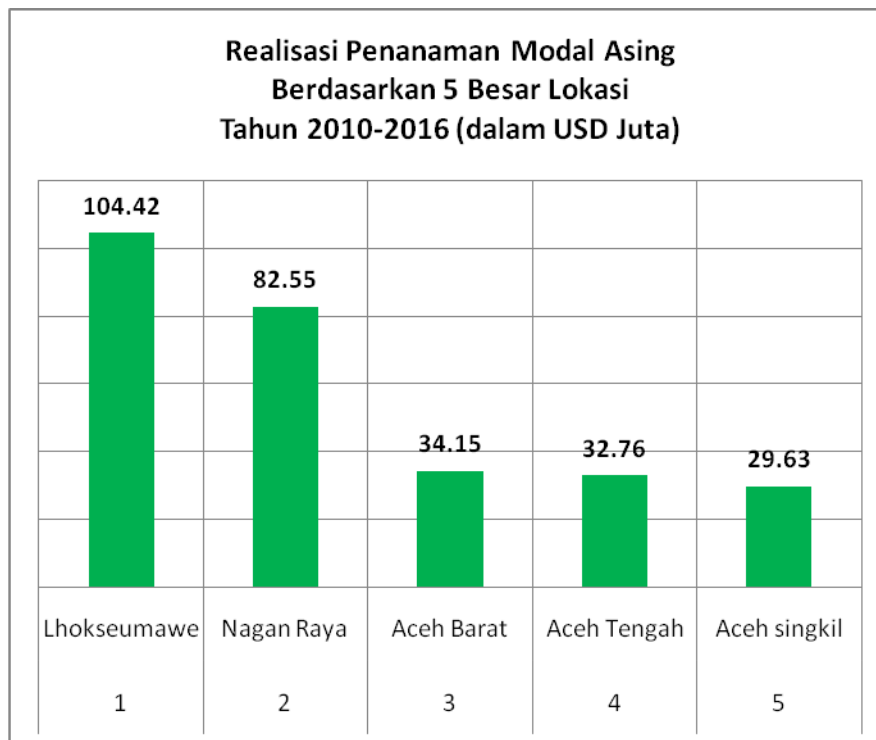
Pada tahun 2016 terdapat 346 proyek/perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menyampaikan LKPM dengan jumlah nilai tambahan realisasi investasi sebesar Rp 3,80 triliun dengan sektor dominan adalah sektor tersier dan lokasi terbesar realisasi di Kota Lhokseumawe.

Sedangkan realisasi penanaman modal asing berdasarkan 5 besar bidang usaha tahun 2010-2016 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 4.16 Realisasi Penanaman Modal Asing Berdasarkan 5 Besar Bidang Usaha Tahun 2010-2016

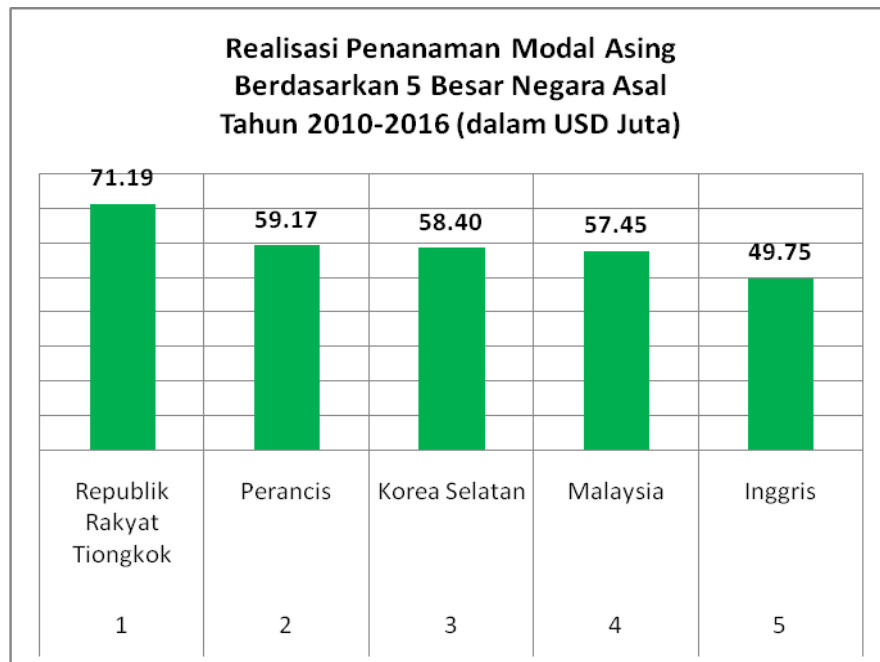
Dan realisasi penanaman modal asing berdasarkan lokasi tahun 2010-2016 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 4.17 Realisasi Penanaman Modal Asing Berdasarkan 5 Besar Lokasi Tahun 2010-2016

i. Realisasi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Negara Asal

Adapun realisasi penanaman modal asing berdasarkan Negara asal tahun 2010-2016 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 4.18 Realisasi Penanaman Modal Asing Berdasarkan 5 Besar Negara Asal Tahun 2010-2016 (Dalam USD Juta)

Pada tahun 2010 terdapat 23 proyek/perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang menyampaikan LKPM dengan jumlah nilai tambahan realisasi investasi sebesar USD 5,08 juta dengan sektor dominan adalah sektor tersier dan lokasi terbesar realisasi di Kota Banda Aceh. Dengan realisasi investor terbesar berasal dari Gabungan Negara.

Pada tahun 2011 terdapat 37 proyek/perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang menyampaikan LKPM dengan jumlah nilai tambahan realisasi investasi sebesar US 40,78 juta dengan sektor dominan adalah sektor primer dan lokasi terbesar realisasi di Kabupaten Aceh Singkil. Dengan realisasi investor terbesar dari Malaysia.

Pada tahun 2012 terdapat 37 proyek/perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang menyampaikan LKPM dengan jumlah nilai tambahan realisasi investasi sebesar USD 26,13 juta dengan sektor dominan adalah sektor primer dan lokasi terbesar realisasi di Kabupaten Nagan Raya. Dengan realisasi investor terbesar berasal dari Belgia.

Pada tahun 2013 terdapat 60 proyek/perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang menyampaikan LKPM dengan jumlah nilai tambahan realisasi

investasi sebesar USD 165,10 juta, dengan sektor dominan adalah sektor primer dan lokasi terbesar realisasi di Kabupaten Aceh Besar. Dengan realisasi investor terbesar berasal dari Korea Selatan.

Pada tahun 2014 terdapat 51 proyek/perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang menyampaikan LKPM dengan jumlah nilai tambahan realisasi investasi sebesar USD 31,54 juta dengan sektor dominan adalah sektor sekunder dan lokasi terbesar realisasi di kabupaten Aceh Tengah. Dengan realisasi investor terbesar berasal dari Belgia.

Pada tahun 2015 terdapat 36 proyek/perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang menyampaikan LKPM dengan jumlah nilai tambahan realisasi investasi sebesar USD 55,87 juta dengan sektor dominan adalah sektor tersier dan lokasi terbesar realisasi di Kabupaten Aceh Besar. Dengan realisasi investor terbesar berasal dari Perancis.

Pada tahun 2016 terdapat 42 proyek/perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang menyampaikan LKPM dengan jumlah nilai tambahan realisasi investasi sebesar USD 87,80 juta dengan sektor dominan adalah sektor tersier dan lokasi terbesar realisasi di Kabupaten Aceh Selatan. Dengan realisasi investor terbesar berasal dari RRC.

2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Peningkatan Investasi Aceh

a. Faktor Penghambat

Setelah melalui proses wawancara selama 6 (enam bulan) dengan para informan yang sudah peneliti pilih dalam rangka mencari informasi yang sedalam dalamnya tentang berbagai faktor yang mempengaruhi peningkatan investasi di Aceh.

“Menurut Ridwan Sobirin hal-hal yang mungkin akan memicu gangguan investasi dalam dunia usaha di Provinsi Aceh, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh telah melaksanakan riset *Growth Diagnostic* untuk menemukan *constraints* utama bagi perkembangan ekonomi atau investasi di Aceh. Berdasarkan hasil dari riset tersebut, secara umum terdapat 6 (enam) hambatan utama terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi maupun investasi di Aceh yaitu: 1) Minimnya kegiatan ekonomi produktif berupa keberadaan berbagai industri pengolahan di Aceh

(industri hilirisasi). Dalam hal ini Aceh sebagai penghasil sumber daya alam yang melimpah harus mampu merubah arah investasi dari hulu ke investasi hilir. Dimana pemerintah Aceh perlu memanfaatkan teknologi untuk memberi nilai tambah pada produk SDA sehingga industri hilir dapat terwujud; 2) Kondisi infrastruktur di Aceh, khususnya kondisi pelabuhan, listrik, serta jalur konektivitas yang menghubungkan secara langsung antara kawasan Aceh bagian barat dan bagian timur melalui jalur bagian tengah juga masih menjadi kendala dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi Aceh; 3) Persoalan non infrastruktur yakni kualitas sumber daya manusia dan kenyamanan dalam berinvestasi. Kualitas sumber daya manusia terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat Aceh yang masih didominasi oleh tingkat SD dan SMP; 4) Faktor ketidakamanan dalam berinvestasi karena masih terkait dengan banyaknya biaya tidak resmi berbentuk pungutan liar (Pungli) di Aceh. Pungli merupakan salah satu penghambat investasi yang memperbesar biaya yang harus ditanggung pengusaha. Pungli dan *makelar* penyebab biaya produksi membengkak. Masalah pungli sangat sensitif bagi pengusaha. Pungli bisa saja di sektor regulasi, operasional atau di sektor yang berkaitan dengan pihak ketiga. Jika pada kenyataannya para pengusaha/investor memerlukan pihak ketiga seperti makelar untuk mengurus izin atau hal lainnya sehingga akan mengakibatkan adanya *high cost of production*; 5) Faktor penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) yang belum tepat sasaran dan seharusnya dipergunakan pada program-program yang lebih produktif dipercaya akan dapat membantu peningkatan investasi di Aceh; 6) Faktor upah di Aceh yang merupakan upah paling tinggi kedua setelah Provinsi Bangka Belitung juga menjadi salah satu variabel yang menjadi pertimbangan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Aceh. Berdasarkan hasil perhitungan periode 2010 sampai dengan 2015, untuk Provinsi Aceh sendiri terdapat korelasi yang negatif antara kenaikan UMP terhadap peningkatan produktivitas.”⁷

Sebagai analisis pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Aceh Banda Aceh, Bapak Ridwan Sobirin menjelaskan ada enam faktor penghambat investasi di Aceh yaitu: 1) Minimnya kegiatan ekonomi produktif berupa keberadaan berbagai industri pengolahan di Aceh (industri hilirisasi); 2) Kondisi infrastruktur di Aceh; 3) Persoalan non infrastruktur yakni kualitas sumber daya manusia dan kenyamanan dalam berinvestasi; 4) Faktor ketidakamanan dalam

⁷ Ridwan Sobirin, Analisis pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Banda Wawancara pada tanggal 12 Agustus 2017.

berinvestasi karena masih terkait dengan banyaknya biaya tidak resmi berbentuk pungutan liar (Pungli) di Aceh; 5) Faktor penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) yang belum tepat sasaran; 6) Faktor upah di Aceh yang merupakan upah paling tinggi kedua setelah Provinsi Bangka Belitung.

Menurut Aswar Kasubbag perekonomian dan investasi BAPPEDA Provinsi Aceh, “Faktor-faktor yang menjadi penghambat investasi Aceh diantaranya yaitu: 1) Harga komoditas global yang mempengaruhi produksi daerah yang sedang berjalan sehingga menghambat realisasi investasi; 2) Birokrasi daerah Aceh yang kurang berjalan optimal; 3) Sektor perizinan dan pelayanan belum terintegrasi lintas sektor; 4) Kreativitas sumber daya manusia belum optimal; 5) Pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnasi; 6) Tenaga kerja yang tidak produktif; 7) Tren migas yang cenderung menurun; 8) Infrastruktur yang belum optimal seperti jalan Provinsi lintas kabupaten; 9) peran BUMD masih lemah; 10) Industri pengolahan yang masih kurang memadai; 11) SDM pengelolaan kelembagaan; 12) Defisit ekspor perdagangan antar daerah harus di tekan; 13) Anggaran pemerintah tidak fokus dan tidak tepat sasaran; 14) Adanya politik anggaran.”⁸

Sedangkan Bapak Aswar mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan faktor penghambat investasi di Aceh sejumlah 14 faktor yang menurut beliau faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi terjadinya peningkatan investasi di Aceh.

Kepala Bagian Dinas ESDM Provinsi Aceh Joni menyebutkan “bahwa di sektor pertambangan dan sumber energy mineral menjelaskan bahwa faktor penghambat investasi di Aceh adalah: 1) kekurangan dan kelemahan para calon investor dalam mengelola potensi, khususnya di bidang pertambangan, migas, air dan mineral; 2) Pemerintah Aceh belum siap menerima peluang bisnis migas agar dapat berjalan 30 tahun lebih; 3) Bagaimana kepastian hukum para investor. Karena migas ini padat modal berbeda dengan industri lain yang padat karya banyak pegawai yang dibutuhkan; 4) Resiko cukup besar di sektor tambang khususnya. 5) Bagaimana tren investasi migas untuk saat ini sehingga pemerintah Aceh jika tidak mampu memahami tren akan sulit mendapatkan investor di semua daerah karena sebuah hirarki dari pemerintah pusat kalau turunannya juga tidak jelas makanya pertumbuhan investasi di Indonesia walaupun pertumbuhan ekonomi 7% tapi di sektor rill mungkin hanya 2-3% lainnya

⁸ Aswar, Kasubbag Perekonomian dan Investasi BAPPEDA Aceh, Wawancara pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 pukul 10.30 WIB.

mungkin di sektor moneter; 6) Regulasi yang tidak *matching* baik itu peraturan pusat, peraturan daerah Provinsi dengan peraturan yang ada di Kabupaten/Kota; 7) kepercayaan pemerintah secara global. Karena di bisnis tambang dan migas ini harga sangat berpengaruh apalagi kalau harga minyak. Misalnya hari ini biaya produksi yang cukup tinggi sementara harga minyak mentah dunia jatuh, juga salah satu yang menyebabkan investor lesu, sektor tambang juga seperti itu; 8) faktor sosial masyarakat, resesistensi masyarakat yang agak repot. Di dinas lingkungan hidup kita dorong misalnya salah satunya Pabrik Semen Laweung untuk perintis berinvestasi mereka sudah berkomitmen, sebagian sudah bergerak faktor sosial ini terus bergeser membuat *speed* mereka juga tidak bisa cepat saya kira ke depan pemerintah harus lebih peka, ini menjadi sebuah catatan penting disamping hal-hal yang lain juga namun ini harus menjadi ekstra perhatiannya jadi pra kondisi sebelum investasi itu sangat penting. Sebenarnya bagi mereka mudah sekali, bagaimana keterwakilan, kesempatan kerja. Isu-isunya seperti itu, tanah ini yang harus menjadi perhatian pemerintah bagaimana memastikan investasi masuk di suatu daerah bahwa mereka terlindungi dari kesempatan kerja, mungkin tanahnya hilang dari petani tapi bisa menjadi lahan yang dapat dipergunakan kembali. Sedangkan pemerintah menyediakan lahan baru sebagai ganti rugi ketika tanah masyarakat dibebaskan sehingga ketika mereka harus pindah, apakah tempat baru mereka menjamin kehidupan sosial akan lebih baik, minimal setara dengan tempat sebelumnya “.⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Joni dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh bahwa ada 8 faktor penghambat investasi pada sektor pertambangan dan energi.

Sementara itu Dedi menyampaikan bahwa “Faktor penghambat ada pada: 1) proses perizinan yang terlalu rumit khususnya yang terkait dengan investasi pada bagian Energi, Listrik dan Gas Bumi. Menyangkut izin yang berupa WKP dalam bentuk SK Kementerian yang terkait untuk membangun atau izin untuk mengembangkan bukan kewenangan pemerintah Aceh untuk mengeluarkannya walaupun itu prospeknya langsung pada wilayah Aceh. Jadi ada kewenangan-kewenangan, ada pengembangan-pengembangan atau izin-izin yang prospeknya langsung kepada wilayah-wilayah Aceh walaupun bukan Aceh yang mengeluarkannya. Jadi investasi itu bukan mesti langsung gubernur. Bahwa izin pengembangan untuk suatu wilayah bukan

⁹ Joni, Kabag pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Wawancara pada tanggal 14 Juni 2017.

hanya dikeluarkan oleh gubernurnya saja tapi kementerian atau lembaga lain di pusat juga bisa berwenang untuk mengeluarkan izin untuk wilayah tersebut agar investasinya berjalan. Contoh panas bumi yang mengeluarkan izin atau yang melelang suatu wilayah panas bumi agar dikembangkan oleh investasi yang ada di Jakarta. Seterusnya izin usaha panas buminya juga masih di Jakarta tapi kalau sudah ke luar, ia akan mengembangkan langsung ke sini. Jadi di daerah paling hanya izin lokasi; 2) Kewenangan berinvestasi di daerah khususnya migas sepenuhnya masih merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Aceh hanya berkoordinasi dengan pemerintah pusat”.¹⁰

Dedi yang merupakan staf pada bagian Energi Dinas ESDM Aceh menambahkan bahwa terkait dengan penghambat investasi di sektor energi, listrik dan gas bumi masih sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat sehingga pemerintah Aceh tidak dapat secara mandiri dalam pengurusannya. Sehingga perizinan khusus pada sector ini masih memerlukan kebijakan yang lebih fleksibel.

Menurut Syukri:

“Faktor penghambat investasi belum maksimal di Aceh yaitu diantaranya: 1) faktor keamanan, yang dinilai bersifat *temporary* artinya isu yang sangat insedentil seperti bom waktu yang bisa saja sewaktu-waktu meledak. Ini menjadi pertimbangan tertentu dalam kemajuan ekonomi. Aceh masih dikhawatirkan tentang kemanan meskipun sudah kondusif; 2) Kemudian hambatan lainnya dari aspek birokrasi sebenarnya tidak mudah, hal ini tidak hanya di Aceh tapi seluruh Indonesia secara nasional birokrasinya masih sulit; 3) Masalah sumber daya manusia yang dimiliki sebetulnya masih belum siap, terutama kesiapan mental dan karakter yang masih harus terus dibina; 4) Yang terakhir yaitu masalah infrastruktur yang belum memadai”.¹¹

Bapak Syukri dari Dinas Syariat Islam juga menyebutkan 4 faktor yang menjadi penghambat investasi yaitu: 1) faktor keamanan; 2) aspek birokrasi yang tidak mudah; 3) Kesiapan mental dan karakter sumber daya manusia; 4) infrastruktur yang belum memadai.

¹⁰ Dedi, Staf pada bagian Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Wawancara pada tanggal 14 Juni 2017.

¹¹ Syukri, Kabag pada Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, Wawancara pada tanggal 13 Juli 2017. Pukul 10.00 wib

Lain halnya Pak Nasir mengatakan bahwa “Beberapa faktor penghambat investasi di Aceh yaitu: 1) Faktor energi sumber daya alam Aceh yang belum dapat dikelola dengan optimal; 2) Gangguan keamanan yang masih cenderung menjadi “*image*” menakutkan bagi masyarakat di luar Aceh; 3) Distribusi barang (perdagangan) yang tidak seimbang dimana ekspor dan impor yang berlangsung tidak seperti yang diharapkan; 4) Kurangnya kepercayaan investor lokal Aceh terhadap daerah Aceh, hal ini ditandai banyak masyarakat Aceh yang memiliki modal besar berinvestasi di luar Aceh; 5) Mata rantai distribusi ekonomi (perdagangan) masih berpusat di Sumatera Utara”.¹²

Bapak Nasir dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh menjelaskan ada 5 (lima) faktor penghambat investasi sehingga Aceh perlu berbenah diri menghadapi bebrbagai penghambat ini terutama dalam sector perdagangan dan perindustrian dimana seperti yang di ungkapkan oleh beliau bahwa mata rantai distribusi masih berpusat di Sumatera Utara dan ekspor impor yang masih belum seperti diharapkan. Disamping juga masih tercipta “*image*” akan gangguan keamanan di Aceh.

Iskandar Zulkarnein mengungkapkan bahwa:

“Faktor penghambat investasi di aceh berkaitan dengan: 1) masalah sosial dan perilaku masyarakat yang belum pro investasi dimana budaya masyarakat lokal yang jika melihat orang asing/orang yang belum dikenal akan memberi cost/biaya yang tinggi dari setiap jasa yang ditawarkan. Sehingga akan menimbulkan “*image*” kurang baik bagi calon investor. Belum dimulai saja sudah mulai ada tekanan. Ini tugas besar setiap warga Aceh untuk dapat bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam hal melakukan pengelolaan yang baik dalam menyambut calon investor; 2) kurangnya dukungan keamanan; 3) Kurang tersedianya pelayanan publik di daerah; 4) Belum ada kerja sama berbagai pihak dan elemen untuk memastikan investasi berjalan lancar sehingga infrastruktur harus terbangun dan perhotelan tersedia secara representatif. Investasi itu bisnis sehingga setiap daerah harus memperhitungkan segala sesuatunya, termasuk *cost* yang dikeluarkan. Tidak mungkin para investor itu datang begitu saja tanpa ada maksud dan tujuan bisnis yang diinginkan. Karena calon investor yang datang ke daerah adalah orang yang akan melakukan penanaman modalnya kepada daerah yang bersangkutan. Otomatis

¹² Nasir, Kasie Perindustrian Disperindag Aceh, Wawancara hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 pukul 14.30 wib.

setiap rupiah yang dikeluarkan akan diperhitungkan dan semuanya harus pasti; 5) Aceh memiliki ketersediaan bahan baku, industri, kopi kualitas dunia dan produk agro industri yang besar dan mempunyai hasil yang melimpah, demikian juga perkebunan. Tapi semua potensi alam itu belum maksimal dimanfaatkan karena para investor belum mampu melirik Aceh sebagai daerah tujuan investasinya; 6) aturan/kebijakan pemerintah pusat akan penanaman modal harus berurusan dengan ibukota negara yaitu pihak BKPM yang ada di Jakarta. Disini persoalannya adalah jika bahan baku yang ada yang dibutuhkan investor dimiliki oleh daerah/wilayah yang dekat dengan Jakarta seperti Jambi, Riau maka investor ini akan memilih daerah yang berdekatan pastinya; 7) pelabuhan di Aceh harus dihidupkan supaya hasil produksi dari kegiatan investasi yang lakukan dapat dipasarkan ke pasar internasional melalui pelabuhan yang ada di Aceh. Aceh memiliki produk sere, aksiri yang cukup bagus, minyak pala, minyak cengkeh yang belum tergarap maksimal”.¹³

Ketua BAINPROM Aceh Bapak Iskandar Zulkarnain menerangkan secara detail ada 7 (tujuh) faktor penghambat investasi Aceh yang menurut beliau akan banyak mempengaruhi iklim investasi Aceh. Beliau mengungkapkan proses kebijakan mengenai penanaman modal masih menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga sangat menghambat investor dalam pengurusannya. Harmonisasi kebijakan sangat di perlukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pemerintah kabupaten/kota. Kondisi social masyarakat Aceh yang belum pro investasi dengan di tandai adanya penekanan akan “*cost*” jika menghadapi orang asing yang belum di kenal. Selain itu kurangnya dukungan keamanan menjadi penghambat berikutnya. Kondisi alam Aceh sebagai penghasil bahan baku pertanian dan perkebunan masih belum mampu di optimalkan secara baik.

Mahyiddin sebagai ketua HIPMI Aceh menyampaikan:

“Faktor penghambat investasi di Aceh meliputi: 1) faktor keamanan; 2) birokrasi yang rumit, 3) tidak memiliki industri pengolahan; 4) pemerintah dan masyarakat kurang mendukung investasi; 5) adanya biaya-biaya “siluman” yang sering muncul dan arahnya tidak tahu kemana; 6) nilai jual barang di Aceh rendah”.¹⁴

¹³ Iskandar Zulkarnain, Ketua BAINPROM Aceh, wawancara tanggal 01 Oktober 2017 pukul 15.30 wib.

¹⁴ Mahyiddin, Ketua HIPMI Kab. Aceh Utara, Wawancara pada tanggal 30 Mei 2017.

Ketua APINDO Aceh menuturkan pendapat bahwa beberapa faktor yang mendasari adanya hambatan dalam investasi yaitu:

1) Ketersediaan infrastruktur yang belum mandiri, Aceh memiliki pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Krueng Geukueh, Langsa dan Tapak Tuan, meskipun demikian belum berjalan dengan baik dan maksimal; 2) Aceh juga memiliki hasil ikan yang melimpah namun belum mampu mengolah dengan standar yang sesuai pemasaran; 3) pemerintah daerah yang berada di kabupaten/kota belum mampu mendorong dan menciptakan iklim investasi yang sehat kepada pihak luar bahwa daerah Aceh layak untuk berinvestasi padahal Aceh mempunyai lahan yang cukup banyak dan sumber daya alam yang cukup; 4) promosi yang belum tepat sasaran karena tidak mungkin langsung mencapai target secara cepat. Bisa jadi 5-10 tahun yang akan datang baru ada hasilnya; 5) Adanya masalah yang mengundang gejolak pada masyarakat karena masyarakat pada lingkungan setempat perlu diperhatikan; 6) Perusahaan yang melakukan investasi tidak mampu menyerap tenaga kerja masyarakat local karena *skill* yang kurang memadai”.¹⁵

Dari dua asosiasi pengusaha yang peneliti wawancarai lebih cenderung melihat dari aspek birokrasi dan kesiapan pemerintah Aceh yang masih lambat dalam menangani masalah investasi di sebabkan adanya ketimpangan dari pengusaha dengan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota. Di samping itu masih terdapat gangguan berupa biaya tidak resmi sering muncul dalam setiap proses yang dilakukan oleh pengusaha. Demikian juga adanya gangguan dari pihak masyarakat lokal yang senantiasa ingin mendapatkan prioritas dalam kesempatan kerja dengan usaha-usaha di luar dugaan.

Bapak M.Iqbal utusan dari BPSDM Provinsi Aceh ketika peneliti wawancarai bersama dengan rekannya Muhammada Rubi mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat investasi di Aceh dalam hal sumber daya manusia ketika banyak pihak yang menyebutkan bahwa ketersediaan SDM Aceh kurang memadai dalam mempengaruhi investasi. Seharusnya sebagai pemerintah apa yang sudah dilakukan oleh Provinsi Aceh mulai dengan dari memberikan beasiswa atau bantuan pendidikan ataupun program program pelatihan. Namun tetap saja permasalahnya ada pada kualitas SDM.

¹⁵ Dahlan Sulaiman, Ketua APINDO Aceh, wawancara pada tanggal 27 mei 2017 pukul 13.30 wib.

1) Pemberian bantuan pendidikan ataupun pelatihan pelatihan belum berdasarkan potensi kewilayahan; 2) kurang optimal tenaga kerja yang siap pakai sehingga perusahaan harus menyediakan pusat informasi yang memberikan berbagai informasi tentang lowongan pekerjaan; 3) kurang berjalannya kerjasama antara perguruan tinggi dengan perusahaan terkait. Seperti contoh Unsyiah sudah memiliki *Carier Development Sector* untuk pusat pengembangan karir di Unsyiah. Tetapi *Carier Developmen Sector* ini juga masih kurang efektif karena setiap person tidak tentu mengambil sumber daya yang terbaik dikampusnya, jadi masih banyak yang tidak terserap, itu makanya mereka banyak yang menjadi pengangguran atau keluar daerah; 4) Potensi SDM masyarakat Aceh belum terserap dengan baik bagi para investor-investor yang masuk ke Aceh. Pemanfaatan SDM mengharuskan Pemerintah Aceh melakukan *grand desain* bahwa Aceh dengan potensi yang ada harus ada pemetaan secara kewilayahan. *Grand design* inilah yang diperlukan oleh pemerintah sebenarnya. Jadi yang dilakukan oleh BPSDM adalah mendapatkan dana yang agak minimalis untuk sebuah *grand desain* dan sedang melakukan pemetaan potensi-potensi di daerah dengan data yang ada di Bappeda, data BPS termasuk juga melakukan titipan hibah ke beberapa perguruan tinggi daerah dan akan mengarahkan kebijakan di tahun-tahun selanjutnya 2018 agar beasiswa yang kami berikan berdasarkan potensi kewilayahan; 5) Hambatan dan tantangan dalam investasi selanjutnya ada pada isu keamanan yang belum kondusif Aceh, namun seiring dengan perjanjian perdamaian tahun 2005 Aceh berangsur-angsur mulai kondusif keamanannya.; 6) Demikian juga pemerintah tidak mendukung pada prospek potensi kewilayahan daerah tertentu termasuk masyarakat masih enggan menerima datangnya investor”.¹⁶

Bapak Iqbal yang merupakan staf bidang perencanaan kerjasama dan pendayagunaan Alumni BPSDM mengungkapkan 6 faktor penghambat investasi di Aceh menurut pandangan beliau dari aspek sumber daya manusia dan beberapa perspektif lainnya.

“Irfani menyebutkan faktor penghambat investasi dari aspek tenaga kerja yaitu; 1) Kekurangan atau kelemahan investor dalam proses merekrut tenaga kerja di Aceh diantaranya tidak semua investor menyampaikan dan melaporkan lowongan pekerjaannya ke dinas tenaga kerja setempat. Namun tiba-tiba informasi lapangan pekerjaan sudah terjadi perekrutan melalui website

¹⁶ M. Iqbal dan M.Rubi, Staf pada bidang perencanaan kerjasama dan pendayagunaan Alumni BPSDM, wawancara pada tanggal 11 Juni 2017 pukul 15.00 wib

perusahaan, padahal ada aturan kita dengan Keppres No. 4 tahun 1980 tentang wajib lapor ketenagakerjaan. Jadi setiap perusahaan itu jika membutuhkan tenaga kerja harus melaporkan ke dinas tenaga kerja menurut Keppres No. 4 tahun 1980, walaupun Keppres itu sudah lama sampai sekarang belum dicabut, itu yang kurang difahami; 2) Kemampuan para pekerja atau lulusan perguruan tinggi yang menjadi pekerja masih kalah bersaing dengan pekerja daerah lain terutama pada *skill* keterampilannya; 3) perlunya mengaktifkan bursa kerja khusus, pada satuan pendidikan menengah atau perguruan tinggi. Jadi ketika membuka bursa kerja khusus, tidak boleh menambahkan dari sekolah lain dan itu syaratnya. Bursa kerja khusus itu hanya untuk menempatkan para alumninya, saat ini dikenal dengan istilah *tracer study*. Gunanya untuk mengoptimalkan para lulusan untuk menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan siap pakai alumni perguruan tinggi; 4) peningkatan pada Indeks Prestasi (IP) mahasiswa yang masih kurang nilainya agar segera meluluskan kuliahnya dengan IPK minimal 3,00, hal ini diharapkan karena perusahaan-perusahaan yang menampung tenaga kerja sebagai syarat salah satunya adalah memiliki IPK minimal 3,00”.¹⁷

Bapak Irfani dari Dinas mobilitas penduduk dan tenaga kerja Provinsi Aceh menyebutkan ada 4 hal dasar dari aspek tenaga kerja yang harus diperhatikan agar tenaga kerja Aceh dapat berdaya saing dengan tenaga kerja luar.

Ibu Hannimi Nasution sebagai general manager salah satu perusahaan mengungkapkan:

“Penghambat investasi Aceh di keranakan adanya gangguan dari masyarakat setempat (lokal) yang masih kurang terbuka menerima perusahaan baru. Kemudian pemerintah daerah melalui birokrasinya sangat lambat merespon terkait dengan kebijakan perizinan yang sering berubah-ubah. Sehingga akan memakan waktu lama dalam setiap proses yang dihadapi pihak swasta”.¹⁸

Intan Permata Sari salah satu karyawan PT. LhokNga Sarana Andalas menyebutkan bahwa:

¹⁷ Irfani, Kasi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas, Wawancara pada tanggal 13 Juni 2017. Pukul 11.00 wib

¹⁸ Hannimi Nasution, General Manager PT SAU, wawancara tanggal 22 November 2017 pada pukul 10.00 wib.

“Penghambat investasi adanya berita tentang hukuman cambuk di Aceh, ditambah lagi konflik masa lalu Aceh yang menjadi was-was para investor”.¹⁹

Safrianti yang merupakan pengusaha lokal daerah dan juga wakil sekretaris Apindo Aceh menyebutkan:

“Penghambat investasi Aceh di sebabkan pengaruh media akan penilaian negative dari masyarakat luar Aceh serta kondisi masa lalu konflik aceh secara berkepanjangan, selain itu peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan masih sangat kurang dan tidak berpengaruh positif terhadap perkembangan investasi. Media pers juga memiliki pengaruh dalam menyampaikan informasi yang tidak akurat membuat penilaian calon investor menjadi sama sekali tidak tertarik berinvestasi ke Aceh.”²⁰

Berdasarkan pendapat dari Ibu Hannimi Nasution, Intan Permata Sari dan Ibu Safrianti menjelaskan bahwa faktor penghambat investasi di Aceh lebih banyak dititikberatkan pada adanya gangguan dari masyarakat setempat (lokal) yang masih kurang terbuka menerima calon investor. Selanjutnya penghambat lainnya lebih pada peran pemerintah daerah melalui birokrasinya masih lambat, ditambah lagi kebijakan perizinan yang sering berubah-ubah. Disamping itu juga pengaruh media akan penilaian negative dari masyarakat luar Aceh tentang kondisi Aceh sebagai daerah konflik masih begitu terasa.

Rosi Malia sebagai direktur PT. Mata Mandiri energy menyebutkan bahwa:

“Faktor penghambat investasi Aceh konsentrasinya pada: 1) Infrastruktur pelabuhan yang harus di awasi sehingga tidak terjadi biaya bongkat muat yang terlalu tinggi; 2) Regulasi yang tumpang tindih; 3) Ketersediaan lahan yang masih kurang memadai; 4) Adanya gangguan sosial masyarakat dan politik; 5) peran pemerintah sangat lamban menangani investasi sehingga masih terlihat unsur-unsur politik yang tidak sehat.”²¹

Edi Sandra Sahputra menyebutkan bahwa:

¹⁹ Intan Permata Sari, PT.Lhoknga Sarana Andalas, wawancara tanggal 10 Desember 2017 pukul 15.30 wib

²⁰ Safrianti, Wakil Sekretaris Apindo Aceh, wawancara tanggal 10 Desember 2017 pukul 15.30 wib

²¹ Rosi Malia, Direktur PT. Mata Mandiri Energi, wawancara tanggal 10 Desember 2017 pukul 17.00 wib.

“Ada 3 (tiga) hal penghambat investasi yaitu: 1) issue keamanan yang belum kondusif; 2) infrastruktur yang belum memadai; 3) Kurangnya Peran aktif pemerintah daerah.”²²

Kenny Kurniadidarma sebagai owner perusahaan jasa cuma menjelaskan bahwa:

“Penghambat investasi aceh lebih banyak di sebabkan karena berbagai isu-isu media yang sama sekali tidak beralasan dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu agar investasi Aceh tidak berjalan.”²³

Ibu Zahrany A. Balwy sebagai pengusaha travel menyebutkan bahwa:

“Penghambat investasi Aceh karena biaya transportasi udara terlalu mahal dan Maskapai penerbangan juga sangat sedikit.”²⁴

Sedangkan menurut Rahmadi yang juga pengusaha jasa menyebutkan bahwa:

“Faktor penghambat investasi Aceh terletak pada jarak jauh Provinsi Aceh ini dengan Ibukota Negara karena masalah investasi semua kebijakan/aturan harus dengan izin dan persetujuan pemerintah pusat.”²⁵

Hal senada juga disampaikan oleh beberapa pengusaha lainnya seperti Ibu Rosi Malia, Edi Sandra Sahputra, Kenny Kurniadidarma, Ibu Zahrany A. Balwy dan Rahmadi mengungkapkan bahwa peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang lambat dalam pengurusan izin serta birokrasi yang tumpang tindih masih menjadi penghambat utama dalam meningkatkan investasi di Aceh. Hal ini langsung dihadapi oleh mereka sebagai pihak swasta di dalam mengajukan berbagai proses penunjang usaha mereka masing-masing.

Pieter Feith, saat mengunjungi Banda Aceh bulan Agustus 2015 lalu memberi kometar bahwa

²² Edi Sandra Sahputra, Owner Pengusaha Bumbu Instan Meuraxa, wawancara tanggal 10 Desember 2017 pukul 17.00 wib

²³ Kenny Kuniadidarma, Owner Perusahaan Jasa, wawancara tanggal 10 Desember 2017 pukul 16.00 wib.

²⁴ Zahrany A. Balwy, Pengusaha Travel, wawancara tanggal 10 Desember 2017 pukul 16.00 wib.

²⁵ Rahmadi, Ketua PKBM Maju bersama, wawancaratanggal 10 Desember 2017 pukul 15.00 wib.

“Hambatan dan kendala investasi terletak pada masalah regulasi, infrastruktur serta sumber daya manusia. Sejumlah analisa menyebutkan, angka ini tidak sebesar penanaman modal setahun sebelumnya. Enam tahun silam, Bank Dunia menyebutkan ada dua besar faktor penghambat investasi di Aceh yaitu ketersediaan infrastruktur dan korupsi. Pendapat serupa juga disuarakan mantan Ketua Aceh Monitoring Mission (AMM), Demikian juga dengan aksi kekerasan yang dilakukan segelintir eks kombatan GAM dinilai bukan sebagai penyebab utamanya minimnya investasi ke Aceh. Sebetulnya pertumbuhan ekonomi Aceh bisa lebih cepat, tapi untuk tumbuh seperti itu, harus ada investasi dari dalam dan luar negeri. Investor tertarik untuk menanamkan modalnya asal tidak ada korupsi, pemerintahan yang bersih dan ada penegakan hukum.”²⁶

Peneliti juga mendapatkan data informasi dari media Berita Indonesia tahun 2015 tentang penghambat investasi yang diungkapkan oleh Pieter Feith sebagai mantan Ketua Aceh Monitoring Mission (AMM) yaitu lebih fokus pada masalah regulasi, infrastruktur dan sumber daya manusia. Namun Pieter Feith juga mengungkapkan sebenarnya investasi di Aceh bisa lebih cepat meningkat asalkan adanya investasi dari dalam dan luar negeri dengan catatan tidak ada korupsi, pemerintahan yang bersih dan ada penegakan hukum.

b. Faktor Pendukung

Ridwan Sobirin menyampaikan bahwa:

“Faktor pendukung dan daya tarik investor untuk melakukan investasi di Aceh antara lain: 1) Pertanian. Pasca habisnya cadangan gas alam dan minyak, sebagian besar perekonomian Aceh bertumpu pada sektor pertanian. Potensi tersebut termasuk diantaranya subsektor perkebunan, perikanan, pangan, dan kehutanan. Potensi perkebunan masih didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Kemudian diikuti oleh komoditas kopi, karet, dan kakao. Kondisi tekstur tanah dan letak geografis menjadikan wilayah Aceh menjadi sangat potensial untuk pengembangan komoditas-komoditas perkebunan tersebut. Kondisi wilayah Aceh yang berada di antara Samudera Hindia dan Selata Malaka yang kaya akan sumber daya bahari juga membuat potensi di subsektor perikanan cukup potensial. Hal tersebut semakin diperkuat dengan

²⁶ Pieter Feith, mantan Ketua Aceh Monitoring Mission (AMM), *Indonesia Ekonomi Aceh*, (https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150816_indonesia_ekonomi_aceh.) Diakses tanggal 11 Juni 2017

hadirnya berbagai pelabuhan yang sudah memiliki infrastruktur yang baik seperti keberadaan *storage* dengan kapasitas cukup besar (Contoh: PPS Lampulo); 2) Pariwisata. Penerapan syariat Islam di Aceh dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi dunia pariwisata Aceh yang membedakannya dengan daerah lain. Berbagai macam suku dan atraksi kesenian serta adat-istiadat yang dimiliki oleh masing-masing suku di Aceh. Di samping potensi budaya tersebut, wisata sejarah dan wisata alam juga tercatat memiliki potensi yang besar untuk dijadikan daya tarik wisata, baik itu wisata bahari (Pantai dan wisata bawah laut) maupun wisata pegunungan. Daerah Banda Aceh, Pulau Weh, Simeulue, Takengon, Tangkahan, dan kawasan Leuser dapat menjadi kawasan wisata strategis yang dapat terus dikembangkan oleh Aceh; 3) Industri Pengolahan. Keberadaan industri pengolahan di Aceh menjadi sangat potensial dikarenakan adanya pasokan bahan baku yang cukup memadai di Aceh, khususnya industri yang berfokus pada hasil perkebunan. Pada tahun 2015, hanya terdapat 43 IBS di Aceh yang menyerap 9.159 Tenaga Kerja. Mayoritas IBS (81%) bergerak di sektor industri makanan (pengolahan CPO, air minum kemasan, roti, dan lain-lain). Setelah adanya pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe dan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong maka seharusnya prospek investasi pada sektor industri pengolahan menjadi semakin baik di tengah berbagai insentif yang diberikan di kawasan tersebut.”²⁷

Menurut Ridwan Sobirin ada tiga faktor pendukung bagi investasi di Aceh yaitu pertanian, pariwisata dan industri pengolahan. Pendukung investasi menurut beliau lebih fokus pada sektor pertanian dan pariwisata karena kondisi alam Aceh sangat memungkinkan untuk prospek investasi pada kedua sektor tersebut.

Azwan menyampaikan:

“Dari Badan Investasi dan Promosi Aceh sedang menyiapkan data potensi investasi yang lebih sempurna lagi dari yang sudah pernah disusun bahwa aceh memiliki beberapa sektor yang sangat diminati oleh PMA dan PMDN. Badan Investasi dan Promosi Aceh yang pada awal tahun 2017 berubah menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sedang dalam tahap proses penyempurnaan profil investasi. Dan juga sedang menyiapkan data-data dukungan yang bisa disajikan baik dalam bentuk display yang ada di monitor atau dilayar yang ada di jalan, dan juga mengikuti even-even yang dapat banyak dipromosikan keunggulan-keunggulan dan potensi yang ada di Aceh. Adapun

²⁷Ridwan Sobirin, Analis pada Bank Indonesia Kantor Wilayah Aceh. Hasil wawancara via email diterima tanggal 18 Agustus 2017.

yang menjadi faktor pendukung/daya tarik untuk berinvestasi di Aceh meliputi: 1) industri pengolahan ikan; 2) perkebunan; 3) pertanian dan kelautan; 4) sektor pariwisata, perhotelan dan kuliner; 5) Disamping itu daya tarik yang lain adalah tersedianya sumber daya alam yang melimpah. Provinsi Aceh secara geografis memiliki letak strategis yang sebenarnya mendukung investasi di Aceh. Dari awal kita sudah mengkampanyekan bahwa Aceh merupakan wilayah yang utama dalam hal investasi nasional. Tugas berikutnya adalah memberikan kemudahan bagi calon investor. Jika dilihat dari letak strategis lalu lintas terpadat perairan Selat Malaka Aceh sangat potensial karena dekat dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapore. Lalu lintas kapal pelayaran yang paling bisa dimanfaatkan Aceh untuk ke luar negeri. Karena paling padat yaitu Selat Malaka, yang mengalahkan kita adalah negeri Singapura yang mempunyai infrastruktur dan fasilitas yang cukup serta rakyatnya yang pro investasi.”²⁸

Ungkapan yang senada disampaikan oleh Azwan bahwa faktor pendukung investasi di Aceh meliputi industri pengolahan ikan, perkebunan, pertanian dan kelautan, sektor pariwisata, perhotelan dan kuliner dan tersedianya sumber daya alam yang melimpah.

Joni mengatakan:

“Berbagai sektor dan potensi yang dapat menjadi faktor pendukung investasi adalah pariwisata, pertanian dan perkebunan, industri pengolahan, industri berbasis agro, perikanan tangkap dan budidaya, industri perikanan dan UKM Makanan sedangkan sektor industri meliputi perdagangan, ekspor/impur. Adanya Kawasan Ekonomi Khusus di Aceh sudah menjadi daya tarik dalam investasi demikian juga potensi investasi yang pro syariah meliputi *halal industry, halal tourism, islamic banking & finance* dan *halal food*. Sektor atau bidang usaha di Provinsi Aceh yang potensial untuk dikembangkan menjadi daya tarik bagi investor khususnya di Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral karena penghasil minyak di dunia ini tidak semua negara. Jadi sektor migas sebenarnya masih menarik, begitu juga dari sektor tambang tidak semua negara masih mungkin dikembangkan di sektor pertambangan cuma harus melihat aspek lain misalnya membuka tambang dengan kerusakan lingkungan. Kemampuan para pengusaha dalam mengoptimalkan potensi ESDM di Provinsi Aceh dalam konteks investasi khususnya investasi pertambangan. Aceh salah satu Provinsi dimana kita telah *melaunching green vision*, visi lingkungannya cenderung lebih kental dari daerah lain

²⁸ Azwan, Staff Baimprom Aceh, Wawancara pada tanggal 13 Juni 2017.

khususnya investasi di sektor pertambangan. Pada sektor migas sebenarnya kita satu langkah maju dibanding daerah lain dimana kewenangan investasi disektor migas itu untuk daerah lain di Indonesia itu sudah terletak di kementerian artinya sudah mejadi tanggungjawab dan wewenang pusat namun aceh melalui turunan UUPA di pasal 160, 159 turunannya melalui PP No. 23 tahun 2015 itu mengenai kewenangan pengelolaan bersama migas Aceh yaitu meliputi 12 mil merupakan wilayah yang dilakukan pengelolaan bersama.”²⁹

Joni yang merupakan Kabag pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral juga mengatakan bahwa potensi alam yang meliputi sektor pertanian dan perkebunan, perikanan tangkap dan budidaya perikanan masih menjadi andalan bagi investasi. Disamping itu pariwisata dan berbagai industri pengolahan jika mampu dimanfaatkan dengan baik menjadi pendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sektor pertambangan dan migas masih menjadi unggulan yang menarik bagi peningkatan investasi, hanya saja pada persoalan dan prosedur perizinan yang masih menjadi kendala.

Bapak Nasir menambahkan bahwa:

“Pendukung/daya tarik investasi di Aceh pada bagian industri menyiapkan pola industri kawasan dimana akan membuat pemetaan industri yang mengacu kepada komoditas unggulan inti daerah dan pengelolaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Adanya kemudahan-kemudahan bagi calon investor di Aceh cukup memadai dimana sebagai syarat daerah investasi yang dituju adanya sumber daya alam yang cukup menjanjikan seperti air, energi, listrik dan sarana lainnya. Selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan berusaha mengaktifkan beberapa industri. Sektor yang paling berpotensi untuk investasi di Aceh adalah sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Intinya investasi yang diharapkan di Aceh adalah investasi padat karya dengan melahirkan produksi-produksi barang dan mengoptimalkan tenaga kerja lokal.”³⁰

Askari menyebutkan:

“Sektor pertanian sudah sepatutnya menjadi primadona investasi pemerintah Aceh. Dahulu kala, Aceh saja sudah menjadi

²⁹ Joni, Kabag pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Wawancara pada tanggal 14 Juni 2017.

³⁰ Nasir, Kasie Perindustrian Disperindag Aceh, Wawancara pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 pukul 14.30 WIB.

pengekspor lada yang terkenal di beberapa negara Eropa sehingga dikenal dengan meriam lada sicupak. Meskipun tidak menistakan sektor seperti MIGAS dan juga sektor perikanan, tetapi hasil pertanian aceh sudah dikenal diberbagai belahan dunia. Bahkan kopi gayo dicap sebagai salah satu kopi dunia terbaik karena kualitas dan cita rasa khasnya yang tinggi. Sektor MIGAS secara sekilas memang tampak menjanjikan. Tetapi bila kita melihat fakta dilapangan tampak sukar bila kita melihat investor suka dengan sektor ini kami lebih pola pikir masyarakat yang masih memberikan konotasi negatif terhadap sektor ini karena pengalaman ExxonMobil terdahulu. Faktor pendukung lainnya adalah aturan Syariat Islam di Aceh menjadi daya tarik tersendiri bagi investor karena hanya di Aceh, masyarakat masih memegang dan menjunjung tinggi nilai agama meskipun pembangunan investasi yang terkadang memberikan sebuah ambiguitas pembangunan dalam lingkup keagamaan.”³¹

Hal serupa dikuatkan oleh pendapat Bapak Nasir dan Bapak Askari bahwa sektor pertanian merupakan sektor primadona selain dari sektor perkebunan dan perikanan bagi pendukung investasi. Selain itu Askari juga menyebutkan ternyata syariat Islam dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi peningkatan investasi.

Mahyuddin menyampaikan bahwa:

“Sebagai faktor pendukung investasi Aceh karena Sumber daya alam yang menjanjikan untuk dapat di eksplorasi, selain itu keindahan alamAceh yang mampu menjadi tempat pariwisata halal (*halal tourism*).”³²

Intan Permata Sari menyebutkan juga bahwa:

“Pendukung investasi Aceh karena alamnya yang indah cocok untuk pariwisata serta kuliner Aceh yang sangat menjanjikan untuk di kembangkan.”³³

Rosi Maliah menambahkan bahwa:

“Faktor pendukung investasi Aceh (a) karena Aceh memiliki potensi alam yang sungguh luar biasa; (b) infrastruktur jalan sudah mulai membaik setelah musibah gempa dan tsunami tahun 2004; (c) transportasi darat dan udara sudah berangsur-angsur pulih dan

³¹ Askari, Karyawan PT. Alhas Jaya, Wawancara pada tanggal 30 Mei 2017.

³² Mahyuddin, Ketua HIPMI Aceh Utara, wawancara tanggal 05 Desember 2017 pukul 11.00 wib.

³³ Intan Permata Sari, PT. Lhoknga Sarana Andalas, wawancara tanggal 10 Desember 2017 pukul 15.30 wib

normal; (d) sikap ramah tamah pemerintah dan masyarakat dalam hal simbiosis mutualisme dengan calon investor.”³⁴

Zahrany mengemukakan pandangannya tentang faktor pendukung investasi Aceh meliputi:

“(a) Adanya penerapan syariat Islam; (b) kuliner Aceh sehingga Aceh disebut *negeri seribu satu coffe*; (c) sumber daya alam yang memerlukan eksplorasi secara tepat guna; (d) adanya beberapa pelabuhan yang memerlukan perhatian khusus.”³⁵

Rahmadi menyebutkan juga tentang:

“Pendukung investasi Aceh meliputi sektor perkebunan, pertanian dan kelautan sangat potensial bagi perkembangan investasi.”³⁶

Kalangan pengusaha mengungkapkan hal yang serupa akan potensi dan pendukung investasi meliputi sektor pertanian, perkebunan dan kelautan. Ditambah lagi dengan daya lainnya seperti penerapan syariat Islam yang akan mendukung program wisata halal.

Hafas Furqani sebagai narasumber pada acara FGD memberikan pendapat tentang:

“Pendukung investasi Aceh dengan membangun model investasi yang pro syariah seperti *halal food, halal industry, halal tourism, Islamic banking and finance*.”³⁷

Azwan menyebutkan:

“Pendukung investasi dilihat dari potensi dari beberapa sector misalnya sector pertambangan, Aceh sangat kaya dengan hasil tambang mineral baik itu bijih besi, emas, dan mineral lainnya yang punya nilai tinggi. Dari sektor pertanian dan tanaman pangan dan holtikultura Aceh memiliki hamparan lahan yang memiliki daya tarik tersendiri bagi calon investor.”³⁸

³⁴ Rosi Malia, Direktur PT. Mata Mandiri Energi, Wawancara pada tanggal 11 November 2017 pukul 16.30 wib.

³⁵ Zahrany A. Balwy, Pengusaha Travel, wawancara tanggal 10 Desember 2017 pukul 16.00 wib.

³⁶ Rahmadi, Ketua PKBM Maju Bersama, wawancara tanggal 10 Desember 2017 pukul 15.00 wib.

³⁷ Hafas Furqani, Ketua Prodi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Arraniry Aceh, wawancara tanggal 18 Desember 2017 pukul 09.00 wib.

³⁸ Azwan, Staff Baimprom Aceh, Wawancara pada tanggal 13 Juni 2017.

Sebagai akademisi Hafas Furqani juga mengungkapkan pendukung investasi bisa dibangun dengan model investasi syariah seperti yang sudah pernah diimplementasikan pada negara tetangga Malaysia dimana model-model investasi syariah diwujudkan dalam perkembangan dunia keuangan. Sedangkan Azwan masih senada dengan pendapat para informan lainnya sektor yang potensial menjadi pendukung investasi yaitu sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan pertambangan.

Ketua APINDO Aceh menyebutkan bahwa:

“Kerjasama Pengusaha dengan pemerintah merupakan faktor pendukung Investasi di Aceh. Melalui asosiasi pengusaha bersama-sama melakukan upaya mencari partner usaha di luar Aceh. Selama ini hanya mendapatkan usaha-usaha kecil menengah misalnya keagenan mobil, sepeda motor, pemasok-pemasok barang dagangan. Sedangkan usaha dengan skala besar seperti industry, APINDO belum berhasil merangkul pengusaha luar masuk ke Aceh. Banyak faktor dan bukan salah siapa. Karena Aceh ini sebenarnya wilayah yang tidak strategis dalam bidang ekonomi perdagangan dan pendapat saya ini banyak ditentang oleh para pakar lain, ini fakta. Dan bentuk saingan usaha dengan Provinsi Sumatera Utara juga sangat kuat. Aceh hanya merupakan pasar bagi Sumatera Utara. Para pengusaha setidaknya menjadi penggerak utama dalam hal investasi. Pengusaha sebagai pihak swasta mampu memberikan energy geliat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dengan adanya asosiasi ini mampu bersinergi dengan pemerintah dalam peningkatan investasi. Apindo sudah pernah melakukan pendekatan dengan perusahaan aqua untuk bisa membuka industri di Aceh, ternyata tidak mau padahal mesin yang digunakan untuk pengolahan air minum itu sangat sederhana. Daya saing dalam usaha air minum sangat pesat saat ini. Apindo murni pengusaha, namun setiap pengusaha mempunyai sektor usaha masing-masing karena Apindo merupakan lintas sektoral. Tujuan dari asosiasi pengusaha adalah meningkatkan, melindungi dan menjamin keberlangsungan usaha para anggotanya. Dan menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain. Kegiatan para pengusaha secara general di Aceh saat ini sudah mulai berkembang karena Aceh saat ini sudah relatif aman, diberbagai sektor usaha sudah ada perbaikan-perbaikan. Orang luar Aceh juga sudah begitu banyak mengembangkan usaha usahanya di Aceh. Ini membuktikan bahwa orang Aceh sangat terbuka dengan orang luar. Dan bukan berarti usaha rumah makan Aceh semakin menurun, tidak juga. Aceh bisa disebut juga kota seribu café. Ini membuktikan bahwa dunia usaha

di Aceh sudah mulai bangkit/dan memperkuat keyakinan bahwa Aceh sudah relatif aman.”³⁹

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Wilayah Aceh pendukung investasi lebih menitikberatkan pada kerjasama Pengusaha dengan pemerintah, disamping itu asosiasi pengusaha harus mampu bersinergi dengan pemerintah dalam peningkatan investasi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini didasari oleh tujuan dan fungsi dari asosiasi yaitu meningkatkan, melindungi dan menjamin keberlangsungan usaha para anggotanya serta menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain. Dengan adanya tujuan dan fungsi ini pemerintah seyogyanya merangkul dan bersama-sama membangun pertumbuhan ekonomi suatu daerah terutama dalam hal investasi. Keterlibatan pengusaha sebagai pihak swasta ini dapat mewujudkan keselarasan dalam pembangunan ekonomi.

3. Eksistensi Faktor Syari’at Islam dan Faktor Keamanan

Beberapa hasil wawancara peneliti terhadap eksistensi faktor syariat Islam dan faktor keamanan bagi peningkatan investasi Aceh.

Ridwan Sobirin mengemukakan bahwa:

“Pelaksanaan syariat Islam di Aceh memiliki beberapa konsekuensi, termasuk pada sisi ekonomi. Isu tersebut juga masih sering menjadi perhatian dari sebagian besar investor yang hendak menginvestasikan modal mereka di Aceh. Dari sisi peluang ekonomi maupun investasi, terdapat beberapa sisi positif serta beberapa sisi yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pengimplementasiannya. Beberapa poin yang dapat kami *highlight* antara lain: (1) Dengan adanya penerapan hukum syariah ini, sebetulnya dapat menjadi ciri khas dan daya tarik tersendiri bagi para investor dibandingkan dengan provinsi lain. Sektor pariwisata dan jasa akomodasi serta makan minum dapat menjadi sektor-sektor yang mendorong investasi di Aceh apabila penerapan konsep syariah Islam ini dapat dikelola dengan baik; (2) Penerapan syariat Islam di Aceh sebetulnya dapat mencegah terjadinya berbagai bentuk tindakan yang mengancam keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi dikarenakan hukum Islam yang lebih detail dan sejalan dengan prinsip, tradisi, dan adat istiadat masyarakat Aceh. Oleh sebab itu, apabila penerapan syariat Islam

³⁹ Dahlan Sulaiman, Ketua Apindo Aceh, Wawancara pada tanggal 27 Mei 2017

ini dapat mencegah serta mengurangi berbagai kegiatan yang mengancam keamanan dan kenyamanan para investor, maka seharusnya penerapan hukum ini dapat mendatangkan lebih banyak investor ke Aceh; (3) Adanya penerapan Syariat Islam di Aceh dapat menjadi peluang bagi pengembangan ekonomi syariah. Selain mulai tersedianya lembaga keuangan syariah, kondisi masyarakat juga sangat mendukung untuk pertumbuhan berbagai bisnis syariah. Berbagai potensi pengembangan bisnis syariah seperti perbankan syariah, pariwisata syariah, jasa *entertainment* syariah, industri makanan syariah, dan lembaga pendidikan syariah, rumah sakit syariah; (4) Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya penerapan hukum Syariat Islam tersebut masih menimbulkan banyak pertanyaan dari para investor. Pertanyaan tersebut khususnya menyangkut keamanan dan kenyamanan mereka berinvestasi di bawah naungan regulasi Syariat Islam. Untuk memitigasi hal tersebut, komunikasi dan sosialisasi yang terus-menerus dan tepat sasaran perlu untuk terus dilanjutkan; (5) Pelaksanaan syariat islam bisa merupakan peluang bagi investasi di Aceh karena daya tarik pemberlakuan syariat islam itu bisa kita lihat di akhir-akhir ini banyak sekali orang turis-turis atau wisatawan dari mancanegara seperti Malaysia, Brunei datang ke Aceh untuk mengetahui tentang penegakan syariat islam di Aceh. Kemudian Syariat islam ini menjamin keamanan yang ditakuti investor itu sebenarnya, sekarang kita dapat melihat kondisi keamanan di Aceh cenderung kondusif. Ini merupakan dampak penerapan syariat Islam itu sendiri.

Kondisi Aceh yang kondusif terlihat dari setelah tahun 2010 dengan adanya pemilu jauh lebih aman dan relatif tenang. Hal ini menunjukkan bahwa Aceh sejak tahun 2010 dalam kondisi relatif aman. Sebetulnya sebagian besar perusahaan besar yang pernah di kunjungi oleh Bank Indonesia KPW Aceh merasa bahwa Aceh sudah cukup aman tetapi belum cukup nyaman. Kenyataan tersebut terkait dengan masih banyaknya kegiatan pungutan tidak resmi dan tidak terukur nominalnya. Analisis terhadap kondisi keamanan masih menjadi bayangan yang menakutkan bagi para calon investor dikarenakan adanya *traumatic* intensitas konflik keamanan secara vertikal di masa yang lalu dan selalu dibesar-besarkan oleh media massa, padahal itu sudah berlalu. Selain itu *image* yang tidak baik selalu disampaikan oleh media kepada calon investor yang akan berinvestasi di Aceh. Sehingga calon investor merasa tidak nyaman berinvestasi di Aceh ditambah lagi *image* yang sudah terbentuk dalam pemikiran orang luar Aceh akibat konflik yang sudah cukup lama sehingga menimbulkan trauma yang sulit dihilangkan. Faktor keamanan ini merupakan isu negatif yang terus berkembang bagi calon investor, hal ini dilihat dari jumlah investasi yang masuk ke Aceh yang masih minim. Analisis dari Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Aceh mengatakan bahwa sebenarnya sebagian besar perusahaan besar yang dikunjungi merasa bahwa Aceh sudah cukup aman, tetapi belum cukup nyaman terkait dengan masih banyaknya kegiatan pungutan tidak resmi dan tidak terukur nominalnya. Isu konflik keamanan lebih kepada “*traumatic*” informasi yang berkembang dan memang menjadi dampak yang cukup signifikan bagi pembangunan Aceh.”⁴⁰

Dalam ungkapannya Ridwan Sobirin memberikan analisa tentang eksistensi syariat Islam bagi investasi yaitu adanya penerapan hukum syariah dapat menjadi ciri khas dan daya tarik tersendiri bagi para investor. Penerapan syariat Islam di Aceh diharapkan dapat mencegah terjadinya berbagai bentuk tindakan yang mengancam keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi. Adanya penerapan Syariat Islam di Aceh dapat menjadi peluang bagi pengembangan ekonomi syariah. Namun syariat Islam menjadi suatu pertanyaan besar bagi investor dalam hal keamanan dan kenyamanan.

Hafas Furqani memberi jawaban atas eksistensi syariat Islam bagi investasi yaitu:

“Isu syariat Islam sebagai penghambat investasi di Aceh sangat gencar di berbagai media merupakan isu yang tidak benar sama sekali, Aceh maju seiring dengan majunya peradaban Islam. Syariat Islam tidak menjadi penghambat investasi, hanya publikasi media saja yang belum paham akan makna dari syariat Islam itu yang sebenarnya, disamping itu penyampaian informasi yang tidak tepat oleh media dan sangat subjektif. Syariat Islam sebenarnya tidak menghalangi pembangunan (termasuk juga investasi) karena Islam menghendaki kesejahteraan manusia, bahkan *maqasid syariah* bertujuan membangun kesejahteraan dalam segala dimensi kehidupan ini. UU Syariat Islam sebagai penghambat investasi karena faktor isu negatif dari luar khususnya media. *Framing* dan *image* syariat Islam di Aceh sebagai penghambat investasi sangat besar dalam mempengaruhi perspektif dari para investor dan isu ini juga adalah sesuatu yang “bias” lebih kepada peran media yang belum bisa memahami konteks syariat Islam bagi Aceh.”⁴¹

⁴⁰ Ridwan Sobirin, Analis pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Banda Wawancara pada tanggal 12 Agustus 2017.

⁴¹ Hafas Furqani, Kaprodi Magister Ekonomi Syariah, UIN Arraniry, wawancara pada tanggal 19 Desember 2017.

Hafas Furqani memberikan pendapat jika Undang-Undang Syariat Islam dikatakan sebagai penghambat investasi maka berbagai kebijakan pemerintah akan program-program yang menyangkut ekonomi tidak akan dapat dijalankan. Namun ini merupakan sebuah isu negatif dari media yang belum dapat memahami akan kontekstualisasi syariat Islam bagi masyarakat Aceh.

Pandangan Rosi Malia adalah:

“Syari’at Islam di Aceh merupakan peluang dan jaminan sebagai keamanan dan kedamaian dalam berinvestasi serta menjanjikan suatu negeri yang *baldatun warabbun ghafur* (negeri yang aman, damai). Selain itu syari’at Islam juga sebagai konsep hidup seluruh umat Islam yang ada di Provinsi Aceh. Syari’at Islam itu menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk bisa berinvestasi di Aceh. Karena ada nilai-nilai syariah yang bisa diterapkan dalam investasi di Aceh bahwa pekerja di Aceh itu lebih banyak yang muslim dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Isu syariat Islam di Aceh sebagai penghambat investasi dirasakan tidak tepat karena pemerintah harus lebih jeli untuk menetapkan hukum syariah di Aceh terutama prospek akan *syariah tourism* dan *halal food*. Hal lain yang menjadi isu menakutkan bagi calon investor adalah hukum cambuk dan hukum rajam. Isu syariat itu sebenarnya dari peran media dalam menyampaikan informasi yang tidak akurat membuat penilaian masyarakat/investor menjadi negatif terhadap investasi di Aceh. Salah kalau dikatakan syariat Islam adalah penghambat investasi, sebenarnya tidak menghambat bila disesuaikan, tapi isu-isu tersebut dicuatkan dengan alasan-alasan tertentu. Sedangkan kondisi keamanan di Aceh sudah berangsur-angsur kondusif ditandai dengan kondisi pengusaha yang sudah dapat menjalankan aktivitas usahanya tanpa adanya tekanan dan ancaman dari pihak manapun.”⁴²

Rosi Malia juga mengungkapkan akan eksistensi syariat Islam merupakan peluang dan jaminan bagi keamanan dan kedamaian di Provinsi Aceh.

Kenny Kurniadidarma mengungkapkan bahwa:

“Syariat Islam sama sekali tidak menjadi penghambat investasi, malah sebaliknya menjadi sebuah daya tarik bagi pariwisata halal. Sedangkan kondisi keamanan sudah lebih kondusif sejak tahun 2010”.⁴³

⁴² Rosi Malia, Direktur PT. Mata Mandiri Energi, Wawancara pada tanggal 11 November 2017 pukul 16.30 wib.

⁴³ Kenny Kuniadidarma, Owner Perusahaan Jasa, wawancara tanggal 10 Desember 2017 pukul 16.00 wib.

Edi Sandra Sahputra sependapat dengan rekannya Kenny Kurniadidarma mengungkapkan bahwa:

“Kondisi Aceh saat ini sudah relatif aman, dimana pengusaha sudah dapat bekerja dengan aman.”⁴⁴

Rahmadi setuju jika dikatakan bahwa Aceh saat ini sudah lebih aman terutama bagi pengembangan usaha masyarakat. Sudah tidak ada lagi rasa ketakutan ketika menjalankan aktivitas usaha.⁴⁵

Safrianti mengungkapkan rasa bahagianya dengan kondisi Aceh yang saat ini sudah lebih aman dibandingkan sebelum tahun 2005.⁴⁶

Kalangan pengusaha menilai bahwa faktor keamanan merupakan variabel yang sangat penting dalam iklim investasi sehingga menjadi upaya yang harus diusahakan oleh pemerintah daerah setempat karena para investor menginginkan adanya jaminan keamanan bagi keberlangsungan jangka panjang investasi di suatu daerah. Pertumbuhan investasi di suatu daerah sangat tergantung kepada pemerintah daerah sehingga perlu mendapatkan dukungan dari peraturan daerah atau qanun yang ada di daerah Aceh agar tidak menghambat investasi itu sendiri. Dukungan dan komitmen kepala daerah sangat mempengaruhi akan realisasi investasi mengingat perizinan usaha merupakan kewenangan kepala daerah. Kalangan pengusaha memerlukan kejelasan tentang regulasi daerah akan berdampak nyata pada peningkatan minat investasi secara langsung. Oleh karenanya komitmen pemerintah daerah akan percepatan dan kemudahan perizinan usaha sangat diharapkan.

Azwan kembali memberikan pendapatnya bahwa:

“Bercerita investasi berarti ada penanaman modal ke dalam negeri kita Aceh yang tercinta ini. Kemudian bercerita investasi juga bercerita adanya pengusaha dan perusahaan. Ada yang menjadi isu saat ini adalah faktor syariat Islam di Aceh ini menjadi penghambat iklim investasi, para investor luar negeri maupun dalam negeri khawatir menanamkan investasinya di Aceh karena

⁴⁴ Edi Sandra Sahputra, Owner Pengusaha Bumbu Instan Meuraxa, wawancara tanggal 10 Desember 2017 pukul 17.00 wib

⁴⁵ Rahmadi, Ketua PKBM Maju Bersama, wawancara tanggal 10 Desember 2017 pukul 15.00 wib.

⁴⁶ Safrianti, Wakil Sekretaris Apindo Aceh, wawancara tanggal 10 Desember 2017 pukul 15.30 wib.

adanya penerapan syariat Islam. Sebenarnya ada pihak-pihak yang *memblow up* isu yang terakhir disebutkan tadi terkait dengan investor atau pelaksanaan syariat Islam menjadi penghambat investor masuk di Aceh sebetulnya ini sebuah isu yang terlalu dipaksakan yang tidak berdasar yang tidak berdasarkan penelitian, tidak berdasarkan fakta karena sebetulnya sama sekali pelaksanaan syariat Islam itu tidak menjadi halangan untuk investor dan menanamkan sahamnya dan itu tidak ada dasar sama sekali kecuali hanya sekedar isapan jempol yang sengaja di *blow up* untuk dibesar-besarkan supaya mungkin tujuannya tidak lain untuk menggagalkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dari keberadaan keamanan dianggap masih menjadi bayangan menakutkan investor karena dilihat dari jumlah investasi yang masuk ke Aceh masih minim. Dan seharusnya dinas terkait yang berhubungan dengan investasi terus melakukan terobosan dalam peningkatan investasi.⁴⁷ Isu konflik keamanan lebih kepada “traumatic” informasi yang berkembang sehingga hal ini memang menjadi dampak yang cukup signifikan pada pembangunan Aceh.⁴⁸ Konflik keamanan hanya dikaitkan saja dengan masa lalu dan selalu di besar-besarkan oleh media massa. Padahal saat ini pasca perjanjian Helsinki tahun 2005 Aceh berangsur-angsur aman.⁴⁹

Azwan meyakini adanya isu-isu negatif yang sengaja disebarkan pada media agar pelaksanaan syariat Islam di Aceh gagal dilaksanakan. Demikian juga dengan isu bahwa keamanan di Aceh belum kondusif sengaja kembali dibesar-besarkan oleh pihak media masa hingga iklim investasi menjadi menurun di tahun 2015 dan 2016.

Bapak Syukri menjelaskan bahwa:

“Aceh yang sudah menerapkan syariat Islam ini sejak tahun 2002 tidak tertinggal daripada daerah yang tidak menerapkan syariat Islam. Karena Aceh bukan Provinsi yang sangat terbelakang di Indonesia ini. Seperti contoh negara lain yang justru memberlakukan syariat Islam seperti Arab Saudi dan Brunai Darussalam ternyata investor juga menanamkan modalnya ke negara tersebut dan negara tersebut termasuk negara yang maju. Dinas syariat Islam dalam hal ini hanya memberikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan agar para investor yang ingin menanamkan modalnya di Aceh adalah mendukung dari segi

⁴⁷ Hafas Furqani, Ketua Prodi Ekonomi syariah Pasca Sarjana UIN Arraniry Aceh, wawancara tanggal 18 Desember 2017 pukul 09.00 wib.

⁴⁸ M. Iqbal, Staf pada bidang perencanaan kerjasama dan pendayagunaan Alumni BPSDM, wawancara pada tanggal 18 Juni 2017 pukul 15.00 wib

⁴⁹ Azwan, Staff Baimprom Aceh, Wawancara pada tanggal 13 Juni 2017.

penyiapan regulasi syariat atau kebijakan pemerintah itu senantiasa melindungi orang-orang asing atau non muslim. Jika terjadi sesuatu yang bertentangan tidak dihukum dengan hukum syariat, itu berarti mereka bisa bebas dan mengikuti hukum yang berlaku secara nasional. Kemudian yang kedua dari aspek perekonomian kita mencoba untuk membuat regulasi seperti LKS (Lembaga Keuangan Syariat) untuk mengatur perekonomian dan mengatur lembaga-lembaga keuangan, bank dan non bank. Artinya siapapun dipayungi oleh regulasi tersebut dan harus mengikuti segala peraturan yang ada pada Dinas Syariat Islam.”⁵⁰

Syukri sebagai Kabag pada Dinas Syariat Islam dalam hal ini menjelaskan tentang kewenangan Dinas Syariat Islam dalam hal mengatur dan membuat kebijakan yang berbentuk regulasi bagi kepentingan dan kebutuhan perekonomian suatu daerah. Syukri meyakini bahwa hukum syariat Islam itu berlaku bagi semua muslim namun syariat Islam tetap melindungi orang-orang non muslim. Jika ada pendapat yang mengatakan bahwa syariat Islam itu tidak berpihak kepada non muslim hal itu sangatlah tidak benar. Kebijakan pemerintah melalui regulasi syariat Islam senantiasa melindungi investor asing non muslim dengan tetap memperlakukan sesuai dengan peraturan/kebijakan nasional.

Mahyiddin menjelaskan:

“Syariat Islam membawa kedamaian dan mempermudah urusan duniawi. Isu syariat Islam sebagai penghambat investasi terlalu dibesar-besarkan. Bagi pengusaha/investor setidaknya ada hasil dari prospek yang menjanjikan, itu yang menjadi patokan untuk berinvestasi. Syariat Islam juga sebagai peluang untuk rasa aman dan damai. Kondisi keamanan di Aceh dalam mendukung investasi sejauh ini masih harus tetap diwaspadai karena faktor keamanan sangat mempengaruhi investor untuk berinvestasi. Kondisi yang tidak aman dan beresiko menghambat investasi, sampai saat ini Aceh dari segi keamanan sudah lebih baik dan kondusif pasca konflik penandatanganan perdamaian Aceh tahun 2005.

Sebenarnya saat ini secara umum gangguan keamanan bukan menjadi faktor kendala atau hambatan dalam berinvestasi. Namun dalam *scope* kecil setidaknya gangguan keamanan pasti ada. Pasca MoU perdamaian Helsinki 2005 Aceh dianggap sebagai daerah yang relatif aman dari gangguan keamanan pihak-pihak yang tidak

⁵⁰ Syukri, Kabag pada Dinas Syari’at Islam Provinsi Aceh, Wawancara pada tanggal 13 Juli 2017.

bertanggung jawab. Kondisi keamanan pada periode 2010-2016 relatif aman, bersifat netral dan terbuka bagi siapapun karena keamanan merupakan faktor utama bagi investor untuk berinvestasi karena efeknya pada lingkungan sekitar. Secara horizontal pungutan liar masih ada, namun sudah berkurang. Karena sudah ada pantauan dari pihak pemerintah maupun non pemerintah. Harapan dari pengusaha agar regulasi dipermudah oleh pemerintah khususnya dalam hal perizinan usaha dan penanaman modal. Masyarakat lokal yang memiliki sifat terbuka bagi pengembangan usaha.”⁵¹

Hannimi menerangkan bahwa:

“Pengaruh syariat Islam bagi iklim investasi hanya sedikit, malah syariat Islam justru menjadi *role model* bagi aturan/regulasi. Syariat Islam sendiri bukan penghalang bagi dunia usaha, justru bagus untuk mendukung bagi eksistensi dunia usaha. Hanya gangguan dari penduduk lokal saja yang masih kurang terbuka menerima perusahaan-perusahaan luar. Syariat Islam itu merupakan faktor kekuatan bagi dunia usaha (investasi) dan sumber daya alam di Aceh perlu dieksplorasi kembali agar menjadi potensi besar bagi iklim investasi.”⁵²

Askari kembali menjelaskan bahwa:

“Syariat Islam pada dasarnya tidak menjadi masalah didalam penerapan investasi di Aceh. Namun menjadi masalah ketika investasi tersebut mulai bersentuhan terhadap nilai-nilai dan norma-norma agama islam. Contoh yang paling simple adalah bagaimana di Aceh, tidak diperbolehkannya dibuatkan Bioskop. Sekilas nampak sepele, tetapi pada faktanya, dibeberapa negara dan kota lain, pemasukan pajak bioskop untuk peningkatan PAD daerah bisa mencapai 300% dari total modal yang dimasukkan. Hasil ini sangat fantastis, tetapi karena nilai dan norma agama dalam syariat islam menjadikan ini tidak akan mungkin terjadi. Ini juga didukung oleh Dayah dan Ormas-ormas Islam yang ada di Aceh yang sangat antusias didalam penerapan syariat islam. Sedangkan untuk sector-sektor seperti pertanian, agroekoteknologi, kelautan dan lain-lain saya lihat masih dalam tahap yang wajar.

Keamanan menjadi faktor utama yang menjadi penghambat yang sangat tampak timbul pada hari ini. Pasca MoU antara GAM-RI di Helsinki Finlandia, kita pernah mendengar tentang yang namanya “*Pajak Nanggroe*” yaitu sejenis pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan maupun investor bilamana ingin

⁵¹ Mahyiddin, Ketua HIPMI Kab. Aceh Utara, Wawancara pada tanggal 30 Mei 2017.

⁵² Hannimi Nasution, General Manager PT SAU, wawancara tanggal 22 November 2017 pada pukul 10.00 wib.

melaksanakan suatu pekerjaan. Banyak pengusaha dan investor yang lari dari Aceh bila persoalan ini tidak ditanggulangi, maunya pemerintah Aceh harus segera turun tangan jangan membiarkan hal itu terjadi berkepanjangan karena bisa fatal pembangunan Aceh kedepan. Sosial masyarakat yang masih *skeptik* terhadap pembangunan yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada mereka membuat hal ini menjadi sulit bagi para pengusaha yang akan melaksanakan tugas investasi mereka. Kondisi keamanan sudah cukup kondusif, karena banyak masyarakat sekarang sudah berani bepergian kemana saja, dan bahkan masyarakat tidak takut lagi dalam hal mencari nafkah, apakah mereka mencari rezki secara berkebun maupun bekerja pada instansi swasta apabila mereka bekerja pada jam lembur. Peran pengusaha didalam berinvestasi menurut saya kita harus melihat dulu sikap Pemerintah Daerah Aceh maupun Pemerintah Pusat sebab apabila pusat dan daerah tidak sinkron itu semua tidak akan jalan, strategi apapun yang kita buat untuk meningkatkan investasi di Aceh tidak akan terlaksana dengan sempurna karena Pemerintah Aceh ketergantungan Pemerintah Pusat. Pada saat ini kegiatan para pengusaha kami lihat sudah cukup aman dengan persaingan-persaingan yang sehat dan ini juga menjadi sebuah pembuktian yang bahwa untuk berinvestasi di Aceh sudah aman dan nyaman.”⁵³

Sebagai pengusaha yang terlibat langsung dan bersentuhan langsung dengan pemerintah, Mahyiddin, Hannimi dan Askari menyatakan akan eksistensi syariat Islam sebagai peluang untuk rasa aman dan damai. Syariat Islam justru menjadi *role model* bagi aturan/regulasi. Syariat Islam sendiri bukan penghalang bagi dunia usaha, justru bagus untuk mendukung bagi eksistensi dunia usaha. Syariat Islam pada dasarnya tidak menjadi masalah didalam penerapan investasi di Aceh. Namun kondisi keamanan di Aceh dalam mendukung investasi sejauh ini masih harus tetap diwaspadai karena faktor keamanan sangat mempengaruhi investor untuk berinvestasi. Masih terdapat gangguan dari penduduk lokal saja yang kurang terbuka menerima perusahaan-perusahaan luar. Keamanan menjadi faktor utama yang menjadi penghambat yang sangat tampak timbul pada hari ini. Istilah “*Pajak Nanggroe*” sering terdengar di kalangan pengusaha yaitu sejenis pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan maupun investor bilamana ingin melaksanakan suatu pekerjaan. Bahasa lain dari *pajak nanggroe* ini adalah kutipan

⁵³ Askari, Karyawan PT. Alhas Jaya, Wawancara pada tanggal 30 Mei 2017.

tidak resmi dari oknum masyarakat. Selain itu dari pihak pemerintah juga masih terjadinya pungutan liar/biaya tidak resmi selain dari syarat yang telah ditetapkan. Pemerintah Aceh harus segera melakukan langkah-langkah preventif agar tidak membiarkan hal itu terjadi secara berkepanjangan. Sosial masyarakat yang belum pro terhadap investasi dan masih *skeptik* terhadap pembangunan menjadi faktor yang tidak nyaman bagi pengusaha.

Iskandar Zulkarnain menjelaskan bahwasanya:

“Aceh bersyariat Islam dari sejak dahulu. Dan jika ada penerapan syariat Islam bagi pelaku yang melanggar yaitu pada Qanun Khalwat/Jinayah hanya diberlakukan pada masyarakat Aceh muslim saja, tidak ada persoalan bagi pendatang/turis/wisatawan yang datang. Mereka harus mentaati syariat Islam itu sendiri. Syariat Islam sama sekali tidak menjadi penghambat investasi, ada data yang menunjukkan bahwa kunjungan perhotelan terus meningkat. Ini membuktikan bahwa Aceh yang menerapkan syariat Islam tidak mempengaruhi datangnya para wisatawan lokal maupun asing. Syariat Islam sebagai peluang/kekuatan bagi investor, terutama jika kita menggunakan isu syariat Islam sebagai strategi untuk menarik investor dengan berbagai programnya. Kita lihat di Indonesia Aceh dan NTB yang menerapkan syariat Islam, bahkan di negara tetangga kita Thailand/Malaysia sekarang mengkampanyekan wisata syariah dan program produk halalnya. Saya justru melihat hambatan dan kendalanya terletak pada pelayanan publik yang kurang maksimal, begitu juga pemerintah yang tidak paham dengan investasi sehingga setiap investor yang datang tidak bisa dikelola dengan baik. Saat ini Aceh sudah termasuk dalam kondisi aman bagi investasi, walaupun stigma bahwa Aceh merupakan daerah konflik tidak begitu mudah untuk dihilangkan. Aceh sudah terlanjur dicatat oleh komunitas internasional sebagai daerah konflik namun dari tahun ke tahun semakin kondusif. Padahal letusan senjata yang ada di Aceh sama dengan yang di Jakarta, orang yang tertembak di Aceh juga sama dengan di Jakarta, karena tindakan kriminal. Hanya alasan penembakan saja yang berbeda, kalau di Aceh karena alasan politik, di Jakarta kriminal.

Gangguan keamanan sebenarnya sama, hanya karena daerah Aceh sudah punya stigma adanya alasan politik sehingga pemberitaan begitu melekat sulit untuk dilupakan. Jadi ini perlu upaya yang gencar untuk mengkampanyekan bahwa Aceh aman selama 10 tahun terakhir. Tingkat kenyamanan yang masih harus di waspadai dengan adanya *social cost* yang harus dikeluarkan, misalnya ada biaya preman yang mungkin dikeluarkan, ada proses tender yang tidak fair, ditambah juga dengan aturan politik

indenpenden memberikan kesempatan kepala daerah berasal dari partai politik lokal yang ternyata mantan GAM sehingga pada saat berinteraksi dengan para investor tidak sengaja menunjukkan kemampuannya. Pada tataran keamanan sifatnya hanya gangguan keamanan saja. Investor ini maunya kepastian biaya yang resmi, tidak mau berurusan dengan hal-hal keamanan di luar biaya yang terlalu tinggi (*high cost*).⁵⁴

Sebagai Ketua Bainprom Provinsi Aceh Tahun 2016, Iskandar Zulkarnain, menjelaskan eksistensi syariat Islam bagi masyarakat Aceh mempunyai sejarah tersendiri karena Aceh sudah bersyariat sejak dahulu kala. Ini membuktikan akan eksistensi syariat Islam sama sekali tidak menjadi penghambat investasi. Dibuktikan pada kunjungan-kunjungan turis asing semakin meningkat ditambah lagi dengan pemberlakuan Qanun Penanaman Modal dan Qanun-Qanun lainnya yang berhubungan erat dengan perekonomian dan muamalah. Sedangkan faktor keamanan sudah menjadi persoalan yang penting dalam hal berinvestasi. Keamanan di Aceh sudah cenderung kondusif pasca MoU Helsinki tahun 2005, keamanan ini ditandai dengan kondisi stabilitas politik secara vertikal dengan pemerintah pusat sudah kondusif. Namun yang menjadi persoalan adalah tingkat kenyamanan yang masih harus diwaspadai dengan adanya *social cost* yang harus dikeluarkan, ditambah lagi pada aturan politik memberikan kesempatan kepala daerah berasal dari partai politik lokal yang ternyata mantan GAM (Eks Kombatan). Tataran keamanan yang masih harus diwaspadai sifatnya hanya gangguan keamanan secara horizontal. Ini yang masih menimbulkan gesekan-gesekan antara sesama pelaku kepentingan politik. Sehingga menimbulkan banyaknya biaya-biaya tidak resmi dari kepentingan-kepentingan politik tersebut.

Bapak Dahlan menilai bahwa:

“Aceh sebagai daerah konflik sehingga dianggap belum aman bagi investor merupakan *image* yang sudah lama berkembang. Dan agak sulit untuk di hilangkan. Peran media sangat mempengaruhi adanya image tersebut. Padahal pemerintah Aceh sudah memiliki RPJM melalui Bappeda Aceh, selanjutnya menyediakan informasi yang benar baik tentang potensi yang dimiliki Aceh, SDM, infrastruktur dan kemudahan-kemudahan lain yang disediakan

⁵⁴ Iskandar Zulkarnain, Ketua Bainprom Provinsi Aceh Tahun 2016, Wawancara pada Juni 2017.

pemerintah tepatnya perijinan, jaminan keamanan melalui pengembangan teknologi informasi dan kualitas penerapan teknologi informasi.”⁵⁵

Penjelasan berbeda diungkapkan oleh Bapak Dahlan yang sangat mempercayai akan eksistensi keamanan yang sudah pulih sehingga Pemerintah Aceh sudah memiliki potensi akan keunggulan daerah, infrastruktur yang sudah berangsur-angsur membaik ditambah lagi kemudahan informasi dan teknologi akan potensi dan SDM yang dimiliki oleh Aceh.

4. Strategi Peningkatan Investasi Provinsi Aceh

a. Analisis Faktor-Faktor Strategis Menggunakan SWOT

Penelitian ini juga menganalisis dengan metode SWOT dengan pendekatan kuantitatif, analisis IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*) dan EFAS (*External Factors Analysis Summary*) serta analisis SWOT (*Strengths Weaknesses Opportunities Threats*) untuk merancang strategi pengembangan, setelah itu dibuat *Positioning* Kuadran SWOT untuk mengetahui posisi potensi investasi. Dengan keempat analisis tersebut diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat menciptakan strategi baru dalam pengembangan peningkatan investasi di Aceh.

1) Analisis Internal dan Eksternal (IFAS-EFAS)

Adapun langkah analisis awal sebelum menganalisis IFAS dan EFAS yang perlu dilakukan adalah menentukan nilai bobot. Pembobotan ini kemudian diterapkan ditempatkan pada kolom kedua matrik IFAS-EFAS. Metode tersebut digunakan untuk memberikan penilaian setiap faktor penentu eksternal dan internal. Pada kolom ketiga memberikan penilaian rating pada pernyataan indikator variabel internal dan eksternal, skala mulai dari 4 sampai dengan 1. Variabel yang bersifat positif (kekuatan atau peluang) diberi nilai dari 1 sampai dengan 4. Sedangkan variabel yang bersifat negatif kebalikannya, jika kelemahan

⁵⁵ Dahlan Sulaiman, Ketua APINDO Aceh, wawancara pada tanggal 27 Mei 2017 pukul 13.30 wib.

atau ancaman besar sekali nilainya adalah 1, sedangkan jika nilai ancaman kecil nilainya 4.

Tabel 4.4 Rating Kuisioner SWOT

| Peringkat Rating | Internal | | Eksternal | |
|------------------|------------------------------------|---|---|--|
| | Kekuatan (Positif) | Kelemahan (Negatif) | Peluang (Positif) | Ancaman (Negatif) |
| 1 | Kekuatan yang miliki sangat rendah | Kelemahan yang dimiliki sangat sulit dipecahkan | Peluang yang dimiliki sangat sulit diraih | Ancaman yang dimiliki sangat sulit diatasi |
| 2 | Kekuatan yang dimiliki rendah | Kelemahan yang dimiliki sulit dipecahkan | Peluang yang dimiliki sulit diraih | Ancaman yang dimiliki sulit diatasi |
| 3 | Kekuatan yang dimiliki kuat | Kelemahan yang dimiliki mudah dipecahkan | Peluang yang dimiliki mudah diraih | Ancaman yang dimiliki mudah diatasi |
| 4 | Kekuatan yang dimiliki sangat kuat | Kelemahan yang dimiliki sangat mudah dipecahkan | Peluang yang dimiliki sangat mudah diraih | Ancaman yang dimiliki sangat mudah diatasi |

Untuk mendapatkan nilai skor dengan cara mengalikan antara nilai bobot dengan rating. Kemudian menjumlahkan secara total jumlah skor total IFAS-EFAS antara (1.00-4.00) sehingga mengetahui posisi nilai tersebut.

Tabel 4.5 Skor Total IFAS-EFAS

| Uraian | Bobot Skor | | |
|---|-------------|------------|------------|
| | Rendah | Sedang | Tinggi |
| <i>Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS)</i> | (1,00-2,00) | (2,1-3,00) | (3,1-4,00) |
| <i>Eksternal Strategic Factor Analysis Summary (EFAS)</i> | (1,00-2,00) | (2,1-3,00) | (3,1-4,00) |

a) Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS)

Analisis internal dilakukan untuk mendapatkan faktor kekuatan yang akan dipergunakan dan faktor kelemahan yang akan diantisipasi. Untuk mengevaluasi faktor tersebut digunakan matriks IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*).

Tabel 4.6 Matrik IFAS

| Faktor Strategi Internal | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--|-------|--------|-------|
| No | Faktor | Indikator Faktor Kekuatan (<i>Strengths</i>) | Bobot | Rating | Score |
| A | Kebijakan Pemerintah | Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal memberikan keringanan dan kemudahan terhadap investasi di Aceh. | 0.045 | 3 | 0.135 |
| | | Qanun Aceh tentang Penanaman Modal bisa menjadi daya tarik bagi investor. | 0.044 | 3 | 0.131 |
| | | Qanun tentang Penanaman Modal memberikan kemudahan dan keringanan pajak dan retribusi bagi investasi (pasal 18 dan pasal 31) | 0.045 | 3 | 0.135 |
| B | Sumber Daya Manusia | Ketersediaan akan pendidikan /keahlian yang berpengaruh dan mendukung investasi di Provinsi Aceh | 0.043 | 2 | 0.086 |
| C | Sumber Daya Alam | Potensi kelautan dan maritim memberikan potensi besar bagi dunia investasi di Provinsi Aceh | 0.045 | 3 | 0.136 |
| | | Potensi minyak dan gas atau barang tambang untuk berinvestasi di Provinsi Aceh. | 0.044 | 3 | 0.133 |
| | | Potensi perkebunan dan hortikultura sebagai sumber alam yang berpengaruh bagi investasi di Aceh. | 0.045 | 3 | 0.135 |
| D | Sarana dan Prasarana | Kondisi Infrastruktur jalan, listrik, telekomunikasi dan informasi di Provinsi Aceh yang mempengaruhi investasi | 0.044 | 2 | 0.088 |
| | | Kondisi Sarana dan prasarana transportasi Laut di | 0.044 | 2 | 0.087 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|-------|---|--------------|
| | | provinsi Aceh yang mempengaruhi investasi | | | |
| E | Sumber Energi | Ketersediaan Pembangkit Listrik di Provinsi Aceh yang sangat terbatas berpengaruh terhadap investasi | 0.041 | 2 | 0.082 |
| | | Perlu penambahan sumber energi baru selain migas dan diesel | 0.044 | 2 | 0.088 |
| F | Pemasaran Hasil Produksi | Pemasaran produk dan jasa yang ditawarkan ke masyarakat sudah berkualitas | 0.037 | 2 | 0.075 |
| | | Harga Produk dan Jasa yang ditawarkan terjangkau | 0.039 | 2 | 0.077 |
| Total Faktor Kekuatan (<i>Strengths</i>) | | | | | 1.387 |
| Indikator Faktor Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) | | | | | |
| A | Kebijakan Pemerintah | Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam sebagai penghambat investasi di Aceh. | 0.022 | 2 | 0.044 |
| B | Sumber Daya Manusia | Ketersediaan angkatan kerja yang memadai dalam berinvestasi di Provinsi Aceh. | 0.043 | 2 | 0.086 |
| | | Biaya/gaji tenaga kerja untuk mendukung investasi di Provinsi Aceh sudah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) | 0.043 | 2 | 0.086 |
| | | Ketersediaan sumber daya manusia atau tenaga kerja sudah sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja | 0.039 | 2 | 0.077 |
| C | Sumber Daya Alam | Potensi pertanian dan kehutanan sebagai lahan berinvestasi di Provinsi Aceh | 0.044 | 2 | 0.088 |
| D | Sarana dan Prasarana | Kondisi Sarana dan prasarana Transportasi Darat di provinsi Aceh yang mempengaruhi investasi | 0.043 | 2 | 0.086 |
| | | Sarana dan prasarana Transportasi Udara di Provinsi Aceh masih minim dalam operasional | 0.043 | 2 | 0.086 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--|----------|---|--------------|
| E | Sumber Energi | Habisnya ketersediaan Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Aceh yang berpengaruh terhadap investasi | 0.039 | 2 | 0.077 |
| | | Infrastruktur energi di Aceh masih sangat terbatas | 0.040 | 2 | 0.081 |
| F | Pemasaran Hasil Produksi | Pola distribusi Produk dan Jasa masih bergantung pada provinsi lain | 0.043 | 2 | 0.086 |
| | | Promosi terhadap barang dan Jasa masih sangat kurang | 0.042 | 2 | 0.083 |
| Total Faktor Kelemahan | | | | | 0.881 |
| Total Strategi Internal | | | 1 | | 2.268 |

Berdasarkan tabel di atas nilai total indikator kekuatan tertinggi terdapat pada indikator Sumber Daya Alam (SDA) dengan total nilai sebesar 0.404 sementara nilai indikator kekuatan terendah adalah Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar 0,086. Nilai maksimum untuk setiap pernyataan pada indikator kekuatan sebesar 0.136 pada pernyataan “Potensi kelautan dan maritim memberikan potensi besar bagi dunia investasi di Provinsi Aceh”. Sementara nilai minimum untuk setiap pernyataan pada indikator kekuatan sebesar 0.075 pada pernyataan “Pemasaran produk dan jasa yang ditawarkan ke masyarakat sudah berkualitas”.

Pada nilai total indikator kelemahan tertinggi terdapat pada sarana dan prasarana sebesar 0.260, sementara nilai total indikator kelemahan terendah terdapat pada kebijakan pemerintah sebesar 0,044. Nilai maksimum untuk setiap pernyataan pada indikator kelemahan sebesar 0.088 pada pernyataan “Potensi pertanian dan kehutanan sebagai lahan berinvestasi di Provinsi Aceh”. Sementara nilai minimum untuk setiap pernyataan pada indikator kelemahan sebesar 0.044 pada pernyataan “Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam sebagai penghambat investasi di Aceh”.

Tabel 4.7 Skor Total IFAS

| Uraian | Bobot Skor | | |
|--|-------------|--------------|------------|
| | Rendah | Sedang | Tinggi |
| | (1,00-2,00) | (2,1-3,00) | (3,1-4,00) |
| <i>Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS)</i> (Kekuatan dan Kelemahan) | | 2.268 | |

Berdasarkan tabel di atas nilai total matrik IFAS adalah 2,178 berada pada skala sedang. Kondisi internal tersebut menggambarkan posisi kekuatan dari beberapa indikator masih memiliki potensi yang cukup baik dalam mengembangkan investasi di Aceh namun terdapat beberapa kendala pada indikator kelemahan yang perlu diperbaiki.

Potensi kekuatan internal dalam pengembangan investasi di Aceh terletak pada indikator potensi Sumber Daya Alam (SDA), sementara kelemahan internal dalam pengembangan investasi di Aceh terletak pada indikator sarana dan prasarana. Artinya jumlah SDA yang tersedia di Aceh merupakan modal yang potensial bagi iklim investasi di Aceh, potensi kelautan dan maritim, minyak dan gas atau barang tambang, perkebunan dan hortikultura berpengaruh bagi investasi di Aceh. Namun kelemahannya adalah potensi pertanian dan kehutanan sebagai lahan investasi masih belum banyak tergarap dengan baik. Dengan potensi kekuatan yang ada pemerintah memiliki tugas penting yaitu memperbaiki sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, listrik, telekomunikasi dan informasi agar dapat mendukung pengembangan investasi di Aceh.

Kekuatan internal yang rendah dalam pengembangan investasi di Aceh adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Artinya ketersediaan SDM masih belum memadai terhadap investasi di Aceh, hal ini bisa disebabkan jumlah SDM yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan kerja, ditambah lagi mengenai masalah upah/gaji yang belum memadai. Sehingga masih menjadi tugas pemerintah disektor pendidikan agar meningkatkan mutu pendidikan dan lulusan sehingga memiliki keahlian kerja yang memadai sesuai harapan *stakeholder*.

Untuk kualitas barang yang diproduksi masih memiliki tingkat kualitas yang rendah sehingga perlu program pelatihan atau pendampingan di masyarakat

dengan memfasilitasi agar kualitas produksi dapat meningkat. Dari segi kebijakan pemerintah mengenai peraturan daerah terkait pelaksanaan syari'at Islam memiliki pengaruh terhadap investasi di Aceh, namun belum menjadi sebagai penghambat investasi di Aceh.

b) Eksternal Strategic Factor Analysis Summary (EFAS)

Analisis eksternal dilakukan untuk mengembangkan faktor peluang yang kiranya dapat dimanfaatkan dan faktor ancaman yang perlu dihindari. Hasil analisis eksternal dilanjutkan dengan mengevaluasi guna mengetahui apakah strategi yang dipakai selama ini memberikan respon terhadap peluang dan ancaman yang ada. Untuk maksud tersebut digunakan matrik EFAS (*External Factors Analisis Summary*).

Tabel 4.8 Matrik EFAS

| Faktor Strategi Eksternal | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|
| No | Faktor | Indikator Faktor Peluang (Opportunity) | Bobot | Rating | Score |
| A | Budaya Masyarakat | Sistem Kekerabatan di Aceh yang mendukung investasi | 0.037 | 2 | 0.074 |
| | | Karakter Masyarakat mudah dan ingin perubahan dalam mendukung investasi | 0.037 | 2 | 0.074 |
| B | Teknologi Informasi | Pengembangan Teknologi Informasi terbatas | 0.038 | 2 | 0.075 |
| | | Perlu peningkatan kualitas penerapan teknologi informasi | 0.039 | 2 | 0.078 |
| C | Kebijakan Pemerintah Pusat | Kerjasama Sub Ekonomi Regional semisal AFTA, IMTGT berpengaruh meningkatkan investasi | 0.038 | 3 | 0.113 |
| | | Pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) akan berdampak pada peningkatan investasi produktif | 0.038 | 3 | 0.114 |
| D | Kondisi Alam | Letak Geografis yang Strategis yang mempengaruhi investasi | 0.040 | 2 | 0.080 |
| | | Kondisi Alam di Aceh menguntungkan untuk investasi | 0.039 | 3 | 0.118 |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|-------|---|--------------|
| | | Terdapatnya Kawasan Berikat dan Pelabuhan Bebas akan mempengaruhi investasi | 0.039 | 2 | 0.078 |
| E | Kondisi Perekonomian | Tingkat Konsumsi Masyarakat lebih tinggi | 0.040 | 2 | 0.080 |
| F | Syariat Islam | Pengetahuan masyarakat tentang implementasi Syariat Islam di Aceh masih harus disosialisasikan | 0.039 | 2 | 0.077 |
| | | Syariat Islam di Aceh sebagai peluang bagi investasi dalam bidang pariwisata dan kuliner (halal tourism dan halal food) | 0.040 | 2 | 0.081 |
| G | Konflik Keamanan | Isu Aceh sebagai daerah konflik menjadi penghambat investasi | 0.033 | 2 | 0.066 |
| Total Faktor Peluang (<i>Opportunity</i>) | | | | | 1.107 |
| Indikator Faktor Ancaman (<i>Threat</i>) | | | | | |
| A | Budaya Masyarakat | Karakter masyarakat sulit beradaptasi terhadap perubahan dalam mendukung investasi | 0.037 | 2 | 0.074 |
| | | Kondisi sistem sosial dan Politik yang mendukung investasi | 0.036 | 2 | 0.073 |
| B | Teknologi Informasi | Kemampuan dan kehandalan teknologi informasi memadai dalam upaya promosi keunggulan provinsi Aceh | 0.035 | 2 | 0.071 |
| | | Kualitas website Pemerintah Provinsi Aceh sudah memadai | 0.034 | 2 | 0.068 |
| C | Kebijakan Pemerintah Pusat | UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 4 Oktober 1999 berpengaruh terhadap investasi. | 0.032 | 2 | 0.065 |
| | | UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam | 0.034 | 2 | 0.068 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--|----------|---|--------------|
| | | berpengaruh terhadap investasi | | | |
| D | Kondisi Alam | Pengelolaan dan pemanfaatan SDA hanya menguntungkan wilayah lain | 0.033 | 2 | 0.066 |
| E | Kondisi Perekonomian | Pertumbuhan Ekonomi masyarakat Aceh sulit meningkat | 0.035 | 2 | 0.071 |
| | | Inflasi yang masih terus terjadi | 0.034 | 2 | 0.068 |
| | | Pengeluaran Pemerintah Provinsi tidak tepat sasaran | 0.037 | 2 | 0.074 |
| F | Syariat Islam | Implementasi Syariat Islam seperti hukum rajam atau cambuk berpengaruh terhadap investasi | 0.026 | 2 | 0.053 |
| | | Isu media bahwa Syariat Islam sebagai penghambat Investasi | 0.026 | 2 | 0.053 |
| G | Konflik Keamanan | Troumatic intensitas konflik keamanan vertikal dan horizontal | 0.033 | 2 | 0.066 |
| | | Adanya biaya transaksi non formal (pungutan liar) akibat dari konflik keamanan yang belum tuntas | 0.035 | 2 | 0.071 |
| | | Kesenjangan sosial masyarakat akibat konflik keamanan yang berkepanjangan di Aceh | 0.034 | 2 | 0.068 |
| Total Faktor Ancaman (<i>Threat</i>) | | | | | 1.008 |
| Total Strategi Eksternal | | | 1 | | 2.115 |

Berdasarkan tabel di atas nilai total indikator peluang tertinggi dengan total nilai sebesar 0,275 terdapat pada indikator kondisi alam Aceh yang mendukung untuk investasi. Nilai total indikator peluang terendah terdapat pada indikator konflik keamanan sebesar 0,066. Nilai maksimum untuk setiap pernyataan pada indikator peluang sebesar 0,118 pada pernyataan “Kondisi alam di Aceh menguntungkan untuk investasi”. Sementara nilai minimum untuk setiap pernyataan pada indikator peluang sebesar 0,066 pada pernyataan “Isu Aceh sebagai daerah konflik menjadi penghambat investasi”.

Kondisi eksternal pada indikator ancaman bagi pengembangan investasi di Aceh dipengaruhi oleh indikator kondisi ekonomi dengan memiliki nilai total indikator tertinggi sebesar 0,213. Nilai total indikator terendah terdapat pada indikator kondisi alam sebesar 0,066. Nilai tertinggi untuk setiap pernyataan pada indikator ancaman sebesar 0,074 pada pernyataan “Karakter masyarakat sulit beradaptasi terhadap perubahan dalam mendukung investasi”. Sementara nilai terendah untuk setiap pernyataan pada indikator ancaman sebesar 0,053 pada pernyataan “Implementasi syariat Islam seperti hukum rajam atau cambuk berpengaruh terhadap investasi” dan “isu media bahwa syariat Islam sebagai penghambat Investasi”.

Tabel 4.9 Skor Total EFAS

| Uraian | Bobot Skor | | |
|---|-------------|--------------|------------|
| | Rendah | Sedang | Tinggi |
| | (1,00-2,00) | (2,1-3,00) | (3,1-4,00) |
| <i>Eksternal Strategic Factor Analysis Summary (EFAS) (Peluang dan Ancaman)</i> | | 2.115 | |

Berdasarkan tabel di atas nilai total matrik EFAS adalah 2.115 berada pada skala sedang. Kondisi eksternal pada peluang yang dimiliki Aceh dalam pengembangan investasi masih dapat diraih walaupun terdapat beberapa hambatan dari indikator ancaman pada lingkungan eksternal dilihat dari beberapa nilai indikator.

Kondisi lingkungan eksternal pada pengembangan investasi di Aceh saat ini berpeluang untuk mendatangkan investor dikarenakan kondisi alam yang dimiliki Aceh sangat didukung oleh letak geografis yang strategis, kondisi alam dengan sumberdaya yang besar sehingga menguntungkan untuk investasi, dan terdapatnya fungsi akses kawasan berikat dan pelabuhan bebas. Disisi lain Aceh melalui kebijakan pusat pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berpengaruh pada peningkatan investasi produktif di Aceh. Kondisi lingkungan eksternal tersebut masih terkendala pengembangan investasi berbasis teknologi inovasi yang belum memadai dikarenakan ketersediaan SDM yang belum memadai. Ditambah dengan faktor budaya masyarakat yang masih merasa ragu

dengan investasi di Aceh dikarenakan faktor kebudayaan adat istiadat yang turun menurun terus dijaga sehingga memiliki kekhawatiran dapat merubah perilaku yang dapat menghilangkan nilai-nilai budaya dan agama.

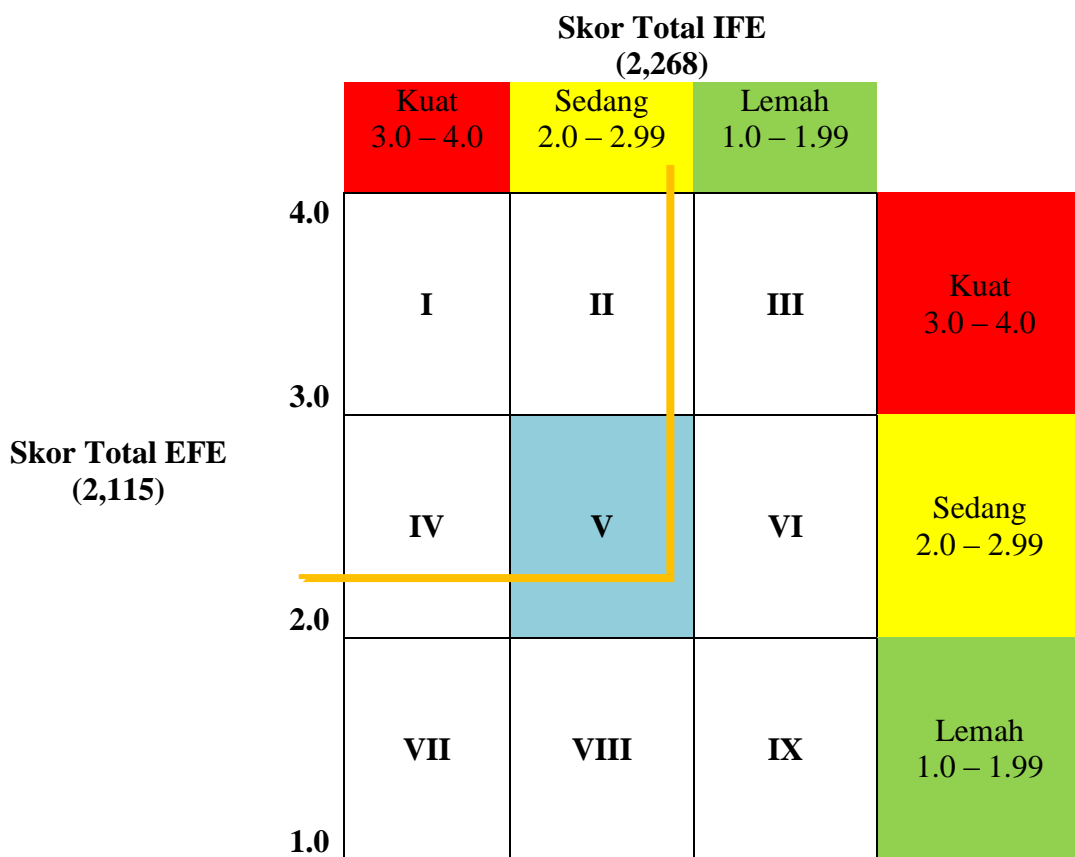
Faktor ancaman merupakan faktor yang mempengaruhi rendahnya kondisi lingkungan eksternal bagi pengembangan investasi di Aceh. Indikator diantaranya adalah kondisi perekonomian di Aceh, kondisi ini dinilai bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh sulit meningkat, pengendalian inflasi yang masih belum tercapai, dan pengeluaran pemerintah provinsi yang tidak tepat sasaran. Dengan menilai indikator kondisi alam yang potensial di Aceh selama ini pengelolaan dan pemanfaatan SDA hanya menguntungkan wilayah lain termasuk ancaman terendah, karena selama ini provinsi Aceh ketergantungan terhadap daerah lain cukup tinggi terutama kebutuhan pokok, hal ini dikarenakan kapasitas produksi belum memadai dan beberapa industri hulu yang ada di Aceh cenderung melakukan produksi setengah jadi, sedangkan industri hilirnya berada di luar Aceh, maka berpengaruh pada nilai ekonomi yang dihasilkan dari produksi masih rendah akibat daya tambah nilai pada hasil produksi yang masih minim. Sehingga perekonomian Aceh masih tertinggal. Pada isu media bahwa syariat Islam sebagai penghambat investasi merupakan ancaman terendah. Artinya penerapan syariat Islam di Aceh tidak menjadi ancaman yang serius.

Masalah konflik keamanan di Aceh merupakan bagian faktor yang ikut melemahkan kondisi ekonomi dan merupakan ancaman yang serius bagi investasi di Aceh, walaupun Aceh sudah dalam kondisi aman pasca perdamaian Aceh dengan Indonesia sejak 2004, namun masih meninggalkan trauma yang mendalam bagi sebagian masyarakat korban konflik sehingga muncul kekhawatiran konflik terulang kembali dan memberikan rasa takut di masyarakat. Masalah konflik Aceh yang belum sepenuhnya tuntas seperti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kasus Daerah Operasi Militer (DOM) dan belum tertunaikannya beberapa poin perjanjian MOU Helsinki dengan pemerintah pusat, ditambah lagi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat akibat konflik keamanan yang berkepanjangan di Aceh belum bisa menjamin secara penuh situasi yang kondusif bagi investasi dalam jangka panjang terhadap kondisi keamanan di Aceh. Maka

diperlukan langkah ekspansif melalui kebijakan fiskal daerah terkait program strategis ekonomi guna memperbaiki kondisi perekonomian.

2) Matrik Internal dan Eksternal (IE)

Matriks IE digunakan untuk memposisikan institusi atau perusahaan ke dalam matriks yang terdiri dari dua dimensi, yaitu total skor dari IFE matriks pada sumbu X dan total skor EFE matriks pada sumbu Y. Pada sumbu X dari IFE matriks bernilai 2,268 berada pada skala sedang. Pada sumbu Y dari EFE matrik bernilai 2,115 berada pada skala sedang, hal tersebut dapat disimpulkan posisi internal dan eksternal pengembangan investasi di Aceh pada posisi sedang.



Gambar 4.19 Matriks Internal dan Eksternal

Berdasarkan nilai matrik IE tersebut di atas menunjukkan posisi kuadran V (lima), posisi kuadran ini menunjukkan pengembangan investasi di Aceh memerlukan strategi pertumbuhan (*growth strategy*). Strategi tersebut

mengharuskan pengembangan investasi di Aceh dapat dipertahankan dan dipelihara supaya mengalami pertumbuhan dan berkembang lebih baik.

Strategi pertumbuhan (*growth strategy*) ini digunakan untuk mencapai pertumbuhan investasi di Aceh. Strategi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pangsa pasar investasi dengan cara penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk investasi. Strategi lainnya dengan memperluas posisi perusahaan dengan cara membangun industri hulu dan hilir di lokasi strategis, dan meningkatkan kualitas produk serta jasa dengan memanfaatkan keuntungan skala ekonomis baik dalam produksi maupun pemasaran. Hal ini dilakukan agar tidak kehilangan penjualan dan kehilangan keuntungan secara ekonomi. Strategi lainnya seperti perluasan pasar, peningkatan fasilitas produksi, dan teknologi melalui pengembangan internal maupun eksternal.

Faktor keberhasilan kunci pengembangan investasi di Aceh terdapat sejauh mana peluang dengan memanfaatkan kekuatan internal yang dimiliki serta menopang berbagai kelemahan yang ada. Strategi yang bisa diambil adalah bisa saja bersifat agresif dengan memanfaatkan kekuatan yang ada, strategi perubahan haluan jika pengembangan investasi di Aceh masih memiliki kelemahan, strategi diversifikasi jika masih terdapat ancaman bagi pengembangan investasi di Aceh.

3) *Positioning Kuadran SWOT*

Setelah sebelumnya membahas matrik IFAS dan EFAS maka dapat diketahui posisi suatu perusahaan yang sesungguhnya. Dari matrik IFAS dapat diketahui posisi sumbu X dengan rumus sebagai berikut:

$$X = \text{Total Kekuatan} - \text{Total Kelemahan}$$

$$X = 1,387 - 0,881$$

$$X = 0,507$$

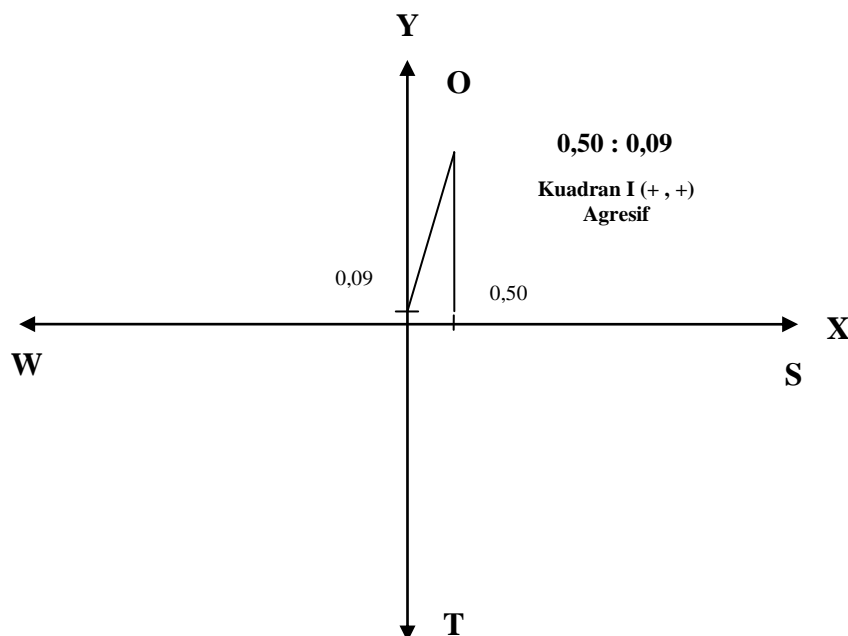
Sedangkan untuk matrik EFAS dapat diketahui posisi sumbu Y dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \text{Total Peluang} - \text{Total Ancaman}$$

$$Y = 1,107 - 1,008$$

$$Y = 0,099$$

Berdasarkan matrik IFAS dan EFAS tersebut dapat diketahui posisi sumbu X dan posisi sumbu Y yang di mana menentukan posisi dikuadan SWOT. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.20 Kuadran SWOT

Posisi Kuadran I (Positif, Positif) ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

b. Analisis Matriks SWOT

Berdasarkan analisis matrik SWOT dapat dirumuskan berbagai kemungkinan strategi baru dalam pengembangan strategi peningkatan investasi di Aceh. Kombinasi komponen-komponen SWOT merupakan strategi yang mendukung pengembangan strategi peningkatan investasi di Aceh seperti strategi *Strengths-Opportunities* (SO), strategi *Strengths-Threats* (ST), strategi *Weaknesses-Opportunities* (WO) dan strategi *Weaknesses-Threats* (WT) disajikan dalam tabel matrik SWOT.

Tabel 4.10 Matrik SWOT

| | | |
|--------------------|--|--|
| <p>IFAS</p> | <p><i>Strength (Kekuatan)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal memberikan keringanan dan kemudahan terhadap investasi di Aceh. 2. Qanun Aceh tentang Penanaman Modal menjadi daya tarik bagi investor. 3. Qanun tentang Penanaman Modal memberikan kemudahan dan keringanan pajak dan retribusi bagi investasi (pasal 18 dan pasal 31) 4. Ketersediaan akan pendidikan /keahlian yang berpengaruh dan mendukung investasi di Provinsi Aceh 5. Potensi kelautan dan maritim memberikan potensi besar bagi dunia investasi di Provinsi Aceh 6. Potensi minyak dan gas atau barang tambang untuk berinvestasi di Provinsi Aceh. 7. Potensi perkebunan dan hortikultura sebagai sumber alam yang dapat meningkatkan investasi di Aceh. 8. Kondisi infrastruktur jalan, listrik, telekomunikasi dan | <p><i>Weakness (Kelemahan)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Aceh tak punya Master Plan investasi dan perekonomian Aceh 2. Kurangnya pengetahuan Masyarakat Aceh tentang investasi 3. Biaya/gaji tenaga kerja untuk mendukung investasi di Provinsi Aceh tidak sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) 4. Ketersediaan sumber daya manusia atau tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja 5. Pariwisata masih dianaktirikan ketimbang migas dan tambang 6. Kondisi sarana dan prasarana transportasi darat di Provinsi Aceh yang belum sepenuhnya mendukung investasi 7. Sarana dan prasarana transportasi udara di Provinsi Aceh yang mempengaruhi investasi 8. Habisnya |
| | <p>EFAS</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>informasi di Provinsi Aceh yang memadai investasi</p> <p>9. Kondisi sarana dan prasarana transportasi laut yang memadai di provinsi Aceh dapat meningkatkan investasi</p> <p>10. Ketersediaan pembangkit listrik di Provinsi Aceh yang sangat mendukung terhadap investasi</p> <p>11. Penambahan sumber energi baru selain migas dan diesel</p> <p>12. Pemasaran produk dan jasa yang ditawarkan ke masyarakat sudah berkualitas</p> <p>13. Harga produk dan jasa yang ditawarkan terjangkau</p> | <p>ketersediaan minyak dan gas bumi di Provinsi Aceh yang berpengaruh terhadap investasi</p> <p>9. Infrastruktur energi di Aceh masih sangat terbatas</p> <p>10. Pola distribusi produk dan jasa masih bergantung pada provinsi lain</p> <p>11. Promosi terhadap barang dan Jasa masih sangat kurang</p> |
| <p>Opportunity (Peluang)</p> <p>1. Sistem kekerabatan di Aceh yang mendukung investasi</p> <p>2. Karakter masyarakat mudah dan ingin perubahan dalam mendukung investasi</p> <p>3. Pengembangan teknologi informasi cepat</p> <p>4. Peningkatan kualitas penerapan teknologi informasi</p> <p>5. Kerjasama sub ekonomi regional meningkatkan investasi</p> <p>6. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan berdampak pada peningkatan investasi produktif</p> | <p>Strategi SO</p> <p>1) Memperbesar kapasitas produksi</p> <p>2) Perbaikan infrastruktur yang menunjang produksi</p> <p>3) Penetapan regulasi yang mendorong dunia usaha</p> <p>4) Meningkatkan produktifitas Sumber Daya Manusia</p> <p>5) Mendorong pengembangan industri pengolahan di daerah</p> | <p>Strategi WO</p> <p>1) Pengembangan agroindustri daerah</p> <p>2) Memanfaatkan kerja sama bidang investasi</p> <p>3) Meningkatkan daya saing daerah</p> <p>4) Merealisasikan program kebijakan pemerintah pusat di daerah</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 7. Letak geografis yang strategis meningkatkan investasi 8. Kondisi alam di Aceh menguntungkan untuk investasi 9. Terdapatnya kawasan berikat dan pelabuhan bebas akan menjadi daya tarik investasi 10. Tingkat konsumsi masyarakat lebih tinggi 11. Pengetahuan masyarakat tentang implementasi syariat Islam di Aceh 12. Syariat Islam di Aceh sebagai peluang bagi investasi dalam bidang pariwisata dan kuliner (<i>halal tourism</i> dan <i>halal food</i>) 13. Aceh sebagai daerah konflik sudah mulai kondusif. | | |
| <p>Threat (Ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karakter masyarakat sulit beradaptasi terhadap perubahan dalam mendukung investasi 2. Kondisi sistem sosial dan politik yang tidak mendukung investasi 3. Kemampuan dan kehandalan teknologi informasi yang kurang memadai dalam upaya promosi keunggulan provinsi Aceh 4. Kualitas website Pemerintah Provinsi Aceh belum memadai 5. UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 4 Oktober 1999 | <p>Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjaga kekuatan permintaan termasuk daya beli masyarakat 2) Sinergisitas pemangku kepentingan 3) Jaminan keamanan investasi 4) Promosi daerah guna menarik minat investasi | <p>Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2) Menghindari ketimpangan pemerataan ekonomi 3) Mengupayakan persepsi positif investasi 4) Menciptakan suasana kondusif mendukung investasi |

| | | |
|--|--|--|
| <p>tidak berpengaruh terhadap investasi.</p> <p>6. UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam tidak berpengaruh terhadap investasi</p> <p>7. Pengelolaan dan pemanfaatan SDA hanya menguntungkan wilayah lain</p> <p>8. Pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh sulit meningkat</p> <p>9. Inflasi yang masih terus terjadi</p> <p>10. Pengeluaran pemerintah provinsi tidak tepat sasaran</p> <p>11. Isu syariat Islam seperti hukum rajam atau cambuk menghambat investasi</p> <p>12. Isu media bahwa syariat Islam sebagai penghambat Investasi</p> <p>13. Adanya traumatic intensitas konflik keamanan vertikal dan horizontal</p> <p>14. Adanya biaya transaksi non formal (pungutan liar) akibat dari konflik keamanan yang belum tuntas</p> <p>15. Terjadinya kesenjangan sosial masyarakat akibat konflik keamanan yang berkepanjangan di Aceh</p> | | |
|--|--|--|

1) Strategi *Strengths-Opportunities* (SO)

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran organisasi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan memanfaatkan

peluang sebesar-besarnya. Beberapa langkah strategi SO dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Memperbesar Kapasitas Produksi
- b) Penetapan Regulasi Yang Mendorong Dunia Usaha
- c) Meningkatkan Produktifitas SDM
- d) Mendorong Pengembangan Industri Pengolahan di Daerah

2) Strategi *Strengths-Threats* (ST)

Strategi ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan dalam yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman. Beberapa langkah strategi ST dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Menjaga Kekuatan Permintaan Termasuk Daya Beli Masyarakat
- b) Sinergisitas Pemangku Kepentingan
- c) Jaminan Keamanan Investasi
- d) Promosi Daerah Guna Menarik Minat Investasi

3) Strategi *Weaknesses-Opportunities* (WO)

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Beberapa langkah strategi WO dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pengembangan Agroindustri Daerah
- b) Memanfaatkan Kerja Sama Bidang Investasi
- c) Meningkatkan Daya Saing Daerah
- d) Merealisasikan Program Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah

4) Strategi *Weaknesses-Threats* (WT)

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat bertahan dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Beberapa langkah strategi WT dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
- b) Menghindari Ketimpangan Pemerataan Ekonomi
- c) Mengupayakan Persepsi Positif Investasi
- d) Menciptakan Suasana Kondusif Mendukung Investasi

c. Menyusun Formula Strategi

Formula strategi disusun berdasarkan analisis yang diperoleh dari penerapan model SWOT. Tahapan kegiatannya adalah:

- 1) Tentukan faktor-faktor strategi internal dan eksternal;
- 2) Rumuskan alternatif strategi dengan cara membuat matriks internal eksternal, *space* matriks dan matriks SWOT.

Adapun cara untuk mengisi tabel internal maupun eksternal pada Tabel 4.6 dan Tabel 4.8 adalah:

- 1) Susunlah di dalam kolom berupa faktor-faktor internal yang merupakan kekuatan dan kelemahan;
- 2) Beri bobot masing-masing faktor dengan cara menjumlahkan seluruh hasil diskusi dengan pihak yang telah ditentukan kemudian masing-masing faktor tersebut dibagi dengan total keseluruhan faktor internal dan eksternal;
- 3) Hitung rating untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (sangat baik) sampai dengan 1 (dibawah rata-rata) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi organisasi yang bersangkutan (lihat Tabel 4.4);
- 4) Kalikan bobot dengan rating yang hasilnya berupa skor untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi;
- 5) Jumlahkan skor pembobotan sehingga diperoleh skor pembobotan untuk organisasi yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana organisasi tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis baik eksternal maupun internal. Total skor ini selanjutnya dimasukkan ke dalam skor total IFAS dan EFAS sehingga diketahui nilai skor berada pada wilayah rendah, sedang atau tinggi (lihat Tabel 4.7 dan Tabel 4.9).

d. Analisis *Quatitative Strategic Planning Matrix* (QSPM)

Tahap akhir dari analisis strategi merupakan pemilihan strategi yang sesuai dan dapat dijalankan oleh perusahaan atau suatu daerah, setelah diperoleh beberapa alternatif strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT, maka selanjutnya adalah pemilihan strategi terbaik. Adapun analisis yang digunakan adalah Matrix Perencanaan Strategi Kuantitatif (*Quatitative Strategic Planning Matrix*).

Tabel 4.11 Analisis QSPM

| Faktor Kunci | Bobot | Alternatif Strategi | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------|-------|---|-------|--|-------|---|-------|---|-------|
| | | Penetapan Kepastian Hukum | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Serta Keamanan | | Peningkatan Tenaga Kerja dan Produktifitas SDM | | Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur | | Pelaksanaan Berbagai Jenis Kegiatan Promosi | |
| | | AS | TAS | AS | TAS | AS | TAS | AS | TAS | AS | TAS |
| Kekuatan : | | | | | | | | | | | |
| a. Qanun tentang Penanaman Modal memberikan kemudahan dan keringanan pajak dan retribusi bagi investasi (pasal 18 dan pasal 31) | 0,045 | 3 | 0,135 | 3 | 0,135 | 4 | 0,18 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 |
| b. Harga produk dan jasa yang ditawarkan terjangkau | 0,037 | 3 | 0,111 | 2 | 0,074 | 3 | 0,111 | 3 | 0,111 | 3 | 0,111 |
| c. Potensi kelautan dan maritim memberikan potensi besar bagi dunia investasi di Provinsi Aceh | 0,045 | 3 | 0,135 | 2 | 0,09 | 3 | 0,135 | 4 | 0,18 | 2 | 0,09 |
| d. Potensi minyak dan gas atau barang tambang untuk berinvestasi di Provinsi Aceh. | 0,044 | 2 | 0,088 | 2 | 0,088 | 2 | 0,088 | 3 | 0,132 | 2 | 0,088 |
| e. Potensi perkebunan dan hortikultura sebagai sumber alam yang berpengaruh bagi investasi di Aceh | 0,045 | 4 | 0,18 | 3 | 0,135 | 3 | 0,135 | | 0,09 | 4 | 0,18 |
| Kelemahan : | | | | | | | | | | | |
| a. Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Syari'at Islam sebagai penghambat investasi di Aceh. | 0,022 | 4 | 0,088 | 3 | 0,066 | 4 | 0,088 | 2 | 0,044 | 2 | 0,044 |
| b. Ketersediaan angkatan kerja yang kurang memadai dalam berinvestasi di Provinsi Aceh. | 0,043 | 1 | 0,043 | 3 | 0,129 | 3 | 0,129 | 2 | 0,086 | 3 | 0,129 |
| c. Biaya/gaji tenaga kerja untuk mendukung investasi di Provinsi Aceh sudah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) | 0,043 | 2 | 0,086 | 2 | 0,086 | 3 | 0,129 | 1 | 0,043 | 3 | 0,129 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| d. Habisnya ketersediaan minyak dan gas bumi di Provinsi Aceh yang berpengaruh terhadap investasi | 0,039 | 1 | 0,039 | 1 | 0,039 | 1 | 0,039 | 1 | 0,039 | 1 | 0,039 |
| Peluang : | | | | | | | | | | | |
| a. Karakter masyarakat mudah dan ingin perubahan dalam mendukung investasi | 0,037 | 1 | 0,037 | 3 | 0,111 | 3 | 0,111 | 2 | 0,074 | 3 | 0,111 |
| b. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan berdampak pada peningkatan investasi produktif | 0,038 | 2 | 0,076 | 3 | 0,114 | 3 | 0,114 | 4 | 0,152 | 2 | 0,076 |
| c. Terdapatnya kawasan berikat dan pelabuhan bebas akan mempengaruhi investasi | 0,039 | 1 | 0,039 | 2 | 0,078 | 2 | 0,078 | 4 | 0,152 | 2 | 0,078 |
| d. Syariat Islam di Aceh sebagai peluang bagi investasi dalam bidang pariwisata dan kuliner (<i>halal tourism</i> dan <i>halal food</i>) | 0,040 | 4 | 0,16 | 3 | 0,12 | 3 | 0,12 | 2 | 0,080 | 4 | 0,16 |
| Ancaman : | | | | | | | | | | | |
| a. Karakter masyarakat sulit beradaptasi terhadap perubahan dalam mendukung investasi | 0,037 | 1 | 0,037 | 2 | 0,074 | 2 | 0,074 | 2 | 0,074 | 2 | 0,074 |
| b. Inflasi yang masih terus terjadi | 0,034 | 1 | 0,034 | 1 | 0,034 | 2 | 0,068 | 2 | 0,068 | 2 | 0,068 |
| c. Adanya biaya transaksi non formal (pungutan liar) akibat dari konflik keamanan yang belum tuntas | 0,035 | 4 | 0,14 | 3 | 0,105 | 2 | 0,07 | 2 | 0,07 | 1 | 0,035 |
| d. Kesenjangan sosial masyarakat akibat konflik keamanan yang berkepanjangan di Aceh | 0,034 | 2 | 0,068 | 3 | 0,102 | 2 | 0,068 | 1 | 0,034 | 2 | 0,068 |
| Total | | | 1,496 | | 1,424 | | 1,737 | | 1,519 | | 1,57 |

Sumber: Diolah Peneliti 2019.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel QSPM di atas diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Strategi 1 (Menetapkan Kepastian Hukum): 1,496
2. Strategi 2 (Meningkatkan Partisipasi Masyarakat serta Keamanan): 1.424
3. Strategi 3 (Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Produktifitas SDM): 1,737
4. Strategi 4 (Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur): 1,519
5. Strategi 5 (Melaksanakan Berbagai Jenis Kegiatan Promosi): 1,57

B. Pembahasan

1. Hal-hal yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung investasi Aceh

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait yaitu pemerintah Provinsi Aceh, para pelaku ekonomi (pengusaha) dan asosiasi pengusaha dalam Focuss Group Discussion menghasilkan pembahasan bahwasanya faktor penghambat investasi di Aceh yaitu: a) minimnya kegiatan ekonomi produktif ditandai dengan rendahnya jumlah dan macam industri pengolahan di Aceh. Ini menunjukkan bahwa tingkat perkembangan industri di Aceh masih rendah. Padahal, penggolongan industri salah satunya berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, dan kebutuhan masyarakat. Semakin besar dan kompleks kebutuhan masyarakat, maka semakin beranekaragam jenis industri. Potensi sumberdaya alam yang besar tersebut harus berimbas pada kesejahteraan masyarakat melalui keberadaan industri, karena pembangunan sektor industri dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan sehingga memberikan manfaat optimal untuk masyarakat. Untuk itu pemerintah sangat berperan dalam mengembangkan industri kecil dan mikro dengan menerapkan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha dan dukungan kelembagaan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kebijakan pemerintah dalam memasarkan atau mempromosikan terhadap berbagai jenis usaha industri kecil dan mikro. Namun sumbangan industri pengolahan pada perekonomian Aceh belum memberikan

kontribusi yang besar; b) Kualitas sumber daya manusia tidak mendukung kepada arah potensi kewilayahan daerah. Terkait kualitas sumber daya manusia di Aceh menurut analisis peneliti, walaupun sudah mengalami kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun jika dibandingkan dengan pencapaian rata-rata nasional masih rendah. Perbandingan ini dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) di Aceh masih lebih rendah dari IPM nasional. Daya saing sumber daya manusia di Aceh masih tergolong rendah yang dicirikan dengan masih terbatasnya jumlah lulusan SDM kejuruan yang memiliki keterampilan (*skill*), jumlah tenaga kerja yang berpendidikan tinggi masih rendah dan rasio ketergantungan penduduk usia produktif dengan jumlah penduduk masih tinggi. Berdasarkan data BPS tahun 2011 persentase pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk yang berumur 5 tahun keatas di provinsi Aceh berada pada tingkat pendidikan SD/MI/Sederajat sebesar 25 persen, tidak/belum tamat SD sebesar 17%, tidak/belum pernah sekolah sebesar 6%, tingkat pendidikan SLTP/MTsN/Sederajat sebesar 18%, tingkat SLTA/MA/Sederajat sebesar 19%, SM kejuruan sebesar 1%, tingkat Diploma I, II, III, IV sebesar 5%, sedangkan persentase pada tingkat pendidikan S2/S3 sebesar 9%. Karena itu, peningkatan SDM saat ini harus lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengecap pendidikan terutama pada kelompok masyarakat usia sekolah yaitu usia 7 – 24 tahun. Kontributor utama terhadap kemajuan sebuah bangsa adalah sumber daya manusia yang mempunyai input tenaga kerja terdiri dari kuantitas dan keterampilan tenaga kerja (*skill*). Kualitas input tenaga kerja yaitu keterampilan, pengetahuan dan disiplin tenaga kerja merupakan elemen paling penting dalam pertumbuhan ekonomi. Bahkan, pertumbuhan ekonomi akan berkembang pesat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika didukung oleh tingkat pendidikan yang tinggi. Karena itu, pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) melalui pendidikan dalam rangka mendorong dan meningkatkan produktivitas, yang pada akhirnya pertumbuhan produktivitas menjadi motor penggerak pertumbuhan. Dapat dikatakan, pendidikan memainkan kunci dalam kemajuan perekonomian di suatu negara.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan hubungan dua arah yang kuat. Aspek pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber-sumber yang memungkinkan pembangunan manusia berkembang secara berkelanjutan. Sedangkan pada aspek lain, pengembangan dalam kualitas modal manusia merupakan kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di tempuh pemerintah dengan peningkatan rata-rata lama sekolah; c) kendala Infrastruktur dan noninfrastruktur yang masih belum maksimal dalam pemanfaatan. Menurut analisis peneliti dengan kondisi pelabuhan, listrik, serta jalur konektivitas yang menghubungkan secara langsung antara kawasan Aceh bagian barat dan bagian timur melalui jalur bagian tengah yang menjadi kendala dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi Aceh harus dilakukan perbaikan. Karena kondisi jalan yang baik akan sangat membantu kelancaran dan efisiensi biaya bagi para pelaku ekonomi di Aceh. Demikian juga dibidang kelistrikan mengalami defisit energi yang sangat besar. Kapasitas listrik di Aceh hingga kini belum memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, usaha, umum dan industri. Kondisi saat ini baru 60 % yang selama ini kebutuhan tersebut masih dipasok dari Sumatera Utara sehingga mengalami kehilangan arus dalam proses pendistribusiannya. Maka, kebutuhan energi untuk daerah-daerah terpencil masih belum terjangkau. Sementara, kebutuhan energi listrik untuk mendukung dunia usaha dan industri masih belum tersedia. Diperkirakan untuk 5 tahun kedepan Aceh membutuhkan pasokan listrik sekitar 500 MW. Pada tahun 2025 diperkirakan kebutuhan energi listrik sebesar 7.131 MW. Karena itu, untuk mengurangi dampak negatif dari kurangnya kapasitas listrik, pemerintah harus melakukan perencanaan pembangunan pembangkit listrik. Disamping memanfaatkan sumber energi alternatif atau energi terbarukan (non fosil), yaitu seperti energi panas bumi, energi air, tenaga angin dan tenaga surya. Beberapa sumber energi terbarukan tersebut sudah mulai dikembangkan seperti energi panas bumi Seulawah Agam di Kabupaten Aceh Besar, energi tenaga air Krueng Peusangan dan energi tenaga angin Kluet Selatan di Aceh Selatan. Sementara itu, sumber energi terbarukan lainnya masih pada tahap pengkajian dan perlu ditindaklanjuti sebagai prioritas pembangunan jangka

panjang. Karena Aceh memiliki sumberdaya mineral yang cukup potensial, yaitu mineral dan batubara (minerba), minyak dan gas bumi (migas), panas bumi, dan air tanah. Maka, potensi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sementara, potensi tersebut masih belum dimanfaatkan oleh investor dari dalam dan luar Aceh akibat kurangnya informasi, promosi dan regulasi yang mendukung investasi. Begitu juga dengan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe di Aceh akan dapat meningkatkan perekonomian Aceh dari sektor Industri Pengolahan serta Investasi Produktif yang lebih bersifat jangka panjang;

d) Adanya biaya tidak resmi berbentuk pungutan liar (Pungli) masih terjadi di luar biaya formal yang menjadi syarat. Tradisi pungli menjadi gambaran yang menunjukkan lemahnya tingkat kedisiplinan aparat. Pungli ini sangat merusak iklim investasi dan daya saing dunia usaha, sehingga investor yang berencana menanamkan modal di Aceh menjadi enggan dan mengalihkannya ke daerah lain. Karena itu, pemerintah Aceh harus berupaya untuk memberantas perilaku pungli ini. Pemberantasan pungutan liar (pungli) harus dilakukan secara terpadu dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara *abolisionistik* (cara penanggulangan gejala) sebagai tindakan *preventif*. Biaya transaksi yang tidak resmi masih menjadi kendala. Biaya transaksi dalam investasi yang dimaksud adalah biaya di luar biaya-biaya formal yang memang disyaratkan. Konflik Aceh masih menyisakan polemik keamanan investor untuk berinvestasi. Tampaknya kecil kemungkinan bahwa di Aceh akan kembali terjadi konflik bersenjata, tetapi peristiwa-peristiwa kekerasan masih lazim terjadi dan dunia usaha masih menganggap bahwa provinsi ini tidak aman, yang dapat menjadi penghalang masuknya investasi swasta. Terjadi asimilasi secara luas dalam proses perdamaian di antara para mantan pimpinan GAM karena banyak di antara mereka diangkat menduduki jabatan pemerintah atau menjalankan usaha yang menguntungkan. Akan tetapi, banyak di antara para pengikutnya yang tidak dapat melakukan dan mungkin merasa bahwa mereka tidak menerima keuntungan dari suksesnya perdamaian.⁵⁶ Akibatnya, kadangkala mereka menggunakan cara-cara

⁵⁶ MSR, 2009, *Multi-Stakeholder Review of Post-Conflict Programming in Aceh*:

kekerasan untuk mencari nafkah. Selanjutnya biaya tidak resmi yang di hadapi oleh pihak swasta ini menjadi pemicu gangguan sosial masyarakat berikutnya sehingga akhirnya membuat ketidaknyaman dan berimbas pada ketidakpercayaan suatu perusahaan akan keamanan suatu daerah. Pada lingkungan Pemerintah Aceh telah membentuk Tim Sapu Bersih Pungli Aceh untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan pungli diberbagai sektor terutama di sektor perizinan dan pengadaan barang dan jasa di Aceh. Karena, sektor perizinan dan pengadaan barang dan jasa bersentuhan langsung dengan publik dan rawan dari tindakan pungli; e) proses birokrasi yang berbelit dan tidak tepat sasaran karena peran pemerintah di Aceh masih sangat lamban dan masih ada unsur-unsur politis yang tidak sehat, hingga sangat mempengaruhi perilaku investasi di Aceh. Peran pemerintah sangat tidak mendukung/ tidak sejalan dengan pengusaha Aceh. Pemerintah masih sangat kurang mendukung fungsi pemerintah sebagai pengambil kebijakan (regulasi) tidak berdampak positif terhadap perkembangan investasi; f) kurangnya kepedulian pengusaha lokal/ daerah untuk menggarap investasi di sector unggulan daerah terutama pada wilayah wilayah yang memiliki sumber daya alam yang sangat produktif. Hal ini memerlukan tingkat kepedulian bagi pihak swasta terhadap potensi unggulan daerah; g) penggunaan anggaran daerah yang belum tepat sasaran dan masih mengandung unsur politik. Sehingga belum mampu dipergunakan pada program-program yang lebih produktif padahal sepatutnya anggaran produktif dapat dipercaya dapat membantu peningkatan invsestasi.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Venti Eka Satya yang menjelaskan permasalahan utama yang membuat Indonesia tertinggal dalam menjaring investasi asing adalah tumpang tindih regulasi, ketidakpastian hukum, pajak, tenaga kerja, perizinan, serta infrastruktur. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala tersebut seperti belum efektif dan tidak

mampu meningkatkan minat para investor. Untuk itu pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan tersebut dan mengevaluasi penerapannya di lapangan.⁵⁷

Begitu juga dengan hasil penelitian Gita Melina, dkk. menyebutkan beberapa faktor kendala dan hambatan pelaksanaan penanaman modal tidak berjalan maksimal karena kurangnya kemampuan SDM secara internal BPKS, masih kurang maksimal sarana infrastruktur penunjang investasi, kondisi keamanan yang belum kondusif, kesulitan dalam menarik minat investor, kurangnya kenyamanan dalam berinvestasi, letak regional Kawasan yang belum strategis serta belum dijadikannya Kawasan Sabang sebagai daerah tujuan investasi.⁵⁸

Berkaitan dengan faktor penghambat melalui proses birokrasi yang rumit dan masih diwarnai dengan unsur-unsur politis sehingga pada penggunaan anggaran juga dipenuhi dengan politik anggaran. Hal ini sangat mempengaruhi kestabilan politik suatu Pemerintah Daerah. Penelitian yang sejalan dengan faktor penghambat ini dikemukakan oleh Hafid Zakariya dkk dalam menarik investor asing ini Indonesia harus menciptakan iklim yang nyaman bagi para investor asing. Karena investor asing ini merupakan orang-orang yang cukup sensitif dengan isu-isu kestabilan hukum dan politik serta tidak mau mengambil resiko maka pemerintah perlu membuat kebijakan kebijakan yang membuat mereka mau dan nyaman untuk menanamkan modalnya. Dalam pembuatan kebijakan tersebut tidak terlepas dari peran anggota politik yang duduk dalam legislatif negara. Kebijakan-kebijakan hukum tersebut harus mampu mengakomodasi kebutuhan negara untuk mensejahterakan warga negaranya dan di satu sisi juga harus mampu memberi kelunakan bagi para investor asing tersebut.⁵⁹

Selain itu indeks keamanan investasi itu mencakup suatu hal dalam dunia investasi, bahwa syarat fundamental untuk menopang elemen-elemen pembangunan ekonomi adalah stabilitas politik. Stabilitas politik sangat berkaitan erat dengan

⁵⁷ Venti Eka Satya, Upaya Penciptaan Investasi yang Kondusif, Jurnal Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik: Kajian singkat Terhadap isu actual dan strategis, vol.XI,No 06/11/Puslit/Maret/2019.

⁵⁸ Gita Melina, dkk, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1(3) Desember 2017.

⁵⁹ Hafid Zakariya, Hernawan Santosa, Furry Dhismayana Masa Ganta, Ratna Fitri Anjani, Jurnal Serambi Hukum Vol. 10 No. 02 Agustus 2016 - Januari 2017, ISSN: 1693-0819 E-ISSN: 2549-5275.

partisipasi warga negara dan aktivitas kelembagaan negara. Teori Plano membuktikan bahwa stabilitas politik merupakan suatu kondisi dari sebuah sistem politik yang komponen dan elemennya tidak mengalami perubahan dari batasan-batasan yang telah disepakati bersama.⁶⁰ Dimana stabilitas politik mempengaruhi iklim investasi, semakin situasi politik di sebuah negara tidak menentu, sudah dapat dipastikan tingkat kepercayaan investor untuk menanamkan modal semakin rendah. Bila banyak kebijakan pemerintah dibuat untuk mempermudah investasi tapi tidak dibarengi kondisi politik yang kondusif akan menghasilkan sesuatu yang sia-sia.

Analisis peneliti akan faktor penghambat ini ada pada poin penting dari pembahasan mengenai investasi berkaitan dengan berlakunya UU Pemerintah Aceh yang mengembalikan otonomi daerah kepada Provinsi. Sehingga investasi yang dilakukan harus atas dasar persetujuan pemerintah Provinsi. Seharusnya pemerintah daerah memberikan fasilitas dengan segala kemudahan dalam proses perijinan. Sedikit banyaknya faktor ini mempengaruhi percepatan dan peningkatan investasi di Aceh. Dimana sebelum UU PA berlaku otonomi yang dilaksanakan adalah otonomi daerah berdasarkan UU No. 18 tahun 2001 yang menganut konsep desentralisasi sehingga pemerintah kabupaten/kota dapat mengelola segala kebijakan daerahnya sendiri.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Marsi Adi dkk menjelaskan bahwa perkembangan investasi yang merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dimana investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tantangan pelaksanaan investasi di Indonesia saat ini, salah satunya adalah dengan pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia. Sejak tahun 2001 era otonomi daerah di Indonesia dimulai, dimana semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sementara itu, sumber pendanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian

⁶⁰ Jack C. Plano, *Kamus Analisa Politik*, (Jakarta: Rajawali, 1989), h. 249.

diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dimana makna penting pengaturan tersebut adalah bahwa ada sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.⁶¹

Sedangkan yang menjadi faktor pendukung investasi di Aceh pada dasarnya wilayah yang subur dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa nilainya, meliputi industri pengolahan ikan, perkebunan, pertanian dan kelautan, sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, pertambangan, dan sebagainya. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah, pada dasarnya daya dukung alam untuk kesejahteraan penduduk masih sangat terbuka luas dan menjadi faktor daya tarik investasi di Aceh. Karena, investasi pada dasarnya berasal dari tabungan yang kemudian digunakan kembali pada sektor produktif. Dengan demikian, semakin tinggi kecenderungan untuk menabung, maka semakin tinggi pula peluang pembentukan investasi. Investasi bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (produksi) yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, secara faktual, terutama di negara-negara berkembang, bahwa distribusi pendapatan di masyarakat tidaklah merata dan sebagian besar masyarakat sangat rendah kemampuan menabungnya.

Adapun faktor pendukung investasi yang masih dapat diandalkan yaitu: a) Sektor pertanian karena ekonomi Provinsi Aceh berstruktur agraris, yaitu sebagian besar sektor ekonomi bersumber dari sektor pertanian, dan sektor ini menjadi tumpuan kehidupan banyak keluarga. Daya tarik investasi di Aceh dari sektor produksi adalah sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Karena, investasi di sektor produksi adalah investasi yang ditanamkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang memproduksi barang-barang (ekonomi riil). Biasanya investasi di sektor ini berdasarkan ketersediaan sumber daya alam yang relatif melimpah.

⁶¹ Marsi Adi Purwadi dkk, Target pertumbuhan investasi dan rencana strategis pengembangan investasi provinsi papua: JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 2017,h. 16.

Bahkan di sektor pertanian menjadi primadona investasi di Aceh. Karena, sejak dahulu Aceh sudah menjadi pengeksport lada yang terkenal di beberapa negara Eropa sehingga dikenallah dengan istilah *Meriam lada sicupak*. Hasil pertanian aceh sudah dikenal diberbagai belahan dunia, seperti Kopi Gayo dicap sebagai salah satu kopi dunia terbaik karena kualitas dan cita rasa khasnya yang tinggi. Begitu juga dengan perkebunan kelapa sawit; b) Potensi perkebunan masih didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Sumber daya alam yang melimpah, tingginya permintaan dunia akan minyak sawit dan harga minyak sawit dunia menjadi insentif menarik bagi pengembangan usaha kelapa sawit dan daya tarik investasi. Karena, minyak Sawit adalah salah satu produk yang cenderung mengalami peningkatan harga di pasar dunia. Begitu juga dengan konsumsi lokal juga semakin meningkat karena faktor jumlah penduduk Indonesia yang banyak serta penggunaan minyak goreng sehari-hari. Pengembangan produk turunan kelapa sawit akan meningkatkan potensi pasar dan bila diolah di Aceh akan memberikan multiplier ekonomi bagi Aceh dan kesejahteraan masyarakat. Seperti limbah sawit atau *sludge* potensial untuk diolah menjadi bahan baku bio-diesel untuk penyediaan energi listrik. Pada kualitas tertentu, limbah sawit diperkirakan akan terekstrak sekitar 25%-berat bio-diesel. Porsi ini cukup menjanjikan bagi kebutuhan penyiapan energi listrik di Provinsi Aceh yang menggunakan generator-set diesel sebagai pembangkit, atau juga sebagai bahan bakar otomotif. Harga jual pabrik bio-diesel dari bahan *sludge* sekitar 50-60% dibandingkan bio-diesel dengan bahan baku CPO.

Bagitu juga dengan pengembangan kelapa sawit yang terintegrasi dengan kegiatan peternakan (kambing/sapi) adalah salah satu alternatif yang baik untuk mempercepat kembalinya investasi. Integrasi ekstensif ternak kambing dan domba dengan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu alternatif sistem produksi yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia seperti lahan dan vegetasi. Sistem produksi ternak pada perkebunan sangat ditentukan oleh ketersediaan pakan hijauan secara berkesinambungan. Tingkat pemeliharaan ternak yang menguntungkan akan dapat dipertahankan apabila ketersediaan pakan hijauan yang menurun sejalan dengan bertambahnya umur kelapa sawit dapat

disubstitusi oleh sumber bahan pakan lain, terutama yang tersedia di areal tersebut. Sistem ini akan lebih meningkatkan perolehan usaha peternak dan juga pengusaha perkebunan, karena umumnya gulma dan pelepah harus dibuang dengan cara kimiawi atau mekanis dengan biaya yang cukup besar; c) Komoditas unggulan lainnya yaitu kopi, karet, kakao, cengkeh, pinang dan nilam. Kondisi tekstur tanah dan letak geografis menjadikan wilayah Aceh menjadi sangat potensial untuk pengembangan komoditas-komoditas perkebunan tersebut. Komoditas perkebunan ini memiliki catatan produksi baik di Aceh. Kondisi alam Aceh yang sebagian besar bergunung sangat memungkinkan untuk pengembangan komoditas perkebunan tersebut. Begitu juga dengan kesesuaian lahan untuk dikembangkan. Pengembangan komoditas ini relatif tidak memerlukan perubahan pola budidaya yang terlalu besar, sehingga dari sisi biaya akan lebih ekonomis. Kesiapan sosial ekonomi masyarakat sangat positif untuk usaha pengembangan komoditas ini. Berdasarkan kondisi tersebut, keunggulan komoditas perkebunan di Aceh menjadi daya tarik investasi. Seperti komoditas karet di Aceh yang menjadi salah satu produsen utama di Indonesia. Salah satu pasar yang menyerap karet alam terbanyak adalah industri ban dan elastomer lainnya. Selain itu banyak digunakan juga untuk jenis-jenis belt, alas kaki, peralatan operasi kedokteran dan beberapa jenis pakaian. Penggunaan karet di negara-negara berkembang untuk pembuatan ban mengalami peningkatan pesat, seiring dengan meningkatnya permintaan mobil di negara berkembang.

Sedangkan untuk komoditas cengkeh, Aceh juga sebagai produsen utama di Indonesia. Karena, penyerap cengkeh terbesar di Indonesia adalah industri rokok kretek. Industri rokok besar maupun kecil berkembang pesat. Hal ini merupakan indikasi kebutuhan cengkeh domestik untuk rokok sangat besar. Dalam hal ini, Aceh dapat mengembangkan produksi cengkehnya untuk mengisi kekurangan pasar domestik. Cengkeh juga dapat digunakan untuk obat-obatan. Potensi permintaan untuk farmasi memang tidak terlalu besar, namun demikian bila diolah dengan teknologi yang lebih baik dan menghasilkan minyak cengkeh maka tidak mustahil potensi pasarnya juga besar.

Begitu juga untuk komoditas coklat, yang saat ini coklat merupakan salah satu tanaman penting di Indonesia. Produk olahannya banyak digunakan untuk berbagai jenis makanan di seluruh dunia. Pasar domestik maupun ekspor cukup luas kapasitasnya. Provinsi Aceh adalah salah satu Provinsi yang memberikan hasil coklat besar di Indonesia. Permintaan coklat dunia terus meningkat cukup tajam terutama dari negara maju. Semua faktor pendukung yang berlandaskan pada sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan berdasarkan data dari potensi sumber daya alam Aceh yang besar yang berasal dari hasil hutan seluas 3.946.317,56 ha, perkebunan yaitu perkebunan besar seluas 308.053,11 ha dan perkebunan kecil seluas 223.725,17 ha. Sedangkan yang berasal dari pertanian tanah kering seluas 136.530,00 ha dan tanaman semusim seluas 329.852,03 ha, perikanan (perairan darat) seluas 13.825,17 ha dan pertambangan seluas 516,29 ha justru menjadi kekuatan (*strength*) bagi investasi di Aceh. Bahkan, sektor pertambangan telah mampu menyumbang sekitar 10,83 persen perekonomian di Aceh dengan komoditas minyak dan gas; d) Pembangunan infrastruktur yang sudah menunjukkan arah kemajuan. Pembangunan infrastruktur akan mengintegrasikan industri yang ada di Aceh sehingga pertumbuhannya juga akan semakin meningkat. Pada tahun 2017, Kementerian PUPR telah mengalokasikan Rp 1,98 Triliun untuk pembangunan infrastruktur dalam mendukung ketahanan pangan, konektivitas, permukiman dan perumahan. Dalam mengembangkan sektor pertanian dan pemenuhan kebutuhan air di Aceh, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sudah merampungkan dua bendungan yaitu Bendungan Paya Seunara di Kabupaten Sabang dan Bendungan Rajui di Kabupaten Pidie. Bendungan Paya Seunara yang dibangun sejak 2001, telah selesai konstruksinya pada 2016 lalu oleh kontraktor PT Inaco Harapan-PT Inaco Putra Perkasa dengan total biaya pembangunan mencapai Rp 94,89 miliar. Bendungan yang berada di aliran Sungai Paya Seunara ini memiliki luas area genangan mencapai 98 ha dan disiapkan untuk menampung air dari Sungai Paya Seunara hingga 1,3 juta meter kubik. Bendungan ini mempunyai arti penting bagi masyarakat Sabang, dan juga masyarakat Pulau Weh pada umumnya, karena bermanfaat bagi penyediaan air

baku sebesar 125 liter/detik. Pulau Weh selama ini termasuk rawan krisis air karena salah satu sumber air utama yakni Danau Anak Laut semakin hari semakin turun ketersediaan airnya.

Bendungan lainnya di Provinsi Aceh yang telah selesai pembangunannya yakni Bendungan Rajui yang terletak di Desa Masjid Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Bendungan yang mulai dibangun pada awal tahun 2011 ini selesai pada tahun 2016, membutuhkan biaya sebesar Rp 110,65 milyar.

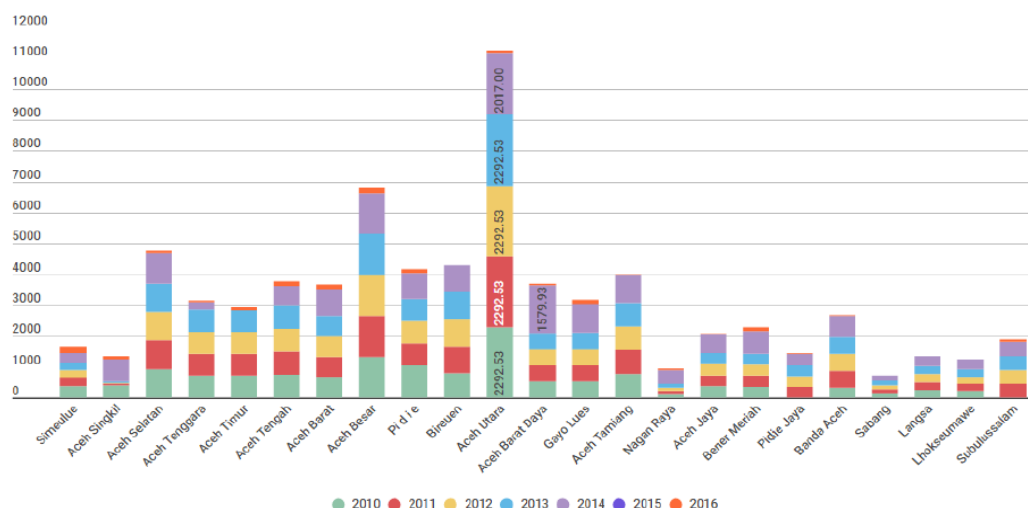
Dengan luas genangan 33,6 ha, bendungan ini diharapkan mampu menampung air sebanyak 2,67 juta meter kubik untuk mengairi areal persawahan seluas 4.790 ha, sehingga mendukung program swasembada pangan dan juga untuk meningkatkan penyediaan air baku. Selain itu, lokasi Bendungan Rajui yang berada di kaki lembah Seulawah, Kabupaten Pidie, Aceh, membuatnya terlihat asri dan terbelah masih sangat alami sehingga juga menjadi salah satu destinasi wisata baru bagi warga sekitar.

Pembangunan tampungan air di Aceh semakin diperbanyak oleh Kementerian PUPR. Saat ini juga tengah diselesaikan Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara. Sementara dua bendungan lainnya yakni Bendungan Rukoh dan Bendungan Tiro akan segera dimulai pembangunannya. Bendungan Keureuto merupakan salah satu bendungan terbesar yang mulai dibangun pada 2015 dan saat ini progres fisiknya mencapai 35,32 persen. Dari total lahan seluas 767 ha, sebagian dana pembebasan lahan akan dibayarkan melalui dana talangan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yakni seluas 457 Ha sebesar Rp 50 miliar.

Pembangunan Bendungan Keureuto bertujuan untuk meredam dan mereduksi debit banjir hingga 896 m³/detik dengan kapasitas tampung 215 juta m³. Bendungan ini juga berfungsi untuk penyediaan air irigasi seluas 9.420 ha, air baku 1,14 m³/detik, penghasil listrik sebesar 6,34 MW, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah. Pekerjaan pembangunan Bendungan Keureuto dilaksanakan

dengan kontrak tahun jamak dari Tahun 2015 – 2019 dan menelan dana sekitar Rp. 1,7 trilyun.

Sementara itu dalam hal peningkatan konektivitas antar wilayah di Aceh, untuk mendukung konektivitas di bidang pembangunan jalan, Kementerian PUPR saat ini tengah menyelesaikan Proyek Pembangunan Flyover Simpang Surabaya di Kota Banda Aceh. Flyover ini memiliki panjang 881 meter dan dibangun untuk mengurangi kemacetan lalu lintas yang keluar masuk kota Banda Aceh di jalur lintas timur Provinsi Aceh. Disamping itu akan memperlancar akses dari dan ke Pelabuhan Malahayati yang merupakan wilayah pengembangan strategis. Anggaran pembangunannya menggunakan paket kontrak tahun jamak 2015-2017 senilai Rp 262,6 miliar. Sejauh ini progres fisik pembangunan fly over telah mencapai 80 persen.



Gambar 4.21 Jumlah Total Panjang Jalan Kabupaten/Kota Menurut Jenis Permukaan Jalan (Km) Kabupaten/Kota Tahun 2010-2016

Infrastruktur lainnya yang saat ini sedang dibangun di Aceh adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Jaringan Air Limbah di Kota Banda Aceh. Fasilitas IPAL tersebut diproyeksikan berkapasitas 3.000 meter kubik per hari dengan sistem IPAL Aerated Lagoon, menggunakan jaringan perpipaan berdiameter 150 milimeter sampai 800 milimeter.

Dengan kapasitas tersebut, IPAL akan dapat melayani hingga 8.000 Sambungan Rumah (SR), namun saat ini pendanaan APBN baru dapat

dialokasikan bagi 210 SR yang ditargetkan selesai pada Oktober 2017. Fasilitas IPAL di Banda Aceh tersebut adalah yang pertama kali akan ada dimiliki oleh masyarakat Aceh untuk menangani masalah air limbah di wilayah Peuniti Kota Banda Aceh; e) Pengembangan wisata bahari, yang menarik investor adalah pada wisata alam terutama kriteria *one stop, manageable dan speciality*. Pengembangan wisata alam *one stop*, yaitu obyek-obyek wisata dikembangkan dalam satu kesatuan sistem pariwisata. Dalam sistem ini wisatawan yang datang ke satu wilayah dapat mengunjungi beberapa pilihan obyek wisata dalam jarak yang masih terjangkau. Pengembangan wisata kriteria *manageable* adalah sistem wisata dapat dijalankan oleh suatu manajemen profesional dan memiliki jaringan internasional. Dalam sistem tersebut manajemen dapat bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar dengan kejelasan peran dan benefit masing-masing. Selain itu, pengembangan wisata dengan kriteria *speciality* yaitu obyek-obyek wisata memiliki kekhususan utama namun terkait dengan pilihan obyek-obyek lain yang bersifat melengkapi atau berada dalam satu rangkaian.

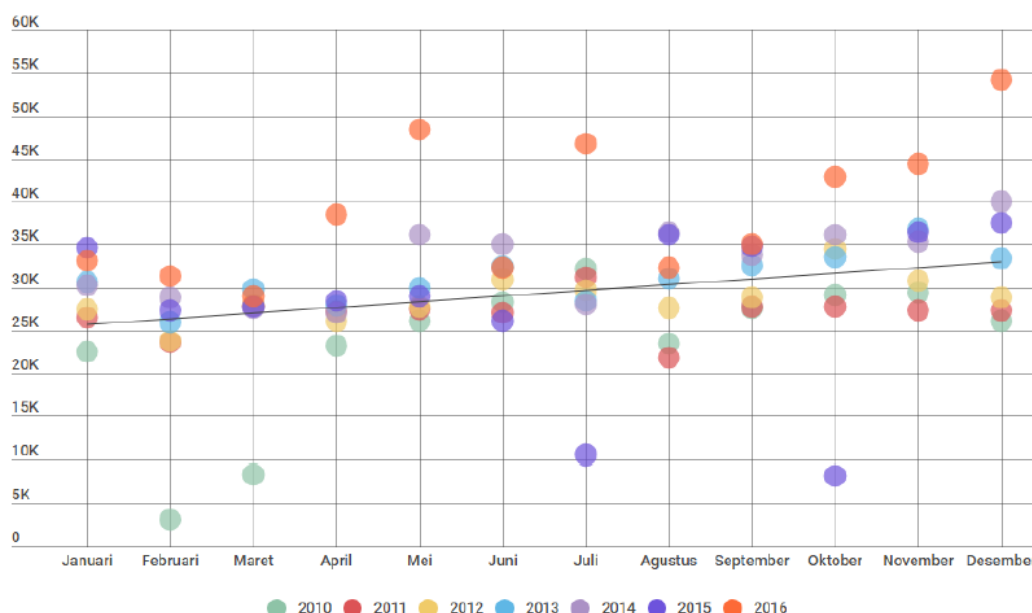
Provinsi Aceh sebagai daerah ujung Pulau Sumatera memiliki dua sisi laut. Sisi Barat adalah Lautan Hindia yang berombak besar, dalam dan umumnya memiliki pantai terjal. Sisi Timur, yaitu laut yang berada di Selata Malaka, termasuk jalur yang padat. Pada sisi Timur ini umumnya memiliki pantai yang landai. Kondisi wisata-wisata bahari di Aceh umumnya masih alami atau belum banyak bersentuhan dengan industri pariwisata. Pantainya relatif bersih dan seringkali tidak terlalu banyak pengunjung. Kondisi ini memang menarik bagi wisata-wisata petualangan yang menginginkan suasana alam yang masih murni. Dengan potensi dasar tersebut pada dasarnya Aceh memiliki peluang wisata bahari laut yang besar. Wisata Bahari Pulau Simeulue dan Sabang di Pulau Weh memiliki potensi wisata yang luar biasa besar dan bagus untuk menjadi pilihan investor,

Tingkat penghunian kamar hotel merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan kunjungan wisatawan ke suatu daerah. Tingkat penghunian kamar hotel bintang pada tahun 2016 di Provinsi Aceh secara keseluruhan mencapai 46,08 persen. Ini berarti bahwa rata-rata dari seluruh kamar yang

dipakai setiap malam pada hotel berbintang di Provinsi Aceh pada tahun 2016 adalah sebesar 46,08 persen.

Tingkat penghunian kamar untuk akomodasi lainnya tahun 2016 lebih rendah daripada tingkat penghunian kamar hotel bintang, yaitu hanya 30,40 persen, artinya bahwa rata-rata dari seluruh kamar yang dipakai setiap malam pada akomodasi lainnya di Provinsi Aceh pada tahun 2016 adalah sebesar 30,40 persen.

Tingkat penghunian kamar hotel bintang selama tahun 2016 paling tinggi terdapat pada bulan Mei yaitu sebesar 56,10 persen, sedangkan pada akomodasi lainnya paling tinggi terdapat pada bulan April yaitu sebesar 34,28 persen. Rata-rata lama menginap tamu asing di hotel pada tahun 2016 adalah selama 1,67 hari, lebih lama dibandingkan rata-rata lama menginap tamu domestik yang hanya 1,58 hari. Rata-rata lama menginap tamu asing paling lama terdapat pada bulan Juni 2016 yaitu selama 5,33 hari dan tamu domestik paling lama pada bulan Mei yaitu selama 1,80 hari.

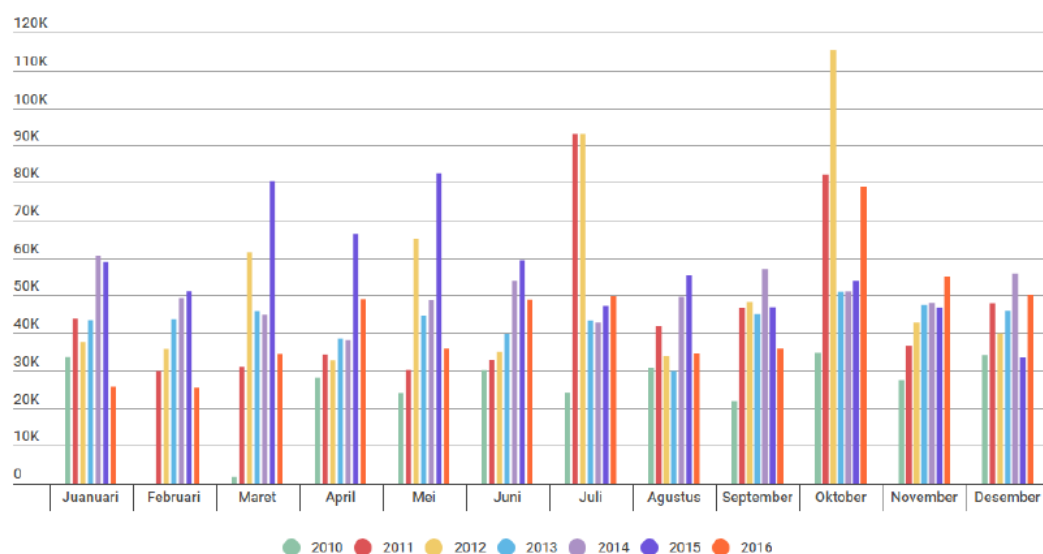


Gambar 4.22 Jumlah Penumpang yang Datang Per Bulan Melalui Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Tahun 2010-2016

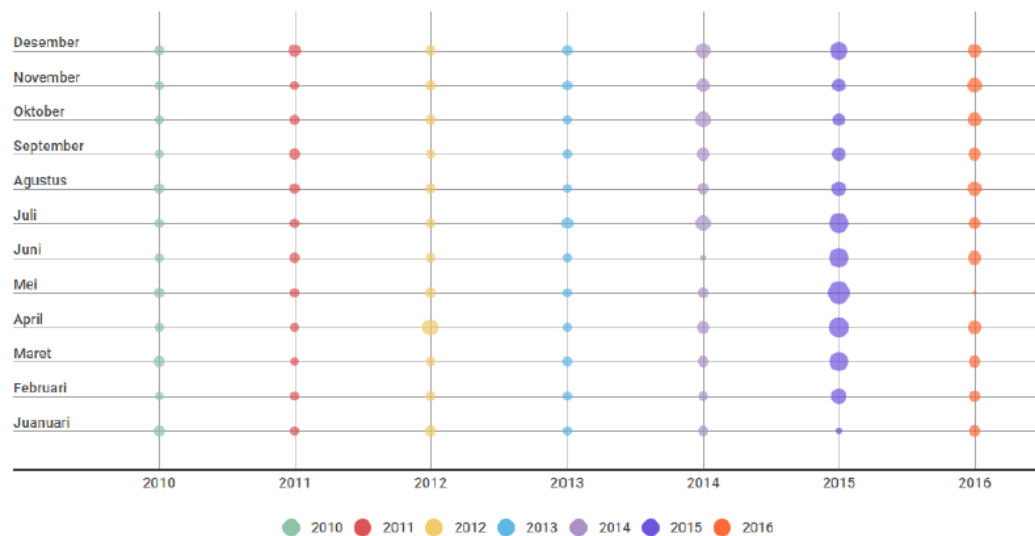
Lalu Lintas penerbangan di Bandara Sultan Iskandar Muda dibedakan atas penerbangan dalam negeri dan luar negeri. Lalu lintas penerbangan dalam negeri

pada tahun 2016 tercatat sebanyak 3.869 pesawat berangkat dan 3.880 pesawat datang. Sedangkan jumlah penerbangan luar negeri yang datang dan berangkat tercatat masing-masing 816 dan 827 penerbangan. Puncak penerbangan terjadi pada bulan Desember yaitu sebanyak 43.855 penumpang datang dan 42.597 penumpang berangkat dari Bandara Sultan Iskandar Muda pada tahun 2016.

Pelabuhan Ulee Lheu dan Balohan adalah pelabuhan terpadat di Provinsi Aceh yang menghubungkan daratan aceh dan Sabang. Jumlah pelayaran yang berangkat dan datang dari Pelabuhan Ulee Lheu-Balohan masing-masing sebanyak 1.296 pelayaran. Puncak pelayaran di Ulee Lheu dan Balohan terjadi pada bulan Juli yaitu sebanyak 264 pelayaran dengan total penumpang yang diangkut sebanyak 90.655 orang.



Gambar 4.23 Jumlah Barang yang Dimuat Per Bulan Melalui Terminal Domestik Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Tahun 2010-2016

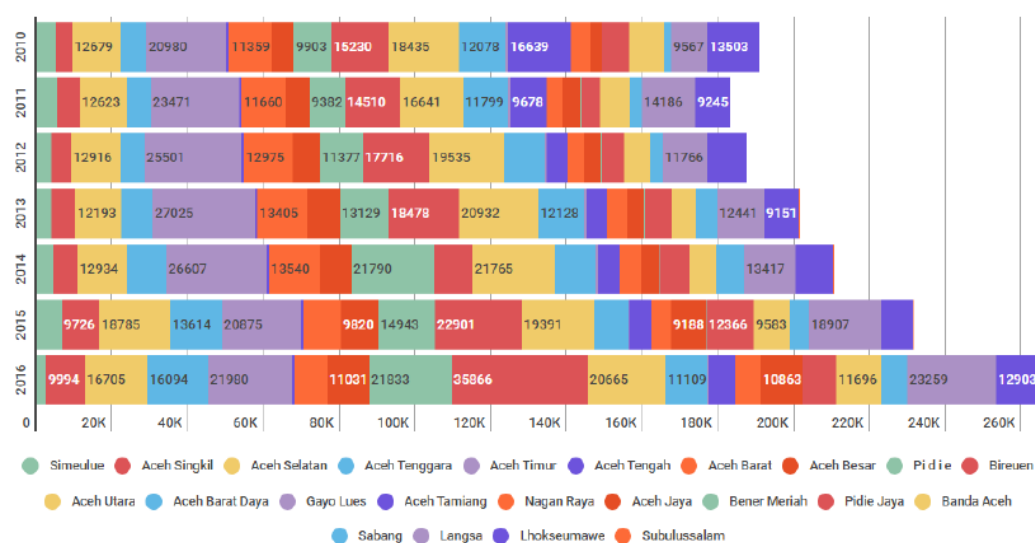


Gambar 4.24 Jumlah Barang yang Dimuat POS Per Bulan Melalui Terminal Domestik Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Tahun 2010-2016

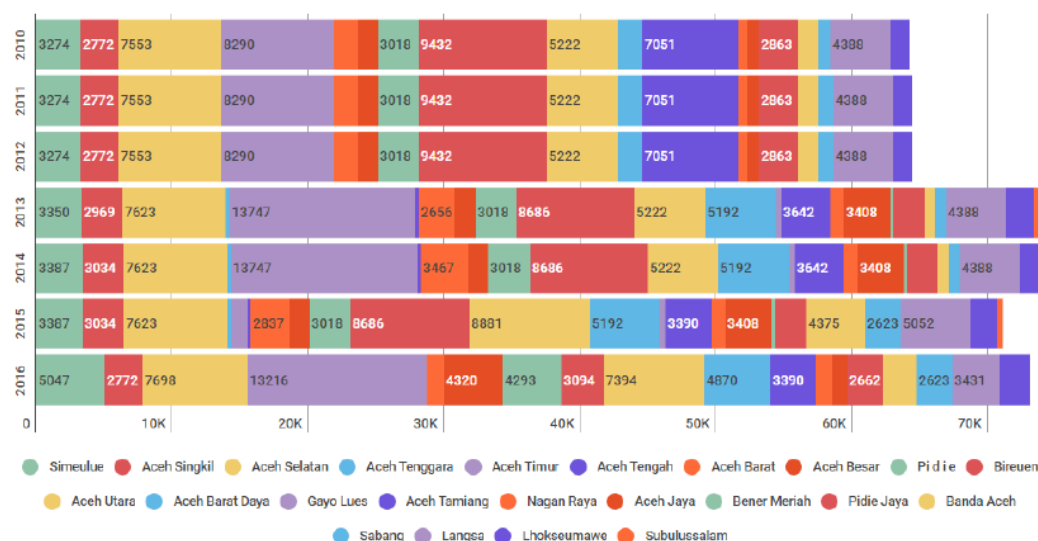
f) Sektor perikanan dan kelautan. Sumber daya bahari juga membuat potensi di subsektor perikanan dan kelautan cukup potensial. Provinsi Aceh merupakan salah satu produsen penting ikan di Indonesia. Ikan laut memiliki pasar yang luas, walaupun standar mutu pada pasar internasional termasuk tinggi, namun potensi laut yang besar masih dapat diupayakan lebih jauh. Pasar domestik juga memiliki potensi yang besar, karena terdapat kecenderungan perubahan pola konsumsi di masyarakat, yaitu kesadaran mengkonsumsi ikan semakin meningkat. Sedangkan, produksi perikanan tangkap di Aceh masih memiliki kemungkinan untuk ditingkatkan, walaupun pada tingkat yang berbeda antara pesisir barat dan timur. Dengan demikian, Aceh berpeluang besar untuk mengisi peluang pasar tersebut, mengingat ketersediaan sumber daya laut yang besar serta posisi pada jalur perdagangan yang strategis. Hal tersebut semakin diperkuat dengan hadirnya berbagai pelabuhan yang sudah memiliki infrastruktur yang baik seperti keberadaan *storage* dengan kapasitas cukup besar



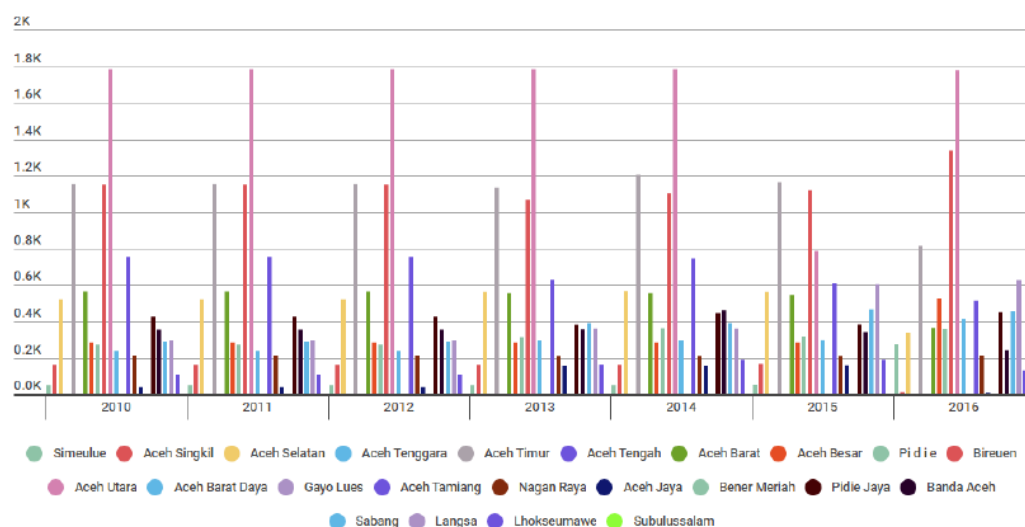
Gambar 4.25 Produksi Budidaya Perikanan Menurut Kabupaten/Kota (Ton) Tahun 2010-2016



Gambar 4.26 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan Menurut Kabupaten/Kota (Ton) Tahun 2010-2016



Gambar 4.27 Jumlah Petani/Nelayan dan Produksi Perikanan Laut Menurut Kabupaten/Kota (Orang) Tahun 2010-2016



Gambar 4.28 Jumlah Kapal Motor Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2016

g) Adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri Aceh (KIA). Keterangan dari Ketua Badan Investasi dan Promosi Aceh, selalu giat dalam menyelenggarakan berbagai strategi dan kebijakan agar investasi di Aceh meningkat dan berjalan semakin berkelanjutan di masa-masa yang akan datang. Adapun berbagai program dan strategi senantiasa dilakukan sampai dengan tahun 2016 yaitu diantaranya: 1) Mengeluarkan Pergub Penanaman Modal No. 96 tahun

2014 yaitu tentang Rencana Umum Penanaman Modal, kemudian adanya Qanun tentang penanaman modal; 2) Aceh sudah memiliki dan membangun KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang akan dimanfaatkan sebagai lahan/lokasi khusus yang memiliki otoritas sendiri, ada perlakuan sendiri, adanya insentif bagi investasi. KEK ini dibangun di daerah bekas kawasan industri di PT. Arun LNG Lhokseumawe yang kiranya dapat memudahkan segala proses kegiatan investasi karena mempunyai otoritas mandiri dan bisa bebas biaya masuk dan biaya keluar serta dapat memberikan insentif bagi yang berinvestasi. KEK ini juga berguna untuk meminimalisir adanya keluhan-keluhan tentang gangguan sosial karena sudah terlokalisir keamanannya sendiri. Sehingga setiap urusan berhubungan langsung dengan pihak manajemen/pengelola kawasan tersebut. Adanya energi listrik yang cukup sekitar 500 MW. Dan di daerah KEK ini juga dekat dengan bandara dan pelabuhan. Sedang dibangun juga konstruksi energi dengan ketersediaan energi yang cukup; 3) Melakukan upaya promosi investasi yang cukup gencar. Ketua Bainprom Aceh pernah melakukan promosi sampai ke Moscow, ikut festival ke Inggris, Amerika untuk mengkampanyekan tentang potensi kopi berkelas yang ada di Aceh, hal ini untuk menjembatani petani kopi Aceh dengan pasar internasional. Sekarang produk kopi Gayo sudah berhubungan langsung dengan produsen-produsen kopi yang ada di luar negeri. Promosi butuh biaya besar; 4) Kawasan Industri Lampulo Banda Aceh. Ada 100 hektar yang disiapkan untuk industri perikanan kita juga melihat bahwa ini tidak cukup hanya pemerintah provinsi yang bergerak tapi harus ikut juga perlu pemerintah kabupaten/kota.

Namun pemerintah provinsi tidak bisa langsung berurusan dengan kabupaten/kota karena sifatnya sangat otonom sekarang. Karena pemerintah kabupaten/kota mempunyai rencana strategi sendiri dan tidak secara hirarki berhubungan dengan pemerintah provinsi. Membangun 4 Kawasan Perhatian Investasi (KPI) yaitu: Tamiang, Aceh Selatan, Aceh Barat dan Aceh Tenggara. Semacam fokus untuk wilayah-wilayah tertentu yang memiliki karakteristik yang hampir sama memiliki sumber daya yang sama pula. Jadi kita dorong untuk

mendukung investasi. Menyikapi program MP3KE (SBY) mendorong investasi di daerah-daerah.⁶²

Sehubungan dengan berbagai faktor pendukung investasi di Aceh banyak didominasi oleh faktor sumber daya alam yang potensial meliputi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

Adapun penelitian yang mendukung akan faktor tersebut diantaranya adalah Maria S.M Purba dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pemerintah daerah perlu melakukan penanaman modal yang baik dengan memperhatikan potensi daerah yang ada di daerahnya. Pengembangan potensi daerah melalui investasi harus di arahkan pada sektor unggulan/prioritas daerah itu sendiri.⁶³

Penelitian lainnya yang berkaitan adalah penelitian Ahmad Heryawan dengan judul Analisis Ekonomi dan Kebijakan Sumber daya Alam menghasilkan bahwa pada sektor pertanian, selama periode 2001 – 2011 menunjukkan kinerja ke arah yang lebih baik. Sedangkan, pada sektor perikanan cenderung berfluktuasi. Selanjutnya pada kinerja output pertanian memiliki potensi perbaikan sebesar 8,75% dari kondisi eksisting. Sedangkan pada kinerja output perikanan memiliki potensi perbaikan lebih besar yaitu sebesar 9,5% ini membuktikan bahwa sumber daya alam yang potensi mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.⁶⁴

Dalam penelitian Rizky P. Lubis dkk juga menyatakan realisasi investasi di Indosnesia masih di dominasi oleh investor asing dimana sektor padat modal seperti industri pertambangan adalah fokus utama. Namun untuk memperkuat peran investor dalam ekonomi nasional, harus di arahkan ke sector perkebunan karena memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja dan perdagangan yang positif.⁶⁵

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi investasi itu salah satunya adalah ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas. Jika hanya potensi sumber daya

⁶² Iskandar Zulkarnain, Ketua Bainprom Provinsi Aceh Tahun 2016, Wawancara pada 26 Juni 2018, Pukul 14.00 Wib.

⁶³ Mariah SM Purba, Jurnal Hukum Samudra Keadilan.....*Ibid.*

⁶⁴ Ahmad Heryawan, *Analisis ekonomi dan kebijakan Sumber Daya Alam*, Tesis, (Bogor: Sekolah Pasaca Sarjana IPB, 2014)

⁶⁵ Rizky P. Lubis dkk, Jurnal Bisnis & Manajemen.....*Ibid.*

alam dan jumlah penduduk yang besar saja tak cukup untuk menarik investor. Potensi itu harus dibarengi ketersediaan tenaga kerja berkualitas, terampil, kreatif, dan murah yang dikelola dengan baik.⁶⁶ Sehingga sumber daya alam yang melimpah belum tentu menjadi daya tarik investor jika dalam pengelolaan kelembagaan pemerintah tidak berjalan secara bersih (*good governance*).

Penelitian lain yang tidak sejalan dengan pembahasan ini diterangkan oleh Mariah S.M. Purba untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor.⁶⁷ Penelitian ini mengungkapkan bahwa walaupun potensi pada sektor unggulan daerah cukup maksimal dan memadai tetapi tidak ditindaklanjuti dengan penciptaan kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor maka investasi tidak akan berjalan seperti yang diharapkan.

Berbagai faktor penghambat dan faktor pendukung memperkuat teori John Dunning dimana teori ini menjelaskan bahwa untuk terjadinya investasi diperlukan 3 (tiga) pilar utama, yaitu: *Ownership* (kepemilikan modal), *Location Determinant* (lokasi tempat tujuan investasi) dan *Internalization* (internalisasi). Ketiga pilar ini dirangkai dalam sebuah singkatan, yaitu *O-L-I theory*. *Ownership* adalah faktor kepemilikan modal dan motivasi utama yang mendorong sebuah perusahaan berinvestasi di luar negeri adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. *Location Determinant* berhubungan dengan suatu potensi alami pasar yang bersangkutan. Faktor lingkungan termasuk dukungan sumber daya alam, sumber daya lingkungan, pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial, pertumbuhan ekonomi, biaya tenaga kerja, penegakan hukum, kestabilan politik, institusi pemerintahan, kebijakan pemerintah, peraturan pemerintah, dan sistem perpajakan yang merupakan pilar penentu yang ikut memberi pengaruh besar bagi investor dalam membuat keputusan investasi, dan yang terakhir *Internalisasi*. Pilar internalisasi ini berkaitan dengan rasionalisasi mengapa investor tersebut

⁶⁶ Venti Eka Satya, *Kajian Singkat ...Ibid.*

⁶⁷ Mariah S.M. Purba, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015.

menanamkan modalnya di tempat lain dimana perusahaan asal berhak mengontrol perusahaannya di tempat investasi berlangsung.⁶⁸

Beberapa penelitian yang pernah mengkaji tentang strategi investasi yaitu Ahmad Ma'ruf yang menghasilkan beberapa kebijakan strategi untuk menarik penanam modal maupun pengembangan modal di daerah diantaranya dengan cara: a) memberikan kemudahan dan pemberian insentif; b) menyusun Perda sebagai payung hukum dalam kebijakan; c) optimalisasi instansi perizinan terpadu melalui penyediaan data dan informasi percepatan perizinan; d) optimalisasi aset daerah dalam penyediaan lahan; e) optimalisasi program *update* data dan bimbingan teknis; f) meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana; g) pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi.

Harikah Maya Sari, dkk dengan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan adalah pelaksanaan promosi, memperbaiki kualitas pelayanan, serta meningkatkan capaian investasi serta melihat faktor yang mempengaruhi peningkatan iklim investasi di Kota Samarinda.

2. Eksistensi Faktor Syariat Islam dan Faktor Keamanan

Eksistensi Syariat Islam di Aceh dikarenakan dalam sejarahnya yang cukup panjang, masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat Aceh amat tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama karena ulamalah yang menjadi ahli waris Nabi. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan, dan dilestarikan dalam kehidupan masyarakat (hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat), yang kemudian diakumulasikan lalu disimpulkan menjadi "*Adat bak Poteumourehom, Hukom bak Syiah Kuala Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana*", yang artinya "Hukum adat di tangan pemerintah dan hukum syariat

⁶⁸ Azhari Yahya, *The Location Determinant* ... h. 11-13

ada di tangan ulama”. Ungkapan ini merupakan pencerminan dari perwujudan Syariat Islam dalam praktek hidup sehari-hari bagi masyarakat Aceh. Kemudian Aceh dikenal sebagai Serambih Mekkah karena dari wilayah paling barat inilah, kaum muslimin dari wilayah lain di Nusantara berangkat ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Untuk itu, maka perlu dibentuknya suatu dinas yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Syariat Islam dalam suatu susunan organisasi dan tata kerja Dinas Syariat Islam.

Syariat Islam bukan hal baru, karena sejatinya masyarakat Aceh telah menerapkan syariat Islam sejak Islam pertama sekali masuk dan berkembang di Aceh. Syariat Islam sudah diterapkan sejak Aceh masih dalam bentuk kerajaan. Dalam penerapannya Ulama merupakan ujung tombak pelaksanaan hukum tanpa harus meminta persetujuan dari penguasa. Masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi ajaran agama Islam, teguh dalam aqidah dan taat menjalankan Syariat Islam. Penerapan Syariat Islam tersebut berlandaskan pada hukum Al-Qur'an dan Hadist yang telah mengatur segala aspek dari hal-hal yang telah diwajibkan dan dilarang Allah SWT. seperti kewajiban dalam aspek beribadah, beraqidah, berakhlaktul-karimah, membela Islam jika terdapat individu atau sekelompok individu melecehkan agama Islam. Adapun larangannya seperti berzina, berjudi, membunuh, minum-minuman keras, mencuri, yang bagi pelanggarnya mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya atau di denda seperti hukuman rajam bagi pelaku zina dan denda dengan membayar diyat oleh pelaku pembunuhan.

Syariat Islam sebagai salah satu faktor kebijakan pemerintah Aceh dalam pelaksanaannya mengalami berbagai problematika tersendiri. Dalam berinvestasi berbagai isu di sebarakan bahwa Syariat Islam menjadi penghambat investasi. Namun pada kenyataannya model penerapan syariat Islam dalam Qanun hukum Jinayat yang membuat para calon investor menjadi enggan berinvestasi ke Aceh. Ini disebabkan adanya hukuman cambuk dan rajam didepan khalayak umum menjadi perhatian serius bagi masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Pada hakikatnya tujuan dari syariat Islam itu adalah sebagai ajaran Allah yang lengkap dan sempurna yang menjelaskan segala aturan aturan kehidupan yang tidak

terpisahkan dari kehidupan umat manusia secara universal. Dengan syariat Islam tatanan kehidupan akan sempurna karena mencakup kemaslahatan sosial, hukum, ekonomi dan moral.

Secara umum informan yang di wawancarai menjelaskan Syariat Islam sama sekali tidak menjadi penghambat investasi. Namun dari pengembangan hasil wawancara mendalam dapat di ketahui hal hal yang tersirat dari penjelasan para informan terutama para pelaku usaha menyebutkan adanya keengganan dari pihak pengusaha untuk bersinggungan dengan penerapan syariat Islam. Dalam artian hal hal langsung yang bersentuhan dengan qanun hukum jinayah membuat para investor mengambil sikap menahan sementara investasinya untuk Aceh. Kaitan hukum jinayah ini dengan investasi yang dilakukan menurut analisa peneliti cukup besar tentunya melibatkan tim pengusaha, sehingga investor khawatir dengan kehadiran mereka secara tidak sengaja akan melanggar Qanun tersebut. Walaupun pihak pemerintah daerah memastikan bahwa jika investor asing non muslim dapat diberlakukan hukum nasional.

Hakikat dan tujuan awal dari pemberlakuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila *maqashid asy-Syariah* diimplementasikan dalam 5 unsur pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. *Maqashid asy-Syariah* mengandung 4 aspek yaitu: 1) tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat; 2) syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami; 3) syari'at sebagai suatu hukum taklif yang harus dilaksanakan; 4) tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. Dalam rangka pemahaman pembagian 4 aspek ini akan meliputi tiga tingkatan *maqashid* yaitu *maqashid dharuriah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*.⁶⁹

Berkaitan dengan investasi sangat erat kaitannya dengan prinsip *maqashid Hifzul Al-Maal* (menjaga harta benda). Dengan demikian setiap transaksi muamalat memiliki landasan epistemologinya yang bersumber pada penalaran

⁶⁹ Syahrizal Abbas, *Syari'at islam di Aceh Rancangan Metodologis dan Penerapannya*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at islam Provinsi Aceh, 2009), h. 34-35.

maqashis syariah. Tujuan syariat dalam transaksi muamalat adalah menciptakan kesejahteraan umat manusia dengan menyeimbangkan peredaran harta benda antara kaum kaya dan kaum miskin secara berkeadilan dan seimbang.⁷⁰

Adanya hambatan dalam penerapan syariat Islam di Aceh di ungkapkan oleh Eka Sri Mulyani dengan judul *Filosofi Pendidikan Berbasis Syariat Dalam Educational Network* menjelaskan Sejauh ini, penerapan Syariat Islam belum menghasilkan perubahan ke arah yang lebih positif dalam tata kehidupan masyarakat. Penerapan Syariat Islam dilakukan ketika Aceh berada dalam pusaran konflik, sehingga kelancaran pelaksanaannya mengalami gangguan yang cukup serius, bahkan isu Syariat Islam pernah berada di bawah bayang-bayang isu konflik. Dalam penerapan Syariat Islam di Aceh terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki secepatnya, antara lain: a) terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu menyusun konsep-konsep dan formula syariat Islam yang hendak diaplikasikan; b) Penegasan hukum terhadap permasalahan perlindungan anak dalam Syariat Islam; c) Pemahaman dan pengertian yang masih sangat minim tentang pola penerapan yang Syariat Islam yang baik dan benar, baik di tingkat aparaturnya maupun di masyarakat Aceh; d) Ketidakseriusan dan kurangnya sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan Syariat Islam yang seharusnya terhadap masyarakat oleh pemerintah melalui Dinas Syariat Islam terkait sehingga niat baik menegakkan hukum Islam tidak melanggar hukum dan norma lainnya yang berlaku di negara ini; e) Status, keterampilan dan “*code of conduct*” polisi syariat itu sendiri. Kadangkala seringkali polisi syariat tidak berdaya ketika berhadapan dengan pelaku syariat yang kuat secara struktural dan finansial, serta sering menimbulkan kekecewaan masyarakat. Selain itu, penerapan Syariat Islam secara menyimpang dan tidak benar telah mengakibatkan munculnya beberapa hal berikut seperti: a) Mengemukanya konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat; b) memudarnya kepercayaan masyarakat kepada elit politik setempat; c) Munculnya

⁷⁰ Moh. Mufid, *MAqashid Ekonomi Syariah, Tujuan dan Aplikasi*, (Malang: empat Dua Media, 2018), h. 23.

resistensi masyarakat terhadap berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah, terutama regulasi yang terkait dengan penerapan syariat Islam.

Faktor keamanan merupakan variabel yang sangat penting dalam iklim investasi. Dimana para investor menginginkan adanya jaminan keamanan bagi keberlangsungan investasi di suatu daerah. Pada periode 2010-2016 dinamika intensitas kasus ketidakamanan dan kekerasan di Aceh terlihat paralel dengan momentum persaingan politik lokal yang akan terjadi. Untuk diketahui tahun 2012 merupakan tahun dilaksanakannya Pilkada di Aceh. Beberapa peristiwa kekerasan terjadi di akhir 2011 dan di awal 2012, ini menunjukkan adanya operasi khusus yang membuat eskalasi ketidakamanan di Aceh menjelang Pilkada. Penundaan Pilkada di Aceh sempat terjadi beberapa kali karena masalah internal pada Dewan Legislatif Aceh Tingkat Provinsi. Ini menunjukkan bahwa stabilitas politik di Aceh menjelang Pilkada cenderung “menghangat”. Namun akhirnya setelah melalui negosiasi panjang pada tanggal 09 April 2012 Pilkada berlangsung aman dan damai.

Setelah tahun 2012 kondisi keamanan di Aceh berangsur-angsur semakin membaik dan kondusif. Jikapun ada masalah keamanan lebih cenderung kepada sifatnya gangguan sosial kepada masyarakat yang berdampak pada timbulnya biaya tidak resmi selain pajak. Pungutan liar cenderung merupakan masalah hambatan utama terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi di Aceh. Setidaknya gangguan keamanan berupa gangguan sosial masyarakat merupakan dampak dari berbagai efek sosial masyarakat dan ekonomi pasca konflik berkepanjangan. Sisa sisa konflik di Aceh masih terus menimbulkan dampak yang mendasar pada lembaga-lembaga ekonomi, sosial, dan politik yang menjadi landasan pertumbuhan. Dampak tersebut mempengaruhi bagaimana perekonomian berfungsi dalam masa pasca konflik. Walaupun sudah relatif aman tetap masih ditemukan adanya biaya tidak resmi alias pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Pungli ini yang masih meresahkan dan berakibat besar bagi keberlanjutan berjalannya investasi.

Dari beberapa informan yang telah peneliti wawancarai mengungkapkan adanya keengganan untuk melakukan investasi di Aceh karena praktik pungli

yang berlapis dari pihak pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta pihak non pemerintah. Kekhawatiran akan keamanan dan persepsi negative di luar Aceh nampaknya faktor yang kuat untuk menghalangi investasi.

Menurut Ikrar dalam penelitiannya, konflik keamanan yang melanda Aceh pasca perundingan MoU Helsinki terjadi lebih banyak bersifat horizontal, khususnya yang terjadi antara mantan anggota GAM (Gerakan Aceh Merdeka) atau kombatan GAM itu sendiri ketimbang konflik yang bersifat vertikal, yaitu konflik antara GoI (Government of Indonesia)-GAM yang sifatnya sangat minim. Di berbagai wilayah kita lihat, di Bireun dan wilayah lain, konflik itu lebih banyak terjadi di antara mantan anggota GAM itu sendiri, misalnya perebutan posisi sekretaris daerah yang kadang-kadang dikatakan tidak berasal dari wilayah tersebut padahal sebenarnya berasal dari wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan konflik kepentingan antar mantan anggota GAM itu sendiri yang memang sangat marak, khususnya di wilayah-wilayah yang boleh dikatakan “kaya” di mana kelompok independen, dalam hal ini mantan anggota GAM, memenangi pilkada pada Desember 2006 yang lalu. Sedangkan, konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan GAM itu biasanya lebih banyak bersifat politik ketimbang bersifat fisik, misalnya perbedaan pandangan antara mantan anggota GAM yang membentuk partai GAM pada bulan Oktober 2007 dengan pemerintah Indonesia; dan juga perbedaan-perbedaan mengenai isu pemekaran Aceh. Konflik yang terjadi ini banyak bersifat politik dan administratif dan juga terkait kebijakan ekonomi ketimbang fisik atau benturan seperti pada masa lalu.

Yang paling berat bagi pemerintahan Aceh sekarang, khususnya di wilayah-wilayah yang merupakan basis GAM adalah bagaimana membuat mantan-mantan kombatan GAM yang tergabung dalam KPA itu memiliki *income generating*, yaitu suatu keahlian dan kemauan untuk menghasilkan uang. Sebetulnya, berbagai upaya dari pemerintah cukup banyak, misalnya BLK (Balai Latihan Kerja) yang sudah banyak didirikan di Aceh. Tantangannya, menurut Ikrar, adalah bagaimana setelah mereka dilatih, mereka juga didukung dari segi pendanaan dan fasilitas lainnya sehingga mereka bisa mandiri secara ekonomi dan tidak lagi melakukan penarikan-penarikan ilegal, seperti pajak nangroe tersebut.

Tantangan bagi keamanan di Aceh bukanlah tantangan yang berdiri sendiri. Ia juga bukan lagi persoalan gerakan untuk memerdekakan diri atau gerakan bersenjata untuk memerdekakan diri. Ia sekarang sudah terkait dengan persoalan-persoalan lain menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Ikrar, terdapat momentum-momentum penting dan menentukan apakah Aceh ini akan aman atau tidak, yaitu tahun 2009 dan 2011.

Di samping itu, mantan anggota GAM pada umumnya hanya lulusan SD atau bahkan tidak lulus SD. Itu sebabnya mereka sangat sulit untuk terserap ke dalam birokrasi pemerintahan atau organisasi TNI-Polri yang memang membutuhkan persyaratan tertentu untuk menjadi bagian dari birokrasi atau TNI-Polri tersebut. Hingga saat ini, mantan-mantan anggota GAM itu baru terserap dalam BRR (Badan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi) dan yang terserap itu sangat minim jumlahnya. Mereka adalah tokoh-tokoh politiknya GAM, seperti Kamaruzzaman yang menjadi sekretaris BRR. Apa yang terjadi sekarang adalah kebanyakan anggota KPA itu menjadi preman, baik itu preman pasar, preman jalanan dan preman-preman dalam aksi-aksi yang terkait dengan pilkada ataupun yang lainnya. Hal inilah yang menurut Ikrar akan menjadi api dalam sekam dan menjadi sesuatu yang menimbulkan *snowballing effect* yang akan mengganggu keamanan di Aceh.⁷¹

Eksistensi keamanan berdasarkan indeks keamanan investasi Indonesia secara kontekstualisasi keamanan investasi menurut Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas Deputy Politik, Hukum, dan Keamanan mengungkapkan praktik pungli saat ini menjadi perhatian dari Pemerintahan Joko Widodo. Hal ini dikarenakan praktek pungli membuat *cost* produksi dan perusahaan semakin tinggi dan membuat investor enggan menanamkan modalnya karena ingin berusaha saja sudah ditarik biaya. Akuntabilitas lembaga juga memberikan jaminan kepada investor atas regulasi yang konsisten dan menghilangkan praktek suap. Penegakan Hukum dan kestabilan politik juga akan membuat kestabilan sosial, yang akan meredam konflik horizontal dan vertikal.

⁷¹ Ikrar Nusa Bakti, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, 2017, www.politik.lipi.go.id/10-problematika-keamanan-di-aceh.

Stabilitas sosial mencerminkan adanya keadilan sosial dan kecilnya ketimpangan ekonomi. Stabilitas politik di daerah juga terkait dengan bagaimana penguasa lokal saling bersaing dalam kontestasi menguasai sektor-sektor bisnis. Kontestasi penguasa lokal berdampak pada semakin tingginya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme di daerah, hal ini karena pemerintah daerah akan cenderung memberikan kemudahan proyek bagi pengusaha-pengusaha yang menguntungkan penguasa lokal. Tingkat resiko investasi di daerah juga di tentukan bagaimana integritas kepala daerahnya⁷²

Pembahasan akan adanya ketidaknyaman dalam proses investasi sejalan dengan hasil penelitian Lu Sudirman menyatakan faktor yang berpengaruh dalam penanaman modal di Indonesia adalah faktor keamanan yang masih berkaitan dengan desentralisasi itu sendiri belum disentuh secara baik oleh pemerintah daerah.⁷³

Hasil penelitian dari Anifatul Hanim dan Ragimun meyebutkan bahwa faktor dominan sebagai penentu minat investasi bagi investor di Kabupaten Jember yang tertinggi yaitu: (1) faktor pertumbuhan ekonomi; (2) biaya pelayanan birokrasi; (3) kebijakan pemerintah; (4) kelembagaan; (5) gangguan keamanan.⁷⁴

Adanya pungutan liar alias biaya tidak resmi sesuai dengan hasil penelitian Mudrajat Kuncoro menyebutkan bahwa untuk meningkatkan daya tarik investasi, tiga hal utama yang diinginkan investor dan pengusaha: (1) penyederhanaan sistem dan perijinan; (2) penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih; dan (3) transparansi biaya perijinan. Tumpang tindih peraturan pusat dan daerah, yang tidak hanya menghambat arus barang dan jasa tapi juga menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, perlu dieliminasi. Barangkali deregulasi dan koordinasi berbagai peraturan daerah dan pusat yang menghambat dunia bisnis merupakan “*starting point*”. Realitas besarnya pungutan liar yang ada di DIY meskipun dianggap masih dalam taraf wajar, menurut pelaku usaha, menunjukkan lemahnya sistem

⁷² Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas, *Indeks Keamanan*,... *Ibid.*

⁷³ Lu Sudirman, Iklim Investasi di Indonesia, Jurnal SELAT....*Ibid.*

⁷⁴ Anifatul Hanimdan Ragiman, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Investasi di Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jurnal Kajian ekonomi dan keuangan, vol 14. No. 3 tahun 2010.

pengawasan terhadap birokrasi dan lemahnya sanksi terhadap perilaku birokrasi yang merugikan dunia usaha.⁷⁵

Ini sejalan yang terjadi di Aceh dimana birokrasi pemerintah daerah masih menyulitkan pihak investor dengan adanya gangguan keamanan berupa pungli berlapis. Dari beberapa jurnal tersebut menunjukkan urgensi situasi dan kondisi keamanan sebuah negara daerah terhadap pengembangan investasi.

Eksistensi faktor Syariat Islam dan keamanan dalam berinvestasi dimaknai akan keberlangsungan dari tujuan syari'ah Islam itu sendiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terbagi atas lima faktor, yaitu: Pertama, menjaga agama mereka (*hifdzu al-diin*); Kedua, menjaga nyawa (kehidupan) mereka (*hifdzu al-nafs*); Ketiga, menjaga akal (pikiran) mereka (*hifdzu al-'aql*); Keempat, menjaga keturunan (generasi) mereka (*hifdzu al-nasl*); dan Kelima, menjaga harta benda mereka (*hifdzu al-mal*). Perlindungan terhadap kelima faktor tersebut, bukan hanya kepentingan individu, tetapi juga merupakan penjaminan terhadap kepentingan publik. Pemerintah (penguasa) merupakan pihak yang dibebani Allah SWT untuk mengontrol dan melindungi kepentingan publik dengan otoritas dan beragam sarana yang dimilikinya.

Ibnu Khaldun, menjadikan syari'ah sebagai variabel terikat di dalam teori "Model Dinamika", tetapi syari'ah hanya memberikan prinsip-prinsip dasar yang dibutuhkan untuk menyusun apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah seiring perubahan tempat dan waktu. Syari'ah harus diimplementasikan, dan akan terlaksana jika kaum ulama tidak terlalu liberal atau tidak terlalu kaku dan realistik. Implementasi syari'ah tidak dapat diwujudkan jika kekuasaan politik menjadi sekuler dan korup serta tidak bersedia menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Apabila masyarakat terlalu miskin, acuh, dan tertindas, maka mereka juga akan menggunakan pengaruh yang ada. Jadi, syari'ah tidak akan efektif bila pemerintah dan masyarakat (termasuk kaum ulama) tidak menjalankan perannya dengan tepat. Jadi, tujuan utama syari'ah adalah mendidik setiap manusia, memantapkan keadilan dan merealisasikan keuntungan bagi setiap

⁷⁵ Kuncoro Mudrajat, Daya Tarik Investasi dan Pungli di DIY, Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.10 No 2. 2005.

manusia di dunia maupun di akhirat. Syari'at mengatur setiap aspek kehidupan umat muslim, baik politik, ekonomi dan sosial dengan menjaga keyakinan, kehidupan akal, dan kekayaan mereka.

Oni Sahroni dan Adiwarman, dalam bukunya *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, menguraikan bahwa tujuan syariah secara umum dari ketentuan praktik ekonomi syariah di antaranya sebagai berikut.⁷⁶ Pertama, setiap kesepakatan harus jelas. Untuk merealisasikan ini, syariat Islam memberlakukan ketentuan *tautsiq* (pengikatan) dalam akad ekonomi syariah, seperti ketentuan bahwa setiap transaksi harus tercatat (*al-kitabah*), disaksikan (*isyhad*) dan boleh bergaransi. Kedua, setiap kesepakatan bisnis harus adil. Implementasi prinsip keadilan ini dengan diberlakukan dalam bentuk kewajiban pelaku akad untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Ibn Asyur menjelaskan bahwa adil dalam bisnis adalah mengelola bisnis dengan tanpa menzalimi mitra bisnisnya, baik dengan cara komersil atau nonkomersil. Ketiga, komitmen dengan kesepakatan. Menjaga komitmen menjadi aspek penting dalam berbisnis. Itu sebabnya, syariat sangat memperhatikan hal ini. Karena setiap akad berisi hak dan kewajiban setiap peserta akad. Sementara setiap kesepakatan bisnis akan berhasil itu ditentukan oleh komitmen peserta akad dalam memenuhi setiap kesepakatan akad. Keempat, melindungi hak kepemilikan. Para fukaha sepakat bahwa mengeksploitasi harta orang lain dengan cara yang batil itu diharamkan. Oleh karena itu, Allah Swt memberikan hukuman atas kejahatan terhadap harta (*ta'addi 'ala amwal*). Dengan adanya sanksi tersebut, hak kepemilikan setiap orang baik Muslim maupun nonmuslim itu dilindungi Islam. Kelima, menjaga distribusi harta tetap stabil. Dalam Islam harta tidak boleh ditimbun, tetapi harus didistribusikan agar dapat dinikmati masyarakat baik dalam bentuk konsumsi maupun distribusi. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan akad-akad yang berorientasi bisnis (*mua'awadhah*) atau akad sosial (*tabaru'*) agar setiap harta bisa berpindah tangan dari satu pihak ke pihak lainnya. Keenam, menjaga investasi harta. Hal ini karena dalam perspektif ekonomi, jika harta tidak diinvestasikan, ia menjadi seonggok

⁷⁶ Oni Sahroni dan Adiwarman A Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 68.

harta yang tidak berguna. Islam tidak menghendaki adanya tindakan penimbunan harta yang sia-sia. Di satu pihak Islam memberikan disinsentif terhadap *saving* yang tidak diinvestasikan, tetapi di pihak yang lain Islam memberikan insentif untuk melakukan investasi. Konsekuensi logis dari investasi ini adalah munculnya peluang untuk untung dan rugi. Ketujuh, menjaga keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Prinsip sesuai dengan kaidah *al-kharaj bi al-dhamaan* yang mana dapat dipahami bahwa suatu keuntungan (*al-ghunmu*) atas modal itu sah didapatkan jika pemilik modal telah menghadapi risiko (*al-ghurmu*) atas modalnya juga. Islam menjadikan keduanya harus seimbang dan sinergi. Itu sebabnya, *al-kharaj* tidak bisa didapatkan kecuali dengan adanya *dhaman*.⁷⁷

Dengan demikian, aktivitas ekonomi maupun bisnis investasi dalam Islam merupakan bentuk ibadah. Oleh karena itu, prinsip utamanya adalah apa yang diusahakan harus halal lagi *thayyib* pun harus terhindar dari unsur ribawi serta tidak oleh berlebihan (*israf*). Artinya, moderat dalam melakukan konsumsi untuk mengurangi timbulnya kelangkaan dan memenuhi kewajiban kepada masyarakat dengan membayar zakat. Demikian pula, bisnis investasi pun harus terhindar dari unsur *khiyana*, *tanajush*, *gharar*, dan semua bentuk dan jenis spekulatif lainnya. Jadi, agar sesuai dengan aturan dan norma Islam, lima unsur dan prinsip Islam yang harus diterapkan dalam perilaku investasi, yaitu: a) tidak ada transaksi keuangan berbasis riba; b) pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat; c) pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam (haram); d) penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (transaksi yang tidak jelas); e) penyediaan takaful (asuransi Islam).⁷⁸

Jika persepsi masyarakat pada umumnya menganggap bahwa syari'at Islam model Aceh hanya menyelesaikan masalah yang sangat domestik yaitu khalwat, judi, miras, jilbab dan hukuman cambuk. Model syari'at Islam di Aceh yang seperti ini yang menjadi hal yang sangat dikhawatirkan oleh para investor. Oleh karena itu isu yang meniupkan bahwa syari'at Islam di Aceh menghambat

⁷⁷ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi*, (Malang: Empatdua Media (Kelompok Penerbit Intrans), 2018), h. 25-26.

⁷⁸ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 44-46.

investasi dinilai merupakan efek dari penerapan qanun hukum jinayah tentang hukuman cambuk. Oleh karena itu pergolakan pemikiran tentang penerapan syari'at Islam secara kaffah harus ditanggapi secara serius, arif dan bijak sejalan dengan pembinaan kesadaran hukum syari'at pada masyarakat dan aparat dalam mengerjakan tugasnya untuk menolak dan membentengi intervensi-intervensi dari luar berupa pandangan-pandangan negatif tentang syari'at Islam. Kesesuaian akan eksistensi syariat Islam tidak terlepas dari peran berbagai pihak.

Disertasi Zaki Fuad menerangkan akan tujuan politik ekonomi Islam yaitu menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok tiap individu masyarakat manusia secara keseluruhan, pemenuhan berbagai kebutuhan pelengkap sesuai dengan kemampuan mereka. Politik ekonomi seperti ini pada akhirnya akan menciptakan kehidupan ekonomi masyarakat yang sejahtera, penuh ketenangan dan kesederhanaan, namun tetap produktif dan inovatif. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam perspektif ekonomi Islam terdiri atas 5 (lima) hierarkhi kebutuhan yang tidak dapat ditukar posisinya berdasarkan kemaslahatan umat manusia,⁷⁹ yaitu: a) *Hifzu al-din* (pemeliharaan agama/keimanan) yang meliputi idiologi, shalat, puasa, zakat, haji, keadilan, dan jihad; b) *Hifzu al-Nafs* (pemeliharaan jiwa) yang meliputi pangan, sandang, perumahan, kesehatan, fasilitas jalan, transportasi, keamanan, lapangan kerja, dan pelayanan social; c) *Hifzu al-'Aql* (pemeliharaan akal) yang meliputi pendidikan, media, pengetahuan, dan riset; d) *Hifzu al-Nasl* (pemeliharaan keturunan) yang meliputi lembaga perkawinan, pelayanan bagi wanita hamil dan ibu menyusui, pelayanan bagi anak, memelihara anak yatim dan sebagainya; e) *Hifzu al-Maal* (pemeliharaan harta) yang meliputi keuangan, regulasi transaksi bisnis, penyadaran tentang urgensinya usaha halal dan penegakan hukum dan pengawasan.

Eksistensi syariat Islam sudah merupakan rangkaian dari keberadaan keamanan yang merupakan wujud dari kemaslahatan akan pemeliharaan jiwa pada poin kedua di atas. Dari kelima kebutuhan dasar yang menjadi tolak ukur dalam penerapan syariat Islam di Aceh harus dapat diaplikasikan dan diimplementasikan

⁷⁹ Lihat Zaki Fuad, *Wawasan Ekanomi Islam Tentang Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi Pendapatan*, (Disertasi pada UIN Jakarta, 2007), h. 72-125.

dalam berbagai program kebijakan dan berbagai peraturan dalam berbagai aspek khususnya ekonomi.

Penelitian lainnya Murasa Sarkaniputra lebih jauh menjabarkan implikasinya dalam tataran praktis bahwa sudah saatnya menyusun format baru kebutuhan insan, untuk suatu negara yang mayoritas muslim maka pemenuhan jenis dan tingkatan kebutuhan ditujukan untuk setiap warga negara. Bahwa ada lima kebutuhan esensial yang tak terpisahkan satu terhadap yang lainnya dan saling melengkapi, agar manusia dapat mempertahankan eksistensinya sebagai manusia di bumi dan memberi pertanggungjawabannya di akhirat kelak, yakni (a) terpenuhinya kebutuhan akan agama yang diindikasikan oleh kokohnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. (*al-Din*). (b) terpenuhinya kebutuhan akan kecerdasan (*al-Aql*) yang diindikasikan oleh lama tahun pendidikan, produktivitas, kemampuan meneliti, dan kemampuan menemukan hal-hal baru. (c) terpenuhinya kebutuhan akan keamanan, kesehatan, keindahan, kehormatan diri dan harga diri (*al-Nafs*), (d) terpenuhinya kebutuhan akan ketentraman diri pribadi, keluarga, hubungan kekeluargaan, dan keturunan yang menjamin pergantian generasi (*al-Nasl*), dan (e) terpenuhinya kebutuhan akan air bersih, air suci dan menyucikan, udara yang segar, bahan bakar, listrik, sarana komunikasi dan informasi, sandang, pangan, dan papan (*al-Maal*).⁸⁰

Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat merupakan prioritas utama dalam kerangka pembangunan ekonomi Islam untuk meraih kesejahteraan rakyat yang bertumpu pada Pemenuhan Kebutuhan Dasar manusia, yaitu pemeliharaan *al-din*, *al-Aql*, *al-Nafs*, *al-Nasl*, dan *al-Maal*. Selain itu penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum lainnya menjadi skala prioritas bukan pada pembangunan yang kurang menyentuh hajat hidup rakyat banyak dengan segala ketimpangan yang dirasakan selama ini. Dengan demikian Aceh sebagai daerah yang telah menerapkan syariat Islam agar kiranya dapat mewujudkannya bertumpu pada teori *maqashid* Syariat. Terutama dalam aspek perekonomian dengan memperhatikan kemaslahatan faktor keamanan di Aceh

⁸⁰ Murasa Sarkaniputra, *Hutanku, Hutanmu dan Hutan Kita Semua*, (Bogor: Yayasan Bina Lingkungan Gunung Salak, 2003), h. 11.

akan tercipta dengan sendirinya sebab keamanan dan kedamaian dalam bermuamalah merupakan tujuan daripada syari'at Islam itu sendiri.

Pada gilirannya, kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk dari hubungan antar sesama manusia, ia bukan merupakan bagian secara langsung dari akidah, akhlak, dan 'ibadah, melainkan bagian integral dari mu'amalah. Namun demikian, masalah ekonomi tidak lepas sama sekali dari ketiga aspek tersebut, sebab menurut perspektif Islam perilaku ekonomi harus selalu diwarnai oleh nilai-nilai aqidah, akhlaq, dan ibadah. Identifikasi kegiatan ekonomi dari syari'at mu'amalah ini dilakukan hanya untuk melukis/jelaskan konstruksi ajaran Islam secara keseluruhan, sebagaimana telah diilustrasikan di atas⁸¹. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.* (QS. Adz-Dzariyat, 51: 56)⁸²

Investasi sebagai salah satu tolok ukur perkembangan ekonomi suatu negara, termasuk ke dalam persoalan muamalah duniawiyah, dalam upaya memenuhi kebutuhan suatu negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Investasi merupakan salah satu cara yang tepat untuk dilakukan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan sandaran dalam berinvestasi, antara lain:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah*

⁸¹ A. Djazuli dan Yadi Yanwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: RajaGrafindio Persada, 2002), h. 17

⁸² Departemen Agama RI, *Quran dan Terjemahnya*, Cet. Ke 13, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2013), h. 524.

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa, 4: 9)⁸³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr, 59: 18)⁸⁴

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۚ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah, 2: 261)⁸⁵

Ayat di atas dapat merupakan contoh kongkret dari kita berinvestasi yang dimulai dengan *habatin wahidatin* (sebutir benih) menjadi tujuh bulir dan akhirnya menjadi tujuh ratus biji. Nampaknya al-Qur'an telah memberikan panduan investasi (walaupun dalam hal ini adalah infaq, yang berdimensi ukhrawi), namun bila banyak orang yang melakukan infaq maka akan menolong ratusan bahkan ribuan orang yang miskin untuk dapat berproduktivitas ke arah yang lebih baik. Nampaknya multiplier effect dari infaq bukan hanya berpengaruh pada akhirat saja namun juga mempengaruhi dimensi *dunyawiyah*.⁸⁶

⁸³ Departemen Agama RI, *Quran dan Terjemahnya*, Cet. Ke 13, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2013), h. 79.

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Quran dan Terjemahnya*, Cet. Ke 13, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2013), h. 549.

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Quran dan Terjemahnya*, Cet. Ke 13, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2013), h. 45.

⁸⁶ Abdul Aziz, *Manajemen....*, h. 47-51

Menurut Alyasa' Abubakar dalam bukunya *Syari'at Islam: di Nanggroe Aceh Darussalam* bahwa izin dan kegiatan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh hanya akan berpengaruh terhadap penyelesaian konflik jangka panjang. Keberhasilan pelaksanaan syari'at Islam diyakini merupakan salah satu jalan yang akan mengembalikan kepercayaan rakyat Aceh kepada pemerintah pusat. Dengan pelaksanaan syari'at Islam yang sungguh-sungguh rakyat Aceh akan merasa bahwa mereka telah dapat kembali ke lingkungan yang asli dan alamiah, berada dalam ridha dan karunia Allah.⁸⁷

Masyarakat Aceh yang Islami itu memiliki sifat tolong menolong, bantu membantu, nilai-nilai tersebut ditanam oleh orang tua dalam kehidupan sehingga menjadi bahagian dari pandangan hidup masyarakat Aceh. Meskipun watak asli masyarakat Aceh dikenal keras dan militan tetapi ketika mengamalkan ajaran Islam yang menjadi lemah lembut dan santun. Maka dengan mudah ajaran Islam menjadi sebuah sistem kehidupan masyarakat Aceh yang manut dengan ajaran-ajaran agamanya. Mereka hidup dengan penuh kasih sayang diantara mereka. Akan tetapi sebaliknya apabila telah menjadi musuh, maka sifat orang Aceh akan memusuhi sampai kapanpun sehingga terjadi kedamaian. Maka sesungguhnya yang dapat menghadirkan kedamaian yang hakiki dalam masyarakat adalah syari'at Islam.⁸⁸

Syari'at Islam telah membentuk masyarakat Aceh untuk hidup aman dan menuju jalan damai. Perwujudan perdamaian dan silaturahmi dalam masyarakat Aceh sesungguhnya tidak terlepas dari nuansa Islam dan nilai-nilai syari'at Islam.⁸⁹ Sejarah telah mencatat bahwa pandangan hidup masyarakat Aceh sejak dahulu adalah hidup dalam syari'at Islam dan terus menjaga syari'at Islam agar terjadi kedamaian dalam hidup dan jauh dari malapetaka.

Syari'at Islam telah mengajarkan kedamaian yang sesungguhnya kepada masyarakat Aceh, sesuai dengan prinsip syari'at Islam itu. Prinsip dasar syari'at Islam adalah menghadirkan rahmah dan kemaslahatan dalam kehidupan nyata.

⁸⁷ Lihat Alyasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi NAD...*, h. 129.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Syamsul Rijal, dkk, *Merajut Damai Berbekal Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, 2009).

Maka syari'at Islam di Aceh jika dilaksanakan sesuai dengan prinsip dasar tersebut akan menghadirkan rahmat dan maslahat bagi kehidupan di Aceh. Maka untuk itu syari'at Islam harus dapat ditegakkan dengan sempurna dengan menjauhi segala bentuk yang menjurus kepada kekerasan yang dapat mengganggu kedamaian.⁹⁰

3. Strategi Peningkatan Investasi di Provinsi Aceh

a. Strategi Strengths-Opportunities (SO)

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran organisasi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Beberapa langkah strategi SO dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Memperbesar Kapasitas Produksi

Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari serangkaian proses pembangunan ekonomi. Pencapaian tersebut penting karena menjadi sebuah indikator bahwa kegiatan ekonomi tumbuh. Pertumbuhan ekonomi terjadi jika ada kegiatan dan proses ekonomi yang berjalan di masyarakat. Investasi dan produksi adalah dua unsur kegiatan dan proses ekonomi yang sangat diperlukan. Tanpa ada investasi dan produksi jangan berharap ekonomi mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dan bisa melakukan kegiatan ekspor.

Kita perlu menata kembali dalam mengelola kebijakan ekonomi. Pertama, dari sisi kegiatan ekonomi, perlunya memfokuskan upaya peningkatan investasi dan produksi. Kedua, dari sisi proses ekonomi, perlu memperbaiki seluruh rangkaian *input* dan *output* agar dapat berjalan efisien. Ketiga, baik dilihat dari sisi kegiatan dan proses ekonomi, memerlukan dukungan iklim investasi yang kondusif.

Dengan melakukan pendekatan proses ekonomi, maka untuk menghasilkan *output* diperlukan komponen *input* berupa modal dan tenaga kerja yang mengalir ke dalam sistem produksi dan memaksimalkan rasio *output*

⁹⁰ Hafifuddin, *Peranan Ulama Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 89-92.

terhadap *input* (produktifitas). *Output* produksi ini menjadi sebuah aset yang berfungsi melayani kebutuhan daerah, nasional dan ekspor. Namun bila jumlah konsumsi domestiknya melebihi produksi nasional, maka selisihnya akan dipenuhi impor.

Berkaitan dengan ini, pemerintah sebagai pembuat kebijakan ekonomi diharapkan fokus membenahi iklim investasi dan kegiatan investasi agar kebutuhan daerah, nasional dan ekspor dapat tercukupi dari produksi nasional. Peran impor harus ditempatkan dalam posisi sebagai penyeimbang atau sebagai pelengkap.

2) Perbaikan Infrastruktur yang Menunjang Produksi

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pembangunan dan infrastruktur yang baik akan mampu mendorong peningkatan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur dapat mempermudah arus perekonomian agar dapat melakukan ekspansi seluas mungkin, mengurangi biaya produksi hingga dapat menimbulkan efek *multiplier*.

Sekalipun manfaatnya dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat begitu besar, akan tetapi pengadaan infrastruktur tidak serta merta akan dapat diupayakan dengan mudah. Ada banyak kendala yang harus dihadapi dalam usaha-usaha pengadaan infrastruktur ini.

Kendala dalam pembangunan infrastruktur secara umum ada dua, yakni adanya kemungkinan terjadinya kegagalan pasar (*market failure*), dan yang kedua adalah terkait aspek pembiayaan. Pengadaan infrastruktur jelas membutuhkan dana investasi yang tidak sedikit. Padahal, hasil dari infrastruktur tidak bisa dinikmati secara langsung dalam jangka waktu singkat. Karena jangkanya yang panjang, selalu ada kemungkinan terjadinya kegagalan pasar. Hal ini membuat efektivitas infrastruktur kadang jadi kurang maksimal.

3) Penetapan Regulasi yang Mendorong Dunia Usaha

Munculnya regulasi dan deregulasi bertujuan untuk menjamin agar pembangunan ekonomi dan investasi berjalan maksimal. Regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah dapat memandu dunia usaha dalam mengembangkan usaha lebih

baik. Pemerintah diharapkan memiliki keberpihakan kepada dunia usaha, sehingga regulasi yang ditetapkan tidak menyulitkan dunia usaha.

4) Meningkatkan Produktifitas SDM

Pendidikan dan pelatihan dapat dipandang sebagai sarana investasi, akan memberikan implikasi secara ekonomi, karena bisa melahirkan tenaga kerja terdidik yang akan mengisi berbagai sektor pekerjaan. Pada akhirnya dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah, perusahaan, serta pihak terkait lain harus terlibat bersama untuk mengasah keterampilan dan keahlian para calon tenaga kerja.

Sumber Daya Manusia yang menguasai teknologi merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Selain memfasilitasi, pemerintah senantiasa mendorong generasi muda untuk terus mengasah keterampilan mereka melalui keikutsertaan di kompetisi-kompetisi yang berskala nasional hingga global. Melalui keikutsertaan dalam berbagai kompetisi, generasi muda bisa mengukur kemampuan mereka dan terus terpacu untuk bisa bersaing.

5) Mendorong Pengembangan Industri Pengolahan Di Daerah

Untuk meningkatkan pengembangan daya saing industri pengolahan di daerah perlu melakukan pemetaan potensi sumber daya yang dimiliki kemudian peningkatan hasil produksi dan diikuti penciptaan produk. Dalam rangka merealisasikan target-target tersebut, daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian agar industri pengolahan dapat berkembang di daerah.

Upaya pendekatan yang perlu dilakukan guna membangun industri pengolahan adalah menciptakan sinergisitas dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Pertama, melalui pendekatan *top-down* dengan pengembangan klaster industri prioritas yang direncanakan pusat dan diikuti oleh partisipasi daerah berdasarkan daya saing serta potensi yang dimiliki. Kedua, melalui pendekatan *bottom-up* dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah, di mana pusat turut membangun pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing.

Pengembangan kompetensi inti di tingkat provinsi disebut sebagai Industri Unggulan Provinsi dan di tingkat kabupaten/kota. Pendekatan kedua ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada semangat Otonomi Daerah. Penentuan pengembangan industri melalui penetapan klaster industri prioritas dan kompetensi inti industri daerah sangat diperlukan guna memberi kepastian dan mendapat dukungan dari seluruh sektor di bidang ekonomi termasuk dukungan perbankan.

b. Strategi *Strengths-Threats* (ST)

Strategi ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan dalam yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman. Beberapa langkah strategi ST dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Menjaga Kekuatan Permintaan Termasuk Daya Beli Masyarakat

Permintaan menjadi pilar yang mendukung sisi pasokan (*output* produksi). Apabila permintaan turun, pasokan yang sudah terbangun sedemikian rupa tidak dapat diserap. Menjaga daya beli masyarakat adalah hal penting untuk mencatatkan realisasi pertumbuhan ekonomi. Target yang perlu dicapai adalah pemerintah tetap menjaga inflasi agar daya beli masyarakat stabil. Dukungan kebijakan fiskal pemerintah pusat dengan mempertahankan tarif listrik, harga BBM bersubsidi, jaminan perlindungan sosial dapat menjaga kekuatan permintaan dan daya beli masyarakat.

Jumlah *output* produksi yang stabil akan berpengaruh terhadap harga komoditas pasar sehingga mengindikasikan permintaan pasar masih relatif meningkat. Meskipun terjadi penurunan harga, dapat juga terjadi penurunan permintaan dan daya beli, penyebabnya adalah keterbukaan lapangan pekerjaan dan tingkat penghasilan masyarakat yang rendah, jika ketersediaan lapangan pekerjaan belum bisa memberikan penghasilan yang cukup bagi masyarakat, kondisi ini yang kemudian mempengaruhi tingkat konsumsi.

Dalam menjaga daya beli di masyarakat pemerintah perlu meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

(MBR). Di sisi lain pemerintah melakukan penguatan kualitas penyaluran dana desa sebagai instrumen untuk pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan di perdesaan.

2) Sinergisitas Pemangku Kepentingan

Dalam membangun pertumbuhan ekonomi melalui hadirnya investasi di daerah membutuhkan sinergitas banyak pihak, termasuk dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Salah satu instrumen mendorong pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan infrastruktur, selain kemudahan perizinan investasi dan termasuk yang terpenting insentif serta keterbukaan masyarakat dalam menerima investor. Tugas tersebut bukan semata urusan pemerintah daerah semata, tetapi kalangan industri dan masyarakat yang punya lahan harus mau bersinergi.

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di satu daerah, seberapa besar mampu berkembangnya industri baik berbasis pabrik maupun industri kecil dan rumah tangga. Apabila pemerintah gagal menumbuhkan industri, maka saat itu pula tidak akan melihat pertumbuhan ekonomi daerah semakin baik.

Dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Aceh perlu kiranya mengundang pemangku kepentingan untuk bertemu guna membahas prospek investasi. Pertemuan semacam ini penting untuk menciptakan sinergi antara investor, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan agar mampu menangkap peluang investasi yang dapat mendukung upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sinergi dari seluruh pihak untuk mendorong akselerasi investasi dipandangnya amat penting. Selain itu pemerintah juga dituntut terus mendorong pembangunan infrastruktur guna mendukung konektivitas seperti jalan, bandara, rel kereta api, dermaga penyeberangan, serta pembangkit listrik bertujuan mendorong pemerataan investasi di daerah.

3) Jaminan Keamanan Investasi

Investasi merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Selain fokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah maupun pusat dinilai perlu membangkitkan sentimen positif kepada para investor salah

satunya adalah dengan memberikan kepastian hukum terkait dukungan dan jaminan kondusifnya investasi sehingga investor tidak ragu untuk memperluas investasinya.

Dalam upaya menjamin investasi perlu sinergisitas respon dan dukungan positif dari berbagai pihak terutama regulasi pemerintah yang mendukung dunia investasi. Pemerintah perlu mengeluarkan Perpres (Qanun/Perda jika di Aceh) yang menjadi landasan bagi keamanan investasi bagi investor. Perpres tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan terkait investasi yang ditanamkan para investor. Investor yang datang menanamkan investasinya tentu berharap agar investasinya dapat berjalan lancar dan tidak mendapat gangguan. Oleh karena itu mereka membutuhkan jaminan kepastian hukum terhadap investasinya.

4) Promosi Daerah Guna Menarik Minat Investasi

Promosi yang dilakukan secara terus menerus, baik dalam negeri maupun luar negeri, peningkatan pelayanan perizinan, serta infrastrukturnya kelancaran operasional sebuah kegiatan investasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan investasi.

Namun yang tak kalah penting untuk terus dilakukan adalah membenahi iklim investasi agar semakin kondusif, memperbaiki regulasi yang tumpang tindih, serta meningkatkan kualitas tenaga kerja industri. Selain itu pemberian insentif juga sangat dibutuhkan untuk menarik minat investasi.

c. Strategi *Weaknesses-Opportunities* (WO)

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Beberapa langkah strategi WO dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengembangan Agroindustri Daerah

Pengembangan agroindustri di daerah terutama di perdesaan relatif belum banyak mengalami kemajuan. Diantaranya karena produk pertanian yang tersebar akibat jaringan pemasaran yang terbatas, jaminan ketersediaan bahan baku dan multikualitas. Selain itu sumberdaya manusia yang ada belum sepenuhnya mampu

pengembangan kegiatan peningkatan nilai tambah produk, ditambah lagi berbagai upaya yang dilakukan pemerintah masih bersifat parsial dan tidak tuntas.

Peluang pengembangan agroindustri ke depan sangat berpeluang, terlebih dengan terbukanya pasar bagi produk olahan di dalam negeri dan berbagai upaya untuk mengutamakan konsumsi produk lokal. Keadaan ini diperkuat dengan berbagai target yang dikembangkan pemerintah bagi percepatan pengembangan agroindustri serta pengembangan wilayah yang semakin terintegrasi.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah memfasilitasi kerja sama antara petani, akademisi, serta pebisnis yang memiliki modal dan kompetensi dalam memasarkan produk. Selain itu membantu memberikan fasilitas pemasaran dengan melakukan pelatihan pemasaran dikalangan petani dengan harapan para petani dan peternak tidak hanya menjadi penyedia bahan baku semata tetapi dapat meningkatkan penawaran harga produk. Para petani juga perlu membentuk agroindustri berbasis kelompok di perdesaan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya. Pembentukan kelompok petani memperkuat posisi tawarnya untuk mendapatkan jaminan ketersediaan bahan baku dan pendukung produksi yang lain serta dalam memasarkan produk yang memiliki nilai tambah.

2) Memanfaatkan Kerja Sama Bidang Investasi

Kerja sama bidang investasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Keberadaannya merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kerja sama bidang investasi oleh pemerintah daerah dengan *stakeholder* dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan sangat penting untuk mempertahankan daya saing. Secara lebih spesifik, penanaman modal membutuhkan iklim usaha yang sehat, kemudahan serta kejelasan prosedur. Investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut. Pembentukan daya tarik investasi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik dan kelembagaan, sosial dan budaya, diyakini merupakan beberapa faktor kunci pembentuk daya tarik investasi suatu daerah. Keberhasilan untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah

satunya tergantung dari komitmen dan kemampuan daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan secara konsisten kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha.

Kerjasama investasi sebaiknya ditujukan pada infrastruktur karena infrastruktur dipercaya mampu meningkatkan perekonomian secara berkepanjangan. Bidang infrastruktur akan menghasilkan ekonomi yang lebih besar karena kita tidak bisa berharap ekonomi membaik kalau infrastruktur tidak dibangun.

Kita dituntut bekerja keras, melakukan kolaborasi dan kerjasama untuk meningkatkan portofolio investasi dan peningkatan produksi daerah, yang bisa berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, yang diperlukan adalah angka realisasi pertumbuhan investasi dan pertumbuhan produksi. Tanda-tanda bahwa ekonomi sedang bergerak dilihat dari sisi *output*-nya, yakni berapa nilai *output* investasi dan nilai output produksi yang dihasilkan dalam satu periode tertentu.

3) Meningkatkan Daya Saing Daerah

Daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah harus mencari dan mengenal potensi yang akan dikembangkan sehingga dapat berpengaruh pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tuntutan kepada daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat menciptakan ide-ide baru, perbaikan-perbaikan yang dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru, industri baru, lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing dapat dilakukan dengan membenahi kapabilitas pemerintah daerah, seperti kualitas sumber daya manusia, pengembangan kualitas aparatur pemerintah daerah, pengelolaan anggaran dan pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan publik merupakan hal mendasar yang perlu menjadi perhatian pusat untuk meningkatkan daya saing daerah.

Peran institusi pendidikan tinggi di daerah juga menjadi penting dalam meningkatkan kapabilitas pemerintah daerah. Satu hal yang dapat dikaji melalui penelitian institusi pendidikan tinggi adalah pemberdayaan potensi daerah, selain itu pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) daerah dalam memasarkan produknya, karena banyak sekali hasil produksi UMKM dari berbagai daerah yang masih belum dapat menembus pasar ekspor dengan kendala keterbatasan informasi yang dimiliki oleh pelaku UMKM.

Pusat riset di perguruan tinggi merupakan tulang punggung dalam menciptakan berbagai temuan baru yang kemudian ditransformasikan oleh perusahaan ke dalam berbagai produk atau jasa baru. Unsur pemasok menyediakan perlengkapan atau komponen penting. Unsur perusahaan pemasaran dan distribusi membawa produk itu kepada pelanggan. Hasilnya adalah kawasan yang tumbuh dan bekerja dengan baik akan menikmati upah, produktivitas, pertumbuhan usaha, dan inovasi yang lebih tinggi.

4) Merealisasikan Program Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah

Ada beberapa kebijakan pembangunan yang menjadi prioritas nasional yang gagas pemerintah pusat seperti, pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan, konektivitas dan pemerataan, peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja, pemantapan ketahanan energi, pangan, sumber daya air, dan lingkungan, serta stabilitas pertahanan dan keamanan. Kebijakan ekonomi pemerintah pusat di bidang investasi seperti kemudahan perizinan usaha, menjaga ketersediaan bahan baku, serta menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM). Maka perlunya sinkronisasi dan penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dengan program prioritas pemerintah daerah untuk tujuan pembangunan. Daerah juga dapat melakukan inovasi-inovasi kebijakan yang pro-investasi untuk mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat.

Kebijakan daerah yang inovatif diyakini akan menopang keberhasilan investasi. Percepatan realisasi investasi justru akan ditentukan kebijakan daerah, khususnya daerah tujuan investasi. Daerah juga dapat melanjutkan dan mengeluarkan paket kebijakan perizinan daerah yang memberikan kemudahan-

kemudahan kepada investor. Daerah seharusnya juga bisa melanjutkan deregulasi dengan memangkas prosedur perizinan yang dibutuhkan untuk investasi menjadi 3 jam sehingga ada keselarasan dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat.

d. Strategi *Weaknesses-Threats* (WT)

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat bertahan dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Beberapa langkah strategi WT dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Upaya yang dilakukan pemerintah Aceh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memprioritaskan alokasi anggaran pada program-program pemberdayaan ekonomi di daerah perdesaan. Selain kebijakan ekspansif fiskal daerah juga perlu melakukan pengendalian inflasi pada tingkat yang rendah terutama pada beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi. Selain itu bagaimana memperbaiki tingkat pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan indeks pembangunan manusia, meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan, serta mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan pengelolaan sumber daya alam.

Terdapat empat hal yang dapat memperbaiki efisiensi ekonomi, pertama adalah layanan peminjaman modal yang masih memberlakukan bunga tinggi bagi nasabah. Hal itu menyebabkan pelaku usaha mengalami kendala dalam menjalankan bisnisnya. Dengan penyertaan modal berbunga kecil, maka tren kewirausahaan dikalangan masyarakat dapat berkembang baik. Kedua, biaya logistik yang tinggi mengakibatkan distribusi produk usaha para pelaku bisnis menjadi lama dan mahal. Hal itu disebabkan oleh kondisi infrastruktur yang belum merata di seluruh daerah. Ketiga, kebutuhan energi listrik semakin tinggi sehingga Pemerintah membangun infrastruktur listrik yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan industri usaha juga. Keempat, tatanan birokrasi yang lambat

dan berbelit menyebabkan pelaku usaha mengeluarkan ekstra waktu dan biaya untuk mengurus izinnya.

2) Menghindari Ketimpangan Pemerataan Ekonomi

Jika pemerataan ekonomi daerah terwujud maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Upaya mewujudkan pemerataan ekonomi daerah ditempuh melalui pemerataan pembangunan infrastruktur dan penyebaran konektivitas kegiatan ekonomi di pedesaan dan diperkotaan sekaligus terintegrasi untuk memudahkan proses produksi, distribusi, hingga ke masyarakat. Pemerataan ekonomi diyakini dapat menjadi langkah awal untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

Langkah yang bisa dilakukan dalam menciptakan pemerataan adalah dengan pembangunan infrastruktur, langkah tersebut merupakan cara sistematis untuk meningkatkan pemerataan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dapat mengundang investasi yang bisa menyerap tenaga kerja daerah dan meningkatkan kualitas perekonomian daerah. Langkah yang kedua adalah pengendalian distribusi dan harga pangan. Komoditas pangan memiliki peran yang sangat besar bagi kemiskinan di daerah, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi komoditas pangan harus ditata dengan baik. Cara yang dilakukan salah satunya dengan reformasi agraria yang telah dicanangkan pemerintah pusat agar diikuti oleh daerah seperti pengembangan pertanian secara klaster, peremajaan perkebunan terhadap komoditas strategis seperti sawit dan karet, kelapa, cokelat, dan tebu. Pemda agar berupaya memfasilitasi petani dalam memperoleh bibit-bibit unggul. Selanjutnya perlu adanya pembangunan gudang dan alat pengering agar kualitas produk pertanian bisa bertahan lama tanpa menurunkan kualitasnya. Pemerintah daerah juga perlu memikirkan fasilitas logistik dari hasil produk pertanian.

Selain strategi di atas upaya lain yang bisa dilakukan adalah mengembangkan wilayah yang tertinggal dan terpencil dengan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Mengoperasionalkan rencana tata ruang, pemerataan kesempatan kerja dengan memperbanyak proyek pembangunan.

3) Mengupayakan Persepsi Positif Investasi

Persepsi positif akan menjadi pintu masuk hubungan dengan investor. Menumbuhkan persepsi positif tidak hanya berputar pada besarnya potensi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, jumlah anggaran yang memadai, atau penghargaan atas capaian prestasi daerah. Tetapi lebih kepada upaya kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi sejumlah risiko ekonomi dan konsisten melakukan reformasi struktur perekonomian. Realisasi program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan berbagai industri sangat ditunggu kalangan investor. Realisasi kebijakan pemerintah daerah yang mendorong daya beli masyarakat juga menjadi perhatian investor karena sangat membantu meningkatkan kinerja dunia usaha. Penilaian positif itu bisa muncul jika pemerintah dianggap bisa mengelola perekonomian dengan baik. Untuk menjaga ekonomi terus bergerak positif, tugas pemerintah daerah adalah menjamin stabilitas sosial politik. Kondisi sosial politik yang stabil akan menciptakan iklim kondusif bagi dunia usaha.

Misalnya beredarnya isu-isu negatif di masyarakat bahwa investasi hanya menguntungkan segelintir orang akibat korupsi atau penguasaan sumber daya, kerusakan lingkungan yang parah, meningkatnya transmigrasi dari daerah lain yang menjadi ancaman bagi masyarakat lokal terhadap lapangan kerja, mencancam penerapan syariah Islam. Hal ini bukti bahwa pemahaman masyarakat luas terhadap investasi yang tidak setuju karena arus informasi yang tidak komprehensif dan konsisten tentang investasi, banyak kalangan yang tidak senang bahkan antipati terhadap investasi.

Investasi merupakan aspek penting dalam mendorong perekonomian, membuka lapangan kerja baru, memberikan kontribusi bagi perusahaan lain di sektor hulu dan hilir, serta dapat menyumbang pendapatan daerah melalui berbagai macam pajak sehingga memberikan dampak timbal balik bagi kesejahteraan masyarakat. Instansi pemerintah daerah memegang peranan yang penting dalam memberikan wawasan yang luas bagi masyarakat terkait dengan kehadiran investor. Tapi, karena selama puluhan tahun masyarakat sudah tidak percaya kepada instansi, maka akan lebih efektif jika upaya dan usaha

menyebarkan informasi yang komprehensif dilakukan oleh pihak lain, seperti LSM dengan memanfaatkan media massa dan media sosial. Salah satu faktor yang menjadi penarik investor modal adalah kepastian hukum dan keamanan. Jika pemerintah mampu merealisasikan maka akan menimbulkan persepsi yang positif bagi investasi.

4) Menciptakan Suasana Kondusif Mendukung Investasi

Kondisi Aceh yang semakin kondusif akan berdampak positif bagi dunia investasi. Hadirnya investasi diasumsikan dapat membuka banyak lapangan kerja baru, tingkat pengangguran berkurang. Jadi investasi Aceh sangat bergantung pada keadaan kondusif di daerah.

Dalam rangka menarik minat investasi, maka daerah harus berbenah diri. Ada dua hal pokok, yaitu infrastruktur dan suprastruktur. Perbaikan dan kelengkapan fasilitas, serta infrastruktur yang memadai adalah syarat mutlak daya tarik investasi. Infrastruktur ini menduduki peringkat pertama, berkaitan alasan utama masuknya investasi di daerah. Iklim kondusif perspektif suprastruktur seperti keamanan dan ketertiban umum. Investasi membutuhkan kenyamanan dan ketenangan. Munculnya konflik akan berdampak buruk dan kontraproduktif terhadap investasi. Investor akan berpikir ulang tentang rencana menanamkan modalnya, jika suatu daerah masih didera konflik. Maka peran pemerintah bersama para pemangku kebijakan seperti DPRD, aparat keamanan, swasta, LSM, masyarakat, sangat strategis untuk mendengarkan aspirasi dan problem yang dihadapi, serta mencegah konflik dan menciptakan iklim kondusif.

Ada beragam pilihan lainnya yang dimiliki pemerintah Aceh untuk memperbaiki iklim penanaman modal. Salah satu kebijakannya adalah penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Secara teoritik, PTSP dapat meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dalam bidang investasi, melalui penyederhanaan perijinan, pemberian insentif dan kemudahan, serta percepatan waktu penyelesaian. Selain itu, membentuk Peraturan Daerah (Perda) untuk dapat memberikan kemudahan dalam mengadakan investasi. Perda yang mengatur tentang penanaman modal akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para

investor. Perda dapat membuat investor yakin bahwa investasi dapat dilakukan dengan perlindungan hukum.

Perda tersebut diharapkan dapat mengembangkan jejaring kerja dan penciptaan iklim investasi yang kondusif, dengan memberi kemudahan pelayanan publik antara lain bernilai kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Hal ini diwujudkan dengan memberikan peluang pengurusan syarat investasi yang ketat namun mudah, melakukan pendekatan secara baik dengan calon investor, serta kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan dorongan kepada masyarakat untuk terbuka menyambut kehadiran investasi di daerah, serta mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya.

Setelah diperoleh beberapa alternatif strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT, maka selanjutnya adalah pemilihan strategi terbaik. Adapun analisis yang digunakan adalah Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (*Quantitative Strategic Planning Matrix*).

Secara konsep, QSPM menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi berdasarkan seberapa jauh faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal dimanfaatkan atau diperbaiki. Daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam satu set alternatif dihitung dengan menentukan pengaruh kumulatif dari masing-masing faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal. Jumlah set alternatif strategi yang dimasukkan dalam QSPM bisa berapa saja, jumlah strategi dalam satu set juga bisa berapa saja, tetapi hanya strategi dalam set yang sama dapat dievaluasi satu sama lain. Sebagai contoh, satu set strategi dapat mencakup diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat, sementara set lainnya dapat memasukkan penerbitan saham dan penjualan divisi untuk menghasilkan modal yang dibutuhkan. Dua set strategi ini sangatlah berbeda, dan QSPM mengevaluasi strategi hanya dalam satu set.

Dengan menggunakan analisis SWOT dan QSPM terdapat 5 strategi yang akan menjadi skala prioritas para pemangku kebijakan dalam pemerintahan yaitu:

Berdasarkan perhitungan pada Tabel QSPM di atas diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan produktifitas SDM
2. Pelaksanaan berbagai jenis kegiatan promosi
3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
4. Penetapan kepastian hukum
5. Peningkatan partisipasi masyarakat serta keamanan.

Dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tertinggi TAS (*Total Attractive Score*) adalah alternatif strategi yang pertama mengenai peningkatan kualitas tenaga kerja dan produktifitas SDM dengan nilai 1,737, SDM menjadi salah satu asset penting dalam mendukung pembangunan suatu daerah. Dengan meningkatnya pengetahuan SDM tentang investasi akan meningkatkan kesadaran masyarakat di Provinsi Aceh dalam mempromosikan kekayaan SDA yang dimiliki Aceh ke dunia Internasional, agar para investor tertarik untuk berinvestasi di Provinsi Aceh.

Rendahnya produktivitas tenaga kerja disebabkan rendahnya akses untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan. Jika tenaga kerja memiliki produktivitas yang tinggi maka akan memperoleh kesejahteraan, yang dicerminkan dari pendapatan atau pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Peningkatan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan dapat kenaikan produktivitas tenaga kerja. Disisi lain, pengangguran pendidikan merupakan hasil dari investasi pendidikan yang tidak terserap dalam pasar tenaga kerja. Hal ini akan menghambat pengaruh investasi sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi.

Alternatif strategi yang kedua adalah pelaksanaan berbagai jenis kegiatan promosi dengan nilai 1,57. Promosi daerah diminta lebih inovatif dalam mempersiapkan kegiatan-kegiatan promosi investasi baik bagi investor internasional maupun bagi investor dalam negeri. Promosi investasi di daerah harus lebih canggih dengan memanfaatkan berbagai kemudahan teknologi informasi yang ada. Daerah perlu membuat program pelatihan bertahap untuk portfolio investasi yang tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan calon investor.

Langkah yang dilakukan misalnya, fokus kepada pengembangan model bisnis yang sesuai potensi daerah dan peluang investasi yang ada, kemudian profil investasi daerah yang ditawarkan harus berkelanjutan. Kegiatan event promosi juga penting dilakukan untuk memberikan informasi positif kepada calon investor agar mau menanamkan modalnya.

Alternatif strategi yang ketiga peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan nilai 1,519. Lambatnya pembangunan infrastruktur merupakan penghambat perekonomian dan pengembangan investasi, hal ini ditandai dengan kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur atau prasarana. Baik infrastruktur yang merujuk kepada jaringan fisik seperti jalan dan bandara maupun infrastruktur non-fisik seperti pasokan listrik, kesejahteraan sosial dan kesehatan tampaknya memiliki kesulitan untuk mendorong pengembangan investasi secara cepat.

Penyediaan infrastruktur yang memadai dapat mempengaruhi investasi, produksi dan pemasaran berjalan secara efisien. Hal tersebut dapat mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Dampak pembangunan infrastruktur terhadap aktivitas ekonomi daerah memang jelas adanya. Fakta empiris menunjukkan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur suatu wilayah berjalan seiring dengan adanya perkembangan *output* ekonomi. Ini berarti secara langsung, infrastruktur dapat berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi secara positif.

Upaya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi juga memerlukan adanya keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan peningkatan peran proaktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki infrastruktur di daerah. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas jalur transportasi kabupaten/kota; optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa; pengembangan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES); perbaikan infrastruktur kunci lain yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Alternatif strategi yang keempat adalah penetapan kepastian hukum dengan nilai 1,496. Kepastian hukum merupakan tolak ukur bagi investor asing untuk mengetahui kondusif atau tidaknya iklim investasi. Ini yang menjadi tugas utama pemerintah daerah untuk menerapkan kepastian hukum yang dapat meyakinkan para investor terkait kondisi Aceh bahwa Aceh adalah provinsi paling aman dan terbuka untuk investor lokal dan asing serta memastikan tidak ada premanisme atau calo, pemerintah Aceh juga harus memberikan garansi tak ada persoalan hukum yang dapat merugikan para investor dikemudian hari.

Regulasi yang mendukung investasi dunia usaha seperti kemudahan perizinan, memberikan kelonggaran perpajakan untuk kalangan UMKMagar bisa memberikan ruang lebih bagi kalangan UMKM untuk berkembang, regulasi pendanaan, dan kemitraan.

Kebijakan keringanan pajak bagi pelaku industri, diharapkan mampu menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modal. Hal ini diyakini dapat menciptakan efek berantai, termasuk dalam membuka lapangan pekerjaan dan menambah penerimaan daerah dan negara. Hal lainnya seperti insentif fiskal dalam mendorong investasi dan pertumbuhan sektor manufaktur, serta mendorong daya saing di kancan global.

Alternatif strategi yang kelima adalah peningkatan partisipasi masyarakat serta keamanan dengan nilai 1,424. Selain regulasi, kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan investasi juga menjadi kunci dalam meningkatkan jaminan investasi. Misalnya adalah menjaga indikator-indikator makroekonomi yang positif, sehingga memberi landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang mengutamakan sektor riil dan berbasis ekonomi produktif di sektor riil. Ketiga adalah membuat masyarakat luas mendapatkan manfaat dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Selain perizinan daerah juga terus menjaga kepastian berinvestasi berupa jaminan keamanan berinvestasi. Desakan ini diharapkan menjadi pertimbangan pemerintahan daerah dalam mengeluarkan kebijakan.

Dengan demikian, apabila kelima alternatif strategi (QSPM) diterapkan dengan baik dan tepat sasaran dapat meningkatkan minat dan kepercayaan para

investor baik lokal maupun asing untuk berinvestasi di Provinsi Aceh. Sebab dunia investasi akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan berdampak terhadap kesejahteraan daerah.

BAB V

PENUTUP

Bagian ini menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan ini disusun dalam pernyataan singkat berdasarkan hasil penelitian yang merupakan orisinalitas penelitian dan pembahasan. Bagian rekomendasi menyajikan masukan peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu dan ditujukan kepada pihak-pihak yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian selanjutnya.

A. Kesimpulan

1. Faktor Penghambat dan pendukung Pengembangan Investasi di Aceh

Adapun yang menjadi faktor penghambat pengembangan investasi di Aceh yaitu: a) minimnya kegiatan ekonomi produktif; b) Kualitas sumber daya manusia tidak mendukung; c) Infrastruktur dan noninfrastruktur yang masih belum maksimal; d) Adanya biaya tidak resmi berbentuk pungutan liar (Pungli) secara berlapis; e) proses birokrasi rumit dan tidak *fair*; f) kurangnya kepedulian pengusaha lokal terhadap potensi kewilayahan daerah; g) penggunaan anggaran daerah yang mengandung unsur politik.

Sedangkan yang menjadi faktor pendukung bagi peningkatan investasi di Aceh yaitu: a) Sektor pertanian; b) Potensi perkebunan; c) Pembangunan infrastruktur yang sudah menunjukkan arah kemajuan; d) Pengembangan wisata syariah; e) Potensi sektor perikanan dan kelautan; f) Adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri Aceh (KIA).

2. Eksistensi faktor Syariat Islam dan Keamanan Bagi Investasi di Aceh

Penerapan syari'at Islam sebagai salah satu kebijakan Pemerintah Aceh yang melahirkan berbagai Qanun (Perda) mampu menjadi salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Aceh terutama dalam hal investasi. Karena tujuan daripada syari'at Islam adalah mencapai kesejahteraan masyarakat dunia dan akhirat. Pada kenyataannya penerapan syari'at Islam di Aceh tercantum dalam rancangan dan berbagai bentuk model menjadi sesuatu keengganan dan kekhawatiran bagi para investor. Hal ini yang perlu di rekonstruksi terutama

syariat Islam dalam bidang muamalah. Pada dasarnya eksistensi dari syari'at Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraan. Kemaslahatan pokok yang disepakati dalam syari'at Islam mencakup 5 hal seperti yang disebutkan oleh para ulama dengan nama *al-kulliyat al-khams*.

Penerapan syariat Islam diawali dari pembinaan para aparatur negara dalam pemerintahannya sebagai pemangku kebijakan baik dari legislatif maupun eksekutif, dan dilaksanakan juga oleh pihak-pihak swasta yang akan melakukan investasinya di Aceh. Sehingga seluruh masyarakat Aceh mampu mengaplikasikan setiap regulasi syariat Islam dalam mewujudkan keadilan dan merealisasikan kesejahteraan umat dari setiap aspek. Eksistensi keamanan merupakan faktor penting bagi kenyamanan investasi di Aceh, setidaknya penerapan syari'at Islam menjadi sebuah jaminan dan merupakan jawaban keinginan daripada muslimin yang ada di Aceh guna terciptanya kedamaian dan keamanan dalam menjalankan kehidupan sebagai anggota masyarakat maupun sebagai pemangku kebijakan pemerintah. Menjaga keamanan ini merupakan tugas bersama-sama dari berbagai pihak yang menginginkan Aceh menjadi sebuah provinsi yang damai dan bermartabat sehingga tidak mudah untuk diprovokasi oleh isu-isu yang mengatakan bahwa Aceh belum aman untuk berinvestasi.

3. Strategi Peningkatan Investasi di Aceh menggunakan analisis SWOT

Berdasarkan analisis matrik SWOT rekomendasi strategi yang diberikan adalah **agresif**, artinya organisasi/Badan dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal, maka menghasilkan strategi SO (*Strength-Opportunity*) yaitu: 1) Memperbesar kapasitas produksi; 2) Perbaikan infrastruktur yang menunjang produksi; 3) Penetapan regulasi yang mendorong dunia usaha; 4) Peningkatan produktifitas Sumber Daya Manusia; 5) Mendorong pengembangan industri pengolahan di daerah.

Berikutnya melalui analisis QSPM menghasilkan urutan strategi alternatif berdasarkan nilai tertinggi adalah: 1) Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Produktifitas SDM; 2) Pelaksanaan Berbagai Jenis Kegiatan Promosi; 3)

Peningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur; 4) Penetapan Kepastian Hukum; dan 5) Peningkatkan Partisipasi Masyarakat serta Keamanan.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini menjelaskan faktor penghambat dan faktor pendukung investasi di Aceh secara umum saja, namun peneliti hanya mengkhususkan dua variabel yang menjadi faktor adanya hambatan atau pendukung bagi peningkatan investasi di Aceh.

Keterbatasan lainnya, peneliti hanya berpedoman kepada hasil laporan realisasi penanaman modal dari tahun 2010-2016 karena diantara tahun tersebut berlangsungnya Pemilihan Umum calon legislatif dan calon eksekutif. Peneliti ingin menjelaskan akan adanya dampak apakah stabilitas politik di Aceh sudah cenderung aman pada periode tahun tersebut. Apalagi menurut laporan realisasi penanaman modal dari tahun tersebut mengalami penurunan di tahun 2015 dan 2016. Peneliti juga hanya menghasilkan beberapa strategi yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemangku kebijakan setelah mendapatkan kesimpulan bahwa kondisi pengembangan investasi di Aceh dalam kondisi progresif. Kondisi progresif ini menandakan bahwa pemerintah Aceh bersama dengan dinas-dinas terkait terus melakukan ekspansi serta memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal bersama-sama dengan pihak swasta. Pihak swasta dalam hal ini adalah para pengusaha baik dalam negeri maupun luar negeri terus dirangkul dan saling bersinergi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik serta berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Aceh secara umum, sehingga Aceh menjadi provinsi dengan tingkat masyarakat yang produktif dan mempunyai pendidikan yang optimal dalam pemberdayaan ekonomi.

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan dari pihak-pihak yang menjadi responden, dimana hanya terdapat 9 responden dari unsur pemerintah dan 9 responden dari unsur swasta yaitu pengusaha yang berada dibawah Asosiasi Pengusaha Indonesia dan 2 diantaranya merupakan manajer pada perusahaan dalam negeri. Sehingga demi keberlangsungan penelitian selanjutnya masih

terdapat masalah-masalah baru yang dapat diteliti terutama mengenai variabel-variabel faktor pendukung investasi dan faktor penghambat lainnya secara spesifik.

C. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kepentingan dan regulator kebijakan di Aceh. Saran tersebut diperuntukkan bagi:

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh

Beberapa saran yang dapat diberikan kepada BAPPEDA Aceh diantaranya: a) Alokasi APBA dilakukan berdasarkan data dan kajian/penelitian, sehingga sektor-sektor utama yang memiliki daya ungkit ekonomi besar dapat lebih diprioritaskan; b) Untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, perlu dilakukan pemberdayaan UMKM dengan meningkatkan kapasitas UMKM melalui pemberian bantuan, pelatihan, dan pendampingan, memberikan kemudahan perizinan, meningkatkan akses pembiayaan serta perluasan akses pemasaran; c) Aktif membantu UMKM memperluas akses pemasaran melalui fasilitasi keikutsertaan UMKM dalam pameran berskala nasional dan internasional maupun dengan memanfaatkan jejaring dimiliki pemerintah daerah di dalam dan luar negeri; d) Percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe melalui: Kemudahan kegiatan perijinan, legalitas, dan kegiatan administrasi dalam pembentukan KEK Lhokseumawe yang dapat ditempuh melalui peningkatan koordinasi antar instansi dan antar level pemerintahan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional, Penyediaan infrastruktur primer khususnya listrik dan air; e) Penambahan kapasitas serta percepatan perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan utama Aceh, seperti pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Krueng Geukeuh. Perbaikan pelabuhan tersebut dapat berbentuk program-program sebagai berikut: Perbaikan infrastruktur pelabuhan, termasuk luas pelabuhan untuk menambah kapasitas dan menarik para eksportir/importir luar negeri dan luar daerah, Perbaikan konektivitas darat dari dan menuju ke pelabuhan, Penambahan sumber daya manusia untuk peningkatan *service* dalam hal *dwelling time*; f) Pembangunan konektivitas darat trans Aceh:

Pembangunan jalur alternatif baru serta perbaikan dan perluasan jalan yang menghubungkan kawasan Aceh bagian Tengah (Penghasil kopi) dengan wilayah Aceh bagian Timur (Jalur bisnis utama Aceh), Perbaikan jalan yang menghubungkan Aceh bagian barat (Penghasil kelapa sawit dan karet) dengan wilayah bagian timur (Jalur Bisnis Utama Aceh).

2. Badan Investasi dan Promosi Provinsi Aceh

Dalam rangka membangun daya saing daerah, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa hal, antara lain: a) Memetakan potensi daerah berikut *supply* dan *demand*; b) Memperkuat seluruh infrastruktur ekonomi untuk mendorong potensi daerah, termasuk SDM-nya; c) Menguasai rantai pasokan (hulu-hilir) untuk menekan inefisiensi (sinergi provinsi dan kabupaten/kota); d) Menciptakan inovasi produk; e) Mendorong ekonomi rakyat dengan terus meningkatkan penggunaan produksi lokal; f) Optimalisasi SDA yang ada melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah, antara lain dengan pemanfaatan lahan tidur dan pengembangan sektor industri pengolahan agar *output* yang dihasilkan bukan lagi bahan mentah, melainkan barang setengah jadi atau barang jadi. Hal ini akan berdampak pada penambahan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan; g) Perlu diupayakan peningkatan investasi melalui penciptaan iklim investasi yg kondusif dan strategi promosi yang tepat. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan investor dalam berinvestasi adalah: kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah setempat, regulasi, isu ketenagakerjaan, keamanan, infrastruktur, serta potensi yang dimiliki; h) Perlu ditingkatkan sinergi program pemangku kepentingan instansi/lembaga terkait untuk mendorong sektor unggulan daerah dalam rangka pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; i) Promosi penggunaan pelabuhan di Aceh ke berbagai pelaku usaha di Aceh dan luar Aceh sebagai pelabuhan alternatif di samping pelabuhan Belawan di Sumatera Utara;

3. Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Provinsi Aceh

BPSDM perlu membuat *grand desain* dalam upaya mengakomodir peningkatan kualitas SDM baik itu SDM aparatur negara sipil ataupun non sipil.

Pengembangan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal produktivitas dan kompetensi melalui program wajib belajar 12 tahun, penyediaan beasiswa pendidikan bagi para siswa kurang mampu, perbaikan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah *remote*, pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan, peningkatan kualitas guru/ dosen, program pelatihan keterampilan, sertifikasi keahlian.

Peningkatan kualitas pengajar dan ketersediaan prasarana pendidikan untuk disiplin ilmu yang sesuai dengan keunggulan daerah, seperti dosen ahli dan laboratorium pertanian dan perikanan untuk menunjang sektor pertanian dan perikanan yang merupakan sektor unggulan daerah. Selain itu, perlu revitalisasi peran sekolah vokasi dalam menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar.

4. Pemerintah Legislatif dan Eksekutif Provinsi Aceh

Saran dan perbaikan yang dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kepentingan dan regulator kebijakan di Aceh yaitu: a) Menambah kapasitas listrik dan memperbaiki sistem distribusi listrik di Aceh antara lain melalui: Percepatan pembangunan PLTA Peusangan di Kabupaten Aceh Tengah dengan target kapasitas 88 MW dan PLTMH Nagan Raya di Kabupaten Nagan Raya dengan target kapasitas 10 MW, Pemberian insentif dan kemudahan bagi sektor swasta untuk berinvestasi dan menanamkan modalnya dalam pembangunan listrik, Membantu PLN dalam hal penyelesaian sengketa lahan dalam usaha untuk membangun Gardu Induk dan Trafo distribusi dikarenakan kendala yang banyak ditemui di lapangan sebagian besar terkait dengan sengketa lahan dengan warga, Terus mengawal progress pengadaan listrik tersebut dan mempermudah izin pembangunan dalam proses pengadaan tenaga listrik tersebut; b) Mengurangi jumlah pungutan liar di Aceh, antara lain melalui alternatif-alternatif kebijakan dan memperbanyak program pemberdayaan ekonomi yang bersifat padat karya pada daerah-daerah perbatasan dengan Sumatera Utara, antarkabupaten, serta di wilayah-wilayah yang mengalami dampak konflik paling besar; c) Peningkatan kuantitas, kapabilitas, dan kemampuan dari aparat keamanan baik dari pihak kepolisian, pengadilan, bahkan apabila diperlukan mengajak masyarakat untuk

dapat bergabung dalam suatu tim pengawasan yang terpadu dan bersifat memberdayakan secara ekonomi; d) Penegakan hukum dan sosialisasi jaminan keamanan dan kenyamanan dari pihak pemerintah, Membentuk satker gabungan yang menjamin keamanan investor dalam melakukan investasi di Aceh

5. Asosiasi Pengusaha dan Himpunan Pengusaha

Dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Aceh pihak swasta dalam hal ini pengusaha dengan asosiasinya harus menciptakan suasana yang kondusif serta bersinergi dalam membuat program dan kebijakan agar mampu menangkap peluang investasi yang dapat mendukung. Para pengusaha juga harus mampu memperhatikan potensi-potensi daripada keunggulan kawasan daerah yang memiliki sumber daya alam yang unggul untuk meningkatkan investasi.

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh

Untuk mewujudkan target-target tersebut, diperlukan upaya-upaya terstruktur dan terukur, yang harus dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi keinginan pemangku kepentingan berupa *strategic outcomes* yang terdiri dari: a) meningkatnya nilai tambah industri; b) meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri; c) kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri; d) meningkatnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan; e) menguat dan lengkapnya struktur industri; f) meningkatnya persebaran pembangunan industri; g) meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk mendorong berkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi, perlu meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri pengolahan, melakukan pendampingan untuk memastikan adanya jaminan produk, keamanan, dan standar. Selain itu optimalisasi penggunaan teknologi, lebih lanjut mengoptimalkan promosi melalui penggunaan *e-commerce* dan didukung pusat logistik serta infrastruktur yang terkoneksi. Melakukan analisis perdagangan antar wilayah di Provinsi Aceh dan membentuk model kerjasama antara Aceh dan Sumatera Utara yang dapat menguntungkan kedua belah pihak baik secara ekonomi riil ataupun makro.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Syari'at Islam di Aceh Rancangan Metodologis dan Penerapannya*, Banda Aceh: Dinas Syari'at islam Provinsi Aceh, 2009.
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, Jilid II, Terj. H. Salim Bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Abdullah, Thamrin, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Abidin, Taufik, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Sektor Potensial di Kabupaten Asahan*, QJurnal vol. 02, No.01-33.
- Abidin, Zainal, *Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Abu Bakar, Alyasa', *Kebijakan Pelaksanaan di Nanggroe Aceh Darussalam, dalam Kompilasi Pemikiran Guru Besar IAIN Ar-Raniry*, Banda Aceh: BRR NAD-NIAS dan Ar-Raniry Press.
- Achsan, Husairi, *Iklim yang Semakin Tidak Menentu*, Depok: CV Arya Duta, 2008.
- Adam, Mahmood Mo dan Mann Gary, *Special Issue: Impact of Information Technology Investment on Organizational Performance*. Journal of Management Information System, 1993.
- Afzalurrahman, *Muhammad as A Trader*, Terj. Dewi Nurjulianti, dkk. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2010.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Edisi Indonesia, Beirut: Al-Maktab Al Islami, tt.
- Anwar, Jusuf, *Kajian Tentang Kepastian Hukum Kinerja Lembaga Pasar Modal Di Indonesia Dalam Upaya Menunjang Pembangunan Nasional*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Sebuah Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arsyad, Lincoln, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: BPFE-UGM, 2006.
- Asplund, Richard W., *Profiting from Clean Energy: a Complete Guide to Trading Green in Solar, Wind, Ethanol, Fuel Cell, Power Efficiency, Carbon Credit Industries, and More Profiting from Clean Energy*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2008.
- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010.

- Badu, Muhammad Nasir, *Internasionalisasi Potensi Sulawesi Barat (Studi Kasus: Investasi Asing di Sulawesi Barat)*, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.
- Bandi, Delphie, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Setting Pendidikan Inklusi*, Sleman: PT. Intan Sejati Klaten, 2006.
- Brealey, R.A., Myers, S.C, Marcus, A.J., *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*, Jilid 1, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Al-Bûti, Sa'îd Ramadân, *Dawâbit al-Maslahah fî al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah wa al-Dâr al-Muttahidah, 1421 H/2000.
- David, Fred R., *Manajemen Strategis*, Terj. Ichsan Setiyo Budi, Edisi Sepuluh, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- David, Fred R., *Strategic Management: Manajemen Strategi Konsep*, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Dawood, Dayan, Syafrizal, *Aceh: The LNG Boom and Enclave Development*, Singapore: Oxford University Press, 1989.
- Dawwabah, Asyraf Muhammad, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang: Pustaka Nun, 2008.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberti, 2007.
- Departemen Agama RI, *Quran dan Terjemahnya*, Cet. Ke 13, Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2013.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Dirgantoro, Crown, *Manajemen Strategik: Konsep, Kasus, dan Implementasi*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Djazuli, A. dan Yadi Yanwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: RajaGrafindio Persada, 2002.
- Dona, Feri, *Peran Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pembangunan Ekonomi di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E).
- Dwi, Jatmiko Rammad, *Manajemen Stratejik*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2003.
- Effendi, Rustam, *Dasar-dasar Manajemen Modern*, Malang: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, tt.
- Effendi, Rustam, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003.

- Eppink, Andreas, *The Eppink Model and the Psychological Analysis of a Culture*, 2013.
- Fauzi, A., *Valuasi Ekonomi dan Penilaian Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Bogor: IPB Press, 2014.
- Fauzi, Akhmad., *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Francis, Jack C., *Investment: Analysis and Management*, 5th edition, McGraw-Hill Inc., Singapore, 1991.
- Fuad, Zaki, *Wawasan Ekonomi Islam Tentang Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi Pendapatan*, Disertasi pada UIN Jakarta, 2007.
- Hadi, S., *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal, dan Dinamika Internasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Hadiwinata, Bob Sugeng, *Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: Dari Realisme hingga Konstruktivisme*, dalam Yulius P Hermawan (ed). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Hafifuddin, *Peranan Ulama Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Halim, Abdul, *Analisis Investasi*. Edisi Pertama, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2003.
- Hammad, Nazîh, *Mu'jam al-Mustalahât al-Mâliyyah wa al-Iqtishâdiyyah fî lughat al-Fuqahâ'*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2008.
- Handoko, *Klimatologi Dasar*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Hanim, Anifatul dan Ragiman, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Investasi di Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, vol. 14. No. 3 tahun 2010.
- Hariadi, Bambang, *Strategi Manajemen*. Malang: Banyumedia Publishing, 2005.
- Hasan, M. Fadhil dan Deniey A. Purwanto, 2006, *Kebijakan Investasi, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Adil dan Berkelanjutan*, Jurnal Kebijakan Ekonomi MPKP FEB UI, Volume 1 No.1. <http://mpkp.feb.ui.ac.id/jurnal-kebijakan-ekonomi/> diakses tanggal 29 September 2016 Jam 18.00
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, Bogor, Galia Indonesia, 2002.
- Heryawan, Ahmad, *Analisis Ekonomi dan Kebijakan Sumber Daya Alam*, Tesis, Bogor: Sekolah Pasca Sarjana IPB, 2014.
- Hidayat, Mohamad, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.

- Hisân, Husain Hâmid, *Fiqh al-Maslahah wa Tatbîqâtuhu al-Mu'âsirah*, dalam Seminar Internasional Tatanan Fundamental Ekonomi Islam Kontemporer, Jeddah: IRTI Islamic Development Bank, Ramâdan, 1413 H.
- Hisân, Husain Hâmid, *Nazariyyat al-Maslahah fî al-Fiqh al-Islâmiy*, Beirut: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971.
- Hulwati, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2009.
- Hunger, David dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi*, Yogyakarta: Andi, 2003.
- Husen, Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Irawan, Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: CV. Rajawali, 1992.
- Irwanto, *Focus Group Discussion: Sebuah Pengantar Praktis*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Iskandar, Kamil, *Al-Munjid Al Wasith*, Beirut: Daar al-Masyriq.
- Ismail, Isa, *Kendala Investasi di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pembangunan Proyek PLTU di Kabupaten Batang)*, *Politika*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2014.
- Januar, Ardani, *Keterkaitan Antara Iklim Investasi Berdasarkan Persepsi Pelaku Usaha dan Realisasi Investasi: Kasus Provinsi Barat*, Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi dan Manajemen IPB, 2009.
- Jatmiko, Rammad Dwi, *Manajemen Stratejik*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2003, Volume 6, Nomor 1, 2018: 501-514.
- Jauch, Laurende R. dan William F. Gluech, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*, Edisi Ketiga, Alih: Murtado, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *I'âm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*, Juz ke-3, Kairo: Dâr al-Hadîts, 1425 H/2004.
- Jeddawi, Murtir, *Memacu Investasi Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UII Press 2005.
- Jhingan, M.L., *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Terj. D. Guritno, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Jones, Walter S., *Logika Hubungan Internasional 2: Kekuasaan Politik Ekonomi Internasional dari Tatanan Dunia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama; 1993.
- Kell, Tim, *The Roots of Achnese Rebellion*, Ithaca N.Y.: Cornell Modern Indonesia Project, 1995.

- Kettinger, W.J. and Chong C. Lee, 1994, *Perceived Service Quality and User Satisfaction With the Information Service Function*, *Decisions Sciences* Vol. 25.
- Kluckhom, C., *Cermin Bagi Manusia*, Parsudi Suparlan Editor *Manusia Kebudayaan dan Lingkungannya*, Cet. II, Jakarta: Grafindo Persada, 1994.
- Kousky, Carolyn, *Private Investment and Government Protection*, New York: Springer Science, 2006.
- Kuncoro, Mudradjad, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: YKPN, 2007.
- Kuncoro, Mudrajat, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Al-Kuwait, Wizarah al-Auqaf, *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Jil. III, Kuwait: Dar al-Salasil, 1404H.
- La Porta, Rafael, dkk, *Investor Protection and Corporate Governance*, *Journal Of Financial Economics*, vol 58. Cambridge: Elsevier, 2000.
- Laurance, Newman W., *Metodelogi Penelitian Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Index, 2015.
- Lederach, John Paul, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*, Washington, DC: United States Institute of Peace Press: 1997.
- Lubis, Rizky P., Muhammad Firdaus, Hendro Sasongko, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung pada Sektor Perkebunan di Indonesia*, *Jurnal Bisnis & Manajemen*, 2015, Vol. XVI, No. 2.
- Ma'aruf, Ahmad dan Latri Wihastuti, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 9, Nomor 1, April 2008.
- Ma'aruf, Ahmad, *Strategi Pengembangan Investasi di Daerah: Pemberian Insentif Ataukah Kemudahan*, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 13, Nomor 1, April 2012.
- Madkur, Muhammad Sallam, *Al-Madkhal Lil Fiqh al-Islami*, 2nd Ed., Cairo, 1963.
- Mankiw, N. Gregory, *Macro Economics*, New York: Worth Publisher Inc, 2007.
- Mankiw, N. Gregory, *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Masli, L., *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 17, No. 1, 2002.
- Meilani, Hilma dan Dewi Wuryandani, *Potensi Panas Bumi Sebagai Energi Alternatif Pengganti Bahan Bakar Fosil Untuk Pembangkit Tenaga Listrik di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 1 No. 1, Juni 2010.

- Melina, Gita dkk, *Kendala dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1(3) Desember 2017.
- Millers, R.L dan E.R Meiners, *Teori Mikro Ekonomi Intermediate*, Terj. Haris Munandar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Mittchel, Chris (1981) seperti dikutip Simon Fisher dkk., *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi untuk Bertindak*, (edisi terjemahan), Indonesia: The British Council, 2001.
- Mubyarto, *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Mudrajad, Kuncoro, *Daya Tarik Investasi dan Pungli di DIY*, Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.10 No 2. 2005.
- Mufid, Moh., *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi*, Malang: Empatdua Media (Kelompok Penerbit Intrans), 2018.
- Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakata: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mulyadi, *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa, Edisi Ketiga*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2001.
- Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002.
- Muscat, Robert J., *Investing in Peace, How Development Aid Can Prevent or Promote Conflict*, New York: ME Sharpe Inc., 2002.
- Nanga, Muana, *Makro Ekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Nasr, *Ideals and Realita of Islam Dalam Cita dan Fakta*, Terj. Abdurrahman Wahid dan Hasyim Wahid, Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional (LAPPENAS), 1981.
- Nasution, Mustafa Edwin, et.all, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985.
- Nizar, C., Hamzah, A., & Syahnur, S., *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN, 0172, 2013.
- Oliver, Sandra, *Strategi Publik Relation*, Jakarta: Erlangga, 2007.

- Pearce II, John A. dan Richard B. Robinson Jr., *Manajemen Strategis-Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Plano, Jack C., *Kamus Analisa Politik*, Jakarta: Rajawali, 1989.
- Prasetyono, Edy, *Konsep-Konsep Keamanan dalam Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*, Indra J Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro (eds). *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: CSIS, 2006.
- Pudjihardjo, HM., *Menciptakan Daya Tarik Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Kompilek Vol. 2, No. 1, Juni 2010 ISSN 2088-6268.
- Purba, Mariah S.M., *Kewenangan Pemerintahan Aceh Dalam Pengembangan Investasi Asing Sebagai Penanaman Modal Daerah Untuk Pembangunan (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Dilematika Hukum Antara UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing)*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015.
- Purnomo, Setiawan Hari dan Zulkiefli Mansyah, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.
- Purwadi, Marsi Adi dkk, *Target Pertumbuhan Investasi dan Rencana Strategis Pengembangan Investasi Provinsi Papua*, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 2017.
- Purwanto, Edi, *Pentingnya Perumusan Strategi Dalam Sistem Manajemen Strategik*, Volume 16, Jurnal Forum Akademika, Surakarta, 2012.
- Qal'azi, Muhammad dan Hamid Shadiq, *Mujam Lughat al-Fuqaha*, Beirut: Dar Nafais, 1988.
- Qardhawi, Yusuf, *Bagaimana Memahami Syari'at Islam*, Pentj. Nabhani Idris, Jakarta: Islamuna Press, 1996M/1416H.
- Al-Qattân, Mannâ', *Raf' al-Haraj fî al-Syari'at al-Islâmiyyah*, Riyad: al-Dâr al-Su'ûdiyyah, 1402 H/1982.
- Rachbini, Didik J., *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2008.
- Al-Rahmân, Jalâl al-Dîn 'Abd, *al-Masâlih al-Mursalah wa Makânatuha fî al-Tasyrî'*, t.tp: Matba'at al-Sa'âdah, 1403 H/1983.
- Rais, Mohammad Amien, *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*, Cet. II, Yogyakarta: PPSK Press, 2008
- Ramdhani, Abdullah dan Muhammad Ali Ramdhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Publik Vol. 11; No. 01; 2017.
- Rangkuti, Freddy, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

- Rasul, Syahrudin, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*, Jakarta: PNRI, 2003.
- Rasyid, Daud, *Formalisasi Syari'at Islam di Serambi Mekkah*, Lihat Ahmad Syafi'i Ma'arif (et., all.) dalam Kurniawan Zein dan Saifuddin HA, *Syari'at Islam Yes Syari'at Islam No Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Paradima, 2001.
- Raysuni, Ahmad, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, Virginia: IIIT, 1995.
- Al-Razi, Ahmad bin Faris, *Mujam Maqayis al-lughah*, Jil. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Rijal, Syamsul dkk, *Merajut Damai Berbekal Syari'at Islam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, 2009.
- Rionga, MT. & Yoga Firdaus, *Tenaga Kerja*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Robinson JR, Richard B. & John A. Pearce II, *Manajemen Strategik Formula, Implementasi, dan Pengendalian*, Terj. Agus Maulana, Jakarta: Binarupa Aksara, 2009.
- Robinson, Geoffrey, *Rawan is as Rawan Does: The Origins of Disorder in New Order Aceh*, Indonesia, 1998.
- Roohangiz Karimi, Alipour, Farhad, *Reduce Job Stress in Organization: Role of Locus of Control*, International Journal of Business and Social Science, Vo. 2 No. 18, 1996.
- Ryan D, Nugrohu, *Kebijakan Publik Evaluasi dan Implementasi*, Jakarta: Elex Media Computindo, 2003.
- Sahroni, Oni dan Adiwarman A Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Santoso, Harun dan Yudi Siyamto, *Investasi dan Dorongan Pertumbuhan Ekonomi Bisnis Mikro Islam di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02, No. 02, Juli 2016.
- Sapoetra, Ance Gunarsih Karta, *Klimatologi Pengaruh Iklim Terhadap Tanah dan Tanaman*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2004.
- Sari, Harikah Maya, Anwar As, Melati Dama, eJournal Ilmu Pemerintahan, 6 (1): 501-514 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id, 2017.
- Sarkaniputra, Murasa, *Hutanku, Hutanmu dan Hutan Kita Semua*, Bogor: Yayasan Bina Lingkungan Gunung Salak, 2003.

- Sasana, Hadi, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Jawa Tengah*. JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 1 (1), 2008.
- Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Satori, Djaman dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 4, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Satya, Venti Eka, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. XI, No.06/II/Puslit/Maret/2019.
- Satya, Venti Eka, *Upaya Penciptaan Investasi yang Kondusif*, Jurnal Bidang Ekonomi dan kebijakan Publik: Kajian singkat Terhadap isu actual dan strategis, vol. XI, No 06/11/Puslit/Maret/2019.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Investasi*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010.
- Simamora, Hendri, *Manajemen Pemasaran Internasional*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Sjafil, Achmad, *Pengaruh Investasi Fisik dan Investasi Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 1990-2004*. Journal of indonesian applied economics, 2009, No. 1.
- Soemardjan, Selo dan Soelaiman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1974.
- Soemardjan, Selo, *Konflik-konflik Sosial di Indonesia: Refleksi Keresahan Masyarakat*, Jurnal Analisis CSIS (No 3 Tahun XXXI/2002), Jakarta: CSIS, 2002.
- Soenarko, *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Airlangga University Press, 2003.
- Soerawidjaja, Tatang H., *Peningkatan Kelangsungan Ekonomi Usaha Pengembangan Jarak Pagar Melalui Pengelolaan Secara Terpadu*, Bandung: Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, ITB, 2007.
- Solihin, Ismail, *Manajemen Strategi*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ekonomi dari Metodologi ke Metode*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sopandi, Andi dan Nandang Nazmulmunir, 2012, *Pengembangan Iklim Investasi Daerah*, Jurnal Kybernan, Vol. 3, No. 1, Maret 2012.
- Stern, M. and Ojendal, J., 2010, *Mapping the Security Development Nexus: Conflict, Complexity, Cacophony, Convergence*, *Security Dialogue*, vol. 41, no. 1, pp. 6
- Subri, Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Edisi pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Sudarman, Ari, *Teori Ekonomi Mikro*, Jilid I, Yogyakarta: BPFE UGM, 1999.

- Sudirman, Lu, *Iklim Investasi di Indonesia*, Jurnal SELAT, Mei Vol. 3 No. 2 Edisi 6.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 1997.
- Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sukirno, Sadono, *Makro Ekonomi*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Rajawali, 2000.
- Sukirno, Sadono, *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Suparlan, P., *Kebudayaan dan Pembangunan*, Jurnal Media IKA, Vol. 14 No. 11 Jurusan Antropologi UI, 1986.
- Suparlan, Parsudi *Hubungan Antar Suku Bangsa*, YPKIK, 2004.
- Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Syaltut, Mahmud, *Islam Akidah dan Syari'ah*, edisi revisi, pentj. Abdurrahman Zein, Jakarta: Pustaka Amani, 1998M/1418H.
- Syaltut, Mahmud dalam Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cetakan 1, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Todaro & Smith, *Pembangunan Ekonomi (Sebuah Terjemahan)*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Todaro, Michael, *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara dan Longman, 2000.
- Triantara, Yosai, *Manajemen Strategis Publik Relation*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Tylor, Edward B., *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom*, Volume I, London: Bradburry, Evand and Co., Printers Whitefriars, 1871.
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Islam Syari'at Abadi*, Terj. Jamaluddin Saiz, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Umar, Husein, *Strategis Management in Action*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Usman, Abdul Halim, *Manajemen Strategis Syariah, Teori, Konsep & Aplikasi*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2015.
- Uwiyuno, Aloysius. *Implikasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 5 Tahun 2003.
- Wartonah, Tarwoto, *Kebutuhan Dasar Manusia dan Proses Keperawatan*, Jakarta: Salemba Medika, 2010.
- Wedhasmara, Ari, *Langkah-Langkah Perencanaan Strategis Sistem Informasi Dengan Menggunakan Metode Ward And Peppard*, Jurnal Sistem Informasi, Volume 1 No 1 Tahun 2009, Palembang.
- Wheelen, Thomas L. dan David J. Hunger, *Concept Instrategic Management and Business Policy*, India: Pearson Education, 2011.
- Wheelen, Thomas L., Hunger, J. David., *Strategic Management and Business Policy Achieving Sustainability*, Twelfth Edition. Pearson, 2010.
- Yahya, Azhari, *The Location Determinant and Provincial Distribution of Foreign Direct Investment in Indonesia*, Research Project paper, Australian National University: Crawford School of Economics and Government, 2007.
- Yuliadi, Imamudin, *Analisis Kesenjangan investasi Asing (PMA) di Propinsi Sulawesi Utara: Sebuah Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 10 (1): 1-12, 2009.
- Yunus, Hadi Sabari, *Metodelogi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Yusanto, M. Ismail dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Yusgiantoro, Purnomo, *Ekonomi Energi: Teori dan Praktik*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2000.
- Zakariya, Hafid, Hernawan Santosa, Furry Dhismayana Masa Ganta, Ratna Fitri Anjani, *Pengaruh Hukum dan Politik Terhadap Perkembangan Investasi Asing di Indonesia*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 10 No. 02 Agustus 2016 - Januari 2017, ISSN: 1693-0819 E-ISSN: 2549-5275.

Internet

- 5TahunRealisasiTarget7InvestasiMenjadiAndalanAcehBesar*,
<http://aceh.tribunnews.com/2017/08/14/5-tahun-realisasi-target-7-investasi-menjadi-andalan-aceh-besar>, diakses tanggal 19 April 2018.

Azhari, Investasi Aceh diantara Isu syariat (<https://aceh.antaranews.com/berita/12703/investasi-aceh-diantara-isu-syariat>) diakses tanggal 3 mei 2018.

Bangun Daya Saing RI, Kompas, diakses 14 Maret 2019, h. 17.

BAPPENASKebutPembangunanInfrastrukturAceh, <https://ekbis.sindonews.com/read/1198576/34/bappenas-kebut-pembangunan-infrastruktur-aceh-1492604111>, diakses tanggal 19 April 2018.

Bardan Saidi, Anggota Komisi III DPR Aceh membidangi Investasi dan Keuangan Aceh, *Legislator Syariat Islam Bukan Penghambat Investasi*, (<https://aceh.antaranews.com/berita/44659/legislator-syariat-islam-bukan-penghambat-investasi>), diakses tanggal 15 April 2018.

Bidik Investasi Double Digit, BKPM Siapkan Kopi Mantap, <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/03/12/po8pom383-bidik-investasi-double-digit-bkpm-siapkan-kopi-mantap>, diakses 21 Maret 2019.

BKPM Catat 5 Keluhan Investor Soal Hambatan Investasi, 12 Januari 2018, <https://tirto.id/bkpm-catat-5-keluhan-investor-soal-hambatan-investasi-cDo1>, diakses 21 Maret 2019.

BKPM Ingatkan Pentingnya Kepastian Hukum Bagi Investor, <https://finansial.bisnis.com/read/20180905/9/835515/bkpm-ingatkan-pentingnya-kepastian-hukum-bagi-investor>, diakses 20 Maret 2019.

Dilema Pajak sebagai Sumber Pendanaan dan Stimulus Investasi, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/06/101712226/dilema-pajak-sebagai-sumber-pendanaan-dan-stimulus-investasi>.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Dalam Perekonomian Suatu Negara, <https://punyaprasetyo.wordpress.com/category/perekonomian-indonesia/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-investasi-dalam-perekonomian-suatu-negara/> diakses pada tanggal 04 Maret 2018.

<http://dpmtsp.acehprov.go.id>.

<http://id.m.wikipedia.org>, diakses 05 Mei 2017.

<http://kbbi.web.id/faktor>, diakses 05 Mei 2017.

<http://www.acehprov.go.id>

<http://www.kppod.org>

Ikrar Nusa Bakti, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, 2017, www.politik.lipi.go.id/10-problematika-keamanan-di-aceh.

Infrastruktur Konektivitas di Aceh Jadi Prioritas, <http://industri.bisnis.com/read/20170417/45/645843/2018-infrastruktur-konektivitas-di-aceh-jadi-prioritas->, diakses tanggal 19 April 2018.

- Ini Deretan Proyek Prioritas Pemerintah di Aceh Pada 2018*, <https://www.merdeka.com/uang/ini-deretan-proyek-prioritas-pemerintah-di-aceh-pada-2018.html>, diakses tanggal 19 April 2018.
- Kabar Gembira Buat Investor, Izin Investasi di Aceh Selesai Satu Hari*, <http://aceh.tribunnews.com/2017/11/04/kabar-gembira-buat-investor-izin-investasi-di-aceh-selesai-satu-hari>, diakses tanggal 19 April 2018.
- Klaim PUPR Atas Sejumlah Proyek Infrastruktur Aceh*, <http://nasional.kontan.co.id/news/klaim-pupr-atas-sejumlah-proyek-infrastruktur-aceh>, diakses tanggal 19 April 2018.
- Koordinasi Pengawasan Investasi*, 13 March-14 March 2019-ICE BSD, <https://www.investindonesia.go.id/id/kalender-kegiatan>, diakses 19 Maret 2019.
- Kumpulan Hadits*, <https://tafsirq.com/hadits/bukhari?>
- Kumpulan Hadits*, <https://tafsirq.com/hadits/muslim?>
- Letak Geografis Provinsi Aceh*, <https://www.sejarah-negara.com/2017/11/letak-geografis-provinsi-aceh.html>, diakses tanggal 18 Mei 2019.
- Meski Infrastruktur Dibangun Investasi Asing Malah Lesu*” <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190217185136-17-55975/meski-infrastruktur-dibangun-investasi-asing-malah-lesu>, diakses 20 Maret 2019.
- MSR, 2009, *Multi-Stakeholder Review of Post-Conflict Programming in Aceh: Identifying the Foundations for Sustainable Peace and Development in Aceh*, http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSPContentServer/WDSP/IB/2010/07/09/000333037_20100709004753/Rendered/PDF/556030WP0v20Bo110Report0MSR0English.pdf diakses pada 24 Oktober 2017
- Muhammad, Marthunis, 2016, *Kebijakan in Invest amazing Aceh*” Staf Bappeda Aceh, Diakses dari <http://www.cakrawalakaifa.blogspot.com/> diakses tanggal 15 Oktober 2016 jam 17.00
- Pengertian Energi dan Beberapa Macam*, <http://furqanwera.blogspot.com/2012/01/pengertian-energi-dan-beberapa-macam.html>, diakses tanggal 27 Mei 2017.
- Pieter Feith, mantan Ketua Aceh Monitoring Mission (AMM), *Indonesia Ekonomi Aceh*, (https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150816_indonesia_ekonomi_aceh.) Diakses tanggal 11 Juni 2017
- Sumber Daya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi*, http://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/366/Sumber-Daya-Alam-dan-Pertumbuhan-Ekonomi.pdf diakses tanggal 4 Maret 2018
- Terjemahan Makna Surat Adz-Dzariyat (51) Ayat 56*, <http://alquran.pro/terjemahan-makna-surat-adz-Dzariyat-51-ayat-56>

Terjemahan Makna Surat Al-An'am (6) Ayat 135, <http://alquran.pro/terjemahan-makna-surat-al-an'am-6-ayat-135>

Terjemahan Makna Surat Al-Baqarah (2) Ayat 148, <http://alquran.pro/terjemahan-makna-surat-al-baqarah-2-ayat-148>

Terjemahan Makna Surat Al-Baqarah (2) Ayat 261, <http://alquran.pro/terjemahan-makna-surat-al-baqarah-2-ayat-261>

Terjemahan Makna Surat Al-Baqarah (2) Ayat 279, <http://alquran.pro/terjemahan-makna-surat-al-baqarah-2-ayat-279>

Terjemahan Makna Surat Al-Hasyr (59) Ayat 18, <http://alquran.pro/terjemahan-makna-surat-al-hasyr-59-ayat-18>

Terjemahan Makna Surat An-Nisa (4) Ayat 5, <http://alquran.pro/terjemahan-makna-surat-an-nisa-4-ayat-5>

Terjemahan Makna Surat An-Nisa (4) Ayat 9, <http://alquran.pro/terjemahan-makna-surat-an-nisa-4-ayat-9>

Terjemahan Makna Surat Ash Shaff 61 Ayat 4, <http://alquran.pro/terjemahan-makna-surat-ash-shaff-61-ayat-4>

Terjemahan Makna Surat At-Taubah (9) Ayat 105, <http://alquran.pro/terjemahan-makna-surat-at-taubah-9-ayat-105>

Terjemahan Makna Surat At-Taubah (9) Ayat 34, <http://alquran.pro/terjemahan-makna-surat-at-taubah-9-ayat-34>

Dokumen

Badan Investasi dan Promoasi Aceh, 2013, *RENTRA2013-2017*.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas, *Indeks Keamanan Investasi Indonesia*, Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2016.

Economics and Research Department Development Indicators and Policy Research Division, *Jalan Menuju Pemulihan Memperbaiki Iklim Investasi di Indonesia*, Jakarta: Asian Development Bank, 2005.

Istilah refferent object of security dipopulerkan oleh Barry Buzan. Lihat Barry Buzan, *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War*. (Boulder: Lynne Rienner Publisher, 1991).

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Qanun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

RENSTRA 2012-2017 Badan Investasi dan Promosi Aceh.

Tokoh-tokoh the Copenhagen School antara lain Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde. Lebih lanjut baca Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap Wilde. 1998. *Security: a New Framework for Analysis*. Boulder, Colorado: Lynne Rienner.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, h. 29

Wawancara

Askari, Karyawan PT. Alhas Jaya, Wawancara pada tanggal 30 Mei 2017.

Aswar, Kasubbag Perekonomian dan Investasi BAPPEDA Aceh, Wawancara pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 pukul 10.30 WIB.

Azwan, Staff Baimprom Aceh, Wawancara pada tanggal 13 Juni 2017.

Dahlan Sulaiman, Ketua APINDO Aceh, wawancara pada tanggal 27 Mei 2017 pukul 13.30 wib.

Dedi, Staf pada bagian Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Wawancara pada tanggal 14 Juni 2017.

Edi Sandra Sahputra, Owner Pengusaha Bumbu Instan Meuraxa, wawancara tanggal 10 Desember 2017 pukul 17.00 wib

Hafas Furqani, Ketua Prodi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Arraniry Aceh, wawancara tanggal 18 Desember 2017 pukul 09.00 wib.

Hannimi Nasution, General Manager PT SAU, wawancara tanggal 22 November 2017 pada pukul 10.00 wib.

Intan Permata Sari, PT.Lhoknga Sarana Andalas, wawancara tanggal 10 Desember 2017 pukul 15.30 wib

Irfani, Kasi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas, Wawancara pada tanggal 13 Juni 2017. Pukul 11.00 wib

Iskandar Zulkarnain, Ketua Bainprom Provinsi Aceh Tahun 2016, Wawancara pada 26 Juni 2018, Pukul 14.00 Wib.

Joni, Kabag pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Wawancara pada tanggal 14 Juni 2017.

Kenny Kuniadidarma, Owner Perusahaan Jasa, wawancara tanggal 10 Desember 2017 pukul 16.00 wib.

M. Iqbal dan M.Rubi, Staf pada bidang perencanaan kerjasama dan pendayagunaan Alumni BPSDM, wawancara pada tanggal 11 Juni 2017 pukul 15.00 wib

M. Iqbal, Staf pada bidang perencanaan kerjasama dan pendayagunaan Alumni BPSDM, wawancara pada tanggal 18 Juni 2017 pukul 15.00 wib

Mahyuddin, Ketua HIPMI Aceh Utara, wawancara tanggal 05 Desember 2017 pukul 11.00 wib.

Nasir, Kasie Perindustrian Disperindag Aceh, Wawancara hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 pukul 14.30 wib.

Rahmadi, Ketua PKBM Maju Bersama, wawancara tanggal 10 Desember 2017 pukul 15.00 wib.

Ridwan Sobirin, Analis pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Banda
Wawancara pada tanggal 12 Agustus 2017.

Ridwan Sobirin, Analis pada Bank Indonesia Kantor Wilayah Aceh. Hasil
wawancara via email diterima tanggal 18 Agustus 2017.

Rosi Malia, Direktur PT. Mata Mandiri Energi, Wawancara pada tanggal 11
November 2017 pukul 16.30 wib.

Safrianti, Wakil Sekretaris Apindo Aceh, wawancara tanggal 10 Desember 2017
pukul 15.30 wib.

Syukri, Kabag pada Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, Wawancara pada tanggal
13 Juli 2017. Pukul 10.00 wib

Zahrany A. Balwy, Pengusaha Travel, wawancara tanggal 10 Desember 2017
pukul 16.00 wib.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



**FGD Bersama Unsur Pemerintahan dengan nara sumber
Dr. Hafas Furqani, M.Si**



Jadwal FGD



FGD Sedang Berlangsung



Wawancara dengan Dinas ESDM Provinsi Aceh



Wawancara dengan BPSDM



Pembukaan FGD



Bersama Sekretaris BAINPROM (Sejak 2017 Menjadi DPMPTSP)



Selesai Wawancara Dengan Ketua BAINPROM



Wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Aceh



FGD dengan para pengusaha

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Malahayatie
NIM : 94315050598/EKSYA
Tempat/Tgl. Lahir : Blora /
Pekerjaan : Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Lhokseumawe
Agama : Islam
Status : Menikah
Alamat : Jl. Pandan Gg. Hikmah No. 14C Desa Uteun Bayi
Lhokseumawe
Telp : 0811671547

2. Pendidikan

- a. MIN Kutablang tamat tahun 1991
- b. SMP Negeri 1 Lhokseumawe tamat tahun 1994
- c. SMA Negeri 1 Lhokseumawe tamat tahun 1997
- d. S1 STAI Malikussaleh tamat tahun 2003
- e. S2 IAIN Sumatera Utara tamat tahun 2011

3. Pengalaman Kerja

- a) Guru Honor Daerah Aceh Utara (2000-2002)
- b) Bendahara PMI Aceh Utara (2001-2006)
- c) Dosen Tetap jurusan Syariah STAI Malikussaleh (2003-2007)
- d) Ketua Prodi Ekonomi Islam STAIN Malikussaleh (2006-2007)
- e) Ketua Pusat Studi Gender STAIN Malikussaleh (2005-2006)
- f) Ketua Prodi Ahwal Alsyakhsyah STAIN Malikussaleh Lhokseumawe (2007-2010)
- g) Bendahara PMI Aceh Utara (2006-2011)
- h) Sekretaris Yayasan RS Marhamah PMI Aceh Utara (Akte Notaris 2011)
- i) Bendahara Yayasan Al-Firdaus Pilar Peradaban (Akte Notaris 2018)
- j) Wakil Bendahara MEMA STAI Malikussaleh (1999-2000)
- k) Bendahara Umum MEMA STAI Malikussaleh (2000-2001)
- l) Sekretaris LDK STAI Malikussaleh (2000-2002)
- m) Sekretaris Umum KOHATI Cab. Lhokseumawe (2000-2002)
- n) Anggota Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Lhokseumawe (2009-2012)
- o) Bendahara Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Lhokseumawe (2009-2012)
- p) Anggota pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Mess Kota Lhokseumawe (2019-2022)